



Editor: M. Fakhry Ghafur

# **POLITIK ISLAM**

## **ARAB SAUDI, KUWAIT,**

### **& UNI EMIRAT ARAB**

# **POLITIK ISLAM**

**ARAB SAUDI, KUWAIT,  
& UNI EMIRAT ARAB**

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

*All Rights Reserved*

Editor: M. Fakhry Ghafur

# **POLITIK ISLAM**

## **ARAB SAUDI, KUWAIT,**

### **& UNI EMIRAT ARAB**

LIPI Press

© 2019 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab/Muhammad Fakhry Ghafur (Ed.)—  
Jakarta: LIPI Press, 2019.

xiv hlm. + 194 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN: 978-602-496-072-8 (cetak)  
978-602-496-073-5 (*e-book*)

1. Politik
2. Islam (*religion*)
3. Negara islam/negara teluk

297.272

*Copy editor* : Risma Wahyu Hartiningsih dan M. Sidik  
*Proofreader* : Sarwendah Puspita Dewi dan Anggun Dian Puspita  
Penata isi : Vidia Cahyani A. dan Rahma Hilma Taslima  
Desainer sampul : Meita Safitri  
Bahan Sampul : Nostalgawan Wahyudhi  
Cetakan Pertama : Desember 2019



Diterbitkan oleh:  
LIPI Press, anggota Ikapi  
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6  
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710  
Telp.: (021) 573 3465  
*E-mail*: [press@mail.lipi.go.id](mailto:press@mail.lipi.go.id)  
*Website*: [lipipress.lipi.go.id](http://lipipress.lipi.go.id)  
 LIPI Press  
 @lipi\_press



## DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit .....	vii
Kata Pengantar.....	ix
Prakata.....	xiii
BAB 1 Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab <i>Indriana Kartini dan Muhammad Fakhry Ghafur</i> .....	1
BAB 2 Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi <i>Nostalgawan Wahyudhi</i> .....	17
BAB 3 Problematika Kekuatan Politik Islam di Kuwait <i>Muhammad Fakhry Ghafur</i> .....	67
BAB 4 Problematika Kekuatan Politik Islam di Uni Emirat Arab <i>M. Hamdan Basyar</i> .....	101
BAB 5 Dinamika Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab: Catatan Penutup <i>Dhurorudin Mashad</i> .....	133
Daftar Singkatan.....	187
Indeks .....	189
Biografi Editor.....	191
Biografi Penulis.....	193





## PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, LIPI Press melalui salah satu terbitan ilmiahnya berjudul *Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab* berupaya untuk menjelaskan fenomena gerakan Islam di Timur Tengah. Sebagai negara-negara Teluk yang selamat dari kudeta militer meskipun tidak terlepas dari guncangan dinamika islam politik, sejarah mencatat bahwa ketiga negara ini memberikan realitas yang berbeda dalam merespons gelombang gerakan Islam.

Analisis menarik mengenai eksistensi dan hubungan antara gerakan Islam dan negara di Timur Tengah disajikan dalam buku ini. Kiprah tiga negara tersebut dalam konstelasi politik regional dan global adalah hal yang turut disoroti. Kajian yang dilakukan cukup mendalam dan mampu memberikan gambaran secara komprehensif dalam menjelaskan fenomena gerakan Islam di Timur Tengah, khususnya di tiga negara Semenanjung Arabia tersebut.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur baru berbahasa Indonesia mengenai kekuatan politik Islam di tengah sistem

politik yang sudah mapan yang masih sangat kurang selama ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press



## KATA PENGANTAR

Islam merupakan aspek penting dalam melihat perubahan politik di Timur Tengah. Imperialisme Barat telah mengubah sistem dan struktur politik di Timur Tengah. Saat Timur Tengah memasuki era modern, pengaruh Barat menjadi dominan. Ini terjadi karena kolonisasi Barat tidak hanya bertujuan untuk menguasai sumber daya alam, tetapi juga melemahkan sistem politik di Timur Tengah agar sejalan dengan kepentingan Barat.

Pada awal kemerdekaan negara mereka, para penguasa Timur Tengah tidak hanya pro-Barat, tetapi juga berusaha menerapkan sekularisme secara radikal. Akibatnya, demi mempertahankan kekuasaan mereka, para rezim menjadi otoriter dan tidak memberikan ruang kebebasan kepada rakyat mereka. Rakyat Timur Tengah hidup terkekang, mengalami kemunduran ekonomi, sementara para penguasa menikmati kehidupan mewah.

Kegagalan rezim-rezim di Timur Tengah yang pro-Barat dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat mereka mendorong gerakan oposisi massa. Gerakan-gerakan oposisi biasanya dipelopori oleh kelompok sosialis dan Islam. Kedua kelompok ini menjadi ancaman serius bagi para rezim di Timur Tengah. Kelompok sosialis menyoroti kondisi rakyat yang tertindas dan diabaikan hak-haknya, sementara kelompok Islam memandang sistem sekuler telah gagal memberikan manfaat bagi rakyat. Gerakan Islam muncul sebagai gerakan politik dan menawarkan Islam sebagai solusi alternatif. Dampaknya, kemunculan gerakan Islam yang termanifestasi dalam kegiatan politik menjadi sumber masalah serius bagi para rezim

yang berkuasa. Respons para rezim di Timur Tengah beragam dalam menghadapi kemunculan gerakan Islam yang menuntut perubahan komprehensif. Para penguasa mendapatkan tekanan untuk melakukan perubahan. Jika tidak, kekuasaan mereka akan terancam. Beberapa gerakan Islam di Timur Tengah yang berhasil melakukan perubahan politik melalui proses kudeta, antara lain adalah Iran pada tahun 1979 dan Sudan pada tahun 1989. Di Mesir, gerakan Islam Ikhwanul Muslimin membantu militer di bawah pimpinan Jenderal Nadjib dan Gamal Abdul Nasser dalam melakukan kudeta terhadap Raja Farouk pada tahun 1952. Di beberapa negara lain, seperti Irak, Suriah, dan Libya, kelompok sosialis bersama dengan militer melakukan kudeta terhadap para penguasa yang pro-Barat.

Uniknya, negara-negara Teluk yang kaya minyak terhindar dari guncangan politik yang berakibat pada kudeta militer. Kudeta itu dapat dihindari oleh negara-negara Teluk karena mereka diselamatkan oleh berkah minyak yang melimpah di kawasan ini. Eksplorasi minyak dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sehingga tidak memunculkan gerakan protes secara besar-besaran di kawasan yang kaya dengan minyak ini. Karena kawasan Teluk dan Semenanjung Arabia kaya akan minyak, secara otomatis mereka mendapatkan perlindungan dari Barat, terutama Amerika Serikat. Hubungan simbiosis mutualisme antara rezim berkuasa dan kekuatan adidaya menjadikan negara-negara monarki ini relatif lebih stabil. Namun, bukan berarti kawasan ini luput dari dinamika Politik Islam.

Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab memberikan realitas yang berbeda dalam merespons gelombang gerakan Islam. Di Arab Saudi, gelombang islamisme yang merongrong kekuasaan Dinasti Saud terjadi setelah munculnya Revolusi Iran pada tahun 1979 dan setelah Perang Teluk 1991. Iran dicurigai ikut mendalangi pembesontakan yang dilakukan oleh Juhaiman Al-Uthaibi yang berhasil menduduki Masjidil Haram pada tahun 1979. Kritik kelompok Islam menguat kembali, terutama setelah Perang Teluk ketika Kerajaan Arab Saudi bersekutu dengan Amerika Serikat guna mem-

bendung ancaman agresi Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Saudi tidak memberikan ruang sedikit pun dan cenderung bersifat represif pada kelompok-kelompok oposisi yang dimotori oleh gerakan Islam. Politik Islam tidak mendapatkan ruang dan dijadikan sebagai musuh negara.

Kondisi di Kuwait agak berbeda. Walaupun monarki Kuwait cenderung menunjukkan sikap waspada terhadap munculnya gerakan Islam, pihak istana cenderung dapat mengakomodasi kekuatan politik Islam. Gerakan Islam di Kuwait diwadahi dalam kekuatan politik yang dikenal dengan sebutan *The Kuwait Islamic Constitutional Movement* (ICM) yang memiliki tujuan untuk melakukan reformasi hukum secara konstitusional. Karena tidak memiliki tujuan dalam mengubah sistem monarki, gerakan ini secara umum mendapatkan penerimaan dari kalangan istana. Citra ICM menjadi semakin baik di mata istana ketika membentuk gerakan Pemuda Perlawanan Kuwait menentang agresi Irak ke Kuwait pada tahun 1991. Politik Islam mendapatkan tempat di Kuwait karena dapat bekerja sama dengan kalangan istana dan tidak membahayakan eksistensi monarki.

Agak berbeda dengan kondisi di Kuwait, gerakan Islam di Uni Emirat Arab menunjukkan dinamika yang unik. Gerakan Islam diwakili oleh Jam'iyah Al-Islah yang memiliki tujuan mengubah sistem dan rezim yang berkuasa. Kehadiran gerakan yang menargetkan negara sebagai sasaran perubahan ini dihadapi oleh pihak istana dengan penuh kecurigaan. Walaupun awalnya berdiri sebagai organisasi sosial keagamaan, dalam perkembangannya, ia bertransformasi menjadi gerakan politik. Al-Islah dianggap memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada tahun 1994, semua jajaran direksi organisasi Al-Islah dipecat oleh pemerintah dan para aktivisnya dilarang menduduki jabatan publik di Uni Emirat Arab. Kebijakan ini dilakukan karena imbas dari dukungan kelompok Ikhwan terhadap Irak yang melakukan invasi ke Kuwait. Al-Islah dianggap tidak sejalan dengan agenda pemerintah dan aktivitasnya sangat dibatasi di Emirat Arab.

Tampaknya, eksistensi gerakan Islam yang memiliki tujuan politik sangat bergantung pada hubungannya dengan para penguasa. Ketika gerakan Islam dianggap mengancam keberadaan monarki, tentu keberadaannya tidak dapat dipertahankan. Sebaliknya, kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak istana menjadi kunci kesuksesan sebuah gerakan. Gerakan Islam akan diakomodasi dalam istana selama tidak menginginkan terjadinya perubahan sistem politik monarki. Sebaliknya, politik Islam akan mendapatkan penindasan bahkan pembubaran apabila memiliki potensi ancaman bagi rezim yang berkuasa. Kelompok oposisi dari gerakan Islam yang mengancam eksistensi monarki ini akan mudah dilabeli sebagai musuh negara, bahkan dicap sebagai teroris.

Buku berjudul *Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab* ini memberikan analisis menarik berkaitan dengan eksistensi dan hubungan antara gerakan Islam dan negara di Timur Tengah. Kajian yang dilakukan cukup mendalam dan mampu memberikan gambaran secara komprehensif dalam menjelaskan fenomena gerakan Islam di Timur Tengah. Bagi para pembaca yang menginginkan informasi secara mendetail mengenai dinamika di Timur Tengah, khususnya berkaitan dengan islamisme di ketiga negara ini, saya merekomendasikan untuk memiliki buku ini. Buku ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur baru berbahasa Indonesia yang masih sangat kurang selama ini.

Depok, 25 Desember 2019

Yon Machmudi, Ph.D.

Ketua Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam  
Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia



## PRAKATA

Diskursus hubungan antara Islam dan politik dalam konteks politik Timur Tengah kontemporer menarik untuk dikaji, terutama dengan semakin menggeliatnya tuntutan terhadap demokratisasi dan terbukanya aspirasi rakyat. Agama dan politik pun seolah menjadi bagian tidak terpisahkan yang saling menautkan diri serta menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial-politik di Timur Tengah.

Menguatnya identitas keislaman yang terjadi dalam realitas politik Timur Tengah tidak lepas dari keinginan masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk menunjukkan eksistensinya di tengah kekacauan sistem, sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Esposito, Islam saat ini bukanlah sebuah keyakinan semata, melainkan sebagai kekuatan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai teologis dalam kehidupan sosial-politik suatu negara. Berbagai aktivitas sebagai bentuk penguatan terhadap eksistensi keislaman dapat dilihat dengan semakin maraknya masyarakat yang berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam ranah politik praktis, seperti pendirian organisasi politik ataupun gerakan sosial-kemasyarakatan. Bahkan, dalam konteks bernegara, pemerintah di beberapa negara mencoba mendekatkan simbol agama untuk melegitimasi kebijakannya, baik dalam sosial-politik, hukum, maupun ekonomi. Di sisi lain, aktivisme keagamaan yang semakin berkembang telah mendorong tumbuh suburnya gerakan Islam yang menghendaki adanya perubahan yang komprehensif dalam berbagai bidang. Atas nama reformasi Islam, kelompok Islam muncul sebagai gerakan oposisi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengulas realitas yang terjadi dalam dinamika sosial-politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab dengan menitikberatkan pada fokus kajian seputar kekuatan politik Islam dengan beragam problematikanya. Di samping itu, juga menjelaskan peran kekuatan politik Islam di tengah sistem politik yang sudah mapan. Selain itu, kiprah tiga negara kajian dalam konstelasi politik regional dan global juga dibahas secara lebih komprehensif.

Penulisan buku ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para penulis, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung turut berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih juga kepada Dr. Rahmat Aming Lasem (Kepala Konsuler KJRI Jeddah) beserta seluruh staf KJRI Jeddah, Dr. Elly Warti Maliki (Pendiri Sekolah Daarul Ulum Jeddah), Herika Muhammad Taqi, M.Si. (Ketua PPMI Jeddah), Syekh Nasruddin Al-Palembangi (World Muslim League), Syekh Ismail Al-Harby (Yayasan Al-Haramain), Syekh Ibrahim Sulthon (Wakil Kepala Biro Urusan Alumni Bidang Hubungan Internasional), Ustaz Mubarak Ainul Yaqin, M.A. (Ketua PPMI Makkah), Ustaz Muhammad Isa Abdullah, Ustaz Muhammad Ayyub, Ustaz Fakhruddin (Mahasiswa Universitas Islam Madinah), Ustaz Ahmad Nahid Silmi, M.A. (Kandidat Doktor Universitas Islam Madinah), Ustaz Imam Khairul Annas (Mantan Ketua PPMI Arab Saudi), dan semua narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, buku ini tidak lepas dari berbagai kekurangan di dalamnya. Karena itu, kami mengharapkan adanya kritik ataupun saran membangun untuk memperbaiki hasil penelitian kami pada masa depan. Teriring doa, semoga buku ini dapat turut memperkaya khazanah pemikiran politik Timur Tengah kontemporer di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.

Jakarta, Desember 2019

Editor



# BAB 1

## **Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab**

*Indriana Kartini dan Muhammad Fakhry Ghafur*

### **A. Persoalan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab**

Dalam beberapa dekade terakhir, agama dan politik menjadi diskursus yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian politik Timur Tengah dan dunia Islam pada umumnya. Berbagai aktivitas untuk mengukuhkan agama, dalam hal ini Islam, dalam ranah politik demokrasi muncul di sejumlah negara yang berusaha untuk mengimplementasikan Islam dalam kehidupan bernegara, baik di negara republik maupun monarki, di lingkungan masyarakat yang homogen ataupun majemuk, baik di negara maju maupun berkembang. Oleh karena itu, menurut Huntington, realitas semacam itu

akan senantiasa terjadi ketika agama kerap menautkan diri dalam semua aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Kemunculan politik berbasis agama yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah setelah *Arab Spring*<sup>2</sup>, tidak lepas dari peran kelompok Islam untuk menunjukkan eksistensinya di tengah kegagalan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun rezim. Oleh karena itu, dalam wacana politik Timur Tengah kontemporer, Islam dipandang sebagai sebuah keyakinan yang mengilhami berbagai lapisan masyarakat serta berhasil mentransformasikan nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Bahkan, sejumlah pemerintahan monarki tertarik menggunakan Islam untuk melegitimasi kebijakannya, baik dalam politik, hukum, maupun ekonomi. Hal inilah yang kita saksikan dalam realitas politik di dunia Arab saat ini. Para penguasa di Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan negara Teluk lainnya, berusaha mendekatkan simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaan. Contohnya, monarki dan ulama Wahabi sebagai dua kekuatan yang saling mendukung di Arab Saudi. Demikian pula di Kuwait, pada pertengahan abad ke-20, monarki membangun kekuatan dengan kelompok Islam untuk membentuk dinasti Kuwait modern.

Dinamika relasi antara agama dan kehidupan bernegara di sejumlah negara Timur Tengah, menarik untuk dikaji, terutama di tengah geliat aktivisme Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Semangat untuk menegakkan Islam pun tumbuh mewarnai

---

<sup>1</sup> Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late 20<sup>th</sup> Century* (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991).

<sup>2</sup> *Arab Spring* atau yang dikenal dengan Musim Semi Arab merupakan gelombang revolusi yang terjadi pada penghujung 2010 yang ditandai dengan runtuhnya sejumlah rezim di beberapa negara Timur Tengah. *Arab Spring* bermula di Tunisia ketika seorang pedagang buah bernama Mohamed Bouazizi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap kesewenang-wenangan rezim. Aksi tersebut memicu demonstrasi besar yang mengarah pada pengunduran diri rezim Zine El Abidin Ben Ali. Dampak dari pergolakan politik di Tunisia merambah ke negara sekitar, seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah yang saat ini masih bergejolak.

sepanjang sejarah politik di dunia Arab yang kemudian melahirkan konsep *Ad-Din wa Ad-Daulah* dalam arti kehidupan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai agama. Melalui paradigma ini, pemerintahan monarki menjadikan Islam sebagai agama resmi sekaligus sebagai sebuah sistem sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Imarah memandang bahwa kolaborasi antara agama dan negara telah melahirkan fenomena revivalisme Islam yang secara definitif dapat diartikan sebagai kebangkitan politik Islam.<sup>3</sup>

Di sisi lain, aktivisme keagamaan yang semakin berkembang di sejumlah negara monarki tersebut telah mendorong tumbuh subur gerakan Islam yang menginginkan transformasi komprehensif dalam kehidupan sosio-politik dan ekonomi. Atas nama reformasi Islam, kelompok politik Islam muncul sebagai gerakan oposisi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, buku ini akan mengkaji secara lebih mendalam kekuatan politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab dengan segala problematikanya.

## 1. Oposisi Gerakan Islam terhadap Pemerintahan Monarki Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara monarki absolut hingga 1992, otoritas kerajaan memperkenalkan konstitusi negara pertama dengan sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam (syariat). Sejak terjadinya Perang Teluk 1991 dan dimulainya Operasi Badai Gurun oleh Amerika Serikat, Kerajaan Arab Saudi harus berhadapan dengan tumbuhnya gerakan Islam yang menginginkan adanya perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Melalui gerakan reformasi keagamaan, kekuatan politik Islam seperti gerakan *As-Sahwah Al-Islamiyyah* merupakan representasi dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang menunjukkan diri mereka sebagai kelompok oposisi

---

<sup>3</sup> Muhammad Imarah, *Al-Ushbuliyyah Baina Al-Gharb wa Al-Islam*. (Kairo: Daar Asy-Syaruq, 1998).

yang mengkritik pemerintah dan bahkan mempertanyakan legitimasi keislaman pihak kerajaan.

Meskipun fenomena kebangkitan Islam sebagai sebuah protes terhadap otoritas negara sekuler telah menjadi pola yang berpengaruh dalam politik kontemporer di dunia Arab, khusus di Arab Saudi gerakan protes dari kelompok Islam ditujukan langsung kepada pemerintahan monarki Islam. Dalam hal ini, Islam telah dijadikan sebagai sumber legitimasi bagi kerajaan sekaligus sebagai medium protes bagi kelompok oposisi. Kendati pada masa lalu, Saudi berhasil mengatasi tantangan dari kelompok oposisi muslim militan, kemunculan gerakan Islam baru telah menjadi perhatian serius bagi monarki dan para pendukungnya di kawasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami gerakan Islam di Saudi, termasuk orientasi ideologis, basis sosial, dan para pendukungnya.<sup>4</sup>

Secara historis, simbiosis antara kekuatan kerajaan dan gerakan Islam terjadi sejak abad ke-18 yang memberikan motivasi bagi pasukan Raja Abdul Aziz bin Saud untuk menaklukkan dan menyatukan Jazirah Arab antara tahun 1912 hingga 1925. Meski didasarkan pada ideologi pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, monarki tetap harus menghadapi tantangan dari kelompok militan Islam lainnya.<sup>5</sup> Tantangan pertama muncul dari kelompok suku-suku fanatik yang tergabung dalam pasukan kerajaan sendiri, yang dikalahkan dalam Perang Sabala pada tahun 1929. Kemudian, terjadi gerakan protes kaum puritan pimpinan Pangeran Khalid bin Musa'id pada pertengahan 1960-an, yang melawan kebijakan Raja Faisal mengenai modernisasi. Aksi lebih serius adalah pengambilalihan Masjidilharam di Makkah pada November 1979 oleh kelompok Juhaiman al-'Utaibi al-Ikhwan, yang kemudian diusir dari Kota Suci dengan kekuatan bersenjata.

---

<sup>4</sup> R. Hrair Dekmejian, "The Rise of Political Islam in Saudi Arabia". *Middle East Journal*. 48, No. 4 (1994): 627.

<sup>5</sup> James P. Piscatori, "Ideological Politics in Saudi Arabia", dalam *Islam in the Political Process*, ed. James P. Piscatory (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 56–63.

## 2. Oposisi Kelompok Reformis Islam terhadap Monarki Kuwait

Sistem politik di Kuwait adalah monarki konstitusional yang berlaku sejak 1962.<sup>6</sup> Meski realitas politik parlemen memiliki sedikit kekuasaan dibandingkan monarki, gerakan oposisi dapat berkembang dan berperan cukup signifikan dalam kancah politik Kuwait. Salah satu kekuatan terpenting dalam mendorong reformasi Islam adalah The Kuwait Islamic Constitutional Movement (ICM) yang didirikan pada 30 Maret 1991. Kelompok ini berbeda dengan gerakan Islam lainnya karena bertujuan untuk melakukan islamisasi melalui reformasi konstitusional. Gerakan Islam militan cenderung bertujuan menggulingkan pemerintah, sedangkan ICM bertujuan melakukan reformasi pemerintahan secara legal. Perbedaan mendasar ini menjadikan ICM sebagai pilihan yang dapat diterima oleh kalangan yang menginginkan reformasi Islam dalam pemerintahan dan aturan hukum tanpa kekerasan.<sup>7</sup>

ICM merupakan sayap resmi dari kelompok Ikhwanul Muslimin Kuwait yang memiliki ikatan formal dengan organisasi induknya di Mesir dengan fungsi utama di bidang sosial dan amal. Namun, kelompok ini juga terjun ke ranah politik, terutama ketika terjadi pembubaran parlemen pada 1976 akibat ketidakpercayaan monarki terhadap parlemen. Ketika parlemen kembali diaktifkan pada tahun 1981, kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) memperoleh beberapa kursi. Capaian politik terbesar kelompok ini diperoleh pada 1990 tatkala Saddam Hussein menginvasi Kuwait, yang mengantarkan ICM pada posisi lebih kuat. Pada saat itu, angkatan muda IM tetap tinggal di Kuwait dan membentuk gerakan perlawanan ICM. Kelompok ini memutuskan ikatan dengan IM dari luar Kuwait

---

<sup>6</sup> Helen Ziegler and Associates, *Political System of Kuwait*.

<sup>7</sup> Nathan J Brown. "Pushing Toward Party Politics? Kuwait's Islamic Constitutional Movement," *Carnegie Endowment for International Peace* (January 2007): 3–20, <http://carnegieendowment.org/2007/02/13/pushing-toward-party-politics-kuwait-s-islamic-constitutional-movement-pub-19016>.

dengan alasan tidak adanya bantuan dari kelompok IM lain untuk membebaskan Kuwait dari invasi Irak.<sup>8</sup>

Meskipun belum ada gerakan Islam yang cukup kuat untuk memenangkan kursi mayoritas di parlemen, gerakan Islam dan ICM khususnya bersifat instrumental dalam membentuk kelompok mayoritas reformis yang terpilih dalam pemilu parlemen 2016. Oleh sebab itu, tatkala Raja Kuwait wafat dan terjadi perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan pada 2006, ICM menggunakan situasi ini untuk memperoleh dukungan dari rakyat dan gerakan kiri untuk membentuk koalisi reformis.<sup>9</sup>

### 3. Oposisi Kelompok Islam terhadap Pemerintahan Monarki Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan negara federal di Timur Tengah yang terdiri dari tujuh keemiran (*emirates*) di bawah pimpinan seorang amir, yakni Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah, dan Umm Al-Quwain. Berdasarkan konvensi, pemimpin Abu Dhabi adalah Presiden UEA dan pemimpin Dubai adalah Perdana Menteri UEA. Sebagai negara kaya dengan penduduk yang makmur, Uni Emirat Arab tidak lepas dari aktivisme politik Islam seperti halnya yang terjadi di negara-negara Arab. Kelompok oposisi Islam terbesar di UEA adalah Al-Islah yang bertujuan melakukan perubahan rezim. Jamiyyat Al-Islah (Al-Islah Society), terdaftar sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) di UEA pada tahun 1974. Aktivitas awal organisasi ini berkaitan dengan bidang olahraga, budaya, amal, dan aktivitas sosial. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendapat lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial, Al-Islah memiliki hubungan baik dengan pegawai pemerintah selama dua

---

<sup>8</sup> Rudman dkk. "Domestic Dynamics of Political Islam in the Greater Middle East: Case Studies of Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey". *Cornell International Affairs Review*, 1 No.1 (2007), 3–4.

<sup>9</sup> Brown, "Pushing Toward Party Politics," 3–20.

dekade terakhir. Selama periode itu, kelompok Al-Islah tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan ataupun agresif.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, organisasi tersebut mengembangkan agenda reformasi paralel dengan agenda sosialnya. Pola ini juga digunakan oleh gerakan politik Islam lain di dunia Arab. Terinspirasi oleh nilai-nilai politik Islam moderat, Al-Islah bertujuan untuk menyediakan petunjuk moral dan reformasi politik bagi warga negara UEA, termasuk anggota legislatif. Organisasi ini serupa dengan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir ataupun An-Nahdha di Tunisia meski terdapat perbedaan dalam tujuan dan bentuk gerakannya.<sup>11</sup>

Pada tahun 1994, pemerintah memecat seluruh dewan direksi organisasi Al-Islah dan melarang para anggotanya terlibat dalam jabatan publik. Sejak saat itu, peran Al-Islah dalam kancah politik UEA mengalami kemunduran. Mereka yang memegang jabatan penting di media, akademik, ataupun di bidang industri langsung diberhentikan. Ketua Al-Islah, Syekh Sultan bin Kayed Al-Qasimi, termasuk dalam daftar orang yang ditahan setelah menyampaikan petisi reformasi pada Maret 2011.

Respons represif pemerintah UEA secara efektif telah menutup organisasi Al-Islah dan membungkam seruan organisasi untuk melakukan reformasi politik.<sup>12</sup> Pemerintah UAE mengklaim bahwa Al-Islah merupakan ancaman keamanan nasional dan kegiatan kelompok tersebut dianggap subversif. Banyak para pemimpin kabilah dan pelaku ekonomi yang mengkhawatirkan terjadinya instabilitas politik dengan langkah represif pemerintah.

Politik Islam—dengan karakteristiknya masing-masing—berpengaruh sangat kuat dalam pasang surut pergolakan politik di Arab

---

<sup>10</sup> Pekka Hakala, "Opposition in the United Arab Emirates". *Quick Policy Insight, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament* (November 2012): 2–3, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/join/2012/491458/EXPO-AFET\\_SP%282012%29491458\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf).

<sup>11</sup> Hakala, "Opposition," 2–3.

<sup>12</sup> Christopher Davidson. "Fear and Loathing in Emirates," diakses pada Februari 2017, <https://carnegieendowment.org/sada/49409>.

Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dalam konteks Arab Saudi, Perang Teluk 1991 menjadi katalis perubahan dalam kebijakan internal dan eksternal Arab Saudi. Gerakan protes para pendukung mereka terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan di Arab Saudi. Upaya reformasi yang dilakukan oleh Raja Fahd pada awal 1990-an menjadi langkah awal transformasi gradual dalam kehidupan politik kerajaan dan membentuk upaya pencarian stabilitas pada dekade selanjutnya.

Di Kuwait, sejarah politik di negara tersebut tidak memberikan ruang bagi oposisi terhadap pemerintah. Pemerintah Kuwait memiliki cara tersendiri untuk membungkam dan menutup ruang oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah telah menarik IM ke dalam proses politik untuk melakukan reformasi politik. Selain itu, ICM melakukan aliansi dengan kelompok liberal dan politisi populis, yang dalam orientasi politiknya cenderung bersikap waspada terhadap kelompok Islam. Hal ini menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik Kuwait.

Sementara itu, pemerintah UEA memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Pada Maret 2011, aktivis politik mengeluarkan petisi yang ditujukan kepada Presiden Federasi UEA agar membentuk Majelis Pemilu Nasional karena pemerintah UEA melarang pembentukan partai politik dan tidak menginginkan proses politik terbuka. Petisi tersebut pada akhirnya menimbulkan reaksi keras dari pemerintah dan aparat keamanan. Tujuh warga negara UEA yang menandatangani petisi ditahan dan dicabut kewarganegaraannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, buku ini menjawab beberapa pertanyaan berikut: 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tumbuhnya kekuatan politik Islam secara signifikan di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab?; 2) Bagaimanakah peran kekuatan politik Islam dalam dinamika sosio-politik di tiga negara?; 3) Bagaimanakah implikasi peran kekuatan politik Islam terhadap kehidupan bernegara di tiga negara tersebut?

## B. Politik Islam: Aspek Teoretis

Politik Islam merupakan konsep modern dalam wacana politik yang muncul setelah Perang Dunia I<sup>13</sup> dan masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan akademisi. Perdebatan tentang politik Islam sering diartikan dan dikaitkan secara sempit dengan wacana fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme Islam meskipun hal tersebut masih dalam lingkup dan menjadi salah satu aspek kajian politik Islam. Bahkan, kesimpulan ini juga mengarah pada generalisasi yang keliru bahwa Islam sebagai agama politik, agama radikal, dan agama yang fundamentalis.

Olivier Roy memandang politik Islam sebagai gaya baru dari gerakan fundamentalisme Islam modern dan memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan purwarupa masyarakat Islam yang sebenarnya, yang tidak diwujudkan melalui pendekatan tradisional dengan menegakkan syariat Islam, tetapi mendirikan negara Islam melalui jalur politik yang dia kategorikan sebagai neofundamentalisme.<sup>14</sup> Roy berangkat dari asumsi yang hampir sama dengan Mohammed Ayooob yang memandang Islam bukan sekadar agama, melainkan sebagai sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep yang islami di ranah publik.<sup>15</sup>

Namun, pendekatan yang definitif yang menganggap politik Islam sebagai ideologi politik harus dipisahkan dengan aspek faktual yang lebih kultural. Graham Fuller berpendapat bahwa politik Islam bukanlah faktor ideologis, melainkan kombinasi aspek religio-sitas-kultural-politik yang sangat berkaitan dengan isu-isu dan memiliki tujuan politis sehingga mendorong masyarakat muslim untuk aktif di dalamnya. Islam merupakan aspek integral dari keyakinan (*body of faith*) yang membentuk semua aspek sosial masyarakat dan

---

<sup>13</sup> Nazih N. Ayubi. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London: Routledge, 1993).

<sup>14</sup> Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*. (Cambridge: President and Fellows of Harvard College, 1994).

<sup>15</sup> Ayooob, *Many Faces of Political Islam*, 2–3.

memiliki aspek solutif dari kompleksitas permasalahan masyarakat modern.<sup>16</sup>

Berdasarkan analisis kritis dapat disimpulkan dari tulisan Ayubi bahwa permasalahan ini harus didudukan kembali. *Pertama*, Islam tersusun atas kolektivitas hukum, doktrin, dan nilai moral sebagai agama yang tidak bisa dibatasi dengan definisi agama yang bersifat politis. *Kedua*, dalam konteks legitimasi politik dan apa yang secara faktual terjadi dalam negara-negara mayoritas muslim, politik Islam sering diartikan sebagai bentuk politisasi agama (Islam) yang dilakukan oleh penguasa untuk mendapatkan legitimasi politik. *Ketiga*, politik Islam tidak bisa dipaksakan untuk dilihat dari perspektif negara sekuler atau dalam bahasa Ayubi “*religiously-neutral states*” yang menjurus pada penyimpulan yang “mengadili”.<sup>17</sup>

Penggunaan konsep politik Islam (*political Islam*) secara bertukaran sering disamakan dengan islamisme (*Islamism*) yang berawal dari asumsi bahwa Islam bukan sekadar agama (sebagai aspek privasi), melainkan ideologi, nilai (*values*), dan doktrin yang memberikan fondasi bagi gerakan sosial (*social actions*). Denoux berpendapat bahwa politik Islam merupakan hasil dari proses “instrumentalisasi” ideologi, nilai, dan doktrin Islam dalam sebuah organisasi gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik (*political objectives*) sebagai respons terhadap tantangan dan persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam terkini.<sup>18</sup>

Muhammad Imarah memandang bahwa munculnya kekuatan politik Islam merupakan sebuah fenomena yang disebut *As-Sahwah Al-Islamiyyah* yang secara definitif diartikan sebagai revivalisme Islam.<sup>19</sup> Perbedaan mendasar definisi revivalisme Islam dan politik Islam adalah sudut pandang yang memperdebatkan posisi agama

---

<sup>16</sup> Graham E. Fuller. *The Future of Political Islam* (New York: Palgrave Macmillan, 2004).

<sup>17</sup> Ayubi, *Political Islam*, 91–95.

<sup>18</sup> Denooux Guilain, “The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam”. *Middle East Policy*, IX, No.2 (2002), 61–62.

<sup>19</sup> Imarah, *Al-Ushuliyyah Baina*.

dalam kehidupan politik (negara). Politik Islam merupakan sebuah gerakan agama (Islam) yang bersifat privat yang memasuki ranah politik (publik). Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah pemisahan agama dan negara sebagaimana diungkapkan oleh Ayubi sebagai “*religiously-neutral states*”.

Revivalisme Islam didasarkan pada konteks sejarah asal perkembangan politik dalam dunia Islam yang tidak memisahkan keberadaan negara dan agama. Revivalisme adalah upaya politis untuk mengembalikan dan merevitalisasi Islam dalam ranah politik dalam masyarakat muslim. Revivalisme Islam ditandai dengan pengimplikasian ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik, budaya, dan kehidupan ekonomi. Tujuan dari revivalisme Islam adalah terciptanya Islam kafah dalam berbagai sektor kehidupan.

Menurut Antony Bubalo, kebangkitan Islam memiliki beberapa bentuk, antara lain, kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup> Di sisi lain, Dekmeijan memandang bahwa fenomena revivalisme Islam ditandai dengan menguatnya aktivitas keagamaan yang meliputi partai politik, kelompok-kelompok pergerakan, dan masyarakat Islam militan. Kelompok ini memiliki kesadaran tinggi dalam memperjuangkan Islam sehingga kerap berseberangan dengan pemerintah dan institusi-institusinya. Para pemikir Islam terdahulu, seperti Hasan Al-Banna, Al-Maududi, Sayyid Qutb, Khomeini, Muhammad Baqi Sadr, dan Said Hawa, banyak memberikan landasan ideologi bagi kebangkitan Islam kontemporer. Gerakan yang mereka usung bertujuan untuk melakukan perubahan sistem sosial politik ke arah kehidupan Islami. Gerakan ini mempunyai pandangan bahwa Islam adalah *ya’lu wala ya’la ‘alaih* “Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya”.

Terdapat lima prinsip utama dari gerakan kebangkitan Islam. *Pertama, Ad-din* (agama) dan *Ad-daulah*. Berdasarkan konsep ini, Islam merupakan sebuah ajaran yang bersifat universal (*syumuliyah*

---

<sup>20</sup> Antony Bubalo, *Middle East, Islamism dan Indonesia* (New South Wales: Low Institute for International Politics, 2005).

*Al-Islam*) yang mengatur tatanan kehidupan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. *Kedua*, penerapan Al-Qur'an dan Sunnah secara kafah. *Ketiga*, puritanisme dan keadilan sosial. *Keempat*, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syariat. *Kelima*, komitmen kuat mewujudkan tatanan Islam (*an-nizam al-Islami*). Menurut pandangan ini, Islam harus menghancurkan tatanan jahiliah dan kekuasaan melalui jihad.<sup>21</sup>

Berdasarkan lima prinsip tersebut, tuntutan pelaksanaan syariat Islam menjadi agenda politik gerakan keagamaan di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin. Kehadiran IM diikuti kelompok Islam lainnya seperti, Hizbut Tahrir, Hizbu Ad-Da'wah, Hizbullah, Jihad Islam, Jama'at Al-Muslimun At-Takfir, dan organisasi Islam lainnya. Gerakan-gerakan Islam tersebut menjadi penggerak perjuangan politik Islam di Timur Tengah dengan berperan aktif dalam politik praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, buku ini secara lebih mendalam menggali tentang problematika kekuatan politik Islam di tiga negara (Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab) dengan berbagai aspeknya yang meliputi, Bab I: Catatan Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang dan permasalahan. Dalam bab ini, dijelaskan problematika kekuatan politik Islam di tiga negara, yaitu Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Di tiga negara tersebut, kekuatan politik Islam tumbuh sesuai dengan karakteristiknya di tengah sistem politik yang ada.

Bab II: Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi. Bab ini mengkaji berbagai faktor penyebab tumbuhnya kekuatan politik Islam, membahas peran kekuatan politik Islam dalam dinamika socio-politik, dan menganalisis implikasi peran kekuatan politik Islam di Arab Saudi. Dalam konteks politik Saudi, kekuatan politik Islam muncul melalui gerakan reformasi keagamaan, seperti gerakan *As-Sahwah Al-Islamiyyah* yang merupakan representatif dari kelompok

---

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, *Ma'alim fi Ath-Thariq*. Penerj. Darul Uswah (Yogyakarta: Penerbit Darul Uswah, 2011).

Ikhwanul Muslimin (IM). Kelompok ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah monarki Islam. Karakteristik ini berbeda dengan kelompok politik Islam lainnya di dunia Arab yang mengkritik rezim otoriter-sekuler.

Bab III: Problematika Kekuatan Politik Islam di Kuwait. Bab ini mengkaji berbagai faktor penyebab tumbuhnya kekuatan politik Islam, membahas peran kekuatan politik Islam dalam dinamika sosio-politik, dan menganalisis implikasi peran kekuatan politik Islam di Kuwait. Sebagai negara yang menjadi *role model* demokrasi di kawasan Teluk, gerakan politik Islam dapat berkembang dan berperan besar dalam kancah politik Kuwait. Salah satu kekuatan politik Islam terpenting adalah the Kuwait Islamic Constitutional Movement (ICM) yang merupakan sayap politik IM. Kelompok ini berbeda dengan gerakan Islam lainnya di dua negara kasus lainnya karena bertujuan untuk melakukan islamisasi melalui reformasi konstitusional. Karakteristik ini menjadikan ICM menjadi pilihan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan yang menginginkan reformasi Islam dalam pemerintahan dan aturan hukum tanpa kekerasan.<sup>22</sup>

Bab IV: Problematika Kekuatan Politik Islam di Uni Emirat Arab. Bab ini mengkaji berbagai faktor penyebab tumbuhnya kekuatan politik Islam, membahas peran kekuatan politik Islam dalam dinamika sosio-politik serta menganalisis implikasi peran kekuatan politik Islam di Uni Emirat Arab. Kekuatan politik Islam terbesar di UEA adalah Jamiyyat Al-Islah (Al-Islah Society) yang memiliki kesamaan karakter dengan IM. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk aktivitas sosial. Kedekatan Al-Islah dengan pemerintah dalam dua dekade terakhir mendorong Al-Islah pada puncak kejayaannya. Namun, dalam perkembangannya, kelompok ini mendapat tekanan rezim yang menjadikannya terpuruk di tengah pusaran dominasi monarki.

---

<sup>22</sup> Brown, "Pushing Toward Party Politics," 3–20.

Bab V: Penutup dan Kesimpulan. Politik Islam di tiga negara kasus (Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab) memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan dinamika politik yang terjadi. Demikian halnya dengan hubungan antara Islam dan negara yang kerap mengalami pasang surut sebagai imbas dari pergolakan politik yang terjadi meski pada tataran tertentu di tiap-tiap negara kasus, agama dan negara saling menautkan diri dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sosial-politik. Terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan. *Pertama*, di Arab Saudi, pemerintah di bawah pimpinan raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dan mutlak, pendirian organisasi Islam hanya bisa terwujud dalam bentuk organisasi formal yang mendapat legitimasi raja. Berbeda dengan Kuwait yang konstitusinya telah memberikan ruang, baik bagi faksi maupun organisasi politik untuk berkembang. Adapun dalam kasus UEA, kelompok Islam berkesempatan tampil dalam kancah politik meski pada akhirnya rezim melakukan pembatasan terhadap gerakan. *Kedua*, kekuatan politik Islam di Arab Saudi diawasi dengan cukup ketat sehingga gerakan Islam lainnya tidak berhasil terlembagakan. Meskipun demikian, pengaruh dunia pendidikan dan organisasi Islam internasional yang masuk telah menginfiltrasi masyarakat terpelajar Saudi. Sementara di Kuwait, pengaruh kekuatan politik Islam mengalami pasang surut imbas dari budaya politik yang berkembang. Adapun di Kuwait, politik Islam yang semula berkembang telah mendapat tekanan akibat dominasi kader gerakan dalam bidang pendidikan dan peradilan negara. *Terakhir*, gerakan politik Islam di Arab Saudi dipengaruhi oleh kelompok Wahabi, baik secara domestik maupun internasional. Pendidikan di Arab Saudi yang semula banyak dipengaruhi IM pada akhirnya digantikan oleh dominasi pemikiran Wahabi. Dalam kasus Kuwait, gerakan politik Islam begitu dominan dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun suku, bahkan kelompok ini mampu memasukkan nilai Islam dalam konstitusi. Sementara itu, di UEA kekuatan politik Islam yang semula kuat pada akhirnya dapat diberangus melalui berbagai kebijakan emir.

## Daftar Pustaka

- Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993.
- Ayubi, Nazih N. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge, 1993.
- Brown, Nathan J. "Pushing Toward Party Politics? Kuwait's Islamic Constitutional Movement". *Carnegie Endowment for International Peace*. No.79 (January 2007): 3–20. <http://carnegieendowment.org/2007/02/13/pushing-toward-party-politics-kuwait-s-islamic-constitutional-movement-pub-19016>.
- Bubalo, Antony. *Middle East, Islamism and Indonesia*. New South Wales: Low Institute for International Politics, 2005.
- Davidson, Christopher. "Fear and Loathing in Emirates". (September 2018). Diakses pada Februari 2017, <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.
- Dekmejian, R. Hrair. "The Rise of Political Islam in Saudi Arabia". *Middle East Journal* 48, No. 4 (1994): 627–643.
- Espósito, John L. *Islam: The Straight Path*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Guilain, Denoëux. "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam". *Middle East Policy* IX, No. 2 (2002): 56–81.
- Hakala, Pekka. "Opposition in the United Arab Emirates". *Quick Policy Insight, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament*, (November 2012): 1–4. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/join/2012/491458/EXPO-AFET\\_SP%282012%29491458\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf).
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in The Late 20th Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991.
- Imarah, Muhammad. *Al-Ushuliyyah Baina Al-Gharb wa Al-Islam*. Kairo: Daar Asy-Syaruq, 1998.
- Piscatori, James P. "Ideological Politics in Saudi Arabia". Dalam *Islam in the Political Process*, diedit oleh James P. Piscatori, 56. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

- Qutb, Sayyid. *Māʿalim fi Ath-Thariq*. Diterjemahkan oleh Penerbit Darul Uswah. Yogyakarta: Penerbit Darul Uswah, 2011.
- Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*. Cambridge: President and Fellows of Harvard College, 1994.
- Rudman, Amanda, dkk. "Domestic Dynamics of Political Islam in the Greater Middle East: Case Studies of Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey". *Cornell International Affairs Review* 1. No. 1 (2007): 3–4.
- Ziegler, Helen and Associates. "Political System of Kuwait." Diakses pada Januari 2017. <https://www.hziegler.com/articles/political-system-of-kuwait.html>.



## BAB 2

### Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi

*Nostalgawan Wahyudhi*

#### A. Arab Saudi dan Fenomena *Arab Spring*

Sebelum menjadi negara yang paling sentral di Timur Tengah, baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun keagamaan, Arab Saudi merupakan negara yang dikelola secara minimalis. Hingga pada tahun 1952, negara sederhana tersebut hanya ditopang oleh tiga kementerian, yaitu kementerian keuangan yang dibentuk pada tahun 1932, kementerian luar negeri yang dibentuk pada tahun 1933, dan kementerian dalam negeri yang berdiri pada tahun 1944. Sebagai negara, Arab Saudi nyaris tidak memiliki anggaran yang cukup untuk hadir dengan program-program pembangunan di tengah

masyarakat, tetapi melanggengkan status keluarga kerajaan yang secara politik dan sosial merupakan ahli waris wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Sebagai penguasa Hijaz dan Najd, cikal bakal entitas politik Arab Saudi, keluarga Saud diuntungkan oleh faktor “*given*” sebagai pelayan Haramain (dua kota suci di wilayahnya), Makkah dan Madinah, dua tanah suci bagi umat Islam. Mereka menikmati statusnya yang disegani, baik secara internal maupun secara eksternal, terutama di dunia Islam. Penetrasi pengaruh sosial politik keluarga Saud diperkuat dengan identifikasi secara politis ajaran Wahabi yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat sebagai aliran keislaman resmi yang dianut negara. Oleh karena itu, wajar jika Saudi sangat selektif dengan gerakan Islam lainnya. Hal ini secara signifikan memengaruhi dan menentukan arah kebijakan internal dan politik luar negeri keluarga Saud ke depan, baik secara nasional, regional, maupun internasional.

Gelombang *Arab Spring* pada tahun 2011 yang melanda Jazirah Arab, muncul sebagai simbol perlawanan dan pembebasan terhadap keterbelakangan ekonomi dan sistem politik otoritarian yang menyebar dari Afrika Utara (Tunisia) ke negara-negara Timur Tengah. Gelombang demokratisasi ini bahkan didukung dan dimotori oleh salah satu gerakan politik Islam yang dilarang di Saudi, seperti Ikhwanul Muslimin. Pergantian rezim pun tidak dapat dielakkan seperti halnya yang terjadi di Mesir. Keluarga Saud yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut tentu merasa sangat terancam dengan gelombang ini. Sejauh mana *Arab Spring* berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik di Arab Saudi? Bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan kekuatan politik Islam di Arab Saudi? Bagaimana pula gerakan politik Islam memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Arab Saudi?

---

<sup>1</sup> Tim Niblock dan Monica Malik, *The Political Economy of Saudi Arabia*. (New York: Routledge, 2007), 32–33.

## B. Dinamika Ekonomi, Sosial, dan Politik

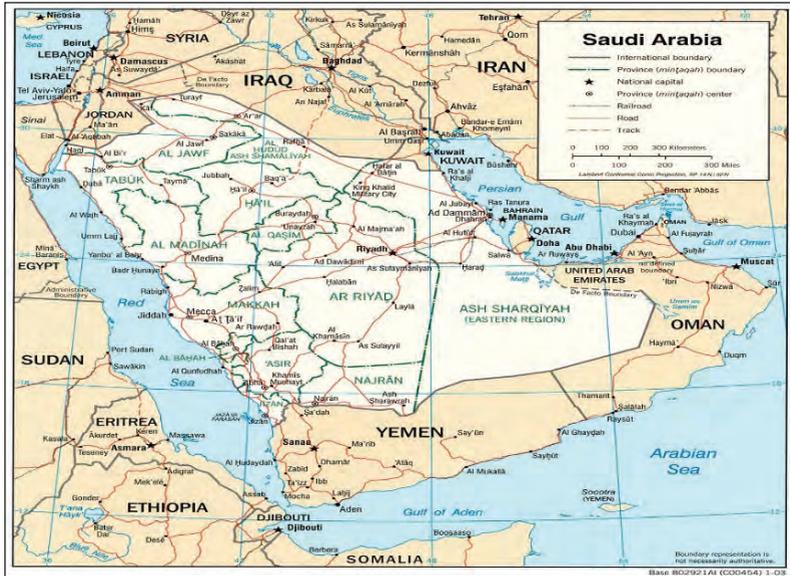
Arab Saudi merupakan negara terluas di kawasan Timur Tengah yang mencapai 2.149 juta kilometer persegi, hanya sedikit lebih luas dari Iran, tetapi hanya memiliki 1% lahan produktif. Selebihnya, wilayah Arab Saudi diselimuti oleh gurun pasir yang gersang sehingga sebaran penduduk di negara ini tidak merata.<sup>2</sup> Sebaran penduduk Saudi terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi dengan laju urbanisasi yang tinggi, baik warga negara Saudi maupun non-Saudi. Kota-kota seperti Riyadh, Makkah, dan wilayah timur mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi karena banyak lapangan pekerjaan dan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.<sup>3</sup>

Arab Saudi terletak di tengah-tengah Jazirah Arab yang memiliki posisi strategis dari akses darat, laut, dan udara. Negara tersebut memiliki luas perbatasan darat sepanjang 4.272 kilometer yang berbatasan langsung dengan 7 (tujuh) negara, yaitu Irak (sepanjang 811 km), Yordania (sepanjang 731 km), Kuwait (sepanjang 221 km), Oman (sepanjang 658 km), Qatar (sepanjang 87 km), UEA (sepanjang 457 km), dan Yaman (sepanjang 1.307 km). Panjang perbatasan lautannya mencapai 2.640 kilometer.

---

<sup>2</sup> Central Intelligence Agency, "Saudi Arabia", *CIA World Fact Book*, (Oktober 2017), 1–2, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html>.

<sup>3</sup> Asharaf AbdulSalam, "Population and Household Census, Kingdom of Saudi Arabia 2010: Facts and Figures". *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 No. 16 (2013), 258–263.



Gambar 2.1 Peta Arab Saudi<sup>4</sup>

## 1. Ekonomi

Secara geopolitik, selain berada di jantung Jazirah Arab, Arab Saudi diapit oleh dua jalur laut tersibuk di seluruh dunia, yaitu Laut Persia dan Laut Merah menuju Terusan Suez. Perbatasan laut Arab Saudi di sebelah timur berhadapan langsung dengan rival politiknya, Iran, dan hanya dibatasi oleh Teluk Persia yang menjadi jalur perdagangan minyak tersibuk dunia dengan produksi mencapai 1.412,4 juta barel yang merupakan pemasok 32,4% produksi minyak dunia.

Perubahan signifikan pada ekonomi Arab Saudi terjadi ketika negara monarki absolut tersebut memulai debut pertamanya dalam mengekspor minyak. Sentralitas Arab Saudi sebagai produsen minyak dunia menguat sejak negara tersebut menjadi pemasok ke negara-negara Eropa dan Amerika pada tahun 1948. Pembangunan

<sup>4</sup> University of Texas Libraries, "Saudi Arabia Pol 2003", September 2017 [http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\\_east\\_and\\_asia/saudi\\_arabia\\_pol\\_2003.jpg](http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/saudi_arabia_pol_2003.jpg).

*Trans-Arabian Pipeline* oleh Aramco (sekarang) sepanjang 1.214 kilometer dari Pelabuhan Dammām di Arab Saudi melewati Yordania, bagian selatan Suriah dan berujung di terminal minyak di Sidon, Lebanon, merupakan revolusi pertama distribusi minyak ke Eropa. Namun, pipa minyak bersejarah ini dihentikan oleh Saudi pada tahun 1990 saat perang Irak sehingga harga minyak melambung saat itu.<sup>5</sup>



Sumber: Chronicle Fanack (2014)

**Gambar 2.2** Distribusi Minyak Arab Saudi

<sup>5</sup> Encyclopedia Britannica, “Trans Arabian Pipeline,” diakses 8 Agustus 2017 <https://www.britannica.com/topic/Trans-Arabian-Pipeline>.

Untuk memotong jalur perdagangan minyak dan gas ke Eropa sekaligus menguasai perdagangan minyak, Saudi membuat pipa minyak dan gas yang melintasi Dammam (di pesisir timur Teluk Persia) bergerak menuju terminal minyak dan gas Yanbu di Madinah, pesisir barat Laut Merah. Hal ini secara signifikan memotong jalur perdagangan minyak menuju pusat perdagangan minyak dan gas di Teluk Persia. Proyek ini dipercayakan atas pendanaan Aramco (62,5%) dan Sinopec (37,5%). Dalam perkembangannya, terminal minyak di Yanbu bukan hanya untuk perdagangan minyak mentah (*crude oil*), tetapi juga dibangun penyulingan minyak dan gas (*oil and gas full conversion refinery*) kualitas terbaik yang rendah sulfur untuk memenuhi standar produk Eropa. Terminal ini akan meningkatkan 30% kapasitas produksi dan varian distribusi perdagangan minyak Arab Saudi.<sup>6</sup>

Pada tahun 2016, Arab Saudi ternyata tidak lagi menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Saudi memproduksi sekitar 12,3 juta barel per hari, meningkat sekitar 3% dari tahun 2015. Namun, Saudi merupakan pemasok 13,4% kebutuhan minyak dunia dan menguasai 38,8% produksi minyak Timur Tengah. Jumlah ini sedikit di bawah produksi minyak Amerika yang mencapai 12,4 juta barel per hari. Sebenarnya, sejak tahun 2014, produksi minyak Arab Saudi sudah berada di bawah produksi minyak Amerika. Diprediksi hingga bertahun-tahun ke depan, produksi minyak Amerika tetap menempati posisi tertinggi di dunia meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi sebanyak 3,2%.<sup>7</sup>

Dengan tingkat produksinya yang tinggi, konsumsi minyak untuk keperluan dalam negeri Arab Saudi hanya sekitar 28,6% sehingga ekonomi Saudi sangat diuntungkan dengan surplus ekonomi

---

<sup>6</sup> "Saudi Aramco Yanbu Refinery," *Hydrocarbons Technology*, diakses 12 Juni 2016 <http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/aramco-yanbu/>.

<sup>7</sup> Centre for Energy Economics Research and Policy, *BP Statistical Review of World Energy* (London: Heriot-Watt University, 2017), [https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de\\_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf](https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf).

dari produksi minyaknya. Dengan penghasilan di sektor minyak yang menjadi komoditas utama, Arab Saudi dan juga mayoritas negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), terjebak dalam *rentier state*, yaitu ketergantungan negara pada sektor yang tidak produktif dari sistem rente. Ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Arab Saudi terhadap sektor minyak cukup tinggi hingga mencapai 43%. Angka ini sebenarnya lebih aman dari Qatar yang mencapai 51%. Namun, sangat rentan dengan fluktuasi harga minyak di pasaran, terlebih beberapa tahun ini harga minyak mulai turun.<sup>8</sup>

Dalam sektor gas, Arab Saudi memiliki 4,5% cadangan gas dunia. Produksi gas Saudi tergolong cukup besar, mencapai 109,4 juta kubik pada tahun 2016. Angka ini sekitar 40% lebih kecil daripada produksi gas Qatar. Namun, sektor gas tidak mendukung pasokan ke APBN karena Saudi tidak memperdagangkan sektor gas untuk kebutuhan ekspor. Semua hasil dari produksi gas dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri Arab Saudi.<sup>9</sup>

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Arab Saudi mencapai 20.029 dolar pada tahun 2016. Namun, jumlah ini menurun sejak tahun 2012. Sebagai *rentier state*, penurunan PDB per kapita Saudi ini disinyalir seiring dengan turunnya harga minyak dunia. Harga minyak dunia pernah naik tajam pada tahun 2011 karena gelombang *Arab Spring*. Harga minyak (*crude oil*) saat itu mencapai 106,18 dolar per barel naik dari harga 78,6 dolar per barel pada tahun 2010. Karena pengaruh kenaikan harga minyak ini pula, PDB per kapita Saudi pernah mencapai puncaknya pada tahun 2012 di level 25.303 dolar.<sup>10</sup> Dengan fluktuasi harga minyak yang cenderung turun dan tidak stabil, kondisi perekonomian Arab Saudi ke depan

---

<sup>8</sup> Centre for Energy Economics Research and Policy, *BP Statistical Review*.

<sup>9</sup> Centre for Energy Economics Research and Policy, *BP Statistical Review*.

<sup>10</sup> "GDP per capita (current US\$)," World Bank National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files, The World Bank IBRD-IDA, 15 Juli 2017, <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.PCAP.CD>.

pun diperkirakan masih labil karena harga minyak pada tahun 2016 sudah terjun bebas menyentuh angka 41,19 dolar per barel.<sup>11</sup>

Perekonomian Saudi diperburuk dengan peningkatan angka pengangguran yang mencapai 12,7%. Lebih dari 70% di antaranya adalah pencari kerja dari golongan perempuan. Lesunya perekonomian Arab Saudi belakangan ini berdampak juga pada pembelanjaan pemerintah yang menurun dan tekanan terhadap pekerja imigran dan ekspatriat yang semakin ketat. Di sisi lain, nahasnya peningkatan jumlah pekerja kebangsaan Saudi juga tidak tampak. Sebenarnya, setiap tahun tercipta 433.000 lapangan kerja, tetapi mayoritas yang mengambil kesempatan itu adalah pekerja asing. Di sisi lain, sirkulasi ekonomi dari sektor bisnis, hotel dan restoran turun hingga 0,8% per tahun dan pertumbuhan ekonomi dijangkakan akan berada di bawah level 1%.<sup>12</sup>

Keterpurukan ekonomi Saudi akibat harga minyak yang turun membuat Visi 2030 mendapatkan momen. Pada Visi 2030, Arab Saudi berkomitmen untuk menekan angka pengangguran pada level 7%.<sup>13</sup> Di sisi lain, Visi 2030 tersebut menetapkan target-target yang sangat ambisius, seperti meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lapangan pekerjaan hingga mencapai 30%, menggenjot pertumbuhan UKM pada PDB hingga 35%, dan menumbuhkan sektor ekonomi nonmigas seperti sektor pariwisata dan jasa. Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, juga merencanakan menjual 5% kepemilikan saham Aramco kepada publik meskipun hingga saat ini pendapatan dari Aramco masih mendominasi pembiayaan di APBN Saudi. Muhammad beranggapan bahwa minyak adalah candu yang berbahaya, sedangkan Visi 2030 ini tidak

---

<sup>11</sup> Centre for Energy Economics Research and Policy, *BP Statistical Review*.

<sup>12</sup> Dominic Dudley, "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" (Juli 2016), <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.

<sup>13</sup> "Saudi Arabia unemployment rate climbs to 12.7 percent," (Juli 2017), <http://www.aljazeera.com/news/2017/07/saudi-arabia-unemployment-rate-climbs-127-percent-170730163025234.html>.

menginginkan harga minyak yang tinggi, tetapi justru menjadikan Saudi yang dapat hidup tanpa minyak.<sup>14</sup>

Dari program ini, tampaknya Arab Saudi ingin mengejar keteringgalan ekonominya dari Uni Emirat Arab dan Qatar yang terlebih dahulu mengembangkan potensi ekonomi di sektor nonmigas, terutama jasa dan pariwisata. Ketergantungan APBN yang sangat tinggi pada sektor migas membuat ekonomi Saudi lunglai ketika harga minyak turun. Keberhasilan UEA yang disusul oleh Qatar menyebabkan pengaruh Saudi secara ekonomi politik di kawasan mulai terkikis. Pertumbuhan kedua negara tersebut sebagai *hub* di kawasan sebenarnya menjadi ancaman bagi Saudi. Karena banyaknya jemaah umrah dan haji menggunakan rute Dubai atau Doha, ikon Jeddah ataupun Riyadh sebagai *hub* tidak begitu menonjol di kawasan.

## 2. Sosial-Budaya

Menurut data resmi pemerintah, populasi penduduk di Arab Saudi per pertengahan 2016 mencapai 31,79 juta jiwa. Jumlah ini berbeda dengan data yang dikeluarkan Bank Dunia yang mencapai 32,28 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 36,8% di antaranya merupakan imigran yang bekerja di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembantu rumah tangga. Mayoritas para imigran itu berasal dari negara-negara Asia dan Arab, seperti India, Mesir, Bangladesh, Srilanka, Filipina, Indonesia, dan Pakistan. Namun, menurut data dari Human Right Watch, Saudi memiliki banyak kasus, terutama di sektor pekerja domestik (pembantu rumah tangga).

Sebaran penduduk Saudi tidak merata. Mayoritas mereka berkumpul di daerah perkotaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tingkat urbanisasi Saudi mencapai 85%. Faktor tipografi wilayah, cuaca/suhu, dan ekonomi/pekerjaan menjadi daya tarik utama bagi penduduk Saudi untuk melakukan urbanisasi.

---

<sup>14</sup> "Saudi Arabia Approves Ambitious Plan to Move Economy Beyond Oil," *The Guardian*, (April 2016), <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/25/saudi-arabia-approves-ambitious-plan-to-move-economy-beyond-oil>.

Arab Saudi merupakan gabungan dari dua wilayah utama, Najd dan Hijaz. Najd merupakan wilayah yang membentang di tengah jantung Arabia mulai dari perbatasan Irak dan Yordania hingga ke wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Oman dan Yaman. Di sebelah timur Najd, terbentang kawasan yang subur dan berbatasan langsung dengan Teluk Persia, sedangkan sebelah barat merupakan wilayah pegunungan yang langsung berbatasan dengan Hijaz di sepanjang Laut Merah. Dengan wilayah yang seperti itu, Najd dihuni oleh banyak suku nomaden yang menyediakan jasa penunjuk arah dengan menyediakan kendaraan unta dan keledai untuk mengangkut barang dagangan bagi kafilah-kafilah yang melintas di padang pasir. Selain itu, terdapat suku-suku yang menetap dengan beternak unta dan domba, dan hidup di kawasan oasis berkebun yang menjadi tempat singgah dan istirahat bagi kafilah yang melintas.<sup>15</sup>



Sumber: Stamp Word History (2018)

**Gambar 2.3** Hijaz, Najd, dan Al-Hasa

<sup>15</sup> David Commins, *Islam in Saudi Arabia*, (London and New York: I.B. Tauris, 2015).

Hijaz merupakan wilayah barat Arab Saudi yang membentang sepanjang pesisir Laut Merah. Di sepanjang sisi sebelah timur, Hijaz berbatasan langsung dengan Najd. Di sebelah utara dan selatan, Hijaz bersinggungan langsung dengan daratan Yordania dan Yaman. Hal yang membuat Hijaz begitu istimewa adalah di wilayahnya terdapat dua kota suci bagi umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, pendudukan Turki Utsmani hingga tahun 1918 sangat penting. Meskipun wilayah ini tidak memiliki banyak sumber kekayaan alam, secara politis penguasaan wilayah ini memiliki dampak legitimasi yang kuat bagi Turki Utsmani di dunia Islam.<sup>16</sup>

Wilayah yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan sebagai referensi kondisi sosial politik Arab Saudi adalah Al-Hasa, bagian timur Arab Saudi di sepanjang pantai Teluk Persia. Komposisi kependudukan di wilayah Al-Hasa lebih majemuk dibandingkan wilayah Saudi lainnya. Kawasan ini merupakan *hub* bagi berbagai etnis Arab, Persia, Baluchi, Asia Selatan, dan Afrika. Sejak abad ke-17, penganut Syiah menjadi mayoritas wilayah ini. Sebagaimana penganut Syiah dari Irak dan Iran, sebagian beranggapan bahwa Al-Hasa merupakan perluasan wilayah Syiah Itsna Asyariyah. Sejak kekuasaan keluarga Saud pada tahun 1913 atas wilayah Al-Hasa, Abdul Aziz menghadapi dilema antara keinginan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi di wilayah mayoritas Syiah ini atau berpegang pada pendiriannya ingin menegakkan pengaruh ajaran Wahabi di setiap jengkal wilayah kekuasaannya.<sup>17</sup>

Hingga kini, Arab Saudi belum bisa menggeser populasi Syiah dari negaranya. Belum pernah ada data resmi dari pemerintah yang merilis secara pasti jumlah penganut Syiah di negara tersebut. Berbagai data berspekulasi bahwa penganut Syiah di Saudi ada pada level 10% dari populasinya. Mereka tidak hanya dari kalangan imigran, mayoritas mereka adalah penduduk asli Saudi yang memang sudah menganut Syiah secara turun-temurun. Berdasarkan konteks

---

<sup>16</sup> Commins, *Saudi Arabia*, 8–9.

<sup>17</sup> Commins, *Saudi Arabia*, 7–8.

sejarah, mayoritas penganut Syiah berada di pesisir timur dekat dengan Teluk Persia, sebagian lagi berada di selatan Saudi berbatasan dengan Yaman.

Penganut Syiah di Saudi tidaklah tunggal. *Itsna Asyariyah* (Syiah Imamiyah) merupakan aliran yang paling banyak dianut oleh kelompok Syiah di Saudi. Jumlahnya bisa mencapai sekitar 2 (dua) juta jiwa yang terkelompok dalam Al-Baharna, Nakhawila, Bani Husaini, Bani Ali (Harb), dan Bani Juhaynah. Etnis Al-Baharna awalnya merupakan imigran dari berbagai tempat yang menetap sejak masa kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kelompok etno-religius Syiah Al-Baharna sebagian besar berada di pesisir timur yang terkonsentrasi di Kota Qatif dan Dammam yang berada di sekitar Pelabuhan King Abdul Aziz dan dekat dengan Bahrain. Penganut Syiah ini memiliki kesamaan etnis dengan mayoritas penganut Syiah di Bahrain. Sebagian lagi terkonsentrasi di wilayah Al-Ahsa yang dekat dengan perbatasan Oman yang dahulu merupakan oasis kecil yang terkenal dengan perkebunan kurmanya.

Nakhawila merupakan kelompok sosial menengah ke bawah yang menganut Syiah Imamiyah. Mereka menetap di sekitar Kota Madinah, Wadi Al-Fara. Kebanyakan di antara mereka dulu merupakan petani dan buruh perkebunan kurma yang berada di sekitar Madinah. Menurut Hamzah Hasan, pengikut Nakhawila sering mendapatkan diskriminasi dan tekanan, terutama sejak penghancuran situs pemakaman Al-Baqi' yang berada di samping Masjid Nabawi yang disakralkan oleh penganut Syiah.<sup>18</sup> Di daerah Hijaz juga terdapat tiga keluarga yang menganut Syiah Imamiyah, yaitu sebagian kecil dari Bani Hussaini yang merupakan keluarga dari Syarif Hussein yang menguasai Hijaz pada periode penguasaan Turki Utsmani, Bani Ali dan Bani Juhaynah. Ketiga keluarga ini merupakan suku yang nomaden di wilayah Hijaz. Sebagian besar dari mereka telah menganut ajaran Wahabi sejak keluarga Bani Saud menguasai Arab Saudi.

---

<sup>18</sup> Raihan Ismail, *Saudi Clerics and Shi'a Islam*. (New York: Oxford University Press, 2016).

Penganut Syiah Ismailiyah juga terdapat di Arab Saudi. Mereka singgah di sebelah barat daya Arab Saudi di Lembah Najran yang merupakan pusat perkembangan sekte Sulaimaniyah dari Syiah Ismailiyah sejak abad ke-16. Najran menjadi kiblat bagi penganut Syiah Ismailiyah yang berasal dari Yaman, Pakistan, dan India. Di sepanjang perbatasan Saudi dengan Yaman juga terdapat penganut Syiah Zaidiyah yang berpusat di Yaman. Relasi interpersonal secara kesukuan, kultural, dan kedekatan geografis membuat perkembangan Syiah di daerah ini berjalan secara dinamis meskipun secara entitas politik mereka terpisah antara dua negara.

Saudi sering membuat kebijakan publik ekstrem yang disandarkan pada prinsip-prinsip ajaran Wahabi. Beberapa pelarangan, yaitu larangan menyetir mobil bagi perempuan, kewajiban menggunakan abaya dan cadar, sensor terhadap iklan-iklan dengan model perempuan, kewajiban membawa mahram bagi perempuan, dan sebagainya berlaku untuk seluruh wilayah negara. Penerapan peraturan ini di Saudi secara khusus menggunakan polisi syariat. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut tidak sama di tiap-tiap daerah. Untuk daerah pesisir timur Saudi yang lebih majemuk dan metropolis, yaitu Riyadh, Dahrhan, Dammam, dan kota-kota lainnya penerapan hukum syariat tidak seketat di Makkah dan Madinah.

### 3. Politik Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut. Dalam hal ini, sentralitas kekuasaan secara dominan ada di tangan raja. Raja dan putra mahkota diangkat melalui sebuah forum baiat keluarga kerajaan (*Hay'at al-Bay'ah*) sebagai simbol pengakuan dan ketundukan anggota keluarga kerajaan terhadap raja dan putra mahkota yang dipilih. Dalam prosesi baiat ini, rakyat diperbolehkan mengikuti sesi seremonial yang diadakan oleh kerajaan.

Dalam keluarga Bani Saud, ada kelompok pangeran yang memiliki kekuatan dominan yang terkenal dengan sebutan faksi Sudairi. Sebutan ini berasal dari nama istri Raja Abdul Aziz, Ratu Husna Sudairi, putri dari klan paling kuat di Najd. Kelompok keturunan

ini terdiri dari tujuh pangeran dengan Raja Fahd merupakan anak pertamanya. Meskipun kuat, sebenarnya hanya dua dari keturunan Sudairi yang menjadi raja, yaitu Fahd dan Salman. Raja-raja sebelumnya, seperti Raja Saud, Faisal, Khalid, dan Abdullah bukan dari keturunan Sudairi.<sup>19</sup>

Faksi dan ketegangan politik sering terjadi di antara pangeran-pangeran Saudi. Terlebih keturunan Sudairi memang terkenal lebih suka berpolitik dibandingkan para pangeran lain yang fokus dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, Raja Abdullah sendiri harus berkoalisi dengan keturunan Sudairi untuk memastikan keamanan pemerintahannya. Setelah Raja Salman menduduki kekuasaan Saudi, dia melakukan reorganisasi kekuatan Sudairi dengan mengangkat putranya sendiri, yaitu Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota setelah putra Pangeran Nayef, Muhammad bin Nayef dilengserkan dari posisinya.<sup>20</sup>

Keputusan politik merupakan hak prerogatif raja yang melakukan konsultasi dengan keluarga penting kerajaan dan ulama Wahabi. Di sisi lain, konstitusi negara berdasarkan pada Al-Qur'an dan hukum syariat. Meskipun begitu, pada tahun 1992, Raja Fahd menerbitkan Undang-Undang Dasar Pemerintah (*Nizām Al-Asāsi li Al-Hukm*), undang-undang tentang pemerintahan hak dan wewenang raja dan warga negara. Hal ini mempertegas Raja Saudi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berkuasa penuh. Dalam hal ini, raja tidak hanya menjadi penguasa eksekutif, tetapi juga berperan sebagai legislatif dan yudikatif.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Patrick Martin, "Why Saudi king spurned half-brother and restored the Sudairi Seven royal lineage," *The Globe and Mail*, (April 2015). <https://beta.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabias-royal-overhaul-signals-riyadh-assertive-foreign-policy/article24178168/?ref=http://www.theglobeandmail.com>.

<sup>20</sup> "King Salman Reasserts Sudairi Seven, Key Abdullah Advisor Removed," *Middle East Eye*, (Februari 2015). <http://www.middleeasteye.net/news/king-salman-reasserts-sudairi-seven-key-abdullah-advisor-removed-496423196>.

<sup>21</sup> Encyclopedia Britannica. "Government and Society of Saudi Arabia," Diakses pada 8 Agustus 2017, <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society>.

Dalam menjalankan pekerjaannya, raja dibantu oleh Majelis Menteri (*Majlis Al-Wuzaraa*) yang tersusun atas dua wakil perdana menteri yang biasanya merupakan putra mahkota kerajaan dan 23 menteri dengan portofolio serta lima menteri negara. Majelis Menteri sebenarnya merupakan forum menteri kabinet yang membantu tugas-tugas raja dalam fungsi eksekutif, memberikan pertimbangan dan masukan kepada raja dalam forum tersebut. Namun, otoritas tertinggi penetapan kebijakan ada di tangan raja. Sebagian besar menteri ini merupakan pangeran dari keluarga kerajaan. Menteri pertahanan merupakan jabatan yang paling prestisius dan strategis setelah raja. Biasanya, posisi ini dirangkap oleh wakil perdana menteri yang dijabat oleh putra mahkota. Posisi seperti ini sangat wajar bagi negara-negara yang menganut sistem monarki, termasuk di negara-negara Teluk. Menteri pertahanan merupakan jabatan yang strategis di tengah sistem monarki yang rawan akan kudeta dari lingkaran dalam keluarga kerajaan itu sendiri.

Pemerintahan di Arab Saudi dibagi dalam 13 wilayah (*Manaatiq Al-Idaariyya*) yang bisa kita persepsikan sebagai provinsi. Provinsi yang terluas merupakan provinsi yang sering bergejolak, Wilayah Timur (Provinsi Asy-Syarqiyyah) yang sedikit lebih luas daripada Wilayah Riyadh. Struktur di bawah wilayah terdiri dari beberapa ke gubernuran (*Al-Muhafadzah*) yang merupakan pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota yang membawahi beberapa sub-gubernur/kecamatan (*Al-Markaz*). Dalam pengelolaannya, pemerintah provinsi dan kabupaten ini biasanya ditunjuk dan diduduki oleh keluarga kerajaan Bani Saud. Sementara itu, anggota untuk dewan daerah (semacam DPRD) di tiap-tiap provinsi sebagian di antaranya ditunjuk langsung oleh gubernur dan hanya separuhnya dipilih melalui pilkada langsung.

Arab Saudi tidak mengenal sistem politik kepartaian. Tidak ada satu pun organisasi politik yang boleh berdiri meskipun hanya organisasi independen biasa. Untuk mengakomodasi aspirasi, Saudi memiliki semacam lembaga legislatif (Dewan Syura) yang bertugas sebagai fungsi konsultatif yang dapat mengajukan rancangan un-

dang-undang, tetapi tidak memiliki wewenang legislasi. Tidak ada mekanisme *check and balance* dalam fungsi eksekutif dan legislatif karena semua berada di tangan raja. Terlebih, lembaga legislatif ini beranggotakan 150 orang yang semuanya ditunjuk oleh raja.

Imajinasi politis dan historis dari sistem politik di Arab Saudi merujuk pada penguasaan daratan Arabia menjadi milik keluarga Bani Saud. Oleh sebab itu, wewenang keluarga kerajaan terhadap daratan Arabia sangat mutlak. Untuk mempertegas legitimasi dan wewenangnya di tengah masyarakat Saudi, keluarga kerajaan berkolaborasi dengan lembaga ulama senior yang semuanya dari kalangan Wahabi dan dikepalai oleh Mufti Agung, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh. Selain memegang kuasa penuh dalam persoalan agama, lembaga ulama ini juga memiliki akses langsung kepada raja, terutama dalam fungsi konsultasi dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis. Oleh karena itu, pengaruh lembaga ulama ini sangat besar dalam politik dalam dan luar negeri Saudi yang sangat kental dengan misi Wahabi.

Saudi memiliki sejarah dalam penyelenggaraan pilkada, tetapi tidak pernah menyelenggarakan pemilu nasional. Pilkada pertama dilakukan oleh raja pertama Saudi, Abdul Aziz, untuk membangun pemerintah daerah yang baru menggantikan kelembagaan yang dibentuk oleh Turki Utsmani. Pilkada tersebut hanya untuk beberapa provinsi utama saja untuk mendapatkan legitimasi. Sementara itu, pilkada di daerah-daerah lain dilakukan pada masa Raja Saud.

Pilkada berikutnya sempat mati dalam beberapa kali pergantian pemerintahan. Di bawah pemerintahan Raja Abdullah, pilkada dilaksanakan lagi pada tahun 2005 dan 2011. Sayangnya, pilkada di Saudi tidak dilaksanakan secara konsisten dan periodik. Pilkada 2011 sebenarnya merupakan penundaan pilkada yang seharusnya dilakukan pada tahun 2009 karena ketidaksiapan kelengkapan pemilu. Uniknya, dalam semua pemilu lokal ini, Saudi hanya memberikan hak memilih dan dipilih bagi kaum laki-laki. Sistem sosial politik Saudi masih belum memberikan ruang bagi perempuan untuk berkecimpung dalam politik.

Pada masa pemerintahan Raja Faisal dan Abdullah, politik Saudi mulai menuju ke arah keterbukaan. Mereka sebenarnya reformis Saudi di tengah tekanan keluarga kerajaan dan para ulama Wahabi. Isu tentang hak perempuan sering dibangkitkan pada masa mereka, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk meniti karier dan bekerja, dan hak untuk mengendarai mobil. Perubahan mendasar sebenarnya terjadi pada masa pemerintahan Raja Abdullah, tepatnya pada tahun 2011. Ketika itu, untuk kali pertama kali, raja di depan Dewan Syura memperbolehkan perempuan untuk mendapatkan posisi di lembaga tersebut dan memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu lokal 2015. Untuk menjembatani hukum syariat di kerajaan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan tempat dan petugas khusus yang dikelola oleh perempuan.<sup>22</sup>

### **C. Wahabi dan Jatuh Bangunnya Arab Saudi**

Kemudahan keluarga Saud dalam menguasai Arab Saudi tidak terlepas dari relasi yang terbentuk antara keluarga kerajaan itu dengan ulama Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, pada tahun 1840-an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan ulama terkenal yang lahir di Kota Al-Huraymilah sekitar tahun 1700-an. Dia merupakan keluarga besar Bani Tamim yang lahir dari seorang kepala kadi dan ulama di Kota Al-Uyaynah, Abdul Wahab bin Sulayman al-Musharraf. Abdul Wahab memiliki dua orang anak yang sangat rajin menuntut ilmu, yaitu Sulayman dan Muhammad yang mendirikan Wahabi. Namun, Abdul Wahab sang ayah dan Sulayman saudaranya sering memiliki pemikiran keagamaan yang berseberangan dengan Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab menuntut ilmu di berbagai kota metropolitan yang menjadi pusat keilmuan, seperti Makkah, Madinah, Kairo, Damaskus, Basrah, dan Baghdad.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> "Women in Saudi Arabia to vote and run in elections," *BBC News*, (September 2011), <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15052030>.

<sup>23</sup> DeLong-Bas, *Wahabi Islam*.

Pada masa itu, para ulama masyhur lumrah menuntut ilmu di Hijaz, Mesir, Suriah, dan Irak untuk mendapatkan ilmu dan studi yang otoritatif tentang Islam. Namun, hal tersebut tidak menjadi benang merah yang mengarahkan mereka menjadi pengikut Wahabi karena para ulama masa itu fokus pada studi fikih sehingga perbedaan mazhab di wilayah Najd waktu itu merupakan kewajaran. Meskipun sebagian besar ulama Najd merupakan pengikut Hanbali dan sebagian lagi menganut mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka tetap diklasifikasikan dalam semacam perhimpunan yang terkenal dengan jaringan ulama Al-Musharraf. Ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan salah satu pemimpinnya. Lingkungan religius di Al-Uyaynah ini yang membentuk spirit keagamaan bagi Syekh Muhammad.<sup>24</sup>

Lahirnya Wahabi merupakan hasil studi yang sangat mendalam dari Syekh Muhammad yang berbeda dengan sebagian besar ulama di Najd. Dia lebih berfokus tentang studi tauhid, akidah, dan keesaan Tuhan, seperti dalam bukunya yang menjadi rujukan utama pengikut Wahabi, *Kitab Al-Tawhid*. Oleh karena itu, pengikut Wahabi sangat berfokus dengan pemurnian ajaran Islam dan melakukan penekanan yang sangat ketat terhadap praktik syirik, bidah, dan khurafat.

Sebenarnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat memahami perbedaan pemikirannya dengan sang ayah yang menjadi kepala kadi di Al-Uyaynah. Oleh karena itu, dia cenderung diam karena tidak ingin membuat pertentangan dengan ayahnya. Namun, sepeninggal ayahnya pada tahun 1740-an, Syekh Muhammad mulai aktif menyebarkan pemikirannya. Dia semakin mendapatkan pengaruh yang kuat dari masyarakat kota kelahirannya, Al-Huraymilah, dan kota sekitarnya, Al-Arid. Karena seruannya yang sangat ketat tentang praktik-praktik keislaman yang telah tercampur dengan budaya sekitar, kehadirannya mendapatkan penentangan dari penguasa dan sebagian suku-suku, hingga dia memutuskan untuk pindah ke Al-Unaynah.

---

<sup>24</sup> Mutawa, "The Ulama of Najd".

Pada awal kepindahannya, dia mendapatkan dukungan dari amir setempat, Ustman bin Mu'ammār. Bahkan, dia mendapatkan izin untuk menghancurkan makam Zayd bin Khattab, adik Khalifah Umar bin Khattab, dan berperan untuk menerapkan hukum syariat di kota tersebut. Namun, ketika Syekh Muhammad menentang kebijakan pajak yang telah berjalan di kota tersebut, Amir Utsman mengusirnya dari Kota Al-Uyaynah.

Pengusiran ini menjadi titik pertemuan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Muhammad bin Saud yang memimpin kota oasis kecil di Al-Dir'iyah. Kedua pihak sepakat untuk saling mendukung untuk menyebarkan purifikasi ajaran Islam sepanjang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendukung kekuasaan Bin Saud. Kesepakatan kedua belah pihak ini ternyata berdampak panjang dalam konstelasi regional dan global hingga berabad-abad mendatang. Ajaran Wahabi terus meluas seiring menguatnya kekuasaan Saud di Najd.

Penyebaran ajaran Wahabi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bukan berarti tanpa pertentangan dan kritik dari ulama lain. Terlebih pada saat itu pusat keilmuan terdekat di Hijaz (Kota Makkah dan Madinah) masih dalam kekuasaan Turki Utsmani yang sudah dianggap kafir oleh kelompok Wahabi. Ulama seperti Syekh Sulayman bin Suhaym dan saudara kandungnya, Syekh Sulayman bin Abdul Wahab, yang melanjutkan estafet ayahnya menjadi kadi di Al-Uyaynah, sangat menentang ajaran Syekh Muhammad. Bahkan, dalam beberapa seri risalah, dua bersaudara ini saling membuat risalah-bantahan yang membenarkan alasan masing-masing.

Penentangan para ulama terhadap ajaran Syekh Muhammad terjadi di setiap wilayah yang dikuasai oleh keluarga Saud, termasuk tempat reproduksi ulama paling produktif yang juga menjadi rujukan kelompok ulama Al-Musharraf, Al-Ushayqir, di sebuah kota di sebelah utara Al-Arid. Ulama dari kota-kota utama, seperti Sudayr, Harma, Ta'if, dan Qasim pun menentang awal mula masuknya ajaran Wahabi ke sana. Penguasaan Bani Saud atas wilayah-wilayah ini membuat para ulama yang tidak setuju dengan ajaran Wahabi

bermigrasi ke berbagai tempat, seperti Al-Hasa, Al-Unayza (bagian utara yang belum dikuasai Bani Saud), Al-Zubayr, dan sebagian yang bermigrasi ke Kuwait menjadi kadi pertama kali di sana.

Pengaruh Bani Saud dan Wahabi semakin kuat di Najd. Ekspansi ke wilayah lain, terutama Hijaz, merupakan target utama kekuasaan Bani Saud. Jatuhnya Kota Makkah dan Madinah pada tahun 1803 dan 1805 merupakan titik awal masuknya ajaran Wahabi ke Hijaz. Sepanjang penguasaan Bani Saud di Hijaz, banyak makam-makam dan situs sejarah dihancurkan, prosesi ibadah haji dilarang kecuali mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan merokok juga dilarang di sepanjang prosesi haji. Kekuasaan Bani Saud semakin kuat ketika suku Bedouin menerima ajaran Wahabi dan ikut menguasai Kota Madinah.

Namun, itu merupakan titik awal padamnya kekuasaan Bani Saud hingga hampir satu abad ke depan. Untuk kali pertama, kekuasaan Bani Saud berkonflik dengan Turki Utsmani-Mesir pada tahun 1913. Masuknya Turki Utsmani ke daratan Arabia disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, menguasai dua kota suci, Makkah dan Madinah, penting bagi penegakan legitimasi Turki di dunia Islam. *Kedua*, sikap ulama Wahabi yang mengafirkan dan menentang kekuasaan Turki Utsmani merupakan bibit ancaman di daratan Arabia. Konflik dengan pasukan Turki Utsmani-Mesir membuat generasi pertama Dinasti Saud tumbang.

Pada konflik antara Emir Mesir dan Turki Utsmani, wilayah Hijaz dan Najd jatuh ke dalam kekuasaan Mesir. Pada tahun-tahun ini, Dinasti Saud di bawah Emir Turki (1823–1834) dan Faisal (1834–1865) kurang beruntung. Emir Turki sendiri lengser karena pembunuhan, sedangkan kekuasaan Emir Faisal juga berada di pengasingan karena sepanjang tahun itu Mesir menguasai Riyadh dan sekitarnya. Pada titik ini, Emir Faisal bersikap pragmatis, menyatakan loyalitasnya kepada Turki Utsmani untuk mempertahankan diri sehingga hubungannya dengan ulama Wahabi sedikit renggang. Setelah Emir Faisal meninggal, terjadi perang sipil dan perebutan kekuasaan internal keluarga antara Emir Abdullah, Abdurrahman,

dan Saud yang justru membuat kekuasaan Bani Saud di Najd melemah. Najd jatuh ke tangan Abdullah bin Rasheed (Rashidi), Emir Jabbal Sammar, yang berkoalisi dengan beberapa kabilah pada tahun 1786.

Berbeda dengan Dinasti Saud yang hancur, di bawah kekuasaan Rashidi, ulama Wahabi mendapatkan tempat. Ajaran Wahabi mendapatkan momentum menyebar di luar Arabia. Berbeda dengan Turki Utsmani yang menganggap Wahabi sebagai khawarij baru, Rashidi tidak menganggap Wahabi sebagai ancaman. Di bawah kekuasaan Rashidi, perkembangan Wahabi semakin kuat dan mengakar di Najd. Selain di daerah Qasim, Rashidi tetap mempertahankan ulama-ulama Wahabi menjadi kadi di seluruh wilayah Najd. Hal ini yang membuat pengaruh Wahabi sedemikian luas di seluruh Najd di bawah kekuasaan Rashidi.<sup>25</sup>

Setelah Rashidi menguasai daerah Riyadh, keluarga Saud dengan perlindungan suku Bedouin yang berasal dari daerah selatan Arab Saudi melarikan diri ke daerah Qatar, Bahrain, dan akhirnya menetap di Kuwait. Dari daerah Kuwait inilah Abdul Aziz muda membangun kembali dinasti ketiga Bani Saud dan menaklukkan kembali Kota Riyadh dari Dinasti Rashidi yang didukung oleh Turki Utsmani pada tahun 1902–1906. Pada tahun 1912, Abdul Aziz berhasil menguasai penuh daerah Najd dan kawasan timur Arab Saudi. Atas persetujuan dari ulama-ulama Wahabi, Abdul Aziz membentuk pasukan militer berbasis Wahabi, Al-Ikhwan, untuk melakukan penaklukan-penaklukan wilayah.

Ketika Perang Dunia I, Dinasti Saud menandatangani Perjanjian Darina<sup>26</sup> yang berisi kerja sama dengan Kerajaan Inggris

---

<sup>25</sup> David Commins, *The Wahabi Mission and Saudi Arabia*, (London and New York: I.B. Tauris, 2006).

<sup>26</sup> Perjanjian Darina berisi tentang kesepakatan antara keluarga Saud dan Pemerintah Inggris untuk mendukung posisi keluarga Saud dan menjamin kedaulatan Qatar, Kuwait, dan *Trucial States* (sekarang UEA). Abdul Aziz menjamin untuk tidak menyerang wilayah protektorat Inggris, tetapi Abdul Aziz tidak menjamin jika dia tidak akan menyerang kekuasaan Syarif Hussain di Hijaz. Sebagai gantinya, Abdul Aziz bersedia menjadi sekutu Inggris dalam perang melawan Turki Utsmani.

untuk melawan kekuasaan Rashidi. Inggris diuntungkan karena mereka berkepentingan untuk memecah kekuatan Turki Utsmani di Jazirah Arab, sedangkan kekuasaan keluarga Saud akan dilindungi oleh Inggris. Dengan bantuan Al-Ikhwan, keluarga Saud berhasil menguasai Najd pada tahun 1921 dan mengambil alih kekuasaan Hijaz dari Syarif Hussain pada tahun 1926. Mulai saat itu, Abdul Aziz memproklamasikan diri menjadi raja dan memerintah dua kerajaan yang terpisah Hijaz dan Najd. Pada tahun 1927, Abdul Aziz dan Inggris menandatangani Perjanjian Jeddah sebagai perjanjian baru yang menggugurkan Perjanjian Darina. Perjanjian Jeddah merupakan bentuk dukungan politis dan pengakuan kedaulatan dari Inggris bahwa keluarga Saud menjadi penguasa dua wilayah tersebut. Setelah tahun 1932, Abdul Aziz menyatukan kedua kerajaan itu menjadi entitas tunggal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Bani Saud mendapatkan kekuasaan penuh sebagai penguasa Najd dan Hijaz, kolaborasi antara keluarga raja dan ulama Wahabi terus berlanjut hingga kini. Aliansi Bani Saud dan Wahabi telah sintas dari berbagai invasi, perang sipil, dan perebutan kekuasaan oleh suku-suku lain di daratan Arabia selama hampir 200 tahun. Oleh karena itu, hubungan ketergantungan dan menguntungkan antara keduanya tidak bisa dinafikan. Perkembangan Wahabi terus menguat menjadi satu-satunya ajaran yang diterima oleh negara. Meskipun pada kenyataannya Syiah juga masih tetap ada di negara tersebut, pengaruh Wahabi di Arab Saudi sangat dominan dalam relasi internal maupun eksternal. Ambisi Saudi-Wahabi untuk menyebarkan ajarannya di kawasan dan seluruh dunia menempati posisi prestisius, terutama dalam aksi filantropi yang didukung oleh Kerajaan Saudi. Dalam posisi inilah Saudi menjadi pemimpin negara-negara Arab dan menjadi garda depan yang membentengi politik luar negeri Iran di kawasan.

## D. Wahabi dan Tantangan Gerakan Islam yang Lain

Relasi yang monolitik antara kekuasaan Bani Saud dan Wahabi menyebabkan kehadiran gerakan-gerakan Islam nyaris tidak mendapatkan tempat. Penerapan yang absolut dari ajaran Wahabi membuat pemerintah sangat selektif terhadap masuknya aliran-aliran Islam ke Saudi. Pada titik ini, Saudi lebih ekstrem dengan melarang semua bentuk organisasi dan institusi independen di negara tersebut. Segala bentuk aktivitas keislaman dimonopoli oleh negara melalui peranan ulama-ulama Wahabi. Ada dua keuntungan yang terbentuk dari relasi ini, yaitu monopoli ini mengurangi kelompok oposisi yang menentang kekuasaan Bani Saud; dan di sisi lain, ulama Wahabi menikmati keistimewaan sebagai otoritas keagamaan yang tunggal di Saudi.

Relasi yang terbentuk secara formal antara pemerintah Saudi dan ulama diwujudkan melalui pelembagaan ulama dalam *Hai'ah Kibar Al-Ulama Lil-Buhuts wal-Ifia'* (Lembaga Ulama Senior untuk Riset dan Fatwa). Lembaga ini merupakan lembaga fatwa resmi Saudi yang disempurnakan oleh Raja Fadh menyusul wafatnya Mufti Saudi Abdul Aziz bin Baz (sering disebut sebagai Bin Baz) pada tahun 1999. Kekosongan ini sempat membuat Raja Fadh ragu karena tidak ada regenerasi yang cukup baik dengan kehadiran ulama pengganti setelah Bin Baz. Pengangkatan ulama *Sahwa* pernah ada dalam pemikiran Raja Fadh. Namun, karena curiga terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), dia mengurungkan niatnya. Dia mengangkat Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh sebagai mufti dan juga mengepalai lembaga fatwa ulama senior ini pada tahun 1999 untuk menggantikan Bin Baz.

Lembaga ulama semacam ini sebenarnya bukanlah tradisi baru di Arab Saudi. Pada tahun-tahun sebelumnya, lembaga ini secara informal terbentuk dan bekerja di bawah pimpinan mufti yang diangkat oleh raja. Hingga tahun 2009 keanggotaan lembaga ulama ini hanya diisi oleh ulama dari mazhab Hanbali. Perubahan terjadi

sejak masa kepemimpinan Raja Abdullah yang menyertakan ulama dari tiga mazhab lainnya, yaitu Maliki, Hanafi, dan Syafi'i dengan melengkapinya menjadi 21 anggota ulama.

Fungsi lembaga ulama ini sangat sentral dalam pemerintahan Saudi. Mereka secara resmi digaji oleh pemerintah. Mereka memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah keagamaan. Lembaga ini merupakan otoritas tunggal yang berwenang untuk membuat fatwa bagi permasalahan individu, atau permasalahan publik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah (sosial). Namun, di luar otoritas itu, lembaga ulama senior ini sangat mewarnai politik dalam dan luar negeri Saudi yang sangat anti-Syiah dan Iran yang menganut *Itsna Asyariyah*.

## 1. Geliat Syiah di Tengah Lautan Wahabi

Pertentangan pertama antara ulama-ulama Wahabi dan kelompok Syiah terjadi di Karbala, di sebelah selatan Irak, pada tahun 1802. Kelompok Wahabi melakukan pembunuhan terhadap ribuan penganut Syiah. Peristiwa ini menjadi ingatan sejarah yang tidak dapat dilupakan dan menjadi akar konflik teologis antara Wahabi dan Syiah. Pada kondisi politik kontemporer, akar ketegangan yang terjadi di kawasan antara Arab Saudi dan Iran tidak terlepas dari sejarah yang berdarah ini.<sup>27</sup>

Saat terjadi ledakan harga minyak yang membuat ekonomi Saudi mengalami surplus, pembangunan besar-besaran terjadi di Saudi. Namun, kesenjangan ekonomi antara penduduk Sunni dan Syiah di Saudi semakin melebar. Pembangunan rumah sakit, sekolah, penampungan air, jalan, dan infrastruktur lain berjalan besar-besaran hanya di wilayah Sunni. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial dan ekonomi yang memicu gelombang demonstrasi yang akhirnya mencuri perhatian Riyadh.

---

<sup>27</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 3.

Kelompok oposisi Syiah terbesar di Saudi sebenarnya merujuk pada ulama yang sangat berpengaruh dari Irak, Muhammad Mahdi Al-Shirazi. Kelompok ini di Saudi dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Saffar yang menuntut ilmu di Irak dan Iran, dan bertemu Shirazi di Kuwait pada tahun 1974. Setelah pertemuan itu, Hasan bersemangat menghimpun anggota, terutama dari kalangan pemuda hingga akhirnya mendirikan Organization of Islamic Revolution (OIR) pada tahun 1979. Momentum revolusi Iran membuat organisasi ini semakin aktif melakukan kritik dan menggelar demonstrasi di wilayah timur Saudi. Di akhir ketegangan ini, banyak anggotanya dipenjarakan dan ditangkap oleh aparat Saudi.<sup>28</sup>

Pada tahun-tahun berikutnya, OIR menjadi organisasi nomađen yang menyetir kegiatannya dari Iran, Suriah, dan Inggris. Organisasi ini sangat aktif untuk mengkampanyekan korupsi di kalangan keluarga kerajaan. Saudi sendiri menganggap kegiatan OIR yang sangat aktif sebagai bagian dari politik luar negeri Iran untuk mendiskreditkan Saudi di kawasan. Saudi memecah kelompok OIR dengan membuat kebijakan yang lebih akomodatif. Pemimpin OIR, Hasan al-Saffar, diundang ke rumah pribadi Bin Baz. Hal ini membuat OIR lebih moderat dan berganti nama menjadi *Reform Movement*.<sup>29</sup>

Akhir-akhir ini, friksi antara Wahabi dan Syiah kembali menghangat. Penyerangan Saudi terhadap kelompok Syiah Houti di selatan Yaman membuat friksi di dalam negeri Saudi memanas. Stigma pemerintahan Wahabi yang anti-Syiah semakin menguat. Ulama Syiah yang baru, Syekh Nimr Al-Nimr dari Provinsi Syarqiyyah, sangat kritis kepada pemerintahan Saudi. Dia mengusulkan adanya pemilu terbuka dan pernah mengusulkan Provinsi Syarqiyyah memisahkan diri jika hak-hak kaum Syiah tidak dipenuhi. Perlawanan keras Nimr membuat Pemerintah Saudi melakukan penangkapan. Demonstrasi besar-besaran terjadi sepanjang tahun 2011 hingga

---

<sup>28</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 141.

<sup>29</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 105.

tahun 2016. Hukuman mati terhadap Syekh Nimr, 4 ulama Syiah, dan 43 orang pengikut Sunni pada tahun 2016 tidak menyurutkan kelompok Syiah untuk menghentikan protes. Kelompok militan Syiah mulai mengebom kantor intelijen Saudi di Qatif.<sup>30</sup>

Hal ini membuka babak baru konflik dalam negeri antara Wahabi dan Syiah. Gerakan protes terjadi besar-besaran dan pembunuhan terhadap polisi Saudi dilakukan oleh milisi Syiah daerah Awwamiyah sebelah timur Qatif sebagai bentuk perlawanan. Aksi ini ternyata berbuntut panjang karena Saudi menganggap mereka sebagai kelompok teroris hingga akhirnya Saudi membombardir wilayah itu pada bulan Mei 2017. Setidaknya, 23 rakyat sipil meninggal dan 20.000 orang menjadi pengungsi ke wilayah lain yang lebih aman.<sup>31</sup>

## 2. Ikhwanul Muslimin

Pembunuhan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin (IM), Hasan Al-Banna, oleh polisi Mesir pada tahun 1949 mengawali perlawanan yang keras dari gerakan tersebut kepada pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Pemerintah Mesir pada tahun 1950-an hingga 1960-an mulai melakukan pembersihan dan melarang gerakan IM dengan menangkap dan menyiksa para pengikut dan pemimpinnya. Pengerasan sikap IM semakin mengental dengan ideologi yang dilahirkan oleh Sayyid Qutb yang mengarang buku dan membuat tafsir *Fii Dhilal Al-Qur'an*. Dalam kondisi Mesir yang tidak kondusif ini banyak di antara aktivis IM menjadi diaspora dan mengungsi ke berbagai negara, termasuk Arab Saudi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> "Inside the Saudi town that's been under siege for three months by its own government", *Independent*, (Agustus 2017), <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>.

<sup>31</sup> Mohammed Al-Sulami, "Three men Wanted by Saudi Security Forces Killed in Qatif, Saudi Security Forces," 2017, <http://www.arabnews.com/tags/saudi-security-forces>.

<sup>32</sup> Stephane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, penerj. George Holoch, (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 39.

Perkenalan Arab Saudi dengan gerakan IM sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelumnya. Ketika kondisi lingkungan sosial dan politik dunia Arab yang berada dalam pengaruh dan kolonialisme bangsa Eropa, IM menawarkan formula atas bangsa Arab bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan dominasi politik, ekonomi, dan budaya dari penjajah Eropa atas bangsa Arab adalah mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan diejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Formula yang diprakarsai oleh Hasan Al-Banna sangat berkesan bagi bangsa Arab. Kantor-kantor cabang IM berdiri di luar Mesir dan menjadi ideologi yang sangat cepat menyebar ke Sudan, Suriah, Yordania, dan Yaman pada tahun 1950-an, tetapi lambat di Arab Saudi.<sup>33</sup>

Hal ini terjadi karena Arab Saudi merupakan satu-satunya negara yang menolak berdirinya organisasi Islam independen apapun di negaranya, termasuk Ikhwanul Muslimin. Sebelum sepeninggalnya, Hasan Al-Banna dalam beberapa kali kunjungan haji secara langsung menemui Raja Abdul Aziz pada tahun 1946 untuk meminta izin pembukaan kantor resmi IM di wilayahnya.<sup>34</sup> Menilik sejarah panjang relasi Saudi dengan ulama Wahabi, permintaan ini sebenarnya sangat mustahil. Saudi telah terbiasa memonopoli otoritas keagamaan dengan dukungan penuh para ulama Wahabi. Kehadiran organisasi baru di luar kontrolnya tentu sangat mengganggu. Indikasi ini jelas terlihat dari penolakan Abdul Aziz yang menegaskan bahwa ketika Islam telah menjadi napas bagi rakyat Saudi, kehadiran organisasi apa pun tidak diperlukan lagi.

Penolakan yang berlanjut oleh negara-negara nasionalis Arab, seperti Mesir dan Suriah terhadap aktivisme IM, membuat pengungsi IM semakin banyak di Arab Saudi. Peluang relasi yang saling menguntungkan terbentuk melalui Raja Faisal ketika Saudi menyadari bahwa mayoritas pengungsi IM merupakan kalangan intelektual dan terdidik yang dibutuhkan SDM-nya bagi pengembangan sektor

---

<sup>33</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 38.

<sup>34</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 40–41, 62.

pendidikan Arab Saudi yang masih tradisional. Mereka dilibatkan dalam peletakan fondasi kurikulum dan sistem pendidikan Saudi. Sebagian dari mereka memiliki andil dalam pendirian sekolah-sekolah dan menjadi guru bagi anak-anak Saudi. Yang paling nyata adalah keterlibatan Manna' Al-Qattan, anggota IM dari Mesir yang memiliki posisi penting di Kementerian Pendidikan Saudi. Dia merancang kebijakan pendidikan dan kurikulum Saudi yang sebagian besar masih diterapkan hingga saat ini.<sup>35</sup>

Ketika Arab Saudi mulai mengembangkan pendidikan tinggi, gelombang kedua kedatangan intelektual IM terjadi. Sebagai contoh, kedatangan Muhammad Qutb adik Sayyid Qutb dosen di Institute of Sharia, untuk memodernisasi pendidikan Islam yang belakangan menjadi Universitas Ummul Quro memberikan dampak yang signifikan bagi pertemuan ajaran Wahabi dan IM. Dalam karangan-karangannya, Muhammad Qutb menegaskan tidak ada pertentangan Wahabi dan IM. Ketika Wahabi menekankan aspek teologis yang sepenuhnya diterima, IM memberikan warna dalam aktivisme sosial dan politik. Karangan Muhammad Qutb ini memberi inspirasi bagi berdirinya gerakan *As-Sahwa Al-Islamiyah* (Kebangkitan Islam) di Arab Saudi.<sup>36</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, ketika Universitas Islam Madinah didirikan oleh Pemerintah Saudi pada tahun 1961 sebagian besar staf dan pengajarnya merupakan pengikut IM. Masuknya IM dalam sendi-sendi pendidikan memperkuat pengaruh IM kepada generasi muda terpelajar di Saudi. Keterbukaan Universitas Islam Madinah terhadap mahasiswa-mahasiswa dari luar juga memberikan peluang terhadap penyebaran ajaran IM dalam skala internasional. Beberapa organisasi Islam yang didukung penuh oleh Saudi juga menjadi saluran yang dikuasai oleh para aktivis IM. Berdirinya Liga Muslim Dunia pada tahun 1962 menjadi program Saudi bagi penyebaran Islam dan memperkuat keberadaan institusi pendidikan Islam

---

<sup>35</sup> Lihat Panduan *Educational Policy in the Kingdom of Saudi Arabia*. Lacroix, *Awakening Islam*, 46.

<sup>36</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 43.

di seluruh dunia. Sepuluh tahun berikutnya berdiri Majelis Pemuda Muslim Dunia yang merupakan saluran bagi aktivis IM di Saudi dalam memperluas pengaruh dan jaringan di kalangan kaum muda di seluruh dunia dan diaspora muslim di Eropa dan Amerika.<sup>37</sup>

Kedekatan IM secara politis dengan Kerajaan Arab Saudi terutama terjadi pada masa pemerintahan Raja Faisal ketika Perang Dingin menjadi isu utama dalam lingkungan politik internasional. Dalam hal ini, Raja Faisal tidak menganggap IM sebagai ancaman. Dia memanfaatkan potensi IM untuk mengampanyekan gerakan menentang sosialisme, komunisme, dan pemerintahan sekuler (Nasser/Mesir) untuk menggalang solidaritas dunia Islam demi kepentingan politik luar negeri Arab Saudi. IM menjadi mesin propaganda Raja Faisal yang efektif melalui koran, majalah, dan radio.<sup>38</sup>

Meskipun menguasai banyak sektor strategis, terutama di bidang pendidikan dan organisasi, IM tidak bisa memasuki lembaga tradisional ulama Arab Saudi yang dikuasai oleh ulama-ulama Wahabi, seperti Peradilan Syariat dan Majelis Ulama Senior Arab Saudi. Namun, di sisi lain gerakan IM bersinggungan langsung di wilayah dominasi Wahabi, dengan menyebarkan buku, buklet, dan selebaran tentang pemikiran IM di sekitar Masjidilharam.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Salah satu hasil sebaran pemikiran IM melalui saluran Arab Saudi adalah Ust. Hilmy Aminudin, pendiri gerakan Tarbiyah yang bergerak di bawah tanah pada masa rezim Soeharto; dia juga merupakan petinggi PKS. Selain itu, Ust. Hidayat Nur Wahid yang merupakan lulusan almamater yang sama dengan Hilmy, Universitas Islam Madinah; dia pernah menjadi Ketua MPR dari PKS. Berikutnya, Ust. Yusuf Supendi yang juga generasi awal pendiri gerakan Tarbiyah merupakan lulusan Universitas Ibnu Saud, Riyadh. Pada generasi pertama pendirian LIPIA di Jakarta, kebanyakan para dosen di sana memiliki pemikiran yang berafiliasi ke IM, termasuk Dr. Salim Segaf Aljufri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lulusan LIPIA, seperti Anis Matta, Aunurrofiq, Jazuli Juwaini, Muhammad Syamlan, dan Bakrun Syafii merupakan murid Dr. Salim yang menjadi tokoh gerakan Tarbiyah di Indonesia. Lihat M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKIS, 2008) hlm. 31, 110.

<sup>38</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 40–42.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Syekh Ismail Harbi, wakil direktur Yayasan Haramain, 30 Maret 2017.

Sebenarnya, Kerajaan Arab Saudi diuntungkan dengan kondisi ini. Di satu sisi, kerajaan mendapatkan dukungan politis dari ulama-ulama Wahabi. Di sisi lain, Saudi diuntungkan dengan SDM IM untuk membangun pendidikan dan kelembagaan Saudi.

IM secara institusional merupakan organisasi yang dilarang berdiri di Saudi sehingga IM berkembang di Saudi secara informal. Seperti halnya yang terjadi di Mesir dan Aljazair, IM di Saudi berkembang melalui klub-klub perkumpulan pemuda, seperti hobi, olahraga, ruangan kelas, perkemahan pelajar, aksi solidaritas, dan perkumpulan penghafal Al-Qur'an. Mereka terhubung dengan jaringan informal yang bernama *Jama'at*. Melalui metode ini, IM cukup mengakar di masyarakat Saudi pada tahun 1970-an.

Pada perkembangannya, percampuran Wahabi dan IM ini menuai perpecahan. Di antara pengikut IM yang memiliki kecenderungan seperti ulama Suriah, Syekh Muhammad Surur, mereka memiliki keengganan untuk menentang, berkonfrontasi, dan mengkritik pemerintah, seperti halnya tipikal Wahabisme. Kelompok ini terkenal dengan sebutan Sururi. Sementara itu, kelompok lain, terutama generasi muda IM Saudi yang telah mengenyam pendidikan di Barat dan bersentuhan dengan iklim politik yang demokratis dan penuh keterbukaan, cenderung tergabung dalam *As-Sahwa al-Islamiyah* atau sering disebut *Sahwa*.

Gerakan *As-Sahwa Al-Islamiyah* yang dipimpin oleh Safar Al-Hawali dan Salman Al-Awdah ini merupakan penggabungan antara Wahabi dan IM. Berbeda dengan IM dari negara asalnya, gerakan ini masih mengadopsi sufisme, tetapi sama-sama memiliki tendensi politik yang kuat. *Sahwa* pernah melakukan protes keras terhadap Pemerintah Saudi yang meminta bantuan pada negara nonmuslim ketika Perang Irak-Kuwait. Saat itu, sekitar 500.000 pasukan internasional, terutama dari Amerika, memasuki wilayah Saudi. Belum lagi kasus adanya tentara perempuan Amerika melakukan aktivitas yang dilarang, yaitu mengemudi mobil tempur di kota-kota Saudi, sehingga sekitar 50 perempuan Saudi melakukan protes dengan mengendarai mobil di sekitar Kota Riyadh. Kejadian

ini mengundang gerakan *Sahwa* untuk mulai berani mengkritik pemerintah untuk melayangkan Surat Permintaan pada tahun 1991 agar Pemerintah Saudi kembali kepada pijakan Islam yang benar.<sup>40</sup>

Gerakan protes *Sahwa* mengundang kecaman dari Raja Fahd dan para ulama Wahabi dengan memvonis ulama dan pengikut *Sahwa* yang telah melenceng. Hal ini memicu perlawanan yang lebih berani. Akibatnya, banyak aktivis *Sahwa* yang dibekuk oleh aparat. Kejadian ini memicu aktivis *Sahwa* untuk membentuk Committee for the Defence of Legitimate Rights (CDLR)/Lajnah Ad-Difa 'an Al-Huquq Asy-Syar'iyah; لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية/Komite Pertahanan Hak-Hak Sah. Mereka menyebarkan rekaman kaset berisi petisi dan kritik terhadap pemerintahan Saudi. Dengan demikian, tindakan keras dari Pemerintah Saudi tidak terelakkan. Aktivis *Sahwa* ditangkap, disiksa, dan dipenjara termasuk pemimpin mereka, Syekh Safar Al-Hawali dan Syekh Salman Al-Awdah.

Syekh Muhammad Al-Mas'ari dan Sa'ad Al-Faqih memindahkan kepemimpinan gerakan CDLR ke Inggris. Dari luar negeri, mereka terus menyuarakan protes atas kebijakan Raja Fahd. Untuk meredam efeknya di dalam negeri, Raja Fahd mengutus dua ulama ahli hadis dari Universitas Islam Madinah untuk meredam suasana dan mengerahkan ulama-ulama Wahabi guna memperkecil dampak aksi *Sahwa* dalam setiap ceramah mereka. Kejadian ini menginspirasi Dekrit Raja pada tahun 1993 untuk membentuk Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan yang melakukan kontrol ceramah dan otoritas ulama-ulama Saudi agar loyal pada keluarga kerajaan dan mengganti ulama-ulama *Sahwa* di semua posisi mereka.<sup>41</sup> Raja Fahd melakukan pembersihan syekh yang diduga berafiliasi dengan IM dengan mengusir Syekh Muhammad Qutb dari Universitas Ummul Quro. Bahkan, Menteri Dalam Negeri

---

<sup>40</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 144–145; 179–180.

<sup>41</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 145–147.

Saudi, Pangeran Nayef secara terbuka menuduh IM sebagai sumber dari semua petaka di Kerajaan Arab Saudi.<sup>42</sup>

Hubungan pemerintah dengan *Sahwa* berangsur membaik ketika Mufti Saudi Abdul Aziz bin Baz meninggal pada tahun 1999. Kekosongan profil ulama yang mumpuni membuat Raja Fahd ingin menjadikan ulama-ulama *Sahwa* sebagai penopang Kerajaan Saudi dengan syarat mereka berkomitmen untuk tidak menentang dan mengkritik pemerintahan Saudi. Saudi juga ingin mendapatkan legitimasi dari ulama *Sahwa* untuk menentang Al-Qaeda yang banyak digandrungi pemuda Saudi. Namun, relasi ini berubah di bawah kepemimpinan Raja Abdullah. Beriringan dengan bangkitnya isu *Arab Spring*, para ulama *Sahwa* kembali mengajukan petisi kepada Kerajaan Saudi. Mereka mengajukan proporsi yang adil antara hak negara dan berorganisasi yang ditandatangani sepuluh ulama *Sahwa*, termasuk Salman al-Awdah.<sup>43</sup>

Melihat geliat pergantian rezim di Mesir, *Sahwa* juga menuntut reformasi pemerintahan dan mengajukan surat terbuka kepada rezim. Namun, para ulama *Sahwa* menentang rencana demonstrasi besar-besaran 11 Maret 2011 di Riyadh yang gagal terlaksana. Kebangkitan *Sahwa* menghangatkan kembali ingatan rezim yang menganggap *Sahwa* sebagai ancaman. Dukungan Pemerintah Saudi terhadap kudeta Jenderal As-Sisi menuai kritikan dari dalam negeri, terutama dari para ulama *Sahwa*. Pada 8 Agustus 2013, sebanyak 56 ulama turut menentang kebijakan Saudi. Politik dalam negeri Saudi juga menjadi memanas. Berbagai narasi disampaikan, di antaranya, larangan untuk turut mendukung penghancuran terhadap sesama pemerintahan muslim, dan juga larangan untuk menentang pemerintahan muslim yang dipilih oleh rakyatnya.<sup>44</sup> Hal ini sebenarnya

---

<sup>42</sup> Lacroix, "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament," *The Washington Post*, (Maret 2014), [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabia-muslim-brotherhood-predicament/?utm\\_term=.f3b04fe78fc2](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabia-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fc2).

<sup>43</sup> Lacroix, "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament."

<sup>44</sup> Lacroix, "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament."

mengingatkan penentangan kelompok Al-Qaeda terhadap upaya rezim Saud dalam menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein.

Kewaspadaan terhadap IM menguat pada pemerintahan Raja Salman. Pada 4 Februari 2017, Salman mengeluarkan dekrit yang berisi: *pertama*, menyatakan organisasi IM yang berbasis di Mesir sebagai organisasi teroris; *kedua*, melarang segala bentuk ekspresi dukungan terhadap IM; *ketiga*, hal ini juga berlaku kepada semua organisasi yang berafiliasi terhadap IM, termasuk *Sahwa* dan juga Sururi.<sup>45</sup> Dekrit ini menjadikan IM sebagai organisasi terlarang di negara tersebut dan memberi wewenang kepada penguasa untuk memberangus setiap gerakan IM yang muncul di negara tersebut.

### 3. Gerakan Salafi

Gerakan yang lebih keras di Arab Saudi dipicu dengan munculnya Salafi yang terinspirasi dari pemikiran ahli hadis, Syekh Nashirudin Al-Bani. Syekh Al-Bani memiliki pemikiran yang lebih tegas tentang Al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, Wahabi sudah berada pada jalan yang benar tentang konsep teologisnya, kurang tepat jika ia merujuk pada mazhab Hanbali. Menurut Syekh Al-Bani, fikih merupakan ilmu yang datang belakangan, bukan tradisi yang memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Seharusnya, umat Islam hanya merujuk secara murni kepada Al-Qur'an dan hadis.<sup>46</sup>

Konsep dari Al-Bani menginspirasi berdirinya gerakan baru Salafi untuk melakukan *sweeping* dan perusakan pada tahun 1965 terhadap toko yang menampilkan gambar wanita di Kota Madinah. Mereka pada perkembangan berikutnya meminta dukungan dari ulama Wahabi Syekh Bin Baz agar memperkuat posisi dan keberadaan mereka. Bin Baz memberikan wewenang kepada pemimpin mereka untuk menjadi pengawas syariat di masyarakat. Dengan legitimasi yang didapatkan, kelompok Salafi semakin kuat dan menjadi gerakan yang militan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*.

<sup>46</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 138–141.

<sup>47</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 138–141.

Kepercayaan diri kelompok Salafi yang dipimpin Juhaiman al-Utaibi menguat seiring pengultusan dirinya sebagai Imam Mahdi. Mereka mulai berani mengkritik keluarga Kerajaan Saudi yang hidup berfoya-foya, terlibat dalam beberapa skandal moral, dan tidak mengamalkan hukum Islam. Mereka juga mengkritik praktik pemerintahan yang memperbolehkan riba. Pertentangan antara kelompok Salafi dan Pemerintah Saudi tidak bisa ditengahi oleh Bin Baz. Akhirnya, dengan persenjataan lengkap mereka melakukan kudeta dengan menduduki Masjidilharam pada 20 November 1979. Pemerintah Saudi akhirnya menumpas kudeta kelompok Salafi dengan tank-tank yang merangsek ke dalam Masjidilharam.<sup>48</sup>

#### 4. Al-Qaeda Arabian Peninsula (QAP)

Al-Qaeda ditegakkan oleh tiga tokoh utama, yaitu Abadullah al-Azzam, Osama bin Laden, dan Ayman al-Zawahiri yang memiliki latar belakang gerakan IM. Sosok yang paling berpengaruh sebagai ideolog dan *the father of jihad* bagi Al-Qaeda adalah Abdullah Al-Azzam, seorang doktor Universitas Al-Azhar, Mesir, berkebangsaan Palestina. Sejak kecil, dia hidup di lingkungan pengikut IM di Asy-Syawahinah, Kota Jenin, Palestina, dan termasuk generasi awal Hamas. Dia datang ke Arab Saudi berbarengan dengan mayoritas anggota IM yang mulai menguasai sektor pendidikan. Pada sekitar tahun 1970-an, Azzam menjadi dosen di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah dan bertemu dengan seorang mahasiswa anak pengusaha konstruksi yang kaya raya, Osama bin Laden. Pertemuan mereka menjadi sangat sentral di mana dari situlah Al-Qaeda terbentuk.

Meskipun aktivitas mereka banyak dilakukan di Afghanistan dan Pakistan, keluarga Bin Laden di Saudi merupakan penyanggah dana terbesar bagi aktivisme Al-Qaeda. Setelah peristiwa 9/11, Al-Qaeda mulai menyebarkan sayap gerakannya ke berbagai belahan dunia. Sebenarnya, sebelum itu pada tahun 1995 Al-Qaeda juga pernah melakukan serangkaian serangan bom truk di kamp latihan

---

<sup>48</sup> Yaroslav Trofimov, *Kudeta Mekkah: Sejarah yang tak Terkuak* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2007).

tentara Amerika di Saudi. Al-Qaeda Arabian Peninsula (QAP) tidak memusuhi Pemerintah Saudi, tetapi menentang keberadaan Amerika di negara Saudi. Namun, ketika Perang Teluk terjadi, Osama mulai mengkritik kebijakan Saudi yang sangat pro-Amerika.

Pengerahan pasukan Amerika secara besar-besaran di Saudi dianggap sesuatu yang berlebihan. Setidaknya ada beberapa alasan penolakan QAP terhadap kebijakan Saudi. *Pertama*, kehadiran pasukan nonmuslim Amerika secara berlebihan dianggap menodai kesucian tanah Saudi yang terdapat dua kota suci di dalamnya. *Kedua*, Saudi tidak layak menyediakan tanah bagi pasukan nonmuslim yang akan menghancurkan kepemimpinan negara Islam yang berdaulat seberapa pun kesalahannya. *Ketiga*, rencana untuk menyediakan tempat bagi rencana Amerika yang membangun pangkalan militer di tanah Saudi menyakiti hati umat Islam. Dia beranggapan, hal itu merupakan bagian dari rencana Amerika untuk menguasai Jazirah Arab.<sup>49</sup>

Osama beranggapan bahwa penguasaan terhadap Jazirah Arab memiliki arti yang berbeda dengan daerah lain. Selain sebagai simbol kesucian karena terdapat dua kota suci umat Islam, Jazirah Arab merupakan tanah utama tempat dua kiblat pertama umat Islam, Al-Aqsa di Yerusalem dan Palestina serta Makkah, Arab Saudi yang merupakan simbol pemersatu umat Islam. Pendudukan terhadap Makkah merupakan titik akhir kehilangan terbesar umat Islam setelah Al-Aqsa dikuasai oleh Israel. Target Al-Qaeda untuk memerangi kehadiran pasukan Amerika di tanah Saudi merupakan satu-kesatuan dengan upayanya untuk menurunkan Dinasti Saud di Jazirah Arab.<sup>50</sup>

Selain kepada kekuasaan Bani Saud, Osama juga melayangkan kritik kepada Wahabi yang muftinya, Bin Baz, mengeluarkan fatwa memperbolehkan rencana pembuatan pangkalan militer

---

<sup>49</sup> Thomas Hegghammer, *Jihad*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 103–105.

<sup>50</sup> Hegghammer, *Jihad*, 105–107.

Amerika di Tanah Suci. Dia juga memberikan kritik pedas tentang fatwa Bin Baz yang mendukung perundingan damai negara-negara Arab dengan Israel. Bagi Osama, sikap Wahabi ini tidak lebih dari pelayan fatwa terhadap sang majikan, keluarga Saud. Hal ini yang membuat Osama dan Al-Qaeda mendeklarasikan perang terhadap pendudukan Amerika di dua Kota Suci.<sup>51</sup>

Persengketaan Pemerintah Saudi dengan Al-Qaeda semakin mengeras ketika kerajaan tersebut melakukan penangkapan secara besar-besaran sekitar 800–900 orang di sekitar Makkah yang berkaitan dengan jaringan Al-Qaeda dan diduga akan melakukan penyerangan terhadap Saudi. Pada tahun 1999, dua tahun sebelum penyerangan 9/11, pihak intelijen Saudi sudah memberikan peringatan kepada Amerika akan rencana penyerangan dari Al-Qaeda. Menghadapi kegentingan ini, Pangeran Turki Al-Faisal juga pernah mengunjungi Khandahar, Afghanistan, untuk melobi Mulla Omar agar mau melakukan ekstradisi terhadap Osama bin Laden.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengakuan Khaled Shaikh Muhammad, pemimpin senior Al-Qaeda, dari seluruh pelatihan militer Al-Qaeda terhadap orang-orang Arab di Afghanistan, hampir 70% di antaranya adalah orang Saudi. Namun, untuk menuju jumlah ini tidaklah mudah. Awalnya, keanggotaan milisi Al-Qaeda kebanyakan hanya dari warga negara Mesir dan negara-negara Afrika utara lainnya, terutama Aljazair. Pada tahun 1996, upaya pertama Al-Qaeda untuk merekrut warga Saudi berujung gagal, diduga karena status sosial warga Saudi sangat tinggi. Osama mengutus warga keturunan Afghanistan, Abu Zubayda, yang secara keturunan kurang meyakinkan bagi Saudi. Rekrutmen itu berhasil mencapai puncaknya pada tahun 2001 ketika Osama mengutus anggota senior Al-Qaeda, Nashir Bahri, warga negara Saudi.<sup>53</sup>

QAP di Jazirah Arab dipimpin oleh Yusuf Al-Uyayri, orang kepercayaan dan *bodyguard* Osama bin Laden ketika dia di Sudan.

---

<sup>51</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 187–188.

<sup>52</sup> Hegghammer, *Jihad*, 114–115.

<sup>53</sup> Hegghammer, *Jihad*, 117–118.

Dia bergabung dengan Al-Qaeda sejak tahun 2000. Sebelumnya, dia lebih dekat dengan jaringan Bosnia, Kosovo, dan Chechnya meskipun dia mengikuti pelatihan militer kali pertama di Kamp Faruq, Afghanistan, saat berumur 18 tahun. Dia pernah dipenjarakan dalam kasus salah tangkap ketika pengeboman yang dilakukan oleh kelompok Syiah di provinsi timur dan aktif melakukan pelatihan militer terhadap calon kombatan di wilayah Dammam. Di antara muridnya yang menjadi orang penting Al-Qaeda adalah Khaled Hajj dan Abdul Aziz Al-Muqrin.<sup>54</sup>

Yusuf Al-Uyayri merupakan kunci keberhasilan QAP di Saudi. Perannya tidak tersiar luas secara internasional, tetapi sangat fundamental dalam merekrut SDM dan menjaring pendanaan untuk Al-Qaeda. Secara sosial, sosoknya disegani karena dia memiliki hubungan dekat dengan ulama-ulama konservatif di Al-Burayda. Selain itu, dia memiliki hubungan khusus dengan ulama *Sahwa* Syekh Salman Al-Awda dan menikah dengan salah satu putri ulama senior yang disegani dari Bani Al-Saq'abi, Syekh Sulayman Al-Ulwan.<sup>55</sup>

Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu sangat sederhana. Dia memanfaatkan teknologi yang saat itu sedang *booming* dan digandrungi oleh kaum muda seperti internet. Tim rekrutmen Yusuf sangat aktif menggunakan media ini untuk melakukan komunikasi dan koordinasi internal serta sebagai alat propaganda eksternal. Selain itu, Yusuf menggunakan video dan kamera digital yang lebih murah, mudah, dan meyakinkan dalam merekrut generasi muda.<sup>56</sup>

Melalui internet, Yusuf memaksimalkan fungsi lembaga Centre for Islamic Studies and Research (CISR, Markaz Al-Buhuts wa Al-Dirasaat Al-Islamiyyah) yang didirikannya. CISR merupakan lembaga propaganda yang memproduksi materi virtual untuk

---

<sup>54</sup> Roel Meijer, "Yusuf al-Uyairi and the Making of Revolutionary Salafy Praxis", *Die Welt des Islams*, 47 (2007).

<sup>55</sup> Hegghammer, *Jihad*, 121.

<sup>56</sup> Hegghammer, *Jihad*, 123–124.

kepentingan Al-Qaeda yang ditulis oleh Yusuf sendiri. Materi-materi yang ditulis oleh Yusuf menyoroti kewaspadaan kalangan muda tentang jihad global. Yusuf merupakan generasi jihadis yang mampu membuat tulisan yang berpengaruh meskipun tidak lulus SMA. Ada tiga tulisan Yusuf yang sangat fenomenal, yaitu *The Truth of the New Crusade*, *Crusade on Iraq Series*, dan *The Future of Iraq and the Arabian Peninsula after the Fall of Baghdad*. Selain itu, dia juga menulis tentang banyak hal, seperti *Iraqi Jihad: Hopes and Dangers* yang terinspirasi dari bom Madrid dan *Camp of Sabra* tentang strategi dan pelatihan militer. Beberapa film juga diproduksi oleh Yusuf, seperti *Martyrs of the Confrontation*, *Badr of Riyadh*, dan *The Quds Squadron*.<sup>57</sup>

Salah satu situs yang mendapatkan respons cepat di kalangan muda adalah [www.alneda.com](http://www.alneda.com) (*an-Nida*/panggilan). Situs ini memuat segala aktivitas para mujahidin di seluruh dunia, terutama di Afghanistan, buku, artikel, dan fatwa yang menjadi rujukan utama dari Al-Qaeda. An-Nida memiliki akses kepada Al-Qaeda dan mendapatkan perhatian khusus dari Osama bin Laden. Beberapa pernyataan Osama sering dirilis langsung melalui situs tersebut, seperti *Qa'idat al-Jihad*. Beberapa forum diskusi dalam situs tersebut, seperti Al-Sahat dan Al-Ansar, menjadi forum alumni yang menghubungkan para veteran mujahidin, terutama dari Afghanistan.<sup>58</sup>

Ketika Madani Al-Tayyib (atau Abu Fadl al-Makki), kepala keuangan perusahaan Bin Laden, dan Sa'id Sayyid Salama, warga Mesir yang menjadi kepala keuangan dan distribusi paket dari Al-Qaeda, ditangkap oleh pemerintah Saudi, sistem kerja Yusuf al-Uyayri dalam mencari jaringan pendanaan di Saudi terungkap. Yusuf menggunakan saluran ulama-ulama yang disegani di Najd, seperti mertuanya sendiri, Syekh Sulayman al-Ulwan dan ulama-ulama *Sahwa*, dalam mengumpulkan dana dari individu ataupun dana CSR dari perusahaan besar seperti Bin Laden.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Hegghammer, *Jihad*, 171–173, 176–177.

<sup>58</sup> Hegghammer, *Jihad*, 171–172.

<sup>59</sup> Hegghammer, *Jihad*, 124.

Salah satu sel Yusuf al-Uyayri yang paling aktif adalah Abdulrahim Al-Nashiri. Dia merupakan otak dari pengeboman terhadap Kapal Perang USS Cole pada tahun 2000. Dia juga merencanakan penyerangan terhadap kapal induk di Port Rashid (UEA), dan kapal perang asing di Selat Hormus dan Pelabuhan Dubai, serta kapal tanker yang melalui Selat Gibraltar. Selain Al-Nashiri, yang tidak kalah penting adalah peran sahabatnya, Walid bin Attash, yang merupakan perekrut jihadis yang membajak pesawat di Bandara Heathrow.<sup>60</sup> Untuk kasus di dalam negeri Saudi, penyerangan, pembunuhan, penculikan, dan pengeboman oleh QAP dilakukan dengan sangat intens dan brutal. Dalam kurun waktu dua tahun saja, tahun 2003 hingga 2005, kasus terorisme mencapai 50 kali insiden, tetapi tidak terlalu diungkap oleh media Saudi.<sup>61</sup>

Pencekalan akses terhadap keuangan Bin Laden Group dan konfrontasi terbuka dengan Pemerintah Saudi merupakan pengalaman pahit bagi gagalannya ekspansi jihad global. Kegagalan QAP ternyata berdampak besar bagi melemahnya Al-Qaeda karena terputusnya pasokan sumber dana terbesar bagi kelompok itu. Hal yang kurang terungkap ke kalangan internasional adalah bagaimana politik dalam negeri Saudi sangat dipusingkan dengan kehadiran QAP. Citra tentang Saudi yang pasif terhadap Al-Qaeda dan sebagai sponsor utama gerakan terorisme merupakan dampak dari minimnya Pemerintah Saudi untuk memublikasikan huru-hara yang terjadi di dalam negeri.

## 5. ISIS

Kemunculan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2014 menguncang stabilitas kawasan. Pada tahun 2015, ISIS melakukan pengeboman masjid di daerah Asir, Arab Saudi. Hal ini sangat mengejutkan karena lebih dari 2.000 pejuang ISIS merupakan warga negara kebangsaan Saudi. Menteri Dalam Negeri Saudi mengkhawatirkan babak baru ketidakstabilan dalam negeri akan berlanjut

---

<sup>60</sup> Hegghammer, *Jihad*, 166–169.

<sup>61</sup> Hegghammer, *Jihad*, 203–217.

setelah berbagai pengeboman dan penyerangan yang dilakukan oleh pendahulunya, Al-Qaeda.

Penyerangan ISIS di Saudi berlanjut di Qatif dan Dammam yang banyak dihuni oleh kelompok Syiah. Serangan itu menewaskan 25 orang dan 106 di antaranya luka-luka. Penyerangan yang dilakukan oleh ISIS juga merambah wilayah tengah Saudi, di titik pemeriksaan polisi di Riyadh. ISIS juga mendeklarasikan diri sebagai pelaku pembunuhan terhadap 12 anggota SWAT Saudi di dalam masjid. Bom bunuh diri dan penembakan terhadap polisi juga terjadi sepanjang tahun 2015. Serentetan dengan kasus ini, Pemerintah Saudi juga menangkap beberapa pelaku yang menggunakan bendera ISIS.<sup>62</sup>

Pada tahun 2016, serangan ISIS berupa bom mobil terjadi di tempat parkir Masjid Nabawi, Madinah, menewaskan empat polisi Saudi dan melukai beberapa orang lainnya. Serangan ini dilakukan oleh simpatisan ISIS, Talie bin Salem Al-Syaya'ari, yang merupakan warga Saudi yang pernah kuliah di Selandia Baru. Serangan serupa terjadi di dekat Masjidilharam bertepatan pada bulan Ramadan 2017, yang menghancurkan sebuah apartemen. Serangan tersebut direncanakan dilakukan di dalam Masjidilharam sebagai simbol perlawanan terhadap Pemerintah Saudi yang dianggap korup.<sup>63</sup>

Sebenarnya serangan ini sudah bisa diduga. ISIS pernah mendeklarasikan niatnya untuk melakukan teror di Saudi. Organisasi tersebut mengklaim sudah memiliki sel yang kuat di wilayah Bahrain, wilayah Hijaz, dan wilayah Najd. Melihat serangan-serangan yang dilakukan, sebenarnya target yang disasar oleh ISIS bukanlah tempat, melainkan aparat keamanan Saudi sebagai simbol representasi

---

<sup>62</sup> "ISIL claims deadly attack on Saudi forces at mosque", *Al-Jazeera*, (Agustus 2015). <http://www.aljazeera.com/news/2015/08/suicide-attack-mosque-saudi-arabia-southwest-150806110739697.html>.

<sup>63</sup> "Saudi Arabia thwarts huge terror attack on world's largest Mosque ahead of Ramadan finale," *Express*, (Juni 2017). <http://www.express.co.uk/news/world/820778/Ramadan-2017-Saudi-Arabia-thwarts-huge-terror-attack-Grand-Mosque-Mecca-ISIS>.

pemerintah dan kelompok Syiah yang berada di Saudi. Meskipun Pemerintah Saudi sudah mengklaim menangkap beberapa sel ISIS di negaranya, rantai jaringan ini masih belum bisa diputus dan terdeteksi.<sup>64</sup>

Upaya ISIS menyasar Pemerintah Saudi tidak lepas dari peran serta militer Saudi yang berkomitmen untuk terlibat lebih jauh dalam penyerangan udara terhadap ISIS, melakukan pelemahan sel-sel ISIS, baik dalam wilayah domestik maupun di Irak dan Suriah.<sup>65</sup> Narasi yang dikembangkan ISIS sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Mereka menganggap Saudi menjadi bagian dari musuh karena kedekatan dan sikap akomodatif Saudi terhadap Amerika.

## E. Politik Saudi Terkini di Kawasan

Semenjak ledakan penjualan minyak Saudi (*Arab Petroleum Boom*) pada era tahun 1970-an, Saudi merangkak menjadi polisi di kawasan. Hal ini dipicu dengan adanya keberhasilan Revolusi Iran menggulingkan Rezim Shah pada tahun 1979 oleh Ayatullah Khomeini. Ruhnya dukungan kebangkitan Iran ini di kawasan Timur Tengah dan di dunia Islam pada umumnya disimbolkan sebagai kemenangan Islam atas Barat. Hal ini membuat negara-negara Arab, terutama Saudi, khawatir karena bisa menjadi momentum penyebaran revolusi ajaran Syiah di dunia Islam.

Kekuasaan Saudi di kawasan semakin dominan dengan terbentuknya GCC, persatuan negara-negara pengeksport migas di kawasan Teluk. Hal ini memungkinkan Saudi untuk membentuk sekutu dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat untuk melaku-

---

<sup>64</sup> "ISIS Threatens Saudi Arabia with Major Attacks, Says 'We Will Strike You In Your Homes,'" *Newsweek*, (September 2017), <http://www.newsweek.com/isis-threatens-saudi-arabia-attacks-says-its-turn-will-come-after-tehran-623715>.

<sup>65</sup> "Saudi Arabia took part in weekend air strikes against Islamic State: Pentagon". *Reuters*, (Februari 2016), <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-saudi-arabia-airstrikes/saudi-arabia-took-part-in-weekend-air-strikes-against-islamic-state-pentagon-idUSKCN0VP2FM>.

kan kebijakan yang konfrontatif dengan Iran di kawasan, terutama dengan kebijakan pemerintah Saudi yang anti-Syiah, baik secara domestik maupun internasional yang sangat mewarnai peta politik dunia. Selain itu, kebijakan Saudi yang agresif terhadap IM juga memberi konsekuensi tersendiri terhadap kestabilan politik di kawasan. Dalam berbagai kasus terkini seperti dampak *Arab Spring*, dukungan terhadap kudeta berdarah Jenderal As-Sisi di Mesir dan blokade politik terhadap Qatar merupakan dampak dari kebijakan ini.

Konfrontasi Saudi dengan Iran membuat polarisasi yang besar di kawasan Timur Tengah sejak Revolusi Iran 1979. Saudi mendapat dukungan dari Amerika, sedangkan Iran mendapat sekutu dari Rusia dan Suriah. Melalui GCC, Saudi mempererat kubunya dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA), bahkan Saudi pernah mengajukan proposal agar GCC menjadi pakta pertahanan baru yang ditolak keras oleh Uni.<sup>66</sup> Munculnya Qatar sebagai negara yang memiliki fondasi ekonomi kuat dan semakin berpengaruh di Timur Tengah dan GCC menjadi ancaman tersendiri bagi Saudi. Label fenomena *new Saudi Arabia* sangat dilekatkan pada Qatar sebagai kekuatan alternatif pada era pos-Saudi Arabia.<sup>67</sup> Terlebih kebijakan Qatar sejak Syekh Hamad Khalifa Al-Thani dan penerusnya, Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani sering berseberangan dengan Saudi, terutama dalam kasus *Arab Spring*, IM, blokade diplomatik terhadap Qatar, dan dukungan terhadap kudeta berdarah Jenderal As-Sisi di Mesir.<sup>68</sup>

Kewaspadaan Saudi terhadap IM dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Salman pada 4 Februari 2017 berdampak besar terhadap ketegangan regional. Saudi bersama sekutu dekatnya, Bahrain dan

---

<sup>66</sup> "Saudi-Qatari tensions and implications for the Persian Gulf," *Yemen Times*, (April 2014). <http://www.yementimes.com/en/1768/opinion/3672/Saudi-Qatari-tensions-and-implications-for-the-Persian-Gulf.htm>.

<sup>67</sup> Lina Khatib, "Qatar's Foreign Policy: The Limits of Pragmatism", *International Affairs*, 89, 2 (2013), 417–431.

<sup>68</sup> James M. Dorsey, "Wahabism vs Wahabism: Qatar Challenges Saudi Arabia". *RSIS Working Paper*, 262 (2016): 2–10.

UEA, harus melakukan sanksi diplomatik yang keras terhadap Qatar dengan menarik duta besarnya karena Qatar dianggap melanggar prinsip “*unified destiny*” yang membuat iklim politik teluk Persia tegang. Ketiga negara tersebut sangat tidak nyaman dengan politik luar negeri Qatar yang mencerminkan keberpihakan terhadap IM dan dianggap negara teroris oleh Saudi dan UEA. Kasus ini berlanjut pada sanksi yang lebih keras berupa blokade diplomatik terhadap batas laut, darat, dan udara terhadap Qatar.<sup>69</sup> Dekrit ini juga mengandung konsekuensi politis, yaitu politik luar negeri Saudi cenderung bertentangan dengan negara-negara yang dianggap dekat dengan IM yang lain, seperti Turki.

Selain masalah IM, stabilitas politik dalam negeri Saudi me-manas akibat gelombang *Arab Spring* yang dipropagandakan oleh Qatar melalui saluran televisi Al Jazeera. Pemberitaan Al Jazeera yang sering menyudutkan pemerintahan Saudi, baik dalam hal kebijakan, ekonomi, maupun sistem politik yang otoritarian, menjadikan kebijakan yang keras terhadap Qatar sebagai pilihan. Hanya berselang satu bulan dari dekrit itu, Saudi menarik duta besarnya dari Qatar dan berlanjut memblokade negara tersebut. Selain ketiga negara tersebut, Mesir juga pernah menarik duta besarnya dari Qatar karena politik luar negeri yang agresif. Ketegangan Qatar dan Saudi Arabia dalam jangka panjang berpotensi memecah negara-negara teluk karena Saudi hingga saat ini masih menjadi pemimpin di kawasan.

Manuver Saudi untuk menjadi poros kekuatan negara-negara Islam dengan mendirikan Aliansi Militer Islam yang diikuti oleh 34 negara-negara mayoritas muslim membuat ketegangan negara itu dengan Iran dan kelompok Syiah menguat.<sup>70</sup> Aliansi tersebut melakukan beberapa manuver militer untuk menyerang kelompok

---

<sup>69</sup> Madawi Al-Rasheed, “Saudi-Qatar tensions divide GCC”. *Almonitor*, (Maret 2014), <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/saudi-qatar-gcc-tensions-islamist.html>.

<sup>70</sup> “Saudi Arabia Announces 34-state Islamic military alliance against terrorism,” *Reuters*, (Desember 2015), <https://www.reuters.com/article/us-saudi-security/saudi-arabia-announces-34-state-islamic-military-alliance-against-terrorism-idUSKBN0TX2PG20151215>.

oposisi bersenjata Syiah Houti di Yaman Selatan dan kelompok ISIS di Irak dan Suriah. Kekhawatiran Iran meningkat karena Saudi memang memiliki kebijakan yang tidak berpihak pada sekutunya di Suriah, Bashar Al-Asad.

Kejatuhan rezim Husni Mubarak dan kemenangan IM dalam pemilu demokratis di Mesir di tengah geliat *Arab Spring* membuat rezim keluarga Saud terancam. Pengaruh itu tampak pada kondisi politik dalam negeri Saudi yang memanas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kerajaan Saudi membendung gerakan tersebut dan sangat menentang kekuasaan Muhammad Mursi di Mesir serta memberikan dukungan, baik secara politis maupun material, terhadap kudeta yang dilakukan Jenderal As-Sisi yang mengakibatkan pertumpahan darah yang besar di Tahrir Square.

Dukungan Pemerintah Saudi terhadap kudeta Jenderal As-Sisi menuai kritik dari dalam negeri, terutama dari para ulama *Sahwa* dan juga dari masyarakat internasional. Keputusan Saudi yang berseberangan dengan kehendak sebagian besar ulama dan rakyatnya menunjukkan kekusaran atas kekuasaannya. Dukungannya terhadap kudeta dan pelemahan kekuatan IM di Mesir mengandung beberapa konsekuensi. *Pertama*, Saudi menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung pemerintahan baru As-Sisi. *Kedua*, Saudi harus lebih aktif melemahkan kekuatan *Sahwa* di dalam negeri. Kedua upaya ini secara aktif dilakukan oleh pemerintahan Saudi. Untuk kali pertama, pemerintahan Saudi melarang buku-buku IM dan menggagalkan berbagai acara ceramah yang dilakukan oleh ulama-ulama *Sahwa*.

## F. Masa Depan Arab Saudi Pasca-Arab Spring

Gelombang *Arab Spring* tidak berdampak secara signifikan terhadap ekonomi Saudi, justru kenaikan harga minyak akibat *Arab Spring* menguntungkan perekonomian Saudi. Namun, aspek politik, stabilitas, dan keamanan dalam negeri Saudi sangat terancam. *Arab Spring* memicu bangkitnya kelompok yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi, seperti kelompok Syiah di wilayah Timur dan kelompok *Sahwa*.

Namun, *Arab Spring* bukan faktor utama bagi menguatnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Saudi. Sikap Pemerintah Saudi yang diktator dan korup, ketimpangan ekonomi, pemasangan terhadap kebebasan berorganisasi, tersumbatnya saluran penyampaian aspirasi, dan ketergantungannya dengan Amerika, menjadi penyebab utama tumbuhnya kekuatan oposisi terhadap Pemerintah Saudi, seperti yang terlihat pada Al-Qaeda, ISIS, dan Syiah. Secara keagamaan, kolaborasi politis antara keluarga Saud dan para ulama Wahabi yang memonopoli kehidupan keagamaan membuat tafsir negara itu terhadap aliran keagamaan terlalu monolitik sehingga negara tidak bisa menerima konsekuensi pluralitas yang ada. Hal ini seperti IM yang pernah menguntungkan Saudi dalam membangun fondasi pendidikannya dan Syiah yang memang sudah sejak lama menjadi bagian dari masyarakat Al-Hasa.

Menguatnya kekuasaan Sudairi dalam tampuk kepemimpinan Saudi dengan melihat manuver politik yang terjadi akhir-akhir ini, baik penyerangan terhadap Houthi di Yaman, blokade diplomatik terhadap Qatar, maupun tendensi yang mudah menggunakan aksi militer, masa depan damai, baik dalam lingkungan domestik maupun kawasan, masih jauh dari kenyataan. Gerakan Islam yang tidak sepaham dengan Wahabi akan senantiasa bergerak di bawah permukaan, dan potensi konflik fisik akan tetap terbuka lebar hingga beberapa dekade ke depan jika Saudi tidak mengubah pendekatan politiknya. Yang pasti, harapan akan tumbuhnya demokrasi masih jauh dari harapan.

## Daftar Pustaka

- Al-Rasheed, Madawi. "Saudi-Qatar tensions divide GCC". *Almonitor*, 6 Maret 2014, diakses pada Agustus 2017. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/saudi-qatar-gcc-tensions-islamist.html>.
- Al-Sulami, Mohammed. "Three men Wanted by Saudi Security Forces Killed in Qatif, Saudi Security Forces," 2017. <http://www.arabnews.com/tags/saudi-security-forces>.
- Bank Dunia. "Saudi Arabia", diakses pada 15 Juli 2017. <https://data.world-bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SA>.

- Batrawi, Aya. "Women win 17 seats in Saudi Arabia's first elections with female candidates", Independent, 13 Desember 2015. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/a-woman-has-been-elected-in-saudia-arabias-elections-a6771161.html>.
- Centre for Energy Economics Research and Policy. *BP Statistical Review of World Energy*. London: Heriot-Watt University, June 2017. [https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de\\_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf](https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf).
- Central Intelligence Agency. "Saudi Arabia", *CIA World Fact Book*, diakses pada 4 Oktober 2017. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html>.1
- Commins, David. *Islam in Saudi Arabia*. London and New York: I.B. Tauris, 2015.
- Commins, David. *The Wahabi Mission and Saudi Arabia*. London and New York: I.B. Tauris, 2006.
- Cook, Michael. "On the Origins of Wahabism". *Jurnal of the Royal Asiatic Society*, 2, issue 2 (1992).
- DeLong-Bas, Natana J. *Wahabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Dorsey, James M. "Wahabism vs Wahabism: Qatar Challenges Saudi Arabia". RSIS Working Paper, S. Rajaratnam School of International Studies, No. 262 (2016).
- Dudley, Dominic. "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" Forbes, 12 Juli 2016. <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.
- "Economy of Saudi Arabia", Chronicle Fanack, diakses pada 28 Agustus 2017. [https://chronicle.fanack.com/wp-content/uploads/sites/5/2014/10/infrastructure\\_sa\\_map\\_infrastructure\\_0001\\_05\\_19e3a68b4f.jpg](https://chronicle.fanack.com/wp-content/uploads/sites/5/2014/10/infrastructure_sa_map_infrastructure_0001_05_19e3a68b4f.jpg).
- Encyclopedia Britannica. "Government and Society of Saudi Arabia". <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society>. Diakses pada 8 Agustus 2017.
- Encyclopedia Britannica. "Trans Arabian Pipeline". Diakses pada 8 Agustus 2017 <https://www.britannica.com/topic/Trans-Arabian-Pipeline>.
- Hegghammer, Thomas. *Jihad in Saudi Arabia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

- “Inside the Saudi town that’s been under siege for three months by its own government”, Independent, 4 Agustus 2017. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>.
- “ISIL claims deadly attack on Saudi forces at mosque”, Al-Jazeera, 7 Agustus 2015. <http://www.aljazeera.com/news/2015/08/suicide-attack-mosque-saudi-arabia-southwest-150806110739697.html>.
- “ISIS suspected of planning attack on Grand Mosque in Mecca as Saudi leaders condemn ‘evil and corrupt’ plot which failed after terrorist blew himself up in gunfight”, Mail Online, 24 Juni 2017. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-4635870/ISIS-suspected-planning-attack-Grand-Mosque-Mecca.html>.
- “ISIS Threatens Saudi Arabia with Major Attacks, Says ‘We Will Strike You In Your Homes’”, Newsweek, 6 September 2017. <http://www.newsweek.com/isis-threatens-saudi-arabia-attacks-says-its-turn-will-come-after-tehran-623715>.
- Ismail, Raihan. *Saudi Clerics and Shi’a Islam*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Khatib, Lina. “Qatar’s Foreign Policy: The Limits of Pragmatism”, *International Affairs* 89, No. 2 (2013): 417–431.
- “King Salman reasserts Sudairi Seven, key Abdullah advisor removed.” Middle East Eye, 13 Februari 2015. <http://www.middleeasteye.net/news/king-salman-reasserts-sudairi-seven-key-abdullah-advisor-removed-496423196>.
- Lacroix, Stephane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. trans. by George Holoch. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Lacroix, Stéphane. “Saudi Arabia’s Muslim Brotherhood Predicament”. The Washington Post, 20 Maret 2014. [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm\\_term=.f3b04fe78fc2](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fc2).
- Martin, Patrick. “Why Saudi king spurned half-brother and restored the Sudairi Seven royal lineage.” The Globe and Mail, 29 April 2015. <https://beta.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabias-royal-overhaul-signals-riyadhs-assertive-foreign-policy/article24178168/?ref=http://www.theglobeandmail.com>.

- Meijer, Roel. "Re-Reading al-Qaeda Writing of Yusuf al-Ayiri", *ISIM Review*, No. 18 (Autum 2006).
- Meijer, Roel. "Yusuf al-Uyairi and the Making of Revolutionary Salafy Praxis", *Die Welt des Islams*, 47 (2007): 3–4.
- Mutawa, Abdullah M., "The Ulama of Nadj from the Sixteenth Century to the Mid-Eighteenth Century". PhD Dissertation, University of California, 1989.
- Niblock, Tim dan Malik, Monica. *The Political Economy of Saudi Arabia*. New York: Routledge, 2007.
- Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Salam, Asharaf Abdul. "Population and Household Census, Kingdom of Saudi Arabia 2010: Facts and Figures". *International Journal of Humanities and Social Science*, 3, No. 16 (2013), 258–263.
- "Saudi Arabia announces 34-state Islamic military alliance against terrorism". Reuters, 15 Desember 2015. <https://www.reuters.com/article/us-saudi-security/saudi-arabia-announces-34-state-islamic-military-alliance-against-terrorism-idUSKBN0TX2PG20151215>.
- "Saudi Arabia Approves Ambitious Plan to Move Economy Beyond Oil". The Guardian, 25 April 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/25/saudi-arabia-approves-ambitious-plan-to-move-economy-beyond-oil>.
- "Saudi Arabia Thwarts Huge Terror Attack on World's Largest Mosque Ahead of Ramadan Finale", Express, 24 Juni 2017. <http://www.express.co.uk/news/world/820778/Ramadan-2017-Saudi-Arabia-thwarts-huge-terror-attack-Grand-Mosque-Mecca-ISIS>.
- "Saudi Arabia Took Part in Weekend Air Strikes Against Islamic State: Pentagon". Reuters, 17 Februari 2016. <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-saudi-arabia-airstrikes/saudi-arabia-took-part-in-weekend-air-strikes-against-islamic-state-pentagon-idUSKCN0VP2FM>.
- "Saudi Arabia unemployment rate climbs to 12.7 percent", Al Jazeera, 31 Juli 2017. <http://www.aljazeera.com/news/2017/07/saudi-arabia-unemployment-rate-climbs-127-percent-170730163025234.html>.
- "Saudi Aramco Yanbu Refinery", Hydrocarbons Technology. Diterbitkan Januari 2016 <http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/aramco-yanbu/>.

- “Saudi protesters fire-bomb intelligence building in Qatif”, Middle East Eye, 11 Januari 2016. <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-protesters-fire-bomb-intelligence-building-qatif-843608836>.
- “Saudi-Qatari tensions and implications for the Persian Gulf”, *Yemen Times*, 1 April 2014. <http://www.yementimes.com/en/1768/opinion/3672/Saudi-Qatari-tensions-and-implications-for-the-Persian-Gulf.htm>.
- dsfisher Bid dumb Map nerd. "Stamp World History Maps." Diakses 28 Agustus 2018. <https://www.deviantart.com/dsfisher/art/Nejd-761454262>.
- Trofimov, Yaroslav. *Kudeta Mekkah: Sejarah yang tak Terkuak*. Ciputat: Pustaka Alvabet, 2007.
- University of Texas Libraries. “Saudi Arabia Pol 2003.” Diakses pada 12 September 2017. [http://www.lib.utexas.edu/maps/middle\\_east\\_and\\_asia/saudi\\_arabia\\_pol\\_2003.jpg](http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/saudi_arabia_pol_2003.jpg).
- “USA Remains Largest Producer of Petroleum and Natural Gas Hydrocarbons”, US Energy Information Administration, 23 Mei 2016. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26352>.
- “Wahabi Makar: Parade Tauhid HUT RI Ke-70 malah Mengibarkan Bendera Arab Saudi”, diakses pada 8 Agustus 2017. <https://www.kaskus.co.id/thread/574ef438ded7704d288b456b/wahabi-makar-parade-tauhid-hut-ri-ke-70-malah-mengkibarkan-bendera-arab-saudi/6>, dikutip dari Stamp World History.
- Wawancara dengan Syekh Ismail Harbi, wakil direktur Yayasan Haramain, 30 Maret 2017.
- “Women in Saudi Arabia to vote and run in elections”. BBC News, 25 September 2011. <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15052030>.
- World Bank National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files, The World Bank IBRD-IDA. *GDP per capita (current US\$)*. 15 Juli 2017. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.PCAP.CD>





# BAB 3

## Problematika Kekuatan Politik Islam di Kuwait

*Muhammad Fakhry Ghafur*

### A. Gambaran Singkat Politik Kuwait

Dibandingkan negara-negara Teluk lainnya atau yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Kuwait merupakan negara yang relatif maju dalam hal pelaksanaan demokrasi dan partisipasi politik masyarakatnya. Kemajuan politik demokrasi di Kuwait mulai terlihat setelah kemerdekaan dari Inggris pada 19 Juni 1961. Sejak itu, Kuwait berusaha menjadi negara maju yang berdaulat dengan membentuk sebuah negara monarki konstitusional yang berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Konstitusi 1962 menyebutkan bahwa Kuwait adalah “negara Arab yang merdeka sepenuhnya dengan

sistem pemerintahan demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat yang merupakan sumber kekuasaan”.<sup>1</sup>

Sejak saat itu, Kuwait menjadi negara monarki konstitusional di dunia Arab yang menjalankan sistem politik demokratis yang disertai dengan berkembangnya kebebasan berpendapat, terbukanya ruang bagi organisasi sosial kemasyarakatan, serta menguatnya partisipasi politik warga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan memandang bahwa Kuwait pada masa awal berdirinya merupakan *role model* dalam pelaksanaan prinsip demokrasi di dunia Arab.

Ada beberapa hal yang menyebabkan demokrasi dapat berkembang di Kuwait. *Pertama*, setelah kemerdekaan, rezim monarki berusaha untuk keluar dari keterpurukan dengan memperkuat kembali negara melalui penegakan prinsip-prinsip demokrasi Kuwait yang tertuang dalam konstitusi 1962. Konstitusi tersebut mendorong rakyat Kuwait untuk dapat menikmati kebebasan dan partisipasi politik yang luas dibandingkan negara teluk lainnya. Hal itu dapat dilihat dari berkembangnya gerakan oposisi yang terdiri dari kalangan Islam ataupun liberal yang berperan signifikan serta semakin meningkatnya partisipasi politik perempuan dalam beberapa dekade terakhir. *Kedua*, perubahan sosial dan budaya yang begitu cepat, terutama setelah Perang Teluk 1991 yang telah memengaruhi dan meningkatkan cara pandang masyarakat Kuwait dalam berdemokrasi.

Kualitas pendidikan masyarakat, terutama para pemuda dan kelas menengah, semakin meningkat. Tercatat sekitar 70% warga berusia di atas 29 tahun telah berkontribusi dalam mendorong munculnya kekuatan sosial baru di Kuwait. Banyak kalangan pemuda yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama, baik di Eropa maupun Amerika, dan sukses menjadi tokoh sentral yang berpengaruh dalam kancah politik dan ekonomi Kuwait. Selain itu, banyak dari kalangan kelas menengah yang semakin sadar akan

---

<sup>1</sup> “Kuwait’s Constitution of 1962,” Reinstated in 1992, Diakses pada Agustus 2017, [https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait\\_1992.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=en), 3–20.

kesalahan monarki dalam mengelola pemerintahan yang menurut mereka perlu direformasi, terutama di tengah maraknya isu korupsi dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Meski politik di Kuwait dalam beberapa dekade terakhir relatif stabil, sejak tahun 2011 tepatnya setelah *Arab Spring*, perlahan-lahan politik Kuwait mengalami sedikit guncangan. Persoalan sosial-politik yang semakin merebak imbas dari fenomena *Arab Spring* dan pengaruh krisis politik dalam negeri, seperti dominasi monarki dalam pemerintahan, isu korupsi, minimnya transparansi pengelolaan keuangan negara, diskriminasi terhadap suku, ataupun imigran, mengakibatkan maraknya gerakan protes yang dimotori kelompok oposisi yang berkomitmen pada reformasi di Kuwait. Tuntutan reformasi itu berkaitan dengan sistem pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemilu yang lebih representatif, berdirinya partai politik, serta partisipasi rakyat yang lebih luas dalam pemerintahan.

Sebenarnya, reformasi politik melalui pelaksanaan demokrasi sudah berlangsung di Kuwait dalam beberapa periode, yaitu sejak periode 1961–1990 yang disebut sebagai masa pembentukan konstitusi, kemudian disusul periode 1991–2010 sebagai pelaksanaan semi-demokrasi Kuwait. Pada periode ini, demokrasi di Kuwait berlangsung dengan sangat dinamis melalui diselenggarakannya beberapa kali pemilu parlemen, yaitu pada tahun 1996, 1999, 2003, 2006, 2008, 2009, dan 2012. Gejolak politik pun terjadi pada masa itu yang mengakibatkan laju demokrasi melambat. Saat itu, terjadi serangkaian krisis yang berulang antara parlemen dan pemerintah yang berujung pada pembubaran parlemen dan pemberhentian kabinet. Puncaknya pada Juni 2012, Mahkamah Konstitusi Kuwait membubarkan parlemen hasil Pemilu 2012 dengan alasan ketidakabsahan pembubaran parlemen hasil Pemilu 2009 serta seruan Emir Syeikh As-Sabah untuk pemilu parlemen baru pada Desember 2012.

Banyak kalangan memandang bahwa kebijakan Emir dalam mendorong pemilu baru adalah upaya untuk menjegal kelompok oposisi dan membentuk parlemen yang pro-monarki. Namun, tidak sedikit pula yang memandang bahwa langkah Emir tersebut meru-

pakan bagian dari upaya pelaksanaan reformasi politik yang tengah berlangsung di Kuwait. Lantas, bagaimana prospek demokrasi Kuwait ke depan serta implikasinya dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Kuwait dan bagaimana peran kelompok oposisi terutama kekuatan politik Islam dalam kehidupan politik di Kuwait?

Tulisan ini mengkaji dinamika sosial-politik di Kuwait dan peran kekuatan politik Islam beserta problematikanya dalam kancah politik Kuwait. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis bagaimana kelompok oposisi yang terdiri dari kekuatan politik Islam, liberal, dan suku terlibat dalam proses demokratisasi di tengah dominasi monarki dan intervensi negara-negara regional pendukung monarki.

## **B. Dinamika Sosial-Politik**

Kuwait merupakan negara kecil di kawasan Teluk yang terletak di ujung bagian barat laut Jazirah Arab dengan luas sekitar 17.818 km<sup>2</sup>. Terdiri dari wilayah daratan dengan ibu kota Kuwait City, sembilan pulau kecil tidak berpenghuni, dan enam daerah administratif (provinsi), antara lain Al-Kuwait, Al-Jahra, Al-Ahmadi, Al-Farwaniyah, Hawalli, dan Mubarak Al-Kabir. Berbatasan langsung dengan dua negara kaya minyak, yaitu Irak di utara (195 km<sup>2</sup>) dan Arab Saudi di Selatan (495 km<sup>2</sup>).<sup>2</sup>

Oleh karena posisinya yang strategis, berada di jalur perlintasan minyak, Kuwait menjadi negara yang kerap diperebutkan bangsa-bangsa besar di dunia. Tercatat sepanjang sejarah, wilayah Kuwait silih berganti berada di bawah kekuasaan banyak dinasti yang berlangsung selama berabad-abad, seperti Dinasti Buyid dari Persia pada abad ke-10, Dinasti Seljuk dari Turki pada abad ke-11, bangsa Mongol pada awal abad ke-14, dan Turki Utsmani pada abad ke-17. Dari sini dapat dilihat meskipun wilayahnya kecil, banyak kelompok etnis dari luar yang ingin menetap untuk menguasai wilayah Kuwait

---

<sup>2</sup> "Cultural Orientation Arab Kuwait," Defense Language Institute Foreign Language Centre, diakses pada Agustus 2017, <https://www.dliflc.edu/cultural-orientation-arabic-kuwait/>, 1–2.

yang makmur. Oleh karena itu, banyak orang, terutama dari Turki yang menyebut wilayah ini dengan sebutan “Kuwait” atau benteng kecil sebagai tempat berlindung dan mencari penghidupan.<sup>3</sup>

Sementara itu, cikal bakal terbentuknya Kuwait sebagai sebuah negara bermula pada awal abad ke-18. Saat itu, banyak orang dari suku Arab Badui yang nomaden dan tinggal di wilayah pedalaman Najd atau wilayah tengah Arab Saudi yang terpaksa bermigrasi akibat kekeringan ke daerah Kuwait Selatan. Mereka berasal dari suku Bani Utub cabang konfederasi dari Kabilah Anizah yang mendapat perlindungan dari Bani Khalid yang telah lebih dahulu ada dan berhasil merebut wilayah Kuwait Selatan dari tangan Turki Utsmani.<sup>4</sup>

Mereka pun mulai membangun pemukiman dan benteng kecil “Kuwait” di sana sebagai tempat bertahan dan berlindung dari serangan musuh. Seiring berjalannya waktu, sejumlah suku yang terdiri dari Suku As-Sabah, Al-Khalid, dan Al-Ghanim membuat kesepakatan bersama untuk bekerja sama berdasarkan aliran kesukumannya dalam membangun sebuah komunitas sosial. Suku As-Sabah diberi mandat untuk mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan, sementara suku Khalid dan Al-Ghanim diberi kepercayaan untuk menangani sektor perdagangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, selama bertahun-tahun relasi ketiga suku ini lebih mengarah pada pembentukan komunitas pebisnis kerajaan yang kemudian dipimpin oleh As-Sabah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Shafeeq Ghabra, “Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation,” *Middle East Institute Policy paper Series*. (Washington: Middle East Institute, 2014).

<sup>4</sup> Naser AlFozaie, “Tribalism in Kuwait: Impacts on the Parliament,” *Master Thesis* 2016, Department of International Environment and Development Studies, (Oslo: Norwegia), diakses pada Agustus 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/154672692.pdf>.

<sup>5</sup> David E. Long, Bernard Reich, dan Mark Gasiorowski, ed., *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*, (Colorado: Westview Press, 2010).



Sumber: Scholastic (16 April 2016)

**Gambar 3.1** Peta Kuwait

Pada awal abad ke-19, keturunan Dinasti As-Sabah, yaitu Mubarak As-Sabah, berhasil memperluas pengaruh Kuwait dan masuk ke dalam negara-negara ekspatriat yang dilindungi Inggris. Wilayah ini pun mengalami perubahan yang cukup drastis seiring dengan ditemukannya sumber minyak oleh perusahaan Gulf Oil dan eksplorasinya oleh British Petroleum pada tahun 1938. Kuwait yang kaya akan sumber daya minyak pun menjadi perebutan negara-negara sekitarnya sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan pada 19 Juni 1961.<sup>6</sup>

Sebagai negara yang baru merdeka, Kuwait banyak mengalami ujian dan ancaman dari negara lain. Pada tahun 1973, Irak mengklaim kedaulatan atas Kuwait dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah perbatasan, tetapi melalui perjanjian yang telah disepakati, Inggris dapat melindungi Kuwait hingga krisis yang terjadi saat itu dapat teratasi. Meskipun demikian, Irak kembali mengklaim pulau-pulau kecil Kuwait, yaitu Pulau Warbah dan Bubiyan yang diiringi dengan bentrokan militer di perbatasan Kuwait.<sup>7</sup> Kemudian,

<sup>6</sup> Michael S. Casey, *The History of Kuwait*, (Westport, CT: Greenwood Press, 2007).

<sup>7</sup> Casey, *The History of Kuwait*, 5–15.

peristiwa ini menjadi awal meletusnya konflik Irak-Kuwait yang terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Memang sejak awal kemerdekaan, hubungan kedua negara mengalami pasang surut, bahkan kerap dilanda konflik sampai dapat berakhir seiring dengan kejatuhan Saddam Hussein pada 2003.

Setelah kemerdekaan, pemerintah monarki berusaha untuk memperkuat negara dari ancaman disintegrasi melalui sistem monarki konstitusional yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam Konstitusi 1962, disebutkan “Sistem pemerintahan Kuwait adalah demokrasi, yang di dalamnya kekuasaan berada di tangan rakyat, sumber semua kekuasaan. Kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan cara yang diatur oleh Konstitusi.”<sup>8</sup> Kemudian, pasal ini menjadi landasan bagi Kuwait dalam menjamin kebebasan warganya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika di Kuwait tumbuh berbagai macam sekte dan aliran keagamaan yang mewarnai sepanjang perjalanan sejarahnya.

Mayoritas penduduk Kuwait adalah muslim dari total penduduk sekitar 4.398.000 jiwa.<sup>9</sup> Sekitar 75%-nya bermazhab Sunni Maliki dan Hanbali yang cukup berpengaruh dalam kehidupan warganya, baik itu pada taraf masyarakat kelas menengah, ulama, maupun keluarga elite monarki. Sementara itu, sisanya sekitar 15% adalah penganut Syiah. Kelompok Syiah dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu Syiah Arab atau Syiah Kuwaiti, sedangkan sisanya adalah Syiah yang berasal dari Persia.<sup>10</sup>

Orang Persia telah menetap di Kuwait selama berabad-abad sejak Dinasti Buyud menguasai Kuwait pada abad ke-10. Meskipun kebanyakan mereka adalah ekspatriat yang secara turun-temurun mempraktikkan ajaran Syiah dari berbagai mazhab yang berkembang

---

<sup>8</sup> “Kuwait’s Constitution of 1962.” Reinstated in 1992. Diakses pada Agustus 2017, [https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait\\_1992.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=en), 3–20.

<sup>9</sup> “Kuwait Population 2017.” Central Statistical Bureau. [https://www.csb.gov.kw/Default\\_EN](https://www.csb.gov.kw/Default_EN). January 2017.

<sup>10</sup> Casey, *The History of Kuwait*, 9–10.

di Iran, pada umumnya mereka cenderung setia pada Kuwait sebagaimana kebanyakan ekspatriat lainnya. Kendati demikian, pemerintahan rezim monarki tetap menaruh curiga pada kelompok ini hingga mengakibatkan terjadinya friksi dalam kehidupan sosial-politik di Kuwait.

Sebagian besar kelompok Sunni adalah penganut mazhab Hanbali yang sebagiannya beraliran Wahabi, khususnya dalam lingkungan elite kerajaan. Relasi antara monarki dan aliran Wahabi dapat dirunut sejak abad ke-18, ketika Kuwait di bawah perlindungan Bani Khalid dapat dikalahkan kaum Wahabi Najd. Di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan ini mengajarkan pemahaman Islam radikal yang melarang kemewahan, pesta, musik, dan tarian di lingkungan kerajaan dan masyarakat luas. Hal ini mendorong Raja Abdullah I yang menguasai Kuwait saat itu menjalin hubungan dengan Turki Utsmani dan menjadi protektorat Inggris untuk mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dari serangan kelompok Wahabi.<sup>11</sup> Meskipun demikian, pengaruh ajaran Wahabi tetap membekas dalam kehidupan warga Kuwait sampai saat ini.

Dengan pengaruh Islam yang sedemikian kuat, wajar kiranya bila rakyat dan penguasa Kuwait menjadikan Islam sebagai agama resmi dan Syariat Islam sebagai sumber utama hukum negara, sebagaimana tertera dalam konstitusi pasal 2, “Agama negara ini adalah Islam dan Syariat Islam adalah sumber hukum utama.”<sup>12</sup> Dengan demikian, berdasarkan teks konstitusi tersebut, agama resmi negara adalah Islam dan pemerintah harus mengarahkan umat Islam pada jalur yang benar sesuai syariat, hingga dapat diterima pada setiap aspek kehidupan masyarakat Kuwait.

Dalam hal aktivitas keagamaan, misalnya, pemerintah membentuk Komite Penasihat Negara atau Dewan Fatwa yang terdiri dari para ulama untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam di Kuwait. Selain itu, pemerintah

---

<sup>11</sup> Casey, *The History of Kuwait*, 37–38.

<sup>12</sup> “Kuwait Constitution”, Diwan of HH the Prime Minister.

mengontrol langsung terhadap aktivitas lembaga keagamaan, seperti menunjuk imam dan muazin, memantau khotbah Jumat, serta membiayai pembangunan dan aktivitas masjid. Dalam beberapa kasus yang terjadi, para imam yang melanggar saat khotbah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diskors dan diberikan sanksi.<sup>13</sup>

Pengaruh Islam di Kuwait tidak hanya terlihat pada kebijakan pemerintah saja, tetapi juga tercermin dalam kehidupan publik, misalnya, perempuan Kuwait dianjurkan untuk memakai hijab, tetapi juga tetap diberikan ruang untuk berkecimpung dalam kehidupan sosial-politik. Begitu juga saat bulan Ramadan, baik muslim maupun nonmuslim, dituntut untuk tidak makan, minum ataupun merokok di tempat umum, bagi yang melanggar akan dikenakan denda sebesar US\$360. Pada hari Jumat, setiap muslim wajib menghadiri salat Jumat dan menutup toko atau aktivitas bisnisnya tanpa kecuali.<sup>14</sup>

Meskipun Islam merupakan agama resmi negara, Pemerintah Kuwait melalui konstitusi 1962 tetap menjamin kebebasan beragama. Artinya warga ekspatriat yang nonmuslim dapat dengan bebas menjalankan ajaran agamanya. Orang-orang Kristen ekspatriat membentuk kelompok persatuan umat Kristen terbesar dengan jumlah anggota mencapai 450.000 orang. Demikian halnya dengan penganut Katolik yang membentuk kelompok tersendiri dengan jumlah penganutnya mencapai 300.000 orang, diikuti kelompok Ortodoks Koptik dan Protestan. Meski dapat dengan bebas beribadah, konstitusi Kuwait melarang kelompok nonmuslim untuk menyebarkan ajarannya di ruang umum serta memberlakukan peraturan yang ketat dalam hal pendirian tempat ibadah sesuai dengan hukum yang ditetapkan Kementerian Urusan Wakaf Kuwait. Untuk memperkuat hubungan antar-umat beragama, terutama

---

<sup>13</sup> "Focus Group Discussion (FGD)," dengan narasumber Tatang Budie Utama Razak, Duta Besar RI untuk Kuwait, di Pusat Penelitian Politik LIPI, 20 Juli 2017.

<sup>14</sup> Casey, *The History of Kuwait*, 20–30.

Islam dan Kristen, umat Islam dan Kristen sepakat membentuk Islamic Christian Relations Council (ICRC) pada tahun 2009.<sup>15</sup>

Selain komunitas keagamaan yang berkembang, tribalisme atau kesukuan merupakan suatu hal yang menonjol di Kuwait. Jika ditelusuri, kelompok suku Arab Badui adalah orang pertama yang mendiami wilayah Kuwait. Seiring berjalannya waktu dan ditemukannya sumber minyak, pada era modern Kuwait menjadi tempat singgah berbagai etnis, terutama dari Asia Selatan dan Timur Tengah untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hasil sensus pemerintah Kuwait pada 2016 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kuwait adalah pekerja ekspatriat dengan jumlah mencapai 55%. Sementara itu, warga Kuwaiti atau orang Kuwait asli adalah minoritas di negeri sendiri yang jumlahnya mencapai 45%. Mereka pada umumnya mendiami wilayah perkotaan atau Kuwait City.<sup>16</sup>

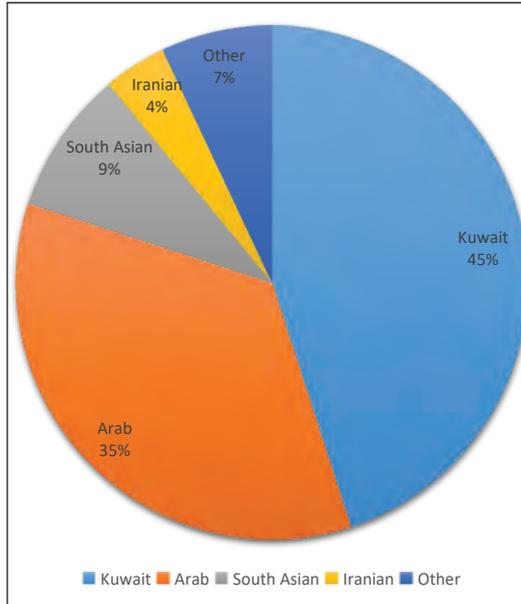
Berdasarkan Gambar 3.2, terlihat bahwa orang Arab non-Kuwait merupakan etnis terbesar kedua di Kuwait yang terdiri dari sejumlah etnis dari kawasan Jazirah Arab dan Afrika Utara. Kehadiran etnis Arab berawal setelah kemerdekaan 1961. Pada saat itu banyak warga dari Palestina dan Yordania yang bermigrasi ke Kuwait dan berpindah kewarganegaraannya hingga menjadi kelompok etnis Arab non-Kuwait yang tersebar luas. Selain untuk mencari pekerjaan, mereka juga banyak direkrut menjadi tentara atau polisi di Kuwait. Namun, saat Perang Teluk, banyak di antara mereka yang dideportasi dan dicabut kewarganegaraannya karena dukungan mereka terhadap Irak serta upaya mereka dalam memfasilitasi para pengungsi Irak. Mereka pun dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap Emir Al-Jabar Al-Ahmad As-Sabah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ghabra, "Kuwait at the Crossroads", 24–25.

<sup>16</sup> Ghabra, "Kuwait at the Crossroads", 25–27.

<sup>17</sup> Ghabra, "Kuwait at the Crossroads", 30–40.



Sumber: Kuwait Ethnic Groups (2002)

**Gambar 3.2** Persentase Penduduk Kuwait

Memang, Perang Teluk telah mengancam stabilitas kawasan hingga mengakibatkan semakin maraknya imigran dari negara tetangga terutama Irak dan Palestina. Kuwait pun memberlakukan sistem administrasi kewarganegaraan secara ketat sehingga banyak warga etnis Arab non-Kuwait pada saat itu yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan dianggap sebagai imigran gelap atau “Bidun”<sup>18</sup>. Pemerintah monarki mengklaim bahwa *Bidun* adalah warga negara asing yang masuk ke Kuwait secara ilegal, di antaranya adalah orang kelahiran Kuwait atau orang Arab yang menyembunyikan

<sup>18</sup> *Bidun* merupakan sebutan untuk status suku dan kelas sosial tertentu di Kuwait yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Arab non-Kuwait yang tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dari pemerintah dan diklaim sebagai imigran gelap. Mereka tidak mendapatkan hak sosial ataupun politik, seperti asuransi kesehatan, pendidikan, akta kelahiran, kartu identitas, serta tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu.

kewarganegaraannya. Belum lama ini dikabarkan bahwa Pemerintah Kuwait telah mengungkap ribuan *Bidun* yang berasal dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Sebenarnya, kedatangan warga negara asing non-Kuwait dari berbagai negara tidak lepas dari semakin berkembangnya perekonomian Kuwait, terutama setelah pengoperasian kilang minyak utama di daerah Al-Ahmadi yang telah menyumbangkan 90% dari total pendapatan ekspor dan devisa negara. Tercatat PDB Kuwait meningkat tajam sebesar 51% pada tahun 2010 yang kemudian semakin meningkat pada tahun setelahnya hingga mencapai sekitar US\$28.756 atau 72.675 US Dollar sesuai PDB PPP.<sup>19</sup> Dengan PDB yang tinggi tersebut wajar kiranya ekonomi Kuwait begitu kuat sehingga memengaruhi stabilitas negara.

Di samping berkembangnya etnisitas, kondisi perpolitikan Kuwait pun relatif stabil. Sepanjang sejarahnya tidak ada kudeta pemimpin ataupun pergolakan politik yang memicu pertumpahan darah. Posisi Emir atau kepala negara silih berganti secara turun-temurun, diwariskan pada anak dan cucu pewaris tahta yang merupakan keturunan dua putra Mubarak As-Sabah, yaitu As-Salim dan Al-Jabir. Saat ini, Kuwait dipimpin oleh Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah yang dilantik pada 29 Januari 2006, setelah mendapatkan persetujuan Majelis Nasional untuk menggantikan ayahnya, Syekh Ahmad Al-Jabir As-Sabah. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Emir menunjuk perdana menteri dan wakilnya yang didukung oleh struktur kabinet yang tunduk dan patuh pada kebijakan Emir. Dengan demikian, sesuai konstitusi, Emir sebagai kepala negara berhak untuk menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan struktur kabinet. Selain itu, Emir juga mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi.

---

<sup>19</sup> "IMF World Economic Outlook 2016". Oktober 2016, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand-Symptoms-and-Remedies>. Diakses pada Juli 2017.

Sementara itu, Sistem legislatif di Kuwait diwujudkan dengan adanya parlemen yang disebut dengan Majelis Ummah atau Majelis Nasional. Pencapaian terbesar Majelis Nasional terwujud setelah kemerdekaan dengan membentuk anggota konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dan menyelenggarakan pemilu. Pada tahun 1963, pemilu pertama diselenggarakan dan berhasil memilih 50 anggota Majelis Nasional baru. Dalam perjalanannya, Kuwait pun sukses menyelenggarakan beberapa kali pemilu langsung untuk memilih 50 anggota Majelis Nasional di 5 daerah pemilihan (dapil), seperti pemilu tahun 1996, 1999, 2003, 2006, 2008, dan 2009. Dengan sistem politik dan ekonomi yang sedemikian kuat, wajar kiranya banyak orang yang berkata, “Kami sangat ingin menjadi seperti Kuwait” dan menjadikannya contoh dalam pelaksanaan demokrasi di Timur Tengah.<sup>20</sup>

Dukungan warga Kuwait terhadap demokrasi pun terus meningkat. Hal itu terlihat dari semakin tingginya peran masyarakat dalam berdemokrasi, terutama dari kalangan perempuan serta semakin menggeliatnya organisasi sosial ataupun faksi sosial yang terlibat dalam politik praktis. Di Kuwait, persentase perempuan cukup signifikan hingga mencapai 51% dari jumlah populasi Kuwait. Oleh karena itu, pemerintah sesuai dengan konstitusi memberikan hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Konstitusi Kuwait menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hukum dan mempunyai hak yang sama, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Meskipun secara hukum perempuan diberi hak politik, pada kenyataannya Undang-Undang Pemilu masih belum memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk memilih dan dipilih. Hingga pada tahun 2005, Emir mengeluarkan dekrit agar perempuan diberikan hak penuh untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pada Pemilu 2008, jumlah pemilih dari kalangan perempuan pun

---

<sup>20</sup> “Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC,” (London: Chatham House, 2012).

meningkat hingga mencapai 55,43% dari total pemilih dengan jumlah kandidat sebanyak 27 orang dari 275 kandidat yang bersaing.<sup>21</sup>

Selain meningkatnya jumlah pemilih dari kalangan perempuan, dinamika politik demokrasi di Kuwait juga diwarnai dengan hubungan yang kuat antara rakyat yang majemuk dan organisasi sosial atau faksi politik yang bertarung dalam pemilu. Meskipun konstitusi Kuwait melarang berdirinya partai politik, rakyat dapat menyalurkan aspirasi melalui organisasi sosial atau faksi politik yang dapat mewakili pandangan politik kelompok sosial, suku ataupun sektenya. Relasi antara rakyat dan organisasi sosial atau faksi politik inilah yang menyatukan rakyat dengan organisasi politik pilihannya, baik melalui serangkaian pertemuan maupun kongres umum yang disebut *Diwaniyyah* dengan tujuan untuk menyampaikan program dan gagasan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Kuwait.

Menurut Hiramatsu, setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi kuatnya relasi antara rakyat dan kelompok atau faksi politik tertentu di Kuwait, yaitu ideologi Islam, tribalisme, dan kelas menengah dari para pengusaha.<sup>22</sup> *Pertama*, faktor ideologi keislaman yang banyak memengaruhi kehidupan sosial politik umat Islam Kuwait. Ghabra menyatakan bahwa peran faksi politik terutama dari kelompok Islam, seperti Islamic Constitutional Movement (ICM), sangat dirasakan dalam kehidupan sosial dan politik Kuwait, tidak hanya di parlemen, tetapi juga di sektor lain, seperti pendidikan dan dakwah.<sup>23</sup>

Kurikulum pendidikan Islam yang kerap diajarkan, baik di sekolah maupun universitas di Kuwait tidak lepas dari peran kelompok Islam dalam mengawal dan mengontrol dunia pendidikan agar tetap selaras dengan prinsip Syariat Islam. Demikian halnya aktivitas sosial

---

<sup>21</sup> Muhamad S. Olimat, "Women and Politics in Kuwait," *Journal of International Women's Studies*, 11, 2 (September 2009), 199–212.

<sup>22</sup> Hiramatsu, "The Changing Nature", 62–73.

<sup>23</sup> Shafeeq Ghabra, "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait," *Middle East Policy Council*, 5, 2 (1997), 58–72.

dan dakwah, kelompok Islam dapat berperan cukup besar sehingga mampu memengaruhi berbagai kalangan di Kuwait. Oleh karena itu, wajar kiranya kelompok Islam dapat meraih dukungan dan suara yang signifikan dari warga Kuwait pada setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, dominasi monarki yang kuat dalam politik dan ekonomi menjadikan kelompok ini lebih fokus dalam hal reformasi konstitusi, isu korupsi, dan aktivitas sosial kemanusiaan, ketimbang melakukan perlawanan untuk mereformasi struktur kepemimpinan di Kuwait.

*Kedua*, faktor tribalisme (kesukuan) yang sudah mendarah daging dalam kehidupan warga Kuwait. Meskipun Kuwait merupakan negara kecil nan makmur dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi dan politik demokratis yang berkembang, tribalisme begitu dominan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kuwait. Sejarah Kuwait pun tidak lepas dari pertalian yang kuat antara tiga suku besar (As-Sabah, Al-Khalid, dan Al-Ghanim) yang bermigrasi dari Najd ke wilayah pesisir Kuwait untuk mencari penghidupan. Pertalian ketiga suku tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya negara Kuwait modern.

Di Kuwait, suku dapat berperan sebagai partisan atau pendukung organisasi politik tertentu tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, kepala suku mengarahkan pengikutnya untuk memilih atau mendukung faksi tertentu yang sesuai dengan ideologi politiknya. Terdapat sejumlah suku yang berpengaruh dengan basis dukungan yang cukup kuat di Kuwait, antara lain Al-Mutairi, Ar-Rashidi, Al-Enizi, As-Shammari, Ad-Dhaferi, dan Al-Ajmi.<sup>24</sup>

Terakhir adalah faktor kelas menengah yang tengah berkembang di Kuwait beberapa tahun terakhir. Menurut Etheridge, sedikitnya terdapat sekitar 1,1 juta orang Kuwait atau sebesar 25% dari total penduduk Kuwait yang dikategorikan sebagai kelas menengah. Kebanyakan mereka adalah ekspatriat yang berprofesi sebagai

---

<sup>24</sup> AlFozaie, "Tribalism in Kuwait".

pengusaha.<sup>25</sup> Meskipun tidak begitu nampak dan diperhitungkan dalam percaturan politik, kelas menengah di Kuwait, terutama dari kalangan pengusaha muda, telah mendorong banyak perubahan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

### **C. Kekuatan Politik di Kuwait: antara Dominasi Monarki, Islam, dan Tribalisme**

Dinamika politik di Kuwait tidak dapat dilepaskan dari persaingan yang kuat antara pemerintah monarki dan komunitas sosial-politik yang tumbuh pada pertengahan abad ke-20 seiring dengan dibentuknya negara Kuwait modern. Sepanjang sejarahnya, politik Kuwait pun kerap diwarnai oleh relasi yang kuat di satu sisi dan pertentangan di sisi lainnya antara Dinasti As-Sabah dan komunitas suku ataupun dengan kelompok oposisi yang dipelopori oleh kelompok Islam. Pergulatan antara aktor politik di Kuwait dapat dilihat dari dinamika politik di parlemen yang banyak terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan sebuah kebijakan. Menurut Ghabra, terdapat tiga kelompok utama yang menjadi aktor dalam kancah politik Kuwait, antara lain elite monarki, komunitas suku, dan kelompok oposisi dari kalangan Islam dan liberal. Dalam perjalanannya, elite monarki dan kelompok oposisi kerap bertarung memperebutkan pengaruh di Kuwait.

Dalam sistem monarki Kuwait, Emir adalah simbol negara yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan dewan menteri serta membubarkan parlemen sesuai dengan keputusan konstitusi. Emir secara turun-temurun berasal dari generasi Mubarak As-Sabah yang berkuasa setelah mengambil alih kekuasaan pada akhir abad ke-19. Sementara itu, perdana menteri yang mengendalikan kabinet dan pemerintahan berasal dari unsur monarki yang dijabat oleh putra mahkota atau pangeran. Namun, atas desakan publik, sejak 2003, posisi perdana menteri menjadi

---

<sup>25</sup> Jamie Etheridge, "Hallmarks of Kuwait's Middle Class," *Kuwait Times*, (Juni 2014). <http://news.kuwaittimes.net/hallmarks-kuwait-middle-class/>.

terpisah dari struktur monarki meski posisinya tetap ditunjuk oleh Emir Dinasti As-Sabah.<sup>26</sup>

Kemudian, kepemimpinan monarki beralih pada Dinasti Al-Jabir di bawah pimpinan Syekh Jabir Al-Ahmad As-Sabah. Penguasa baru ini mempertahankan tradisi politik dinasti sebelumnya, yaitu melaksanakan konstitusi 1962, memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi melalui menyelenggarakan pemilu. Hanya saja keanggotaan Majelis Nasional terbatas pada segelintir kelompok, yaitu pedagang kelas menengah, ekspatriat, kalangan intelektual, dan elite As-Sabah. Pada saat itu perempuan belum diberikan ruang yang luas untuk memilih dan dipilih sampai keluarnya dekrit Emir pada 2005.

Di lingkungan kerajaan sendiri terkadang terjadi pertentangan antara elite muda dan tua yang berujung pada terpecahnya elite di tubuh kerajaan, antara kelompok moderat dan konservatif. Konflik internal dalam elite monarki berakar sejak masa awal pascamerdeka dan berlanjut setelah Perang Teluk 1991. Dinasti Al-Jabir As-Sabah dan As-Salim kerap bersaing dalam kancah politik, seperti pada Pemilu 2003 yang menjadi medan pertempuran keduanya dalam memperebutkan pengaruh. Pada tahun 2003, muncul sebuah manuver dari kalangan moderat monarki di bawah pimpinan putra tertua Emir yang menyerukan supaya ada regenerasi kepemimpinan dalam kerajaan. Namun, upaya tersebut tidak didukung oleh kalangan konservatif yang juga sekutu utama Arab Saudi dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap persatuan monarki.

Pergantian kepemimpinan pun terjadi pada tahun 2006 ketika pencalonan emir dan putra mahkota dimusyawarahkan di parlemen. Saat itu, terjadi persaingan antara Sa'ad As-Salim As-Sabah dari generasi As-Salim dan Sabah Al-Ahmad Al-Jabir As-Sabah Al-Jabir, sampai pada akhirnya, generasi Al-Jabir As-Sabah dapat terpilih dan menunjuk saudaranya Nawaf Al-Ahmad sebagai putra mahkota.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Kristin Smith Diwan, *New Generation Royals and Succession Dynamics in the Gulf State*, (Washington: Arab Gulf Institute, 2017).

<sup>27</sup> Diwan, *New Generation Royal*.

Sementara itu, isu suksesi pun berlanjut pada kancah politik yang lebih luas, terutama pada setiap penyelenggaraan pemilu yang pada akhirnya menimbulkan krisis politik berkelanjutan yang tidak hanya terjadi di internal kerajaan, tetapi juga dalam kancah politik parlemen. Krisis tersebut berujung pada persaingan perebutan kursi perdana menteri antara Nasir Muhammad Al-Jabir dari kalangan konservatif dan Ahmad Al-Fahd dari generasi muda monarki yang berakhir dengan ditunjuknya Nasir Muhammad Al-Jabir sebagai Perdana Menteri. Upaya elite muda untuk merebut takhta tampaknya gagal setelah Emir Al-Jabir As-Sabah lebih memilih dari kalangan konservatif untuk menempati jabatan strategis di kerajaan. Sebagian kalangan memandang bahwa kegagalan manuver Ahmad Al-Fahd karena posisinya dianggap membahayakan bagi keberlangsungan sistem monarki, tidak hanya di Kuwait, tetapi juga di sejumlah negara monarki Timur Tengah lainnya.<sup>28</sup>

Pada akhirnya, kedua kubu membentuk faksi-faksi yang saling berhadapan di parlemen dengan pendukungnya masing-masing, yaitu faksi Al-Jabir dan faksi As-Salim.<sup>29</sup> Perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara dua kubu tersebut serta persaingan antarfaksi menimbulkan krisis politik yang berujung pada pembubaran parlemen seperti yang terjadi pada 2006 sampai krisis terbuka pada 2011.

Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan politik disebabkan oleh adanya persaingan yang kuat di antara para elite kerajaan untuk memperebutkan kekuasaan di samping perbedaan pandangan yang kerap terjadi antara faksi parlemen. Namun, terpilihnya Nasir Al-Ahmad As-Sabah sebagai perdana menteri membawa harapan baru akan berakhirnya persaingan di lingkungan istana. Pada tahun 2011, Nasir Al-Ahmad As-Sabah dari kalangan konservatif kerajaan dipaksa mengundurkan diri, sampai akhirnya digantikan oleh saudaranya, Syekh Jabir Al-Mubarak Al-Ahmad As-Sabah.

---

<sup>28</sup> Diwan, *New Generation Royal*.

<sup>29</sup> Diwan, *New Generation Royal*.

Menurut Ghabra, salah satu slogan yang muncul dalam gerakan protes pemuda di Kuwait saat itu seiring dengan *Arab Spring* yang berlangsung di sejumlah negara Timur Tengah lainnya, yaitu “Asy-Sya’bu Yurid Isqaat Nizam” atau rakyat menginginkan lengsernya rezim.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keinginan suksesi tidak hanya bergulir di lingkungan istana dan parlemen, tetapi juga pada tataran masyarakat luas seiring dengan tuntutan adanya reformasi politik dan regenerasi kepemimpinan di sejumlah wilayah. Memang sejak 2006 gerakan protes yang melibatkan kalangan pemuda kerap menuntut terjadinya reformasi politik dan partisipasi masyarakat yang luas. Puncaknya pada 2011 ketika banyak aktivis dan pemuda yang terlibat dalam gerakan protes bertajuk “Nabiha Khamsa” melalui media sosial yang menuntut lengsernya Perdana Menteri Nasir Muhammad Al-Ahmad As-Sabah melalui semboyan “As-Sya’bu Yurid Isqaat Nasir” atau rakyat ingin Nasir turun.<sup>31</sup> Pada 28 November 2011, akhirnya Syekh Nasir mengundurkan diri dan digantikan oleh Syekh Jabir Al-Mubarak Al-Ahmad As-Sabah. Rakyat pun menaruh banyak harapan kepada Syekh Jabir karena dianggap mewakili kalangan moderat kerajaan. Pada masa itu, diselenggarakan pemilu ke-14, tepatnya pada 2 Februari 2012 setelah Emira membubarkan Majelis Nasional pada 5 Desember 2011 karena memburuknya situasi politik dalam negeri.

Selain kekuatan monarki dengan segala persoalan di dalamnya, konstelasi politik juga diwarnai oleh persaingan sejumlah faksi politik, seperti kelompok oposisi Islam yang terdiri dari kalangan Islamic Constitutional Movement (ICM), Salafi, kelompok independen dari kalangan suku, ataupun dari kalangan nasionalis liberal dan Syiah.

---

<sup>30</sup> Ghabra, “Kuwait at the Crossroads,” 1–3.

<sup>31</sup> Fatiha Dazi Heni, “The Arab Spring Impact on Kuwait ‘Exceptionalism’,” *International Journal of Archaeology and Social Sciences in the Arab Peninsula*. (Chatillon: Arabian Humanities, 2015), 1–78.

**Tabel 3.1** Organisasi dan Faksi Politik di Kuwait<sup>32</sup>

<b>Organisasi Politik</b>	<b>Ideologi</b>
Aliansi Demokratik Nasional	Liberalisme Nasional
Blok Aksi Populer	Nasionalisme
Blok Islamis (ICM dan Salafi)	Sunni
Aliansi Islam Nasional	Syiah
Aliansi Keadilan dan Perdamaian	Syiah Moderat

Pemilu 2012 menjadi babak baru dari persaingan antar-kekuatan politik untuk memperebutkan 34 kursi dari total 50 kursi parlemen. Pada Pemilu ini, kelompok oposisi Islam memperoleh suara terbanyak dengan 23 kursi yang di antaranya diperoleh dari kelompok ICM dan Salafi. Sementara itu, kelompok liberal memperoleh sembilan kursi, adapun dari kalangan perempuan pada pemilu kali ini sama sekali tidak mendapatkan kursi.<sup>33</sup>

Pada 20 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi Kuwait mengeluarkan keputusan pembatalan hasil pemilu pada Februari 2012 dan memulihkan kembali keanggotaan parlemen hasil Pemilu 2009. Emir Kuwait pun memutuskan untuk mengadakan pemilu baru, yaitu pada 1 Desember 2012. Pembubaran parlemen ini merupakan puncak dari pertarungan politik yang sengit sejak diselenggarakannya pemilu antara rezim monarki dan kelompok oposisi Islam. Keputusan pemerintah membubarkan parlemen akhirnya mendapatkan penolakan keras dari oposisi dan menuduh adanya rekayasa pemerintah dalam pemilu. Mereka pun sepakat untuk memboikot pemilu baru tersebut serta melakukan aksi gerakan protes menolak keputusan Emir.

Meskipun parlemen hasil Pemilu Desember 2012 dikuasai kelompok pro-monarki, pertarungan antara kelompok oposisi dan rezim monarki terus berlanjut. Kelompok oposisi tetap eksis melakukan serangkaian gerakan protes di luar parlemen. Hingga pada akhir

<sup>32</sup> Diolah dari berbagai sumber.

<sup>33</sup> "Kuwait Study Group".

tahun 2012 terjadi perubahan peta persaingan antara eksekutif dan anggota legislatif pendukung kelompok oposisi, baik yang berada di dalam maupun luar parlemen.

Ada beberapa faktor yang mendorong kemenangan kelompok oposisi pada Pemilu 2012 sehingga mereka bisa tetap eksis mengawal demokrasi dan mendapat dukungan masyarakat. Di antaranya adalah faktor keislaman dan aktivitas sosial yang kuat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedalaman yang didominasi para suku serta sepak terjangnya sebagai garda depan gerakan protes menentang dominasi rezim monarki.

Memang, Islam memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk identitas sebuah kelompok masyarakat di Kuwait. Kebanyakan suku, misalnya termotivasi untuk meningkatkan identitas keislamannya melalui aktivitas sosial kemasyarakatan daripada harus terlibat langsung dalam kehidupan politik praktis. Komunitas suku yang kritis tidak ragu untuk mendukung kelompok Islam fundamentalis, seperti Salafi ataupun dengan kelompok reformis dari kalangan oposisi ICM selama dapat memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>34</sup> Lebih dari itu, komunitas suku di pesisir Kuwait kerap terlibat protes untuk perubahan dan berkontribusi dalam proses demokratisasi, terutama menentang pengaruh dominasi rezim dalam setiap aspek kehidupan. Kesadaran politik kelompok suku yang tumbuh dari hasil interaksi dengan gerakan Islam ataupun kelompok pemuda, terutama di daerah pesisir, telah sukses menghasilkan karakter baru mereka yang lebih kritis dan terbuka terhadap dinamika politik Kuwait, sebagian mereka bahkan terlibat dalam politik praktis dan menjadi anggota parlemen. Seperti yang diungkapkan Ghabra bahwa gerakan protes yang terjadi di Kuwait pada 2011 secara tidak langsung berasal dari perubahan sosial dan politik yang meluas di antara generasi muda suku.

---

<sup>34</sup> Yagoub Al-Kandari, *Tribalism, Sectarianism, and Democracy in Kuwaiti Culture*. (Kuwait: Kuwait University Press, 2014).

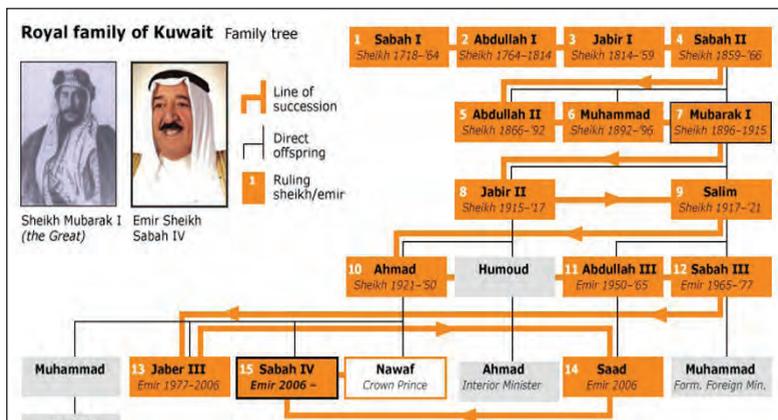
Perubahan ini juga memperluas persaingan antara kekuatan politik monarki dan aktivis politik muda yang sebagian besar berasal dari daerah pedalaman, baik yang berhaluan Islam maupun nasional sekuler. Kelompok ini memprotes kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak sesuai dengan Visi Kuwait 2035 dan buruknya pengelolaan negara akibat korupsi yang akut.<sup>35</sup>

Pertarungan antara kelompok kembali terlihat pada Pemilu Parlemen 2013, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan parlemen hasil Pemilu 1 Desember 2012 dan menyerukan penyelenggaraan pemilu baru. Pemerintah pun memberlakukan sistem baru, yaitu satu orang satu suara dari yang sebelumnya menggunakan sistem satu orang empat suara. Dalam pemilu yang diselenggarakan pada 25 Juli 2013 terjadi perubahan suara parlemen. Kelompok Syiah mengalami penurunan suara secara signifikan dengan hanya memperoleh delapan kursi dibandingkan pemilu sebelumnya yang mencapai 17 kursi. Kelompok liberal mengalami peningkatan suara yang sebelumnya hanya mendapat satu kursi menjadi sembilan kursi. Adapun kelompok muslim Sunni memperoleh suara terbanyak dengan 30 kursi. Kelompok perempuan hanya memperoleh dua kursi di parlemen.

Pada Agustus 2013, PM Syekh Mubarak Al-Jabir As-Sabah menetapkan keanggotaan dewan kabinet. Meskipun anggota parlemen adalah kelompok pro-pemerintah, ketidakpercayaan terhadap kabinet tetap terjadi. Hubungan antara rezim monarki dan parlemen pun semakin tidak harmonis karena masih adanya kelompok oposisi yang masuk di parlemen. Puncaknya terjadi pada Desember 2013 menyusul terjadinya permohonan permintaan pendapat kepada beberapa menteri, bahkan kepada perdana menteri sendiri. Pada akhirnya, krisis ini mendorong pengunduran diri seluruh jajaran kabinet 2013. Pada 6 Januari 2014, Emir mengeluarkan dekrit yang

---

<sup>35</sup> Ghabra, "Kuwait at the Crossroads".



Sumber: Diwan (2017)

**Gambar 3.3** Silsilah Dinasti As-Sabah

menetapkan struktur kabinet baru di bawah pimpinan PM Syekh Al-Jabir Al-Mubarak As-Sabah.<sup>36</sup>

Meskipun sepanjang tahun 2016 kondisi sosial politik Kuwait relatif stabil, dalam taraf tertentu ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif kerap saja terjadi. Perseteruan itu mencapai puncaknya dengan dibubarkannya kembali parlemen hasil Pemilu 2013. Pada 16 Oktober 2016, Perdana Menteri Syekh Al-Jabir Al-Mubarak mengadakan rapat tertutup dengan Emir As-Sabah mengenai pembubaran Majelis Nasional. Berdasarkan pendapat dari PM Al-Jabir, Emir menyetujui pembubaran tersebut dan mengeluarkan Dekrit 276 Tahun 2016 tentang Pembubaran Parlemen. Terlepas dari segala persoalan yang memicu pembubaran parlemen, perseteruan antara rezim monarki dan kelompok oposisi telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga memicu terjadinya mosi tidak percaya para anggota legislatif terhadap pemerintah terkait dengan kenaikan

<sup>36</sup> Jane Kinninmont, "Kuwait's Parliament: An Experiment in Semi-democracy," briefing paper, Chatham House, No. 03/2012, Middle East and North Africa Programme, (Agustus 2012), 1–16.

BBM dan pelanggaran finansial lainnya. Krisis ini berujung pada pembubaran Parlemen hasil Pemilu 2013 yang dilanjutkan dengan diselenggarakannya pemilu parlemen baru.

Pada pemilu kali ini kelompok oposisi yang memboikot pemilu sebelumnya turut bersaing memperebutkan kursi parlemen. Sekitar 70% pemilih yang memenuhi syarat memilih telah memberikan suaranya. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa kelompok oposisi memperoleh 24 kursi dari 50 kursi yang diperebutkan. Separuh dari kursi anggota parlemen oposisi tersebut berasal dari kelompok ICM sayap Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Sepertiga dari kursi parlemen diduduki oleh anggota baru dari kalangan pemuda, sedangkan kelompok Syiah dan suku mengalami penurunan suara menjadi 6 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya yang mendapat 9 kursi.<sup>37</sup> Setelah terpilih, sebagian besar anggota parlemen berjanji akan melakukan langkah-langkah menentang penghematan yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan pendapatan nonmilyak.

Dari dinamika politik yang terjadi sepanjang tahun 2006–2016, dapat kita saksikan bahwa dari tahun ke tahun perseteruan antara legislatif dan eksekutif semakin meningkat. Tercatat sebanyak lima kali penyelenggaraan pemilu baru terdapat enam kali pembubaran parlemen, yaitu pada 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, dan 2016. Menurut Ghabra, krisis politik yang berkelanjutan tersebut menunjukkan dinamika hangat politik Kuwait dalam beberapa tahun terakhir, di samping semakin menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

## **D. Peta Kekuatan Politik Islam**

Meskipun monarki Kuwait melarang pembentukan partai politik, organisasi sosial-politik nonresmi diperbolehkan dan berkembang dengan sangat dinamis. Para aktivisnya sangat aktif dan berperan cukup signifikan dalam kancah politik Kuwait. Dalam konteks

---

<sup>37</sup> K. Katzman, *Kuwait: Governance, Security, and U.S. Policy*, (Washington: Congressional Research Service, 2016).

politik nasional, kelompok oposisi dapat dibagi dalam tiga kekuatan utama, yaitu kelompok oposisi Islam, gerakan populer yang terdiri dari Forum Demokrasi Kuwait, Aliansi Demokrasi Nasional, dan Gerakan Progresif Kuwait. Sementara itu, kelompok independen, kebanyakan terdiri dari para aktivis, baik intelektual, pemuda maupun suku yang mempunyai pandangan kritis terhadap pemerintah.<sup>38</sup>

Meskipun ketiga kelompok ini mempunyai tujuan yang sama dalam hal reformasi politik, terdapat perbedaan yang menonjol di antara mereka, terutama terkait dengan masalah kebijakan sosial-politik, agama, dan kebijakan luar negeri. Menurut Tetreault, secara ideologis, aktivisme politik Kuwait didominasi oleh beberapa arus, di antaranya adalah kelompok pedagang liberal yang berhaluan nasionalis yang terinspirasi pemikiran Nasserisme dan Ba'tsisme, kelompok ini berkembang sekitar tahun 1970-an, kemudian kelompok yang berhaluan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin (IM) dan Salafi. Pada bagian ini, akan dikaji secara lebih mendalam tentang kekuatan politik Islam yang perannya dirasa signifikan dalam kancah politik Kuwait. Menurut Katzman, kelompok politik Islam sesuai afliasinya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok oposisi Islam yang terdiri dari faksi politik Islamic Constitutional Movement (ICM) dan Salafi. Sementara itu, kelompok pro-monarki terdiri dari kalangan Syiah dengan beragam alirannya.<sup>39</sup>

Gerakan ICM merupakan sayap politik IM yang cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Kuwait. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang simpati dengan aktivitas sosial-politik ICM serta banyak dari anggota IM yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> S. Awadh, "Islamic Political Groups in Kuwait: Roots and Influences". *Unpublished Doctoral Thesis*, (Portsmouth: University of Portsmouth, 1999), 10–15.

<sup>39</sup> Courtney Freer, "The Rise of Pragmatic Islamism in Kuwait's Post Arab Spring Opposition," *Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brookings*. (Washington: Brookings Institution, 2015), 1–2.

<sup>40</sup> Freer, "The Rise of Pragmatic Islamism", 15–20.

Secara historis, Gerakan IM dapat tersebar luas berkat persinggungan antara Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok Islam Kuwait yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 setelah pemimpin gerakan Abdul Aziz Ali Al-Matu' bertemu dengan Hassan Al-Banna di Makkah. Pertemuan ini menginspirasi berdirinya jaringan pertama Ikhwanul Muslimin di Kuwait pada tahun 1952 dengan nama Jamiyyah Al-Irsyad Al-Islami yang kemudian berganti nama menjadi Jamiyyah Al-Islah Al-Ijtimai. Atas saran Al-Banna jugalah Al-Matu' menjadi anggota Majelis Konstituante Ikhwanul Muslimin. Melalui majelis ini, Al-Matu' banyak menjalin hubungan dengan jaringan IM Mesir dan para pendukung Al-Banna, bahkan sebagian di antaranya ada yang mengikuti Al-Matu' ke Kuwait untuk menyebarkan paham IM di sana. Kondisi politik Mesir pada era 1954 yang represif terhadap IM telah mengakibatkan eksodus besar-besaran sejumlah tokoh dan aktivis IM ke sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait.<sup>41</sup> Seiring berjalannya waktu, generasi pengikut Al-Matu' kemudian menjadi pencetus lahirnya organisasi politik reformis ICM.

ICM didirikan sebagai gerakan politik Islam gaya baru di Kuwait yang didirikan pada 30 Maret 1991 dengan tujuan melakukan reformasi pemerintah secara legal di samping perannya dalam bidang sosial dan amal. Menurut Islam Hassan dalam artikel *Muslim Brotherhood in Kuwait*, kemunculan ICM di Kuwait dilatarbelakangi oleh kekecewaan sebagian anggotanya terhadap IM Internasional yang seakan-akan diam dan membiarkan Irak melakukan invasi ke Kuwait pada Agustus 1990. Oleh karena itu, gerakan ini memutuskan hubungan dengan IM internasional, padahal sebelumnya IM Kuwait merupakan garda depan pendukung aktivisme IM

---

<sup>41</sup> Nathan J. Brown, "Pushing Toward Party Politics? Kuwait's Islamic Constitutional Movement". *Carnegie Endowment for International Peace*, No. 79, (Januari 2007), <http://carnegieendowment.org/2007/02/13/pushing-toward-party-politics-kuwait-s-islamic-constitutional-movement-pub-19016>.

internasional, seperti gerakan perlawanan melawan Israel dan perang melawan sejumlah rezim Timur Tengah.<sup>42</sup>

Setelah Perang Teluk, ICM tumbuh dengan dorongan sebagian anggotanya untuk terus memperjuangkan reformasi melalui Social Reformation Society (SRS) yang bergerak dalam bidang sosial dan amal. Seiring berjalannya waktu, IM Kuwait mengalami perpecahan tepatnya pada tahun 2003 dengan munculnya dua kubu kepemimpinan IM sehingga pada Pemilu 2003 kelompok tersebut mengalami kekalahan dan harus kehilangan tiga dari lima jatah kursi IM di parlemen.<sup>43</sup>

Setelah kekalahan pada pemilu, ICM melakukan restrukturisasi organisasi secara drastis dengan menciptakan Majelis Umum ICM yang beranggotakan 70 orang di samping perombakan struktur ICM yang beranggotakan 21 orang untuk mengisi jabatan di kantor urusan politik ICM. Menurut sebagian kalangan, restrukturisasi ini dimaksudkan untuk membentuk organisasi atau faksi politik guna menggalang kekuatan dalam menghadapi pemilu baru. ICM pun merombak jajaran pimpinannya dengan memprioritaskan anggota yang lebih muda dan moderat dibandingkan kalangan yang lebih tua. Terbukti dengan perombakan pada masa awal tersebut, beberapa kali ICM dan kelompok yang tergabung dalam blok oposisi memperoleh suara yang signifikan, seperti pada pemilu baru 2012, 2014, dan 2016. Di parlemen, ICM berkoalisi dengan kelompok Islam lainnya untuk bekerja sama dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan politik.

Sementara itu, gerakan Salafi di Kuwait dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu Salafi puritan dan aktivis. Kaum Salafi puritan lebih kuat dan berkembang di dalam negeri, sedangkan Salafi yang

---

<sup>42</sup> Islam Hassan, "The Muslim Brotherhood in Kuwait: A Historical Analysis of the Islamic Movement," Munich, GRIN Verlag, 1–12, <https://www.grin.com/document/301286>.

<sup>43</sup> Ghabra, "Balancing State and Society," 58–60.

aktivis lebih banyak menggalang dukungan di luar negeri.<sup>44</sup> Salafi puritan cenderung kurang politis dan lebih memilih untuk fokus pada penguatan keagamaan dan penegakan nilai Islam yang sesuai dengan As-Salaf As-Salih. Sementara itu, Salafi yang aktivis sejak lama terlibat dalam politik praktis di Kuwait. Bahkan, dalam Pemilu Parlemen 2012, kelompok ini memperoleh suara yang signifikan dan sempat mendominasi kursi parlemen. Hanya saja, dominasi dan sikap represif monarki menjadikan kelompok ini terpinggirkan.

Kemunculan Salafi menjadi organisasi yang tertata pada pertengahan abad ke-19 adalah ketika sejumlah kalangan pemuda yang mengikuti dakwah Salafi berkumpul dan menyusun program untuk mengingatkan kembali masyarakat Kuwait akan pentingnya Islam yang bersumber dari ajaran Rasul dan para sahabat. Mereka memutuskan untuk tidak banyak berkecimpung dalam kancah politik, tetapi lebih fokus pada bidang pendidikan dan amal.

Pada masa awal berdirinya negara Kuwait modern, orang Salafi mendapatkan banyak pengikut di Kuwait dan mulai terjun ke dunia politik, khususnya dari kalangan pebisnis. Organisasi kelompok Salafi yang pertama kali muncul adalah Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) di bawah pimpinan syekh dari Mesir, Abdurrahman Abdul Khaliq. Tujuannya adalah agar RIHS dapat menjadi kendaraan politik bagi kaum Salafi, terutama bagi para ulama dan aktivis. Meskipun kelompok ini kerap dirugikan rezim, keberadaannya di Kuwait sangat diuntungkan dan menikmati dukungan dari pengusaha Arab Saudi sebagai sekutu dekat monarki.

Selain RIHS, faksi Salafi lainnya yang juga berperan dalam kancah politik Kuwait adalah Asosiasi Salafi Islam (At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi) yang didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan membangun moralitas masyarakat Kuwait setelah konflik yang berkepanjangan dengan Irak. Isu yang kerap didengungkan kelompok

---

<sup>44</sup> Zoltan Pall, "Kuwait Salafism and Its Growing Influence in the Levant," *Carnegie Endowment for International Peace* (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2014), 1–38.

ini di parlemen adalah berkaitan dengan hukum Islam (syariat) dan menjadikan syariat sebagai satu-satunya sumber hukum, melarang minuman keras, dan perjudian. Di parlemen, Asosiasi Salafi Islam merupakan kelompok Salafi terbesar yang dekat dengan kelompok pro-monarki. Kelompok ini harus bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari kalangan elite urban atau “Hadar” dengan ICM yang juga mendapatkan dukungan signifikan dari kalangan urban.

Kemudian, yang terakhir adalah Partai Al-Ummah (Hizb Al-Ummah) yang merupakan sayap politik dari kelompok Salafi. Faksi ini didirikan pada tahun 2005 dengan sebagian besar anggotanya berasal dari komunitas Arab Badui yang terinspirasi dari pemikiran Syekh Al-Mutairi. Para pemimpin kelompok ini berusaha mendorong gerakan Salafi di seluruh Kuwait agar dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Di parlemen, pendukung faksi ini kerap menyerukan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi di parlemen. Karena pandangannya yang lebih moderat, wajar kiranya jika banyak aktivis Salafi dari Partai Al-Ummah tidak disukai oleh kalangan Salafi konservatif.

Jika melihat di antara kekuatan politik Islam yang tumbuh di Kuwait, tampaknya, ICM merupakan kelompok yang paling siap dalam menghadapi terpaan krisis dan dominasi kuat monarki karena ICM lebih mengedepankan reformasi damai dalam aksinya ketimbang harus menempuh cara-cara kekerasan. Hal ini berbeda dengan kelompok lain, seperti Syiah yang sudah terfragmentasi secara politis dengan menjadi kelompok pro-monarki sehingga tidak memiliki organisasi politik yang cukup baik di tengah semakin meningkatnya krisis politik Kuwait.

## **E. Kuwait dalam Dinamika Politik Regional dan Global**

Selain sebagai negara yang cukup dinamis dalam hal sosial-politik, Kuwait merupakan negara yang mencoba mengedepankan politik “*high profile*” dalam setiap kebijakan luar negerinya. Dalam konteks politik regional, Kuwait kerap menunjukkan sikap pro-aktifnya dan

menempatkan diri sebagai salah satu negara yang menjadi mediator dalam berbagai persoalan dan krisis yang melanda sejumlah negara Timur Tengah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Kuwait untuk menjadi negara penyeimbang di kawasan Timur Tengah. Belum lama ini, misalnya, Kuwait menjadi negara yang memfasilitasi pertemuan antara Qatar dan Arab Saudi, serta sejumlah negara lain yang terlibat konflik, seperti Yaman, Suriah, dan Libya.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kuwait menjadi negara yang banyak terlibat aktif dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan di daerah konflik dan mengatasi persoalan dunia, seperti halnya isu Palestina-Israel. Sebagai negara yang terlibat dalam GCC, Liga Arab, dan OKI, hubungan Kuwait dengan negara-negara Islam yang terlibat konflik sangat kuat, terlebih dukungannya terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Belum lama ini, Kuwait menjadi salah satu negara yang memprakarsai proposal damai Palestina-Israel, serta rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Karena posisinya tersebut, wajar kiranya sebagian kalangan memandang bahwa Kuwait bertindak sebagai penyeimbang kekuatan di tengah krisis diplomatik antara Qatar dan GCC yang dimotori Arab Saudi.

Sebagai negara yang tergabung dalam aliansi anti-terorisme yang digagas Arab Saudi. Persoalan terorisme di kawasan menjadi salah satu isu penting yang kerap didengungkan Kuwait pada sejumlah kesempatan. Bahkan, belum lama ini, sejumlah negara menuduh bahwa beberapa menteri dan kerabat dekat monarki mulai membantu dan mendanai kelompok yang terlibat aksi teror di Suriah dan Irak. Akibatnya, pada Agustus 2016 lalu, AS menjatuhkan sanksi pembekuan aset terhadap pejabat Kementerian Urusan Wakaf dan Islam Kuwait. Dukungan Kuwait terhadap kelompok yang dianggap teroris tampaknya cukup beralasan, berhubung di antara negara Timur Tengah lainnya, Kuwait adalah rumah yang aman bagi perkembangan gerakan Islam moderat ataupun fundamentalis, seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafiyah.

Ada beberapa alasan yang mendorong Kuwait untuk menunjukkan “*high profile*” dan banyak terlibat aktif dalam kebijakan politik

luar negerinya. Antara lain, kemampuan militer dan meningkatnya ekonomi Kuwait dalam beberapa tahun terakhir melalui pendapatan dan ekspor minyak telah memicu negara ini untuk banyak terlibat aktif sebagai penyeimbang kekuatan di tengah mulai pudarnya pengaruh Qatar dan Arab Saudi di kawasan. Di samping itu, sebagai sekutu dekat Saudi, Kuwait di bawah Emir Al-Jabir As-Sabah mempunyai posisi tawar yang begitu kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik yang melanda Timur Tengah saat ini.

## **F. Politik Islam dalam Bingkai Demokrasi Kuwait**

Pengalaman Kuwait dalam berdemokrasi, terutama sejak masa pascakemerdekaan, menjadikan Kuwait sebagai *role model* dalam pelaksanaan politik demokrasi di kawasan terlepas dari kekurangan yang melatarbelakanginya. Pengalaman demokrasi tersebut telah memberikan ruang yang luas bagi warga dengan berbagai macam kecenderungan politiknya, baik islamis, nasional-sekuler maupun sosialis untuk terlibat aktif dalam proses demokratisasi yang berlangsung, khususnya melalui penyelenggaraan pemilu parlemen dan peran aktif warga di media sosial.

Di antara gerakan atau organisasi politik terbesar yang memanfaatkan momentum perkembangan demokrasi di Kuwait adalah ICM atau Islamic Constitutional Movement yang merupakan afiliasi dari kelompok Ikhwanul Muslimin Kuwait. Seiring dengan berjalannya waktu, ICM melakukan reorganisasi besar-besaran melalui agenda reformasi dan memunculkan kepemimpinan baru di tubuh organisasinya, terutama dari kalangan pemuda. Sejak saat itu, popularitas organisasi dan pengaruh politik semakin meningkat, bahkan salah seorang petinggi ICM diangkat sebagai menteri di kabinet yang baru terbentuk, kemudian tradisi tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Dari sini dapat dilihat bahwa ICM mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya memajukan demokrasi di Kuwait dengan terlibat langsung dalam pemerintahan. Dengan kata lain, ICM adalah gerakan yang paling populer dan kompromistis dibandingkan kelompok Salafi yang tergabung dalam

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) yang lebih reaksioner ataupun dengan Asosiasi Kelompok Liberal dan Syiah yang kurang populer di kalangan masyarakat perkotaan dan suku tradisional.

Berkembangnya gerakan maupun organisasi politik di Kuwait tidak lepas dari tiga faktor pendukung yang melatarbelakanginya, yaitu faktor Islam, tribalisme (kesukuan), dan kelas menengah. Ketiga faktor inilah yang menjadikan kuatnya relasi antara warga dan faksi politik tertentu. Meski dalam beberapa tahun terakhir tren demokrasi Kuwait mengalami peningkatan, lambat laun pada akhirnya Kuwait mengalami guncangan sebagai imbas dari pengaruh dinamika politik regional, terutama setelah terjadinya *Arab Spring* yang meluluhlantakkan sejumlah negara. Dalam hal ini, dominasi rezim di Kuwait justru semakin kentara, isu korupsi dan perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan serta diskriminasi terhadap kelompok suku dan imigran mengakibatkan semakin maraknya aksi protes yang berujung pada penangkapan para aktivis pro-reformasi, khususnya dari kalangan kelompok Islam. Namun, banyak kalangan memandang bahwa demokrasi Kuwait ke depan akan semakin berkembang, terlebih pemerintah monarki yang akan memberlakukan kebebasan berpolitik bagi seluruh komponen warga melalui sejumlah amendemen konstitusi serta peran Kuwait dalam kancah politik internasional yang mengedepankan politik “*high profile*” dalam setiap kebijakan luar negerinya.

## Daftar Pustaka

- AlFozaie, Naser. “Tribalism in Kuwait: Impacts on the Parliament.” Master Thesis, Department of International Environment and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences, (Oslo: Norwegia, 2016). Diakses pada Agustus 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/154672692.pdf>.
- Al-Kandari, Yagoub. *Tribalism, Sectarianism, and Democracy in Kuwaiti Culture*. Kuwait: Kuwait University Press, 2014.

- Awadh, S. "Islamic Political Groups in Kuwait: Roots and Influences". Unpublished Doctoral Thesis, Portsmouth: University of Portsmouth, 1999, 10–15.
- Brown, Nathan J. "Pushing Toward Party Politics? Kuwait's Islamic Constitutional Movement". *Carnegie Endowment for International Peace*, No.79, January 2007, 3–20, diakses pada 15 Mei 2017. <http://carnegieendowment.org/2007/02/13/pushing-toward-party-politics-kuwait-s-islamic-constitutional-movement-pub-19016>.
- Casey, Michael S. *The History of Kuwait*. Westport, CT: Greenwood Press, 2007.
- Defense Language Institute Foreign Language Centre. "Cultural Orientation Arab Kuwait." Diakses pada Agustus 2017. <https://www.dliflc.edu/cultural-orientation-arabic-kuwait/>.
- Diwan, Kristin Smith. *New Generation Royals and Succession Dynamics in the Gulf State*. Washington: Arab Gulf Institute, 2017.
- Don Peretz. *State of Kuwait*. Diakses 16 April 2016. <https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/state-kuwait/>.
- Etheridge, Jamie. "Hallmarks of Kuwait's Middle Class". Kuwait Times, 13 Juni 2014. <http://news.kuwaittimes.net/hallmarks-kuwait-mid-middle-class/>.
- Freer, Courtney. "The Rise of Pragmatic Islamism in Kuwait's Post *Arab Spring* Opposition". *Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brookings*. Washington: Brookings Institution, 2015, 1–2.
- "Focus Group Discussion (FGD)". Narasumber Tatang Budie Utama Razak, Duta Besar RI untuk Kuwait, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 20 Juli 2017.
- Ghabra, Shafeeq "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait". *Middle East Policy Council*, 5 No. 2 (1997), 58–60.
- Ghabra, Shafeeq. "Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation". *Middle East Institute Policy paper Series*. Washington: Middle East Institute, 2014, 1–3.
- Hassan, Islam. "The Muslim Brotherhood in Kuwait: A Historical Analysis of the Islamic Movement", Munich, GRIN Verlag, 1–12, <https://www.grin.com/document/301286>.

- Heni, Fatiha Dazi. "The Arab Spring Impact on Kuwait 'Exceptionalism'." *International Journal of Archaeology and Social Sciences in the Arab Peninsula*. Chatillon: Arabian Humanities, 2015, 1–78.
- Hiramatsu, A. "The Changing Nature of the Parliamentary System in Kuwait: Islamists, Tribes, and Women in Recent Elections." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 4 No. 1&2 (2011).
- International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2016,. Diakses pada Juli 2017. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand-Symptoms-and-Remedies>.
- Katzman, K. 2016. *Kuwait: Governance, Security, and U.S. Policy*. Washington: Congressional Research Service, 2016.
- "Kuwait's Constitution of 1962," Reinstated in 1992. Diakses pada Agustus 2017. [https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait\\_1992.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.pdf?lang=en).
- Kuwait Ethnic Groups, Global Connections the Middle East. 2002. <https://www.pbs.org/wgbh/globalconnections/mideast/maps/demotext.html>.
- "Kuwait Population 2017". Diakses pada September 2017. <http://countrymeters.info/en/Kuwait>.
- Kuwait Population 2017, Central Statistical Bureau. [https://www.csb.gov.kw/Default\\_EN](https://www.csb.gov.kw/Default_EN). January 2017.
- "Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC". London: Chatham House, 2012.
- Kinninmont, Jane. "Kuwait's Parliament: An Experiment in Semi-democracy", Briefing paper, Chatham House, No.03/2012, Middle East and North Africa Programme, August 2012, 1–16.
- Long, David E., Bernard Reich, dan Mark Gasiorowski, ed. *The Government and Politics of the Middle East and North Africa* (6th Edition) 6th (sixth) Revised Edition. Colorado: Westview Press, 2010.
- Olimat, Muhamad S. "Women and Politics in Kuwait". *Journal of International Women's Studies*, 11 No. 2 (September 2009), 199–212.
- Pall, Zoltan. "Kuwait Salafism and Its Growing Influence in the Levant". *Carnegie Endowment for International Peace*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2014, 1–38.



## BAB

# 4

## Problematika Kekuatan Politik Islam di Uni Emirat Arab

*M. Hamdan Basyar*

### A. Gambaran Umum Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan negara federal di Timur Tengah yang terdiri dari tujuh keemiran (*emirates*). Ketujuh Emirat itu adalah Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah, dan Fujairah.<sup>1</sup> Abu Dhabi adalah ibu kota federasi Uni

<sup>1</sup> “Ras al-Khaimah” masuk menjadi wilayah Uni Emirat Arab berdasarkan Keputusan Dewan Tinggi Federal (المجلس الأعلى للاتحاد) No. 2/1972, setelah Ras al-Khaimah bergabung ke dalam negara Uni Emirat Arab. Lihat *United Arab Emirates Constitution*, Pasal 1. Sebelumnya, Pasal 1 berbunyi, “The Federation is composed of the following Emirates: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, and Fujairah.”

Emirat Arab dan merupakan wilayah terbesar dari tujuh emirat yang tergabung dalam UEA. Negara ini terletak di perbatasan dengan Kerajaan Arab Saudi, Kesultanan Oman, dan Teluk Arab. UEA terdiri dari 200 pulau dan memiliki garis pantai sejauh 700 kilometer.

Sebelum menjadi negara merdeka, UEA merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Kemudian, ada kesepakatan yang dicapai antara penguasa setempat dari enam negara Emirat (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm al-Qaiwain, Fujairah, dan Ajman) untuk membentuk sebuah negara. Secara resmi, negara Uni Emirat Arab didirikan pada 2 Desember 1971. Emirat ketujuh, Ras al-Khaimah, masuk ke dalam federasi UEA pada tahun 1972. Sejak terbentuknya negara UEA, mereka berusaha membentuk identitas nasional yang berbeda dengan negara di sekitarnya. Sistem politik UEA dirancang untuk mempertahankan warisan lama yang disesuaikan dan digabungkan dengan struktur pemerintahan modern.

Secara ekonomi, negara federal ini mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum ditemukannya minyak, kawasan ini bergantung pada ekonomi sederhana, terutama pada pertanian nomaden, budi daya tanaman kurma, perikanan, mutiara, dan pelayaran. Namun, penemuan minyak pada tahun 1930-an telah mengubah kehidupan sosial dan ekonomi di UEA. Dalam waktu singkat, produk domestik bruto (PDB) negara Emirat meningkat 236 kali lipat lebih, yaitu dari 6,5 miliar dirham Uni Emirat Arab (AED) pada tahun 1971 menjadi 1.540 miliar AED pada tahun 2014.<sup>2</sup>

Pemerintah Uni Emirat Arab mengklaim bahwa mereka memiliki cadangan minyak terbesar ke-7 di dunia. Diperkirakan cadangan minyak yang dimiliki UEA adalah 97,8 miliar barel, sedangkan cadangan gas bumi sebesar 215 triliun kaki kubik. Ini berarti UEA memiliki 4% cadangan minyak dunia dan 3,5% cadangan gas bumi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> "AED adalah dirham Uni Emirat Arab (mata uang resmi Uni Emirat Arab)", diakses pada 7 Maret 2017, <http://government.ae/en/economy>.

<sup>3</sup> "Cadangan minyak UEA adalah ke-8 di dunia", diakses pada 7 Maret 2017, <http://government.ae/en/economy> dan <http://geab.eu/en/top-10-countries-with-the-worlds-biggest-oil-reserves/>, diakses pada 16 Oktober 2017. Ada sumber

Dengan limpahan minyak dan gas bumi, pemerintah UEA dapat membangun fisik dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka melakukan perubahan yang signifikan di bidang industri dan infrastruktur. Dengan cara itu, penguasa UEA mengusahakan masyarakatnya untuk maju dan sejahtera.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dinamika sosial-politik di Uni Emirat Arab tidak lepas dari aktivitas politik Islam seperti halnya yang terjadi di negara-negara Arab. Kelompok oposisi Islam terbesar di UEA adalah Al-Islah yang bertujuan melakukan perubahan rezim. Al-Islah (the Reform and Social Guidance) terdaftar sebagai LSM di UEA pada tahun 1974. Aktivitas awal organisasi ini adalah berkaitan dengan bidang olah raga, budaya, amal, dan aktivitas sosial. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendapat lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial UEA, Al-Islah memiliki hubungan baik dengan pegawai pemerintah selama dua dekade sejak awal berdirinya. Selama periode itu, kelompok Al-Islah tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan dan agresif.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, organisasi tersebut mengembangkan agenda reformasi paralel dengan agenda sosialnya. Aktivitas ini banyak digunakan oleh gerakan politik Islam lain di dunia Arab. Terinspirasi oleh nilai-nilai politik Islam moderat, Al-Islah bertujuan

---

lain menyebutkan cadangan minyak UEA adalah terbesar ke-8 di dunia, <http://explorationanddevelopment.energy-business-review.com/news/top-ten-countries-with-worlds-largest-oil-reserves-5793487>, diakses pada 16 Oktober 2017 dan <http://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oil-reserves-by-country.html>, diakses pada 16 Oktober 2017. Di dalam Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), cadangan minyak Uni Emirat Arab menduduki peringkat ke-6, setelah Venezuela (302,25 miliar barel), Arab Saudi (266,21 miliar barel), Iran (157,20 miliar barel), Irak (148,77 miliar barel), dan Kuwait (101,50 miliar barel). Lihat [http://www.opec.org/opec\\_web/en/data\\_graphs/330.htm](http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm), diakses pada 16 Oktober 2017.

<sup>4</sup> Pekka Hakala, "Opposition in the United Arab Emirates". *Quick Policy Insight*, (November 2012). [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/join/2012/491458/EXPO-AFET\\_SP%282012%29491458\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf).

menyediakan petunjuk moral dan reformasi politik bagi warga negara UEA dan para anggota legislatif.<sup>5</sup>

Bagian tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kelompok Islam berkiprah di Uni Emirat Arab. Untuk memahami hal tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah kehidupan negara emirat, kepolitikan yang ada di sana, juga keadaan sosial ekonomi masyarakat emirat.

## B. Sejarah dan Dinamika Sosial-Politik

Pada periode pra-Islam dan awal Islam, wilayah UEA kurang menarik untuk dijadikan hunian. Sepanjang pantai Abu Dhabi sampai ke sebagian pedalaman, tanahnya merupakan “dataran garam” (*sabkha*). Daerah itu relatif kosong. Pantainya sangat tidak ramah dan tidak menarik untuk segala bentuk permukiman karena sebagian besar wilayahnya adalah *sabkha*. Ketika hujan, *sabkha* ini hampir tidak dapat dilalui oleh pelancong. Selanjutnya, laut lepas pantai sering kali sangat dangkal sehingga kapal sulit untuk berlabuh. Akibatnya, pada periode pra-Islam dan Islam, wilayah sebelah barat Abu Dhabi sampai ke Semenanjung Qatar jarang dihuni oleh manusia. Sebaliknya, di sebelah timur Abu Dhabi, yakni di Dubai dan Sharjah, pelabuhannya lebih sering dikunjungi.<sup>6</sup>

Pada perkembangan berikutnya, wilayah Uni Emirat yang perbatasan maritimnya berada di wilayah Teluk Arab, telah menarik para migran dan pedagang dari tempat lain. Pada abad ke-18, Portugal dan Belanda sempat memperluas kepemilikan mereka ke wilayah tersebut, tetapi kemudian mundur seiring dengan pertumbuhan kekuatan Angkatan Laut Inggris di sana. Wilayah itu tidak hanya menarik pendatang dari Eropa, tetapi juga menarik para pedagang dari India dan China.

---

<sup>5</sup> Hakala, “Opposition”.

<sup>6</sup> Geoffrey R. King, “The Coming of Islam and the Islamic Period in the UAE,” dalam *United Arab Emirates: A New Perspective*, ed. Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer, (London: Trident Press Ltd., 2001), 70.

Pada abad ke-19, Inggris menandatangani serangkaian kesepakatan dengan para penguasa di emirat. Kesepakatan itu menghasilkan wilayah yang dikenal sebagai “Negara-negara *Trucial*” (disebut juga sebagai “*Trucial Oman*” atau “*Trucial Syekhdoms*”). Penguasa emirat setuju untuk menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Mereka juga tidak akan melakukan hubungan dengan pemerintah asing mana pun selain Inggris. Bila mereka akan bekerja sama dengan pemerintah lain, perlu persetujuan terlebih dahulu dari Inggris. Sebagai imbalannya, Inggris berjanji untuk melindungi pantai wilayah emirat dari semua agresi melalui laut dan memberikan bantuan jika terjadi serangan di wilayah darat.<sup>7</sup>

Setelah Perang Dunia II, negara-negara yang tergabung dalam “*Trucial Syekhdoms*” memperoleh kemerdekaan. Bahrain menyatakan merdeka pada 15 Agustus 1971; Qatar mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 September 1971. Kemudian, enam keemiran bergabung dalam Uni Emirat Arab (UEA) dan menyatakan merdeka pada 2 Desember 1971. Wilayah UEA bertambah besar setelah Ras al-Khaimah ikut bergabung pada tahun 1972. Posisi wilayah UEA berada di pantai Teluk Arab. Di wilayah daratan, UEA berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman.

Pada tahun 2017, diperkirakan jumlah penduduk UEA adalah 9.423.740 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 10% yang menjadi warga negara UEA dan sisanya terdiri dari ekspatriat.<sup>8</sup> UEA memiliki tingkat migrasi bersih tertinggi ke-7 di dunia. Menurut undang-undang di sana, setiap ekspatriat diperbolehkan mengajukan diri menjadi warga negara UEA setelah mereka tinggal di negara tersebut selama 20 tahun dengan syarat mereka tidak pernah di-

---

<sup>7</sup> Lihat, “United Arab Emirates,” diakses pada 24 Oktober 2017, <https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates>; <http://www.uae-embassy.org/about-uae/history>, diakses pada 29 September 2017.

<sup>8</sup> Lihat, “United Arab Emirates Population”, diakses pada 30 Oktober 2017, <http://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population/>. Lihat juga wawancara dengan Ubaidillah, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Uni Emirat Arab. Wawancara dilaksanakan di Makkah, Arab Saudi, pada 6 April 2017.

hukum karena melakukan kejahatan dan mereka dapat berbicara bahasa Arab. Penduduk ekspatriat terbesar di UEA berasal dari Asia Selatan (58%), diikuti oleh orang Asia lainnya (17%), dan ekspatriat Barat (8,5%). UEA juga memiliki ketidakseimbangan gender tertinggi di dunia, dengan rasio laki-laki/perempuan adalah 2,20 atau 2,75 untuk kelompok usia 15–65 tahun.<sup>9</sup>

Secara formal, negara Uni Emirat Arab menganut agama Islam. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi UEA, pasal 7, yang menyebutkan, “Islam adalah agama resmi Uni. Syariat Islam merupakan sumber hukum utama dalam Uni. Bahasa resmi Uni adalah bahasa Arab.”<sup>10</sup> Tidak ada kepastian berapa jumlah penduduk muslim di UEA. Beberapa sumber menyebutkan penduduk muslim di UEA dengan jumlah berbeda. Ada yang menyebutkan jumlah muslim di sana adalah 96% dari seluruh penduduk UEA;<sup>11</sup> ada juga menyebut 76%;<sup>12</sup> atau ada juga yang menyebutkan jumlah penduduk muslim di UEA adalah 62%.<sup>13</sup> Yang jelas di UEA ada penganut agama selain Islam. Menurut sumber resmi pemerintah UEA, di sana ada toleransi yang cukup tinggi. Mereka mengklaim:

“Toleransi adalah sifat baik dan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan Islam. Hal tersebut mencakup semua lingkup kehidupan: pribadi, organisasi, dan negara. Dengan lebih dari 200 kewarganegaraan yang hidup rukun dan sukses, UEA adalah contoh nyata negara yang toleran dan inklusif. Pemerintah Federal dengan kuat mendukung terciptanya rasa setia kawan dan saling memahami sebagai nilai-nilai inti dalam masyarakat.”<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> “United Arab Emirates Population”, 1–2.

<sup>10</sup> “United Arab Emirates’ Constitution of 1971 with Amendments through 2004,” (New York : Oxford University Press, 2017). <http://www.constituteproject.org>.

<sup>11</sup> “Religious Beliefs and Spirituality in United Arab Emirates,” Diakses pada 1 Agustus 2019, <https://www.studycountry.com/guide/AE-religion.htm>.

<sup>12</sup> “United Arab Emirates People,” diakses pada 20 November 2017, [https://theodora.com/wfbcurrent/united\\_arab\\_emirates/united\\_arab\\_emirates\\_people.html](https://theodora.com/wfbcurrent/united_arab_emirates/united_arab_emirates_people.html).

<sup>13</sup> Jill Ann Crystal and J.E. Peterson. “United Arab Emirates: languages and Religion,” *Encyclopedia Britannica*. Diakses pada 8 Agustus 2019, <https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates/Languages-and-religion>.

<sup>14</sup> “Government of Future”.



Sumber: Country Watch (2014)

**Gambar 4.1** Peta Uni Emirat Arab

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat di wilayah Teluk itu hidup dari industri mutiara. Banyak penduduk yang semi nomaden. Pada musim panas, mereka di pantai dan mengembangkan produk mutiara. Namun, pada musim dingin, mereka berpindah ke wilayah tengah. Kemudian, kehidupan mereka kurang membaik ketika ada depresi ekonomi dunia pada akhir 1920-an dan awal 1930-an. Usaha mutiara mereka menjadi lesu, apalagi ditambah dengan penemuan mutiara budi daya Jepang yang ikut merusak industri mutiara mereka.

Pada awal 1930-an, tim perusahaan minyak pertama melakukan survei geologi di Emirat. Sekitar tiga puluh tahun kemudian, 1962, sudah ada hasil minyak mentah yang diekspor dari Abu Dhabi. Kondisi itu mendorong peningkatan ekonomi dari sektor minyak. Pada tahun 1966, Syekh Zayed bin Sultan Al-Nahyan terpilih sebagai penguasa Abu Dhabi. Di bawah kepemimpinan Syekh Zayed,

pendapatan minyak terus membaik. Mereka dapat melakukan perbaikan infrastruktur dengan pembangunan sekolah, perumahan, rumah sakit, dan jalan-jalan di seluruh wilayah Abu Dhabi.

Sementara itu, Syekh Rashid bin Saeed Al-Maktoum, penguasa Dubai sejak 1939, menggantikan pendapatan mutiara dengan mendirikan industri perkapalan. Pada tahun 1969, saat Emirat Dubai mulai mengeksplor minyak, Syekh Rashid memusatkan perhatiannya pada pengembangan program untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya dengan pendapatan minyak yang semakin membaik.

Pada bulan Januari 1968, Pemerintah Inggris mengumumkan untuk mengakhiri hubungan perjanjiannya dengan “Negara-negara *Trucial*,” dan dengan dua *Syeykhdom* lainnya di Teluk (Bahrain dan Qatar) pada akhir 1971. Sejak saat itu, keluarga penguasa di tujuh Emirat, bersama dengan Bahrain dan Qatar, terlibat dalam serangkaian pertemuan dan negosiasi yang panjang untuk membentuk suatu kesepakatan bersama. Awalnya, ada keinginan untuk bersatu dalam struktur politik bernegara setelah penarikan Inggris dari sana. Negosiasi ini untuk membentuk formasi federasi sembilan wilayah (termasuk Bahrain dan Qatar). Negosiasi difasilitasi oleh Kuwait dan Arab Saudi. Akhirnya, mereka hanya berhasil menyatukan tujuh wilayah keemiran karena Bahrain dan Qatar sudah terlebih dahulu mendeklarasikan kemerdekaan.<sup>15</sup>

Sejak penemuan minyak, ekonomi Emirat lebih banyak ditopang oleh sektor minyak dan gas alam. Awal 1970-an, pertumbuhan ekonomi Uni Emirat sangat fenomenal. Industri minyak dan gas dikelola dengan baik menggunakan teknologi terbaru. Hal ini dipertahankan terus untuk meningkatkan efisiensi produksi.

---

<sup>15</sup> Diskusi dan negosiasi pembentukan negara Uni Emirat Arab lebih rinci dapat dilihat pada Ibrahim Al Abed, “The Historical Background and Constitutional Basis to the Federation”. Dalam *United Arab Emirates: A New Perspective*, diedit oleh Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer (London: Trident Press Ltd., 2001), 121–144.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral UEA, kapasitas produksi minyak harian maksimum Emirat adalah 2 juta barel per hari. Kapasitas produksi terpasangnya lebih dari 3 juta barel per hari. Pada tahun 2000, cadangan minyak Emirat adalah 98,8 miliar barel. Di dunia Arab, jumlah itu menempatkan UEA di posisi ketiga setelah Arab Saudi dan Irak. Cadangan minyak di Emirat diperkirakan hampir 10% dari cadangan minyak dunia yang telah terbukti pada bulan Juni 2000. Berdasarkan produksi minyak harian saat ini sebesar 2,2 juta barel per hari, diperkirakan cadangan minyak di UEA akan bertahan selama lebih dari 122 tahun.<sup>16</sup>

Sementara itu, cadangan gas Emirat diperkirakan mencapai 6 triliun meter kubik pada tahun 2000. UEA diperkirakan memiliki cadangan gas alam setara dengan 4% gas dunia. UEA memegang cadangan gas alam terbesar keempat di dunia. Produksi gas harian diperkirakan pada tahun 1999 menjadi 2.940 juta kaki kubik. Cadangan gas Emirat diperkirakan akan bertahan lebih dari 60 tahun.<sup>17</sup> Oleh karena itu, UEA memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Terdapat tiga kategori sumber daya mineral lainnya di Emirat, yaitu batuan, pasir dan tanah, serta logam. Eksploitasi mineral terutama terbatas pada batuan dan pasir. Batu dan kerikil digunakan untuk konstruksi. Batu kapur, pasir, *marl*, dan gipsum digunakan untuk pembuatan semen. Ada juga pertambangan mineral kromit skala kecil di wilayah Fujairah.

UEA memiliki salah satu ekonomi paling terbuka di dunia. Tradisi menyambut bisnis dan perdagangan itu bisa kembali ke sejarah awal wilayah Teluk Arab ketika kapal-kapal berlayar dari Eropa ke India. UEA terus menjadi pusat strategis dengan zona bebas yang ramah bisnis dan ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan PDB rata-rata selama 2000 sampai 2006 di Emirat

---

<sup>16</sup> Shihab, "Economic Development", 250.

<sup>17</sup> Shihab, "Economic Development", 5–10.

sekitar 8,4%. Ini tertinggi di antara negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang rata-rata 6,5%. Produk Domestik Bruto (PDB) Emirat untuk tahun 2014 adalah 419 miliar dolar.<sup>18</sup>

Ekspor minyak Emirat mencapai sekitar 30% dari total PDB negara Teluk tersebut. Melihat kondisi harga minyak yang terus turun, UEA memangkas produksi minyak 139 ribu barel per hari.<sup>19</sup> Selain itu, UEA melakukan penata layanan energi, untuk mengembangkan dan mendiversifikasi ekonominya, mempercepat pengembangan cadangan tambahan hidrokarbon yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan dan implementasi sumber energi alternatif.

Perubahan kebijakan pemerintah Emirat tentang pengelolaan minyak itu untuk menanggapi keadaan harga minyak dunia yang tidak stabil. Dalam sepuluh tahun terakhir, harga minyak dunia cenderung mengalami penurunan. Apabila pada pertengahan 2008, harga minyak mencapai 140 dolar Amerika per barel, pada pertengahan 2017, harga minyak dunia berkisar 50 dolar Amerika per barel. Kondisi saat ini lebih baik dibandingkan pada awal tahun 2016 ketika harga minyak dunia sampai di bawah 40 dolar Amerika per barel.<sup>20</sup> Gambar 4.2 menunjukkan naik turunnya harga minyak dunia selamat 10 tahun terakhir.

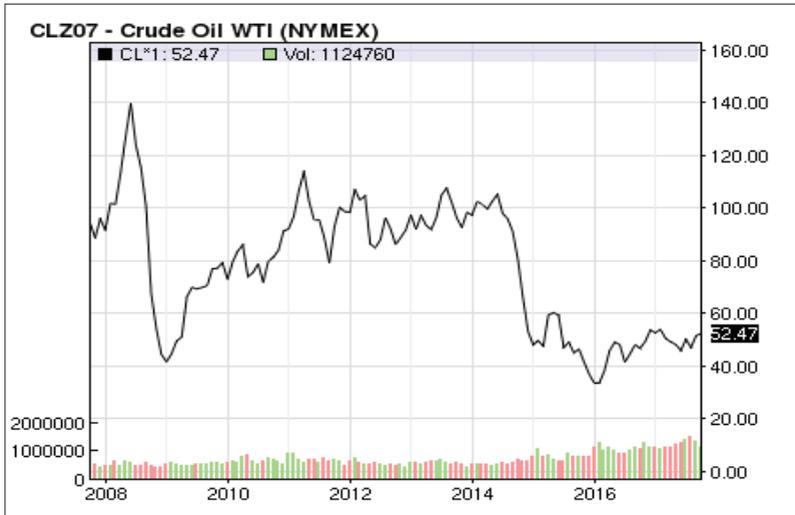
Untuk mengatasi ketergantungan pada minyak, UEA meluncurkan program diversifikasi dan liberalisasi ekonomi. Mereka ingin mengubah ekonominya dari ekonomi konvensional padat tenaga kerja menjadi ekonomi yang berdasarkan pengetahuan, teknologi, dan tenaga kerja terampil. Pemerintah federal dan pihak swasta Emirat telah banyak berinvestasi di berbagai sektor, seperti produksi

---

<sup>18</sup> "UAE Economy," diakses pada 29 September 2017, <http://www.uae-embassy.org/about-uae/uae-economy>.

<sup>19</sup> "Uni Emirat Arab Pangkas Produksi Minyak 139 Ribuan Barel," (Oktober 2017), diakses pada 24 Oktober 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002092931-85-245486/uni-emirat-arab-pangkas-produksi-minyak-139-ribu-barel/>.

<sup>20</sup> "Markets Crude Oil".



Sumber: "Crude Oil" (2017)

**Gambar 4.2** Grafik Harga Minyak West Texas Intermediate dalam Sepuluh Tahun (2007–2017)

aluminium, pariwisata, penerbangan, perdagangan, dan telekomunikasi.

Visi Ekonomi Abu Dhabi 2030 dan Rencana Strategis Dubai 2015 adalah bagian usaha untuk menuju diversifikasi ekonomi. Strategi tersebut adalah untuk meningkatkan investasi di sektor industri dan sektor yang berorientasi ekspor lainnya, termasuk industri berat, transportasi, petrokimia, pariwisata, teknologi informasi, telekomunikasi, energi terbarukan, penerbangan dan ruang angkasa, serta layanan minyak dan gas. Banyak yang telah dicapai di bidang ini, terutama di bidang satelit dan telekomunikasi, sektor penerbangan, dan energi terbarukan.<sup>21</sup>

Sementara itu, pemerintah federal, meluncurkan Visi 2021 yang bertujuan untuk menempatkan inovasi, penelitian, sains, dan teknologi di pusat ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Mereka berharap akan mencapai ekonomi yang produktif dan kompetitif

<sup>21</sup> "UAE Economy".

pada saat ulang tahun emas berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 2021. Secara umum, visi tersebut ingin menjadikan UAE sebagai salah satu negara terbaik di dunia pada peringatan 50 tahun Emirat. Untuk menerjemahkan visi itu menjadi kenyataan, ada pilar-pilar yang dipetakan ke dalam enam prioritas nasional. Hal itu merupakan sektor fokus utama tindakan pemerintah UEA.<sup>22</sup>

Pariwisata berperan besar dalam keberhasilan diversifikasi ekonomi. Pada tahun 2014, ada 156 hotel berbintang di Abu Dhabi yang mencatat tahun terbaik mereka dalam hal jumlah pengunjung. Di Dubai, ada 634 hotel yang juga mengalami peningkatan signifikan dalam menerima tamu pengunjung. Dua maskapai penerbangan kelas dunia UEA, yaitu Etihad dan Emirates, telah ikut memainkan peran utama dalam kemajuan industri pariwisata. Pemerintahan Dubai mengharapkan industri penerbangan akan menyumbang 32% terhadap PDB-nya pada tahun 2020.<sup>23</sup>

### C. Peta Kekuatan Politik

Secara ekonomi, UEA melakukan berbagai terobosan perubahan dengan Visi 2021 atau rencana perubahan yang lainnya. Namun, secara politik, UEA nyaris tidak melakukan perubahan. Memang, pola sistem politik UEA dirancang untuk mempertahankan warisan lama yang disesuaikan dan digabungkan dengan struktur pemerintahan modern. Konstitusi mereka yang ada sejak merdeka, kemudian dibuat permanen pada tahun 1996. Menurut Konstitusi UEA, bentuk pemerintahannya adalah “monarki federal”.<sup>24</sup> Presiden dan wakil presiden dipilih dari para emir yang berkuasa di tujuh emirat.

---

<sup>22</sup> Visi 2021 Uni Emirat Arab (UEA) diluncurkan pada penutupan sidang Kabinet tahun 2010, oleh Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA, Penguasa Dubai. Secara lengkap visi 2021 itu dapat dilihat pada situs [www.vision2021.ae](http://www.vision2021.ae)

<sup>23</sup> “UAE Economy”.

<sup>24</sup> “Monarki federal” adalah gabungan beberapa monarki dalam satu negara dengan satu raja sebagai kepala negara federasi, tetapi tiap-tiap negara bagian mempertahankan monarki yang berbeda. Lihat, [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXW6Guco/wiki/Federal\\_monmonar.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXW6Guco/wiki/Federal_monmonar.html),

Uni Emirat Arab (UEA) mengenal lima kelompok kekuasaan. *Pertama*, kelompok kekuasaan tertinggi adalah apa yang disebut sebagai “Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Council—FSC (المجلس الأعلى للاتحاد)”. Dewan ini terdiri dari tujuh emir dari tujuh keemiratan yang tergabung dalam UEA. FSC adalah badan konstitusional tertinggi di UEA. Dewan ini menetapkan kebijakan umum dan sanksi undang-undang federal. FSC juga memilih Presiden (dan Wakil Presiden) dari para emir tujuh emirat. Pertemuan ini dilaksanakan setiap lima tahun untuk mengukuhkan kembali presiden petahana atau memilih yang baru. Di antara para emir, dua emir, yaitu Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai memiliki hak veto dalam pemilihan presiden.<sup>25</sup>

*Kedua*, jabatan presiden dan wakil presiden (رئيس الاتحاد ونائبه). Dalam sejarah UEA yang menjabat presiden adalah Emir Abu Dhabi dan yang menjabat wakil presiden adalah Emir Dubai. Presiden menunjuk anggota kabinet. Presiden juga menunjuk perdana menteri dan wakil perdana menteri. *Ketiga*, jabatan dewan menteri (مجلس وزراء الاتحاد). Dewan menteri ini dipimpin oleh perdana menteri yang dirangkap oleh wakil presiden. *Keempat*, kekuasaan legislatif, ada Dewan Nasional Federal atau Federal National Council—FNC (المجلس الوطني الاتحادي). Dewan ini memiliki 40 anggota, yang terbagi menjadi dua bagian. Setengah anggota FNC (20 orang) ditunjuk oleh tujuh emir mewakili wilayahnya dan setengah (20 orang) anggota yang lainnya dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan mereka adalah empat tahun. Pasal 68 Konstitusi UEA menyebutkan bahwa 40 kursi anggota FNC itu didistribusikan ke tiap-tiap emirat dengan komposisi berikut: wilayah Abu Dhabi mendapatkan 8 kursi, Dubai 8 kursi, Sharjah 6 kursi, Ras al-Khaimah 6 kursi, Ajman 4 kursi, Umm al-Quwain 4 kursi, dan Fujairah 4 kursi.<sup>26</sup> *Kelima*,

---

diakses pada 19 Januari 2018. Dalam kaitan kajian ini, UEA adalah gabungan beberapa emirat dalam satu negara dengan kepala negara yang disebut presiden.

<sup>25</sup> Country Watch, “United Arab Emirates,” 63.

<sup>26</sup> Sebelum Ras al-Khaimah bergabung ke dalam UEA, jumlah anggota FNC adalah 34 orang. Kemudian, berdasarkan Keputusan Dewan Tinggi Federal (FSC) No. 3

kekuasaan yudikatif (القضاء الاتحادي). Sistem hukum UEA didasarkan pada sistem syariat dan pengadilan sipil. Independensi peradilan dijamin oleh Konstitusi UEA. Hakim ditunjuk oleh presiden.

Presiden UEA saat ini adalah Syekh Khalifah bin Zayed Al-Nahyan yang bertakhta sejak tahun 2004. Dia adalah penguasa Abu Dhabi. Wakil Presiden dijabat oleh Syekh Muhammad bin Rashid Al-Maktoum. Dia adalah Emir Dubai. Syekh Muhammad Al-Maktoum juga menjabat Perdana Menteri. Kemudian, wakil perdana menteri dijabat oleh Saif bin Zayed Al-Nahyan (sejak 2009) dan Mansur bin Zayed Al-Nahyan (sejak 2009).

Di UEA, partai politik dilarang. Pemilu dilaksanakan dengan memilih langsung nama kandidat anggota parlemen yang diusulkan secara independen. Sampai tahun 2017 ini, Uni Emirat Arab sudah melaksanakan tiga kali pemilihan umum (pemilu) anggota FNC. Pemilu pertama diadakan pada Desember 2006. Pemilu kedua pada September 2011. Pemilu ketiga pada 3 Oktober 2015. Dalam Pemilu 2011, ada 129.274 pemilih yang berhak. Pada waktu itu, ada 469 kandidat (termasuk 85 wanita) untuk 20 kursi yang diperebutkan di FNC. Pemilu 2015 diikuti oleh 330 kandidat (termasuk 74 wanita). Dibandingkan Pemilu 2011, pada pemilu terakhir ada penurunan peserta calon anggota legislatif. Pada November 2008, masa tugas anggota FNC diperpanjang dari dua tahun menjadi empat tahun, durasi masa kerja ini dianggap lebih sesuai dengan parlemen lainnya di dunia.

Menurut Pasal 69 Konstitusi UEA, disebutkan bahwa setiap emirat bebas untuk menentukan metode pemilihan warga negara yang akan menduduki anggota FNC. Artinya, setiap emirat boleh menggunakan cara apa saja untuk memilih perwakilan mereka di FNC. Akan tetapi, sebelum diadakan Pemilu 3 Oktober 2015, Ketua Komite Pemilu Nasional (The National Election Committee—NEC), Dr. Anwar Mohammed Gargash, mengeluarkan petunjuk operasional kepemiluan. Aturan ini dibuat agar pelaksanaan ber-

---

Tahun 1972, jumlah tersebut diubah menjadi 40 orang.

bagai tahap proses pemilihan mempunyai tingkat transparansi dan profesionalisme yang tinggi. Dia juga menjelaskan bahwa NEC ingin meningkatkan kinerja dengan mengelola proses pemilihan untuk kali ketiga di UEA itu dengan efisiensi dan standar organisasi yang lebih baik. Lebih lanjut disebutkan bahwa NEC akan melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan visi kepemimpinan negara emirat untuk mempromosikan partisipasi politik dan meningkatkan peran FNC sebagai lembaga yang lebih efektif dan representatif.<sup>27</sup>

Salah satu aturannya adalah sistem pemungutan suara baru yang disebut “Suara Tunggal”. Artinya, pemilih hanya memilih satu kandidat dari emiratnya masing-masing. NEC akan melakukan pendaftaran pemilih di dalam dan luar negeri dan memasukkannya dalam daftar pemilih. Pemungutan suara dilakukan secara elektronik sebagai mekanisme pemungutan suara bersatu, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 29 petunjuk operasional pemilu yang dikeluarkan oleh NEC menyatakan bahwa pemilih harus memberikan suara mereka melalui sistem pemungutan suara elektronik di tempat pemungutan suara. Artinya, tidak ada lagi praktik penggunaan surat suara dalam pemungutan suara.

NEC juga mengenalkan apa yang disebut sebagai “Komite Penghitungan”. Komite ini dipimpin oleh Ketua NEC dengan anggota para ahli yang berkompeten. Tugasnya adalah menghitung suara dengan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik, mengumumkan hasilnya, dan mengidentifikasi daftar anggota cadangan di tiap-tiap emirat. Nama dalam daftar anggota cadangan dapat menggantikan urutan calon terpilih dalam daftar urutan jadi. Petunjuk operasional yang dikeluarkan NEC menyebutkan adanya “Komite Banding”. Komite itu dipimpin oleh seorang hakim dengan dua orang anggota yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk memeriksa semua keberatan/aduan pemilihan, baik yang berkaitan dengan pencalonan kandidat, proses pemungutan suara,

---

<sup>27</sup> “UAE Government Federal National Council Elections 2015,” diakses pada 29 September 2017, <http://gulfnews.com/news/uae/government/federal-national-council-elections-2015-to-be-held-on-october-3-1.1501183>.

maupun penetapan hasilnya. Komite Banding melaporkan pendapat hukumnya kepada NEC.

Mengenai aturan kandidat anggota FNC, disebutkan dalam Pasal 70 Konstitusi UEA bahwa anggota FNC adalah warga salah satu emirat dan tinggal permanen di emirat yang diwakilinya. Dia berumur minimal 25 tahun pada saat pemilihannya. Dia juga berperilaku baik dan tidak sedang dalam hukuman. Kandidat juga harus memiliki pengetahuan membaca dan menulis yang memadai. Setiap kandidat boleh berkampanye untuk meyakinkan pemilih dan mempromosikan *platform* pemilihan mereka secara bebas, asalkan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Dana kampanye dibatasi maksimal 2 juta AED.<sup>28</sup>

Pada Pemilu 2015, terdapat 79.157 pemilih (48.330 pria dan 30.827 wanita) yang menggunakan hak pilih. Jumlah itu merupakan 35,29% dari 224.279 jumlah pemilih terdaftar (48% wanita). Jumlah suara yang masuk di tiap-tiap keemiratan adalah Abu Dhabi 35.046 suara, Dubai 11.760, Sharjah 9.585 suara, Ajman 2.965 suara, Umm al-Qaiwain 2.882 suara, Ras al-Khaimah 11.444 suara, dan Fujairah 5.475 suara.<sup>29</sup> Dengan suara tersebut, 20 kandidat yang terpilih menjadi anggota FNC sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Naema Abdullah adalah satu-satunya perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2015.<sup>30</sup> Dia mewakili wilayah Emirat Ras al-Khaimah. Melihat hasil Pemilu 2015 di UEA, selisih hasil suara antarkandidat tidak terlalu lebar. Di Abu Dhabi, misalnya, yang memilih empat orang kandidat, selisih suara antara kandidat keempat dan kelima

---

<sup>28</sup> "UAE Government", 1–2.

<sup>29</sup> "Emirates FNS Elections 2015," diakses pada 29 September 2017, <http://www.emirates247.com/news/emirates/fnc-elections-2015-the-winners-are-2015-10-04-1.605457>.

<sup>30</sup> Pada pemilu sebelumnya juga pernah terpilih anggota parlemen perempuan, yaitu Dr. Amal Al Hubaisy. Dia menjadi perempuan pertama ketua sidang parlemen. Lihat wawancara dengan Ubaidillah, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Uni Emirat Arab. Wawancara dilakukan di Makkah, Arab Saudi, pada 6 April 2017.

**Tabel 4.1** Anggota Parlemen (FNC) Hasil Pemilu 2015

Emirat	Anggota Parlemen			
Abu Dhabi	Khalifa Suhail Al Mazrouei	Mattar bin Omaira Al Shamsi	Saeed Saleh Al Rumaithi	Saleh Mubarak bin Othaith
Dubai	Hamad Ahmed Al Rahoumi	Marwan Ahmed bin Ghalita Al Muhairi	Khalid Ahmed Ali bin Zayed	Jamal Mohammed Mattar Al Hai
Sharjah	Jassim Abdullah Al Naqbi	Salem Obaid Al Shamsi	Mohammed Ali Saif Al Ketbi	-
Ajman	Hamad Abdullah Saeed Abdullah Ghalita Al Ghafli	Salem Abdullah Hamad Rashid Al Shamsi	-	-
Umm al-Qaiwain	Khalfan Abdullah Salem Humaid Al Ali	Obaid Hassan Humaid bin Rakad Al Ali	-	-
Fujairah	Mohammed Ahmed Al Yamahi	Ahmed Mohammed Mubarak Abdullah Al Hammodi	-	-
Ras al-Khaimah	Salem Ali Ahmed Ali Al Shehhi	Ahmed Yousef Mohammed Al Nuaimi	Naema Abdullah Saeed Al Sharhan	-

Sumber: Emirates FNS Elections 2015; “Nata’iju al-firaz al-‘ulia” (2017)

hanya tujuh suara. Saleh Mubarak bin Othaith memperoleh 1.382 suara dan Salem Muhammad Salem Bal-Humail memperoleh 1.375 suara.<sup>31</sup> Saleh Mubarak terpilih dan Salem Muhammad harus tersingkir. Namun, memang begitu aturannya. Semua perolehan suara diurutkan dari yang terbanyak sampai yang tersedikit di tiap-tiap Emirat. Kemudian, sesuai dengan jatah kursi di tiap-tiap Emirat, dipilihlah kandidat secara berurutan.

Mereka yang terpilih dalam pemilu hanyalah setengah dari jumlah anggota parlemen emirat (FNC) yang berjumlah 40 orang. Setengahnya yang lain (20 orang) ditunjuk oleh emir tiap-tiap emirat.

<sup>31</sup> “Nata’iju al-firaz al-‘ulia li-‘imarati Abi Dhabi,” diakses pada 29 September 2017, <https://www.uaenec.ae/ar/result-list/abudhabi>.

Terlihat bahwa sistem perwakilan rakyat tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat. Kondisi ini menimbulkan protes dari masyarakat. Para wakil terpilih juga tidak menunjukkan keterwakilan aliran politik atau partai politik tertentu karena partai politik dilarang di UEA. Mereka hanya mewakili wilayah tinggal dari tiap-tiap keemiran.

Secara nasional, kekuatan politik di UEA didominasi oleh kekuasaan para emir. Kekuatan tertinggi disimbolkan dengan adanya “Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Council—FSC (المجلس الأعلى للاتحاد)”. Dewan yang beranggotakan tujuh emir itu bertugas untuk membuat kebijakan umum negara Uni Emirat. Dewan ini juga yang memilih Presiden dan Wakil Presiden UEA. Di antara tujuh anggota FSC, yang paling dominan berkuasa adalah Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai. Mereka berdua yang menduduki posisi strategis dalam UEA.

Selain kekuatan politik nasional, di UEA ada pemerintahan lokal dari tiap-tiap emirat. Tujuh emirat yang ada di sana, tidak sama persis dalam menerapkan kehidupan pemerintah lokalnya. Mekanisme mereka berbeda antara satu emirat dengan emirat lain, bergantung pada faktor-faktor seperti populasi, luas, dan tingkat perkembangan.

Emirat terbesar dan terpadat, Abu Dhabi, memiliki organ pengatur pusat sendiri, dewan eksekutif. Dewan ini diketuai oleh Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Di dalam dewan itu, ada sejumlah departemen terpisah yang setara dengan kementerian. Sejumlah lembaga otonom juga ada, seperti Badan Lingkungan Abu Dhabi, Otoritas Pariwisata dan Kebudayaan Abu Dhabi, Otoritas Kebudayaan dan Warisan Abu Dhabi; dan Otoritas Kesehatan Abu Dhabi. Wilayah Emirat Abu Dhabi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Al-Gharbia (Wilayah Barat) dan Asy-Syarqiyah (Wilayah Timur). Kota besar Abu Dhabi dan Al-Ain masing-masing dikelola oleh dewan kotamadya. Abu Dhabi

juga memiliki dewan konsultasi yang beranggotakan 60 orang. Mereka dipilih dari kalangan suku dan keluarga utama emirat.<sup>32</sup>

Dewan Eksekutif Dubai, yang didirikan pada tahun 2003, memiliki fungsi serupa dengan yang ada di Abu Dhabi. Dewan Eksekutif Dubai ini dipimpin oleh Putra Mahkota Dubai, Syekh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Emirat Sharjah dan Ajman juga memiliki dewan eksekutif. Selain dewan eksekutif, Sharjah telah mengembangkan dewan konsultatif sendiri.

Hubungan kekuasaan berbagai lembaga federal dan institusi lokal mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan waktu. Menurut ketentuan konstitusi, para penguasa emirat dapat melepaskan kewenangan tertentu kepada Pemerintah Federal. Hal itu, misalnya, diterapkan untuk menyatukan seluruh angkatan bersenjata di emirat. Dalam Konstitusi UEA, setiap emirat diizinkan untuk menjadi anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Organisasi Negara-Negara Arab Pengekspor Minyak (OAPEC). Namun, mereka tidak melakukannya. Bahkan, Abu Dhabi melepaskan keanggotaannya di OPEC dan OAPEC untuk mendukung kekuatan negara Uni Emirat Arab pada tahun 1971.

Selain kekuasaan formal, baik federal maupun lokal, secara tradisional ada tokoh-tokoh informal yang berpengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah para syekh yang menjadi pemimpin suku. Hal itu sangat wajar, mengingat negara tidak dapat secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Luasnya wilayah, banyaknya masyarakat, dan lingkungan ekonomi itu akan menyulitkan peran negara. Melalui tokoh-tokoh informal itu (para syekh), negara berusaha menyejahterakan rakyatnya.

---

<sup>32</sup> "UAE Political System," diakses pada 7 Maret 2017, [http://www.uaeinteract.com/government/political\\_system.asp](http://www.uaeinteract.com/government/political_system.asp).

## D. Kebangkitan Kekuatan Politik Islam

Seperti telah disebutkan, Uni Emirat Arab (UEA) melarang keberadaan partai politik. Walaupun ada anggota parlemen, mereka dipilih tanpa melalui partai politik. Apa yang disebut sebagai kekuatan politik Islam di UEA adalah sekumpulan masyarakat yang membawa ide-ide keislaman dalam kiprah kehidupannya. Salah satu yang menonjol adalah Ikhwanul Muslimin (IM). Kiprah kelompok Islam yang berasal dari Mesir itu pernah dijelaskan oleh Courtney Freer dalam salah satu tulisannya.<sup>33</sup>

Ikhwanul Muslimin (IM) di Uni Emirat Arab (UEA) berbeda dengan IM di negara lain. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan karakter negara emirat yang unik. Kiprah IM di wilayah Teluk Arab telah ada sejak sebelum negara Uni Emirat Arab lahir. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika Mesir dikuasai oleh Gamel Abdel Nasser, banyak anggota IM yang melarikan diri dari sana. Sebagian dari mereka memilih wilayah Teluk Arab untuk singgah. Mereka adalah individu berpendidikan, profesional, dan kalangan yang mempunyai mobilitas tinggi. Mereka bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk sektor peradilan dan pendidikan.<sup>34</sup>

Kemudian, secara resmi IM pertama kali didirikan di Dubai pada tahun 1974. Pendirian IM waktu itu mendapat dukungan dari pemimpin Dubai yang juga menjabat Wakil Presiden negara UEA, Syekh Rashid bin Saeed Al-Maktoum. Terlihat ada sinyal dukungan pemerintah untuk menggunakan kelompok Islam sebagai benteng melawan nasionalisme Arab. Syekh Rashid juga memberikan kontribusi pada pendirian cabang-cabang IM di Ras Al-Khaimah dan Fujairah. Sementara itu, Presiden UEA yang juga penguasa Abu Dhabi, Syekh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, pada mulanya mau menyediakan lahan untuk pendirian cabang IM di Abu Dhabi, pada akhir tahun 1970-an, tetapi akhirnya IM tidak mendapatkan izin

---

<sup>33</sup> Courtney Freer, "Rentier Islamism", 11–13.

<sup>34</sup> Sultan Al-Qassemi, "The Brothers and the Gulf," *Foreign Policy*, (Desember 2012). <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.

untuk membuka cabang di Abu Dhabi. Di wilayah Sharjah, IM juga tidak memiliki cabang. Tampaknya, di kedua wilayah itu arabisme dan nasionalisme Arab lebih merata dibandingkan sikap islamisme. Sementara itu, di wilayah Ajman, keberadaan IM diposisikan di bawah *Irsyad* (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Sosial).<sup>35</sup> Tampak ada tarik-menarik antara kepentingan “islamisme” dan “arabisme”.<sup>36</sup>

Kiprah IM di UEA adalah menangani kegiatan sosial dan budaya. Bila kita membaca majalah kelompok IM, *Al-Islah*, akan terlihat topik yang paling sering dibahas adalah menyangkut perkembangan pendidikan Islam, penyensoran terhadap informasi yang berasal dunia Barat, seperti tulisan di majalah atau program televisi, pembatasan penjualan alkohol, masalah korupsi di pemerintahan, dan perambahan bisnis dan budaya asing (terutama Barat) dalam masyarakat emirat. Memang, IM ingin mengembangkan sebuah agenda reformasi politik melalui kegiatan dan program sosial. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih merata.<sup>37</sup> Pada awal Maret 1979, Dewan *Al-Islah* Emirat, menulis sebuah surat kepada penguasa setempat menjelang pertemuan *Al-Majlis Al-A'la lil-Ittihad* (Dewan Penguasa Tertinggi), yang mendukung usaha pemerintah untuk mengurangi korupsi dan untuk menghabiskan uang

---

<sup>35</sup> Mansur Al-Noqaidan, “*Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Imarat: Al-Tamaddad wa-l-Inhisar*”. *Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Khalij*, ed. oleh Al-Mesbar Studies and Research Centre (Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre, 2012), 61.

<sup>36</sup> “Islamisme” adalah ideologi yang menginginkan Islam sebagai sistem totalistik untuk mengatur kehidupan politik, budaya, hukum dan ekonomi. Lihat, antara lain, Uğur Kömeçoğlu, “Islamism, Post-Islamism, and Civil Islam,” dalam *Current Trends In Islamist Ideology*, Vol. 16 (Washington: Hudson Institute, March 2014), 16–32. Sementara itu, “Arabisme” atau “nasionalisme Arab” adalah ideologi yang menginginkan identitas kearaban. Mengutip pendapat Ibrahim M. Abu-Rabi, Peter Seeberg menjelaskan bahwa nasionalisme Arab dapat dibagi ke dalam empat fase. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Peter Seeberg, “The weakening of the Arab States: Pan-Arabism re-revisited after the invasion of Iraq,” dalam *Working Paper Series*, No. 11 (Denmark: Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark, May 2007), 12–13.

<sup>37</sup> Hakala, “Opposition”.

minyak dengan cara “saleh”.<sup>38</sup> Pada tahun 1982, majalah *Al-Islah* lebih eksplisit menjelaskan posisi mereka dalam menentang larangan pemerintah terhadap majalah Islam. Mereka menganggap Islam dapat menyelesaikan berbagai masalah. Katanya, “Dengan Islam, kita membebaskan tanah Islam, kita menghentikan ketidakadilan terhadap Islam. Tiran takut kepada kita karena Islam.”<sup>39</sup>

Pada awal 1990-an, sektor peradilan dan pendidikan UEA seakan-akan menjadi “negara dalam negara” (*a state within a state*). Bidang itu dikuasai oleh pengikut IM. Kelompok itu akan memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dan hibah adalah anggota Ikhwanul Muslimin, afiliasi, atau simpatisan mereka. Dalam waktu singkat, dewan mahasiswa dan asosiasi profesional—seperti serikat ahli hukum dan guru—berubah menjadi pos terdepan bagi kepentingan Ikhwanul Muslimin.<sup>40</sup> Melihat perkembangan demikian, penguasa Emirat mulai membatasi ruang gerak kelompok IM.

Pasca pemberhentian sejumlah Dewan Direksi, pemimpin Al-Islah berpaling kepada penguasa Ras Al-Khaimah, Syekh Saqr bin Muhammad al-Qasimi, yang mengizinkan mereka untuk secara legal mendirikan IM di emirat tersebut. Bahkan, Al-Qasimi menunjuk saudaranya, Syekh Sultan bin Kayed Al-Qasimi<sup>41</sup> sebagai Ketua Cabang IM Ras Al-Khaimah. Mereka juga membuka cabang lain di Fujairah sekitar waktu itu.

Namun, pada perkembangan berikutnya, penguasa UEA merasa ada ancaman terhadap stabilitas nasional dan regional. Apalagi, setelah peristiwa Serangan 9/11 tahun 2001,<sup>42</sup> dua orang UEA dituduh terlibat dalam peristiwa itu. Sejak itu, otoritas UEA

---

<sup>38</sup> Al-Noqaidan, “Al-Ikhwān al-Muslimūn fī al-Imārāt,” 65–66.

<sup>39</sup> Abdullah Abu Al-Hadi, “Why Ban Islamic Magazines?” *The Roots of Conspiracy Against the UAE 2*. (Dubai: Al Mezmaah Studies and Research Centre, 2013), 172.

<sup>40</sup> Al-Qassemi, “The Brothers”.

<sup>41</sup> Syekh Sultan bin Kayed al-Qasimi dihukum 10 tahun penjara setelah *Arab Spring*.

<sup>42</sup> Serangan 11 September 2001 terhadap gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat.

memutuskan untuk mereformasi sistem pendidikan dan kurikulum sekolah. Para pengkhotbah diwajibkan untuk mematuhi khotbah yang telah disetujui sebelumnya oleh Kementerian Kehakiman dan Urusan Islam UEA. Pengawasan juga dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai berpartisipasi dalam kegiatan Islam untuk mencegah penyebaran ideologi yang dianggap radikal.<sup>43</sup>

Ada ratusan orang yang dianggap radikal, ditahan oleh *Amn Al-Daulat* (Aparat Keamanan Negara). Selain itu, beberapa kalangan yang dianggap mempunyai kaitan dengan Al-Islah (pengacara, hakim, guru, dan profesor di universitas) dibatasi ruang geraknya. Bahkan, ada yang dilarang berpartisipasi dalam seminar atau acara publik. Ada juga yang diancam izin profesional mereka akan dicabut. Nasib yang sama dialami pula oleh ratusan pegawai Kementerian Pendidikan UEA. Sebagian guru dipaksa untuk pindah profesi atau pensiun dini.<sup>44</sup> Dengan demikian, ruang kebebasan semakin menyempit. Penguasa UEA berusaha membatasi ruang gerak kelompok yang berafiliasi dengan Al-Islah.

Gerakan oposisi di UEA tampaknya sudah ada sebelum muncul *Arab Spring* (2011). Pada tahun 2009, sejumlah aktivis, termasuk mahasiswa dan narablog, meluncurkan situs [www.uaehewar.net](http://www.uaehewar.net) untuk berdiskusi.<sup>45</sup> Situs tersebut menarik perhatian masyarakat UEA. Ribuan pengguna internet yang berbasis di UEA segera memenuhi situs itu dan berdiskusi di sana. Situs itu dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai tempat terbaik untuk mengemukakan keluhan, menantang pihak berwenang, dan mendiskusikan masa depan negara UEA.<sup>46</sup> Dalam beberapa pekan, perdebatan seru terjadi pada

---

<sup>43</sup> Marta Saldana, "Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates: The Case of UAE Students". *Ph.D. Dissertation*, (Exeter: University of Exeter, 2014), 139–140.

<sup>44</sup> Saldana, "Rentierism and Political Culture", 140–145.

<sup>45</sup> Situs itu sudah tidak dapat diakses lagi.

<sup>46</sup> Christopher Davidson, "Fear and Loathing in the Emirates," diakses pada 23 Oktober 2017, <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.

sejumlah isu, termasuk kekayaan pribadi keluarga yang berkuasa dan keberlanjutan proyek investasi dan prestise luar negeri UEA.

Pada Januari 2010, terjadi debat publik paling kontroversial dalam situs tersebut. Melalui dunia maya situs itu, ribuan pengguna internet di UEA mengomentari pembebasan hukuman anggota keluarga penguasa Abu Dhabi yang telah dituduh melakukan penyiksaan dan sodomi. Sebagian besar masyarakat UEA mengkhawatirkan penerapan hukum yang tidak adil tersebut akan berdampak bagi reputasi internasional UEA. Diskusi itu begitu intens dan berbagai komentar memenuhi laman situs tersebut. Akhirnya, penguasa UEA merasa tersudutkan. Pada perkembangan berikutnya, situs [www.uaehewar.net](http://www.uaehewar.net) tidak dapat diakses. Bila ada pengguna internet yang akan mengunjungi situs diskusi tersebut, akan disambut pesan “*server problem*”.<sup>47</sup> Namun, penguasa UEA tidak dapat memblokir situs tersebut dari akses di luar negeri. Situs masih dapat bertahan sampai tahun 2011. Dengan menggunakan *mirror web* itu, masyarakat UEA di dalam negeri dapat mengaksesnya. Maka, ketika muncul *Arab Spring*, mereka masih dapat berdiskusi dan membahas revolusi di Tunisia dan Mesir.

Penggulingan penguasa di Tunisia dan Mesir memberikan inspirasi bagi masyarakat UEA untuk menilai pemimpin mereka. Parlemen UEA yang dianggap kurang dapat mewakili kepentingan rakyat dikritik. Kekurangan penguasa UEA juga dibahas dalam diskusi. Pada Maret 2011, pendiri situs [www.uaehewar.net](http://www.uaehewar.net), bersama dengan sejumlah aktivis lain, menyebarkan petisi yang ditujukan ke Emir Abu Dhabi. Salah satu tuntutan dalam petisi yang ditandatangani oleh 130 intelektual itu adalah agar seluruh anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Petisi juga meminta agar UEA menjadi negara monarki konstitusional yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar lainnya.

Ada empat organisasi masyarakat (ormas) UEA yang ikut menandatangani petisi tersebut sebagai institusi. Empat ormas

---

<sup>47</sup> Davidson, “Fear and Loathing”, 1–2.

itu terdiri dari asosiasi para ahli hukum, guru, para profesionalis nasional, dan dosen universitas. Keikutsertaan empat ormas itu menambah bobot nilai dan tuntutan petisi. Para pemrakarsa dan penanda tangan petisi memublikasikan pernyataan bersama mereka dengan mengatakan, “Masyarakat sipil UEA memandang bahwa telah tiba waktunya untuk memastikan hak partisipasi politik setiap warga melalui pemilihan dewan langsung dengan pengawasan penuh Pemerintah Federal dan wewenang legislatif.” Petisi juga menuliskan, “Kurangnya keterlibatan warga negara untuk memilih perwakilan mereka selama puluhan tahun setelah pembentukan negara.”<sup>48</sup>

Penguasa Emirat menanggapi petisi itu dengan menangkap lima tokoh penanda tangan petisi. Pada awal April 2011, lima orang itu yang kemudian disebut sebagai “UEA 5” dijemput dari rumah masing-masing. Kelima aktivis tersebut adalah Ahmed Mansoor, seorang insinyur dan narablog; Nasser bin Ghaith, seorang ekonom dan dosen universitas di Sorbonne Abu Dhabi; dan aktivis daring, Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul-Khaleq, dan Hassan Ali al-Khamis. Mereka mulai disidang secara terbuka pada 14 Juni 2011. Kelima orang tersebut dikenai tuduhan atas Pasal 176 Undang-Undang Pidana UEA. Mereka dituduh menghina pejabat publik dengan menggunakan situs daring terlarang ([www.ueahewar.net](http://www.ueahewar.net)).<sup>49</sup>

## E. Kebijakan Luar Negeri Emirat

Pasal 12 Konstitusi Uni Emirat Arab (UEA) menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri mereka diarahkan untuk mendukung kepentingan Arab dan Islam, dalam rangka kerja sama internasional dengan semua bangsa, berdasarkan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>50</sup> Dengan prinsip itu, penguasa UEA

---

<sup>48</sup> Davidson, “Fear and Loathing”, 1–2.

<sup>49</sup> “UAE: Investigate Threats against ‘UAE 5’,” diakses pada 23 Oktober 2017, <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>. Lihat juga FGD di LIPI pada 20 Juli 2017 dengan narasumber Wisnu Suryo Hutomo, mantan Staf KBRI Abu Dhabi, UEA.

<sup>50</sup> Constituteproject, *United Arab Emirates’s Constitution of 1971 with Amendments*

berusaha mengarahkan negaranya untuk berkiprah dalam forum internasional. Sedapat mungkin, mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Mereka akan terlibat dalam penyelesaian sengketa suatu negara. Mereka juga ingin memperkuat institusi internasional, seperti PBB dan OECD.

Di wilayah Teluk Arab dan dunia Arab, UEA berusaha meningkatkan kerja sama dan penyelesaian perselisihan melalui dialog. UEA menempati posisi strategis di Teluk Arab, wilayah di mana hampir seperempat dari minyak dunia diproduksi. Saat ini, UEA menyediakan akses pasukan dan wilayah bagi PBB, AS, Uni Eropa, dan NATO.

UEA telah bergabung dalam koalisi untuk mendukung perang global melawan terorisme. Mereka juga telah membekukan rekening para teroris yang diduga sebagai tempat pencucian uang. Untuk mendukung hal itu, UEA telah memberlakukan peraturan anti-pencucian uang. Mereka juga memperkenalkan undang-undang dan peraturan pembiayaan kontra-teror baru.

Secara regional, UEA berpartisipasi dalam koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk mendukung legitimasi Pemerintah Yaman. Keterlibatan UEA merupakan tanggapan atas permintaan dari Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam memerangi oposisi ekstremis dan menyelamatkan orang-orang Yaman. UEA menganggap faksi Al-Houthi dan Al-Qaeda telah menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan di wilayah itu. UEA mendukung solusi politik di Yaman melalui konsensus dan kesepakatan semua pihak. UEA mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2216 (2015) tentang penyelesaian konflik Yaman. Resolusi tersebut, antara lain, berisi tuntutan kepada kelompok Houthi untuk mengakhiri penggunaan kekerasan, meninggalkan wilayah yang dikuasainya, termasuk Ibu Kota Sana'a, mengakhiri rekrutmen anak-anak dalam perang, dan lain

---

*through 2004* (Oxford University Press, 2017), 5.

sebagainya.<sup>51</sup> Selain itu, UEA juga berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Yaman.

Sementara itu, menyikapi kondisi yang terjadi di Suriah, UEA mengancam rezim di sana yang dianggap telah melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Menurut UEA, solusi untuk mengatasi krisis adalah masalah politik. UEA berusaha mengatasi masalah pengungsi Suriah dengan memberikan bantuan asing kepada orang-orang Suriah dan negara-negara tetangga yang menerimanya. UEA sendiri telah menerima lebih dari 100.000 orang pengungsi Suriah. Sejak dimulainya krisis Suriah pada tahun 2011, UEA telah menyediakan 700 juta dolar untuk membantu pengungsi Suriah.<sup>52</sup>

Ketika terjadi kudeta militer di Mesir, 3 Juli 2013, penguasa UEA mendukung pihak militer yang dianggap akan menyelamatkan negaranya. UEA percaya bahwa militer akan menjaga stabilitas dan kemakmuran Mesir. UEA juga memuji Lembaga Al-Azhar atas komitmen jangka panjangnya dalam memerangi ideologi ekstremis. Untuk itu, UEA berkomitmen untuk membantu rakyat Mesir melalui reformasi ekonomi dan melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi lainnya.<sup>53</sup>

Politik luar negeri Uni Emirat banyak yang mengikuti “saudara tuanya”, yakni Arab Saudi. Pada Juni 2017, tiba-tiba Uni Emirat Arab bersama Arab Saudi dan didukung oleh Mesir, Bahrain, dan Yaman, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Mereka mengucilkan Qatar dengan memutuskan hubungan darat, udara, dan laut. Mereka juga mengusir warga Qatar dari negara-negara tersebut. Saudi dan sekutunya mengklaim bahwa Qatar terlibat dalam mendukung terorisme meskipun Qatar adalah salah satu

---

<sup>51</sup> United Nations Security Council, *Resolution 2216 (2015)*. Adopted by the Security Council at its 7426th meeting, on 14 April 2015. Dokumen no. S/RES/2216 (2015).

<sup>52</sup> “Foreign Policy”.

<sup>53</sup> “Foreign Policy”, 1–5.

koalisi longgar negara-negara Sunni yang mendukung pasukan yang memusuhi Iran di Suriah dan Yaman.<sup>54</sup>

Tampaknya, UEA alergi terhadap gerakan politik Islam, seperti yang diperankan oleh Ikhwanul Muslimin. Pemutusan hubungan dengan Qatar dan dukungannya terhadap kudeta militer Mesir telah menunjukkan bahwa UEA berusaha menghilangkan eksistensi Ikhwanul Muslimin. Hal itu berhubungan dengan perkembangan Ikhwanul Muslimin di dalam negeri UEA sendiri. Sejak pertengahan 1990-an, penguasa UEA merasa terganggu dengan eksistensi IM di sana walaupun pada awalnya Emir Dubai menyambut baik kehadiran para aktivis IM.

## **F. Kiprah Politik Islam di UEA: Catatan Penutup**

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan satu negara Teluk Arab yang pada mulanya menerima baik aktivitas kekuatan yang memperjuangkan Islam (Ikhwanul Muslimin). Bahkan, Emir Dubai merestui berdirinya organisasi itu di wilayah Dubai, pada 1974. Awalnya, kelompok itu berkiprah di bidang kegiatan sosial dan budaya. Dalam perkembangannya, kelompok IM menguasai sektor peradilan dan pendidikan UEA. Kedua bidang yang penting itu banyak dijabat oleh pengikut dan simpatisan IM. Maka, timbul istilah “negara dalam negara” (*a state within a state*).

Melihat perkembangan itu, penguasa UEA mulai membatasi kegiatan kelompok IM. Beberapa pejabat yang terindikasi mempunyai afiliasi ke IM akan dipecat, dimutasi, ataupun dibatasi ruang geraknya. Hal itu sudah dimulai pada tahun 1990-an. Kemudian, setelah peristiwa 11 September 2001 di World Trade Center (WTC) Amerika Serikat, kelompok IM semakin diawasi. Penguasa UEA mengadopsi kebijakan anti-teroris yang ingin menyingkirkan

---

<sup>54</sup> Patrick Cockburn, “Qatar Crisis: This is why Saudi Arabia and its allies have suddenly cut ties to their Sunni Arab neighbour,” *Independent*. Diakses pada 6 Juni 2017, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/qatar-crisis-saudi-arabia-uae-bahrain-donald-trump-ties-severed-egypt-yemen-patrick-cockburn-a7774266.html>.

kelompok radikal. Selanjutnya, setelah terjadi peristiwa *Arab Spring*, kelompok IM di UEA semakin sulit bergerak.

## Daftar Pustaka

- Al Abed, Ibrahim dan Peter Hellyer (ed.). *United Arab Emirates: A New Perspective*. London: Trident Press Ltd., 2011.
- Al Abed, Ibrahim. "The Historical Background and Constitutional Basis to the Federation". Dalam *United Arab Emirates: A New Perspective*, diedit oleh Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer. London: Trident Press Ltd., 2001.
- Al-Hadi, Abdullah Abu. "Why Ban Islamic Magazines?". *Al-Islah* 30/50 (1982), dikutip dalam Salem Humaid, *The Roots of Conspiracy Against the UAE 2*. Dubai: Al Mezmaah Studies and Research Centre, 2013.
- Al-Mesbar Studies and Research Centre (ed.). *Al-Ikhwan al-Muslimun fi al Khaliij* Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre, 2012.
- Al-Noqaidan, Mansur. "Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Imarat: Al-Tamaddad wa-l-Inhisar". Dalam *Al-Ikhwan al-Muslimun fi al Khaliij*, diedit oleh Al-Mesbar Studies and Research Centre. Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre, 2012.
- Al-Qassemi, Sultan. "The Brothers and the Gulf". *Foreign Policy*, 14 Desember 2012. Diakses pada 18 Oktober 2018/2017. <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.
- Cockburn, Patrick. "Qatar Crisis: This is why Saudi Arabia and its allies have suddenly cut ties to their Sunni Arab neighbour". Independent. Diakses pada 6 Juni 2017. <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/qatar-crisis-saudi-arabia-uae-bahrain-donald-trump-ties-severed-egypt-yemen-patrick-cockburn-a7774266.html>.
- Constituteproject. *United Arab Emirates's Constitution of 1971 with Amendments through 2004*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- "Crude Oil". Diakses pada 25 Oktober 2017. <http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=10y>.
- Crystal, Jill Ann and J.E. Peterson. "United Arab Emirates: languages and Religion," *Encyclopedia Britannica*. Diakses pada 8 Agustus 2019. <https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates/Languages-and-religion>.

- Davidson, Christopher, "Fear and Loathing in the Emirates" Diakses pada 23 Oktober 2017 dari <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.
- "Emirates FNS Elections 2015". Diakses pada 29 September 2017. <http://www.emirates247.com/news/emirates/fnc-elections-2015-the-winners-are-2015-10-04-1.605457>.
- FGD dengan narasumber Wisnu Suryo Hutomo, mantan Staf KBRI Abu Dhabi, UEA, 20 Juli 2017 di Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Freer, Courtney. "Rentier Islamism: The Role of the Muslim Brotherhood in the Gulf". *LSE Middle East Centre Paper Series*, 9 November 2015.
- "Government of Future". Diakses pada 20 November 2017. <https://government.ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae>.
- Hakala, Pekka. "Opposition in the United Arab Emirates". *Quick Policy Insight*, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament, 15 November 2012. Diakses pada 31 Januari 2017. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/join/2012/491458/EXPO-AFET\\_SP%282012%29491458\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf).
- King, Geoffrey R. "The Coming of Islam and the Islamic Period in the UAE". Dalam *United Arab Emirates: A New Perspective*, diedit oleh Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer. London: Trident Press Ltd., 2001.
- Kömeçoğlu, Uğur. "Islamism, Post-Islamism, and Civil Islam". Dalam *Current Trends In Islamist Ideology*, 16, Washington: Hudson Institute, Maret 2014.
- "Nata'iju al-firaz al-'ulia li-'imarati Abi Dhabi". Diakses pada 29 September/Oktober 2017. <https://www.uaenec.ae/ar/result-list/abudhabi>.
- OPEC Share of World Crude Oil Reserves 2017. Diakses pada 16 Oktober 2017. [http://www.opec.org/opec\\_web/en/data\\_graphs/330.htm](http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm).
- "Religious Beliefs and Spirituality in United Arab Emirates." Diakses pada 1 Agustus 2019. <https://www.studycountry.com/guide/AE-religion.htm>.
- Saldana, Marta. "Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates: The Case of UAE Students". *Ph.D. Dissertation*, Exeter: University of Exeter, 2014.
- Seeberg, Peter. "The weakening of the Arab States: Pan-Arabism re-revisited after the invasion of Iraq". Dalam *Working Paper Series*, No. 11, Denmark: Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark, Mei 2007.

- Shihab, Mohamed. "Economic Development in the UAE". Dalam *United Arab Emirates: A New Perspective*, diedit oleh Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer. London: Trident Press Ltd., 2001.
- "The Worlds Largest Oil Reserves by Country." Diakses pada 16 Oktober 2017. <http://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oil-reserves-by-country.html>.
- "The UAE Government." Diakses pada 20 November 2017. <https://government.ae/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/tolerance-in-the-uae>.
- "Top Ten Countries With Worlds Largest Oil Reserves." Diakses pada 16 Oktober 2017. <http://explorationanddevelopment.energy-business-review.com/news/top-ten-countries-with-worlds-largest-oil-reserves-5793487>.
- "UAE: Investigate Threats against 'UAE 5'." Diakses pada 23 Oktober 2017. <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>.
- "UAE Government Federal National Elections 2015." Diakses pada 29 September 2017. <http://gulfnews.com/news/uae/government/federal-national-council-elections-2015-to-be-held-on-october-3-1.1501183>.
- "UAE Government Federal National Council Elections 2015." Diakses pada 29 September 2017. <http://gulfnews.com/news/uae/government/federal-national-council-elections-2015-to-be-heldon-october-3-1.1501183>.
- "UAE Religion." Diakses pada 20 November 2017. <http://www.studycountry.com/guide/AE-religion.htm>.
- "UAE Economy." Diakses pada 7 Maret 2017. <http://government.ae/en/economy>.
- "UAE Economy." Diakses pada 29 September 2017. <http://www.uae-embassy.org/about-uae/uae-economy>.
- "UAE Foreign Policy." Diakses pada 29 Oktober 2017. <http://www.uae-embassy.org/about-uae/foreign-policy>.
- "UAE History." Diakses pada 29 September 2017. <http://www.uae-embassy.org/about-uae/history>.
- "UAE Political System." Diakses pada 7 Maret 2017. [http://www.uaainteract.com/government/political\\_system.asp](http://www.uaainteract.com/government/political_system.asp).
- "United Arab Emirates". *Encyclopedia Britannica*. Diakses pada 24 Oktober 2017. <https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates>.

- “United Arab Emirates Population”. Diakses pada 7 Maret 2017. <http://world-populationreview.com/countries/united-arab-emirates-population/>.
- “United Arab Emirates People.” Diakses pada 20 November 2017. [https://theodora.com/wfbcurrent/united\\_arab\\_emirates/united\\_arab\\_emirates\\_people.html](https://theodora.com/wfbcurrent/united_arab_emirates/united_arab_emirates_people.html).
- “United Arab Emirates: Languages and Religion.” Diakses pada 20 November 2017. <https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates/Languages-and-religion>.
- “United Arab Emirates’ Constitution of 1971 with Amendments through 2004.” New York: Oxford University Press, 2017, diakses pada Oktober 2017. <http://www.constituteproject.org>.
- United Nations Security Council. *Resolution 2216 (2015)*. Adopted by the Security Council at its 7426th meeting, on 14 April 2015. Dokumen no. S/RES/2216 2015.
- “Uni Emirat Arab Pangkas Produksi Minyak 139 Ribu Barel.” (Oktober 2017), diakses pada 24 Oktober 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002092931-85-245486/uni-emirat-arab-pangkas-produksi-minyak-139-ribu-barel/>.
- Vision 2021. Diakses pada 24 Oktober 2017. <http://www.vision2021.ae>
- Watch, Country. “United Arab Emirat: 2017 Country Review,” diakses pada 4 Mei 2017. <http://www.countrywatch.com>.
- Wawancara dengan Ubaidillah, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Uni Emirat Arab. Wawancara dilaksanakan di Mekkah, Arab Saudi, 6 April 2017.
- Al-Lajnah Al-Wathaniyyah Lil Intikhabat, diakses pada 17 Oktober 2017. <http://www.uaenec.ae>.



# BAB 5

## **Dinamika Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab: Catatan Penutup**

*Dhurorudin Mashad*

### **A. Politik Islam dalam Realitas Politik Timur Tengah Kontemporer**

Politik Islam dalam diskursus politik kontemporer senantiasa menarik untuk diperdebatkan. Masalahnya, perdebatan itu acap kali hanya dikaitkan secara sempit dengan wacana fundamentalisme, radikalisme, bahkan belakangan terkait dengan terorisme. Padahal, jangkauan kajian politik Islam sebenarnya jauh lebih luas dibandingkan ketiga isu tersebut, mengingat Islam memang bukan seka-

dar agama, melainkan acap kali dijadikan sebagai sebuah ideologi politik, menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang tecermin dari penggunaan simbol dan konsep-konsep “islami” di ranah publik.<sup>1</sup> Bahkan, dalam wacana sosiologis kultural, terdapat anggapan yang jauh lebih luas, bahwa politik Islam bukan hanya sekadar faktor ideologis, melainkan kombinasi aspek religiositas-kultural-politik yang terkait erat dengan berbagai isu sosial kemasyarakatan sekaligus memiliki tujuan politis sehingga mendorong umat Islam untuk aktif di dalamnya. Alasannya, Islam ditafsirkan memiliki aspek integral dari keyakinan (*body of faith*) yang membentuk semua aspek sosial dan memiliki aspek solutif terhadap kompleksitas permasalahan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam perspektif ini, Islam tidak hanya ditafsirkan sebagai agama (sebagai aspek privasi), tetapi juga merupakan ideologi, nilai (*values*), dan doktrin yang memberikan fondasi bagi gerakan sosial (*social actions*). Walhasil, politik Islam pun akhirnya merupakan hasil dari proses “instrumentalisasi” ideologi, nilai, dan doktrin Islam dalam sebuah gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik (*political objectives*) sebagai respons terhadap problem sosial masyarakat Islam sesuai konteks dan waktu.<sup>3</sup>

Logika-logika semacam ini dalam realitas dunia Islam senantiasa mendapatkan manifestasinya secara khas, sesuai konteks tempat dan waktu. Dalam beberapa dekade terakhir pun, agama dan politik semacam itu menjadi diskursus yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian politik dunia Islam kontemporer, termasuk di Timur Tengah. Berbagai aktivitas untuk mengukuhkan agama (baca: Islam) dalam ranah politik, misalnya, juga muncul di sejumlah negara, baik republik maupun monarki, yang berusaha menerapkan Islam dalam

---

<sup>1</sup> Mohammed Ayoob, *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008), 2.

<sup>2</sup> Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam*. (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 193.

<sup>3</sup> Guilain Denoex, “The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam,” *Middle East Policy*, IX, No. 2, (2002), 56–81.

kehidupan bernegara. Realitas kemunculan gerakan-gerakan politik berbasis agama di sejumlah negara Timur Tengah setelah *Arab Spring*, misalnya, tidak lepas dari peran kelompok Islam di tengah kegagalan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang selama beberapa dekade dibangun rezim. Oleh karena itu, dalam wacana politik kontemporer di kawasan itu, Islam akhirnya dijadikan sebagai sebuah alternatif keyakinan yang mengilhami berbagai lapisan masyarakat serta berhasil mengejawantahkan nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Berpijak pada logika itu pula, sejumlah pemerintahan monarki tertarik menggunakan Islam untuk melegitimasi kebijakannya, baik dalam politik, hukum, maupun ekonomi. Hal inilah yang kita saksikan dalam realitas politik, termasuk di tiga negara kajian: Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab yang berusaha mendekatkan simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaannya.

## **B. Prinsip *Ad-Din wa Ad-Daulah* di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab**

Semangat untuk “menegakkan Islam” dalam konteks politik sebenarnya telah tumbuh mewarnai sepanjang sejarah negara Saudi, dan pada tataran tertentu juga UEA serta Kuwait sehingga melahirkan konsep *Ad-Din wa ad-Daulah* yang mendasarkan kehidupan bernegara pada nilai-nilai agama.

Dalam kasus Saudi, misalnya, konstitusi negara bahkan berdasarkan Al-Qur’an dan hukum syariat. Setiap keputusan politik—yang merupakan hak prerogratif raja—senantiasa dikonsultasikan dengan ulama, juga dengan keluarga penting kerajaan. Realitas ini terjadi karena eksistensi negara lahir berdasar persekutuan Raja Saud dan ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab, “pendiri” Wahabisme. Pengaruh Bani Saud dan Wahabi dimulai dari Najd dan meluas ke wilayah Hijaz yang ditandai dengan penguasaan Makkah dan Madinah (tahun 1803 dan 1805). Peristiwa ini menandai titik awal masuknya Wahabi ke wilayah Hijaz. Sejak itulah kolaborasi antara keluarga Raja Saud dan ulama Wahabi terus berlanjut hingga kini. Wahabi menjadi satu-satunya ajaran yang diterima negara.

Bahkan, ambisi Saudi-Wahabi untuk menyebarkan ajarannya di kawasan dan seluruh dunia menempati posisi prestisius dalam aksi filantropi yang didukung kerajaan.

Dapat dipahami jika sampai sekarang imajinasi politis historis dari sistem politik negara Saudi sebagai milik keluarga Bani Saud, dengan implikasi wewenang keluarga kerajaan sangat mutlak. Untuk mempertegas legitimasi di tengah masyarakat Saudi, kerajaan berkolaborasi dengan Lembaga Ulama Senior yang semuanya dari kalangan Wahabi dan dikepalai oleh Mufti Agung. Simbiosis kerajaan-ulama Wahabi dilembagakan dalam *Hai'ah Kibar al-Ulama lil-Buhuts wal-Ifta'* (Lembaga Ulama Senior untuk Riset dan Fatwa), lembaga fatwa resmi Saudi. Menyusul wafatnya Mufti Saudi Abdul Aziz bin Baz (Bin Baz) pada tahun 1999, posisi pimpinan lembaga resmi itu hampir digantikan oleh ulama *Sahwa*. Karena ada indikasi keterlibatan Ikhwanul Muslimin (IM), Raja Fahd mengurungkan niat, lantas mengangkat Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh sebagai pengganti Bin Baz. Bahkan, sampai tahun 2009 lembaga ulama ini hanya diisi ulama mazhab Hanbali, dan baru era Raja Abdullah ulama dari tiga mazhab lain akhirnya juga disertakan: Maliki, Hanafi, dan Syafi'i dengan melengkapinya menjadi 21 anggota ulama. Lembaga ulama ini digaji pemerintah dengan tugas memberi nasihat pertimbangan terhadap kebijakan terkait keagamaan. Lembaga ini menjadi otoritas tunggal yang berwenang membuat fatwa bagi permasalahan individu dan publik terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalah (sosial).

Lembaga ulama ini memegang kuasa penuh persoalan agama dan memiliki akses langsung dengan raja dalam fungsi konsultasi terhadap hal-hal strategis. Oleh karena itu, pengaruh lembaga ulama sangat besar dalam politik dalam dan luar negeri Saudi yang sangat kental dengan misi Wahabi. Dalam konteks dalam negeri, Pemerintah Saudi sering membuat kebijakan bernuansa keagamaan tentu saja berdasar prinsip Wahabi. Dalam konteks perempuan, misalkan, ada larangan menyetir bagi perempuan, kewajiban menggunakan abaya dan cadar, sensor iklan dengan model perempuan,

wajib disertai mahram ketika keluar rumah. Peraturan ini diterapkan dengan polisi syariat. Namun, untuk pesisir timur Saudi yang lebih majemuk dan metropolis (Riyadh, Dahrhan, Dammam, dan kota-kota lain), penerapan syariat ini tidak seketat Makkah dan Madinah.

Adapun dalam kasus Kuwait, karakteristik umum penduduknya ternyata hampir mirip dengan Saudi, kebanyakan Sunni (75%) bermazhab Hanbali, bahkan sebagiannya beraliran Wahabi, khususnya dalam lingkungan elite kerajaan. Relasi monarki-Wahabi seperti pola Saudi ini, dalam kasus Kuwait dapat dirunut sejak abad ke-18 M ketika Kuwait di bawah perlindungan Bani Khalid dapat dikalahkan kaum Wahabi Najd (cikal bakal Kerajaan Saudi sekarang).<sup>4</sup>

Dengan pengaruh Islam yang sedemikian kuat, wajar kiranya bila rakyat dan penguasa Kuwait menjadikan Islam sebagai agama resmi dan syariat Islam sebagai sumber utama hukum negara, sebagaimana tertera dalam Konstitusi Pasal 2 bahwa “Agama negara adalah Islam, dan syariat Islam harus menjadi sumber perundang-undangan”. Dalam hal aktivitas keagamaan, misalnya, pemerintah membentuk komite penasihat tinggi atau dewan fatwa yang terdiri dari para ulama untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam di Kuwait.

Pengaruh Islam di Kuwait tidak hanya terlihat pada kebijakan pemerintah, tetapi juga tecermin dalam kehidupan khalayak. Perempuan Kuwait, misalnya, dianjurkan untuk memakai hijab, tetapi tetap diberikan ruang untuk berkecimpung dalam kehidupan sosial-politik—termasuk dalam hak memilih dan dipilih. Begitu juga saat bulan Ramadan, baik muslim maupun nonmuslim dituntut untuk tidak makan, minum, dan merokok di tempat umum dan yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 360 dolar. Pada hari Jumat, seluruh umat Islam wajib salat Jumat dan menutup toko atau aktivitas bisnisnya tanpa kecuali.

Sementara itu, dalam kasus UEA, peran agama dalam politik bernegara tidak sekuat Kuwait, apalagi Saudi dalam konteks

---

<sup>4</sup> Saudi Arabia merupakan gabungan dua wilayah utama, Najd dan Hijaz.

relasinya dengan monarki. Di antara warga negara UEA (disebut Emirati) yang berjumlah sekitar 1–1,5 juta jiwa,<sup>5</sup> kaum muslim Sunni merupakan 85% dari mereka, sisanya 15% adalah Syiah, terutama terkonsentrasi di Keemiran Sharjah dan Dubai. Imigran asal Oman kebanyakan juga Syiah Ibadi, di samping ada pula pengaruh sufi. Sebenarnya, kiprah Ikhwanul Muslimin (IM) di wilayah Teluk Arab telah ada sebelum negara Uni Emirat Arab lahir pada 1971. Namun, sambutan dari para pemimpin di tujuh keemiran, yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah, dan Umm Al-Quwain dapat dikatakan kecil. Hanya di Keemiran Dubai (tahun 1974), IM mendapat dukungan dari Emir Dubai yang sekaligus menjabat Wakil Presiden UEA (Syekh Rashid bin Saeed Al-Maktoum) yang di wilayah ini tampaknya sengaja menggunakan IM sebagai benteng melawan nasionalisme Arab. Syekh Rashid juga berperan pada pendirian cabang-cabang IM di Ras Al-Khaimah dan Fujairah. Namun, di berbagai keemiran lain, seperti Abu Dhabi, pemimpinya (Syekh Zayed bin Sultan Al-Nahyan) tidak mengizinkan IM untuk membuka cabang Abu Dhabi. Hal yang sama untuk wilayah Sharjah. Kalau dalam kasus Saudi keengganan izin eksistensi formal IM lebih karena adanya dominasi tunggal paham agama, yakni Wahabi, tampaknya di kedua wilayah UEA tadi lebih karena arabisme dan nasionalisme Arab yang lebih merata dibandingkan sikap islamisme. Untuk wilayah Ajman, IM hanya diposisikan di bawah *Irsyad* (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Sosial). Namun, di UEA tetap lebih bagus dibandingkan Saudi yang secara total

---

<sup>5</sup> Penduduk UEA (sekitar 10 juta) juga beragam dari segi suku dan agama. Dari segi suku, tercatat hanya sekitar 10–15% yang merupakan penduduk pribumi Arab-Emirat (disebut Emirati). Sisanya adalah warga migran (ekspat), baik Arab non-Emirat maupun non-Arab, khususnya dari India, Bangladesh, Pakistan, Srilangka, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Para migran ini membanjiri UEA sejak *booming* harga minyak di pasaran dunia (*oil booms*) pada tahun 1970-an, 1980-an, dan juga sejak usai Perang Teluk Irak-Kuwait. Warga negara (Emirati) 100% muslim, tetapi jika dilihat dari total penduduk termasuk imigran-ekspatriat, sekitar 75% penduduk UEA beragama Islam; sisanya (25%) adalah nonmuslim. Umat Kristen adalah sekitar 9–10%, sisanya Hindu, Buddha, Bahai, Druze, Yahudi, Sikh, Parisi, dan lain-lain.

melarang berdirinya IM sebagai ormas. Namun, dalam realitas sosial kemasyarakatan, baik UEA maupun Saudi, sempat memberikan hak bagi IM untuk berkembang sehingga sempat menguasai sektor pendidikan (untuk kasus Saudi) dan menguasai sektor pendidikan serta peradilan (untuk kasus UEA).

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan satu negara Teluk yang pada mulanya menerima dengan baik aktivitas kekuatan yang memperjuangkan Islam (Ikhwanul Muslimin). Awalnya, kelompok itu berkiprah di bidang kegiatan sosial dan budaya, dalam perkembangannya kelompok itu menguasai sektor peradilan dan pendidikan. Kedua bidang yang penting itu banyak dijabat oleh pengikut dan simpatisan IM sehingga sampai memunculkan istilah “negara dalam negara” (*a state within a state*). Melihat perkembangan itu, penguasa UEA lantas berbalik 180 derajat membatasi kegiatan kelompok, bahkan represif terhadap IM.

### **C. Antara Monarki dan Politik Islam**

Aktivisme keagamaan pada tataran tertentu senantiasa berkembang di ketiga negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, serta telah mendorong tumbuh suburnya gerakan Islam—formal ataupun tidak formal—yang menginginkan transformasi komprehensif dalam kehidupan sosio-politik dan ekonomi negara. Berpijak pada logika politik agama itu, pemerintah di ketiga negara (pada level yang berbeda) memakai simbol-simbol keagamaan untuk mendapatkan legitimasi politik.

Saudi Arabia sebenarnya merupakan negara monarki absolut yang pusat kekuasaannya ada di tangan raja. Secara resmi disebutkan bahwa konstitusi negara disebutkan berdasarkan Al-Qur’an dan hukum syariat. Namun, pada tahun 1992, Raja Fahd menerbitkan Undang-Undang Dasar Pemerintah (*Nizām al-Asāsī lī al-Hukm*), undang-undang tentang hak dan wewenang raja dan warga negara, yang secara substantif mempertegas raja (kepala negara dan kepala pemerintahan) berkuasa penuh, penguasa eksekutif sekaligus ber-

peran sebagai legislatif dan yudikatif.<sup>6</sup> Negara ini tidak mengenal partai, bahkan tidak ada organisasi politik yang boleh berdiri. Proses penjangkaran aspirasi masyarakat cukup dilakukan lewat lembaga legislatif (Dewan Syura) untuk fungsi konsultatif. Lembaga yang beranggotakan 150 orang ini semua ditunjuk oleh raja.

Berbeda dengan level nasional, pemerintahan level lokal (Saudi) memang mengenal penyelenggaraan pilkada, tetapi itu hanya untuk beberapa provinsi utama saja, bahkan itu pun tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Era Raja Abdullah misalnya, pilkada dilakukan pada tahun 2005 dan 2011. Pilkada 2011 sebenarnya merupakan penundaan untuk tahun 2009 karena ketidaksiapan kelengkapan pemilu. Saudi hanya memberikan hak memilih dan dipilih bagi laki-laki, belum memberikan ruang bagi perempuan. Hanya setelah berkonsultasi dengan Mufti Agung ulama Wahabi pada tahun 2011 di depan Dewan Syura, Raja Abdullah memproyeksikan perempuan bisa memiliki hak pilih dan dipilih dalam pemilu lokal 2015 sekaligus hak untuk duduk di lembaga tersebut. Untuk mempersiapkan hal itu, KPU Saudi akan menyediakan tempat dan petugas khusus untuk perempuan.<sup>7</sup>

Relasi monolitik Bani Saud-Wahabi sedemikian kokoh sehingga membuat kehadiran gerakan-gerakan Islam nyaris tidak mendapatkan tempat. Akibat penerapan absolut dari Wahabisme, pemerintah menjadi sangat selektif terhadap masuknya aliran-aliran Islam ke Saudi. Semua bentuk organisasi non-negara dilarang dan segala aktivitas keislaman di monopoli ulama Wahabi. Monopoli ini di satu sisi meminimalkan oposisi menentang kekuasaan Bani Saud,

---

<sup>6</sup> Government and Society of Saudi Arabia,” *Encyclopedia Britannica*, (3 Agustus 2017) <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society>.

<sup>7</sup> “Women in Saudi Arabia to vote and run in elections,” BBC News, (September 2011), <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15052030>.; Aya Batrawi, “Women win 17 seats in Saudi Arabia’s first elections with female candidates,” *Independent*, (Desember 2015), <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/a-woman-has-been-elected-in-saudia-arabias-elections-a6771161.html>.

tetapi di sisi lain ulama Wahabi menikmati keistimewaan otoritas keagamaan tunggal di Saudi.

Kaitan antara monarki dan politik Islam di Kuwait agak berbeda dibandingkan Saudi. Memang, relasi monarki-Wahabi, dalam kasus Kuwait terjadi sejak abad ke-18 M ketika Kuwait berhasil dikuasi raja berpaham Wahabi Najd (cikal bakal kerajaan Saudi sekarang). Koalisi monarki-Wahabi ini tetap bertahan sampai sekarang. Dalam hal aktivitas keagamaan misalnya, pemerintah membentuk komite penasehat tinggi atau dewan fatwa yang melaluinya pemerintah mengontrol langsung aktivitas lembaga keagamaan, seperti menunjuk imam dan muazin, memantau khotbah Jumat serta membiayai pembangunan dan aktivitas masjid. Dalam beberapa kasus yang terjadi, para imam yang melanggar saat khotbah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diskors dan diberi sanksi.

Namun, dibandingkan Saudi bahkan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) lain, Kuwait relatif lebih maju dalam demokrasi. Sejak 1961, Kuwait menjadi negara monarki konstitusional pertama di dunia Arab serta menjadi *role model* kawasan. Ada beberapa hal demokrasi dapat berkembang di Kuwait. *Pertama*, setelah kemerdekaan monarki berusaha keluar dari keterpurukan dengan memperkuat negara melalui penegakan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui Konstitusi 1962, monarki mendorong warga untuk dapat menikmati kebebasan dan partisipasi secara luas dibandingkan negara Teluk lain. Walhasil, gerakan oposisi yang terdiri, baik dari kalangan Islam maupun liberal dapat berperan besar serta partisipasi politik perempuan dalam beberapa dekade terakhir kian meningkat. *Kedua*, perubahan sosial dan budaya yang begitu cepat, terutama setelah Perang Teluk 1991, telah memengaruhi dan meningkatkan cara pandang masyarakat Kuwait dalam berdemokrasi.

Berpijak pada prinsip keterbukaan pula, dalam soal wanita pun perlakuan Kuwait sangat berbeda dengan Saudi. Persentase perempuan di Kuwait mencapai 51% dari populasi, dan mereka diberi hak untuk berpartisipasi politik. Konstitusi menyatakan pria dan wanita setara dalam hukum, punya hak yang sama dalam pendidikan dan

pekerjaan. Memang dalam realitas, UU Pemilu belum memberikan ruang bagi perempuan untuk memilih dan dipilih, tetapi pada tahun 2005, Emir Kuwait mengeluarkan dekret agar perempuan diberi hak penuh untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pada Pemilu 2008, jumlah pemilih perempuan mencapai 55,43% dari total pemilih dengan jumlah kandidat perempuan 27 orang dari 275 kandidat bersaing.<sup>8</sup>

Konstitusi Kuwait melarang berdirinya partai politik, namun warga Kuwait dapat menyalurkan aspirasinya melalui organisasi sosial atau faksi politik yang dapat mewakili pandangan politik kelompok sosial, suku ataupun sekte. Relasi inilah yang menyatukan warga dengan organisasi politik pilihannya melalui serangkaian pertemuan ataupun kongres umum (*Diwaniyyah*) untuk menyampaikan program terkait dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berbeda dengan Saudi yang melarang berdirinya IM sebagai organisasi formal—meskipun pada realitasnya—IM dapat eksis di Kuwait. IM dapat tersebar di Kuwait berkat persinggungan antara IM Mesir dan kelompok Islam Kuwait yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 setelah pemimpin gerakan Abdul Aziz Ali Mutawwa bertemu Hassan Al-Banna di Makkah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya jaringan pertama IM Kuwait (Kuwait Muslim Brotherhood). Al-Mutawwa menjadi anggota Majelis Konstituante Ikhwanul Muslimin. Melalui majelis ini, Al-Mutawwa membangun hubungan dengan jaringan IM Mesir, bahkan sebagian di antaranya ikut Al-Mutawwa ke Kuwait untuk menyebarkan paham IM Kuwait. Generasi penerus Al-Mutawwa akhirnya membidani lahirnya Islamic Constitutional Movement (ICM).<sup>9</sup> Di Kuwait akhirnya juga hadir organisasi Islam lain semisal Salafi ataupun Syiah dengan segala paham yang melatarinya.

---

<sup>8</sup> Muhamad S. Olimat, “Women and Politics in Kuwait”. *Journal of International Women’s Studies*, 2 (September, 2009), 199–212.

<sup>9</sup> Nathan J. Brown, “Pushing Toward Party Politics? Kuwait’s Islamic Constitutional Movement,” *Carnegie Endowment for International Peace*, No. 79 (2007), 3–20, <http://carnegieendowment.org/2007/02/13/pushing-toward-party-politics-kuwait-s-islamic-constitutional-movement-pub-19016>.

Hal yang lebih unik dari Kuwait adalah “friksi” internal monarki, ternyata ikut membuka peluang partisipasi warga, termasuk kelompok politik Islam. Meskipun lingkungan keluarga monarki monolit menganut Sunni-Wahabi, terkadang muncul friksi antara elite muda vs tua, moderat vs konservatif, yang sebenarnya telah memiliki akar sejak awal kemerdekaan (Al-Jabir As-Sabah dan As-Salim). Pada tahun 2003, muncul manuver dari moderat dipimpin putra tertua Emir Kuwait tentang sirkulasi kepemimpinan, tetapi tidak didukung elite tua yang juga sekutu utama Saudi. Baru pada tahun 2006 terjadi pergantian kepemimpinan melalui rivalitas Sa’ad As-Salim As-Sabah (generasi As-Salim) vs Sabah Al-Ahmad Al-Jabir (generasi Al-Jabir), dan dimenangi generasi Al-Jabir As-Sabah.<sup>10</sup> Isu suksesi terjadi pada kancah lebih luas, terutama pada setiap pemilu dalam kancah politik parlemen. Pada periode yang sama, misalnya, terjadi perebutan kursi perdana menteri antara Nasir Muhammad Al-Jabir (kalangan tua) vs Ahmad Al-Fahd (generasi muda) yang juga dimenangi generasi tua, Muhammad Al-Jabir. Manuver Ahmad Al-Fahd (elite muda) tidak didukung Emir Kuwait karena diduga berbahaya bagi monarki, tidak hanya di Kuwait, tetapi juga di sejumlah negara monarki Timur Tengah lain.<sup>11</sup>

Kubu muda (moderat) vs tua (konservatif) masing-masing membentuk faksi-faksi berhadapan di parlemen: faksi Al-Jabir dan faksi As-Salim.<sup>12</sup> Perbedaan pendapat serta persaingan menimbulkan krisis politik yang berujung pada pembubaran parlemen (2006) sampai pada krisis terbuka (2011) yang merembet dan melibatkan masyarakat. Slogan dalam gerakan protes pemuda dan kalangan oposisi Islam seirama dengan *Arab Spring* di sejumlah negara Timur Tengah, yakni “Asy-Sya’bu Yurid Isqaat Nizam” (rakyat menginginkan rezim lengser).<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keinginan suksesi

---

<sup>10</sup> Kristin Smith Diwan, “New Generation Royals and Succession Dynamics in the Gulf State,” *Issue Paper*, No.2. The Arab Gulf States Institute (Washington : The Arab Gulf Institute), 2017.

<sup>11</sup> Diwan, “New Generation”.

<sup>12</sup> Diwan, “New Generation”.

<sup>13</sup> Shafeeq Ghabra, “Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation,”

tidak hanya bergulir di lingkungan istana dan parlemen, tetapi juga pada tataran masyarakat. Gerakan protes (sejak 2006) ini menuntut reformasi pemilu dan partisipasi politik yang luas dan puncaknya adalah pada tahun 2011. Gerakan protes oleh aktivis Islam dan kaum muda bertajuk “Nabiha Khamsa”<sup>14</sup> (berikanlah kami yang lima) agar seluruh lima provinsi dilibatkan dalam pemilu untuk memberikan partisipasi bagi warga yang sebelumnya lebih bersifat kesukuan (klanisme). Mereka juga menuntut Perdana Menteri Nasir Muhammad Al-Ahmad As-Sabah lengser melalui semboyan “As-Sya’bu Yurid Isqaat Nasir” (rakyat ingin Nasir turun). Pada 28 November 2011, akhirnya Syekh Nasir mundur, diganti Syekh Jabir Al-Mubarak Al-Ahmad As-Sabah, yang dianggap mewakili kalangan moderat.

Sementara itu, di Uni Emirat Arab (UEA) sistem dirancang untuk mempertahankan warisan lama, disesuaikan dengan struktur pemerintahan modern. Konstitusi UEA yang ada sejak merdeka, kemudian dipermanenkan pada tahun 1996. Menurut Konstitusi UEA, bentuk pemerintahannya adalah monarki federal. Dalam hal ini, presiden dan wakil presiden dipilih dari para emir yang berkuasa di tujuh emirat. Posisi monarki federal ala UEA ini berarti berada di tengah antara monarki absolut ala Saudi dan monarki konstitusional ala Kuwait.

Secara nasional, kekuatan politik di UEA didominasi kekuasaan para emir. Kekuatan tertinggi disimbolkan melalui Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Council (FSC) yang beranggotakan tujuh emir dan bertugas membuat kebijakan umum negara Uni Emirat. Dewan ini juga memilih Presiden dan Wakil Presiden UEA. Di antara tujuh anggota FSC yang paling dominan berkuasa adalah Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai. Mereka berdua menduduki posisi strategis dalam UEA.

---

*Middle East Institute Policy paper Series.* (Washington: Middle East Institute, 2014).

<sup>14</sup> Fatiha Dazi Heni, “The Arab Spring Impact on Kuwait ‘Exceptionalism,’” *International Journal of Archeology and Social Sciences in the Arab Peninsula.* (Chatillon: Arabian Humanities, 2015).

Sebagaimana Saudi dan Kuwait, UEA juga melarang partai politik. Hanya saja seperti Kuwait, pemilu tetap dilaksanakan di UEA dengan memilih langsung nama kandidat anggota parlemen yang diusulkan secara independen. Sampai 2017, Uni Emirat Arab sudah melaksanakan tiga kali pemilu anggota parlemen (FNC), yaitu pada Desember 2006, September 2011, dan Oktober 2015. Hanya saja, dalam pemilu UEA, mereka yang terpilih hanya setengah dari 40 orang jumlah anggota parlemen. Sejumlah 20 orang sisanya ditunjuk emir tiap-tiap emirat. Singkat kata, hanya setengah FNC yang mewakili kepentingan rakyat, sedangkan setengah lain mewakili kepentingan raja. Terlihat hanya separuh dari sistem perwakilan rakyat UEA yang mewakili dan/atau dipilih rakyat sehingga pada era *Arab Spring* sempat timbul protes dari masyarakat.

Dari setengah perwakilan itulah, kekuatan politik Islam dapat muncul. Apa yang disebut sebagai ide-ide Islam yang termanifestasi dalam kekuatan politik Islam di UEA adalah sekumpulan masyarakat yang membawa ide-ide keislaman dalam kiprah kehidupannya, bukan dalam wujud partai karena partai memang dilarang. Salah satu yang menonjol adalah Ikhwanul Muslimin (IM) yang telah berkiprah di wilayah Teluk Arab sebelum negara Uni Emirat Arab lahir yang peristiwanya hampir sama dengan kasus Saudi, apalagi Kuwait.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika Mesir dikuasai oleh Gamel Abdel Nasser, banyak anggota IM yang melarikan diri dari Mesir. Sebagian mereka memilih lari ke wilayah Teluk Arab, termasuk wilayah yang akhirnya bernama UEA ini. Mereka adalah individu berpendidikan, profesional, dan kalangan yang mempunyai mobilitas tinggi. Mereka bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk sektor peradilan dan pendidikan.<sup>15</sup>

Ikhwanul Muslimin (IM) di Uni Emirat Arab (UEA) berbeda dengan IM di negara lain. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan karakter

---

<sup>15</sup> Sultan Al-Qassemi, "The Brothers and the Gulf," *Foreign Policy*, (December 2012). <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.

negara UEA yang unik, yakni sebagai negara monarki federal. Di negara federal (yang terdiri dari tujuh keemiran di bawah pimpinan seorang emir, yakni Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah, dan Umm Al-Quwain) ini, IM kali pertama didirikan di Dubai pada tahun 1974 dengan mendapat dukungan dari pemimpin Emirat Dubai yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden UEA, Syekh Rashid bin Saeed Al-Maktoum. Dalam konteks ini, terdapat sinyal dukungan pemerintah untuk menggunakan kelompok Islam sebagai benteng melawan nasionalisme Arab. Syekh Rashid bahkan akhirnya memberikan kontribusi pada pendirian cabang-cabang IM di Ras Al-Khaimah dan Fujairah.

Adapun Presiden UEA yang juga penguasa Abu Dhabi, Syekh Zayed bin Sultan Al-Nahyan mulanya juga mau menyediakan lahan untuk pendirian cabang IM di Abu Dhabi pada akhir tahun 1970-an. Namun, niat itu batal, bahkan IM tidak mendapatkan izin untuk membuka cabang Abu Dhabi. Di wilayah Sharjah, IM juga tidak memiliki cabang. Tampaknya di kedua wilayah itu arabisme dan nasionalis Arab lebih merata dibandingkan sikap islamisme. Sementara itu, di wilayah Ajman, keberadaan IM hanya diposisikan di bawah *Irsyad* (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Sosial).<sup>16</sup> Bahkan, pada perkembangan waktu, ketika IM dianggap mengancam ”wibawa monarki” akibat menguasai seluruh sektor pendidikan dan peradilan, keberadaannya berusaha diberangus, sebagaimana terjadi di Saudi.

Dari kasus ketiga negara (Saudi, Kuwait, dan UEA), tampak bahwa meskipun agama relatif diakomodasi dalam politik—tentu saja dengan tingkat atau derajat yang berbeda-beda—atas nama reformasi Islam ternyata kelompok politik Islam di Saudi, UEA, dan Kuwait tetap muncul sebagai gerakan oposisi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Berpijak pada realitas (tesis vs anti-tesis) tadi, semangat untuk menegakkan Islam senantiasa tumbuh mewarnai sepanjang sejarah politik negara-negara tersebut yang

---

<sup>16</sup> Mansur Al-Noqaidan, “Al-Ikhwān al-Muslimūn fī al-Imarat: Al-Tamaddad wal-Inhīsar,” dalam *Al-Ikhwān al-Muslimūn fī al-Khalīj*, ed. Al-Mesbar Studies and Research Centre. (Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre, 2012).

termanifestasi dalam konsep *Ad-Din wa Ad-Daulah* dalam arti kehidupan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai agama.

Aktivisme keagamaan semakin berkembang di negara-negara monarki tersebut, bahkan telah mendorong tumbuh suburnya gerakan Islam yang menginginkan transformasi menyeluruh dalam kehidupan sosio-politik dan ekonomi. Atas nama reformasi Islam, kelompok politik Islam muncul sebagai gerakan oposisi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang pada tataran tertentu acap kali dinilai tidak atau belum mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam. Dalam konteks inilah, meskipun tiga negara (Saudi, Kuwait, dan UEA) secara formal “melabeli” diri telah menerapkan prinsip *Ad-Din wa ad-Daulah*, realitasnya adalah di ketiga negara tetap muncul gerakan-gerakan revivalisme Islam untuk kembali membangkitkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **D. Peta Kekuatan Politik Islam: Menakar**

### **Pengaruh dalam Dinamika Politik Domestik**

Munculnya kekuatan politik Islam—meminjam pendapat Muhammad Imarah—merupakan fenomena *As-Sahwah Al-Islamiyyah* yang secara definitif diartikan sebagai revivalisme Islam. Revivalisme Islam didasarkan pada konteks sejarah asal perkembangan politik dalam dunia Islam yang tidak memisahkan keberadaan negara dan agama. Revivalisme adalah upaya politis untuk merevitalisasi Islam dalam ranah politik masyarakat muslim. Revivalisme Islam ditandai dengan penegakan ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik, budaya, dan kehidupan ekonomi. Tujuan dari revivalisme Islam adalah terciptanya Islam kafah dalam berbagai sektor kehidupan.

Menurut Bubalo, kebangkitan Islam memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>17</sup> Di sisi lain, Dekmeijan memandang

---

<sup>17</sup> Antony Bubalo, *Middle East, Islamism dan Indonesia*. (New South Wales: Low Institute for International Politics, 2005).

bahwa fenomena revivalisme Islam ditandai dengan menguatnya aktivitas keagamaan yang meliputi partai politik, kelompok-kelompok pergerakan, dan masyarakat Islam militan. Kelompok ini memiliki kesadaran tinggi dalam memperjuangkan Islam sehingga kerap berseberangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaganya.

Banyak pemikir Islam terdahulu telah memberikan landasan ideologi bagi kebangkitan Islam kontemporer. Gerakan yang mereka usung bertujuan melakukan perubahan sistem sosial politik ke arah kehidupan islami. Gerakan ini mempunyai pandangan bahwa Islam adalah *ya'lu wala ya'la 'alaih*—Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya. Berdasarkan prinsip itulah, tuntutan pelaksanaan syariat Islam akhirnya pada tataran tertentu menjadi agenda politik gerakan keagamaan di hampir semua negara di Timur Tengah, termasuk UEA, Kuwait, bahkan Arab Saudi. Revivalisme Islam ini sebagian besar di antaranya dipelopori Ikhwanul Muslimin, yang pada perkembangannya diikuti oleh kelompok Islam lainnya, seperti Hizbut Tahrir, Hizbu Ad-Da'wah, Hizbullah, Jihad Islam, dan Jama'at Al-Muslimun. Gerakan-gerakan Islam tersebut menjadi penggerak perjuangan politik Islam di Timur Tengah dengan berperan aktif dalam politik praktis.

Negara Saudi, Kuwait, dan UEA secara formal memang telah “melabeli” diri sebagai telah menerapkan prinsip *Ad-Din wa Ad-Daulah*. Namun, realitasnya di ketiga negara itu tetap muncul apa yang disebut gerakan-gerakan revivalisme Islam tadi, lahir tuntutan untuk kembali membangkitkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di Arab Saudi, misalnya, secara historis sebenarnya telah terjadi apa yang disebut simbiosis antara kekuatan kerajaan dan gerakan Islam. Bahkan, simbiosis yang terjadi sejak abad ke-18 M ini memberikan motivasi bagi Raja Abdul Aziz bin Saud dan pasukannya untuk menaklukkan dan menyatukan Jazirah Arab pada era 1912–1925. Meskipun negara Saudi didasarkan pada ideologi pemikiran seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seiring waktu monarki tetap menghadapi realitas tantangan

dari kelompok Islam lain.<sup>18</sup> Tantangan pertama justru muncul dari kelompok suku-suku fanatik dalam pasukan kerajaan, tetapi berhasil dikalahkan dalam Perang Sabala tahun 1929 M. Berikutnya, sempat pula muncul gerakan protes pimpinan pangeran Khalid bin Musa'id (era 1960-an) karena melawan kebijakan modernisasi ala Raja Faisal. Aksi lebih serius meletus di Makkah pada November 1979, yakni terjadi pengambilalihan Masjidilharam oleh kelompok Juhaiman al-'Utaibi al-Ikhwan, yang lantas ditaklukkan melalui kekuatan bersenjata.

Terutama sejak terjadi Perang Teluk 1991 dan Operasi Badai Gurun dimulai oleh Amerika Serikat, Kerajaan Arab Saudi kembali harus berhadapan dengan tumbuhnya gerakan Islam yang menginginkan perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Memang, pada 1992 otoritas negara telah mengakomodasi tuntutan dengan memperkenalkan konstitusi negara untuk kali pertama sebagai tanda mengoreksi sistem negara absolut monarki dengan sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam. Namun, gerakan Islam di negara itu tidak lantas berhenti. Melalui gerakan reformasi keagamaan, kelompok politik Islam menunjukkan diri mereka sebagai kelompok oposisi yang mengkritik pemerintah dan bahkan mempertanyakan legitimasi keislaman pihak kerajaan.

Dalam konteks Saudi ini, tentu saja ini menjadi sangat menarik sebab fenomena kebangkitan Islam biasanya menjadi sebuah protes terhadap otoritas negara sekuler bahkan telah menjadi pola yang berpengaruh dalam politik kontemporer di dunia Arab, terutama pada rezim-rezim republik revolusioner. Namun, khusus di Arab Saudi, gerakan protes dari kelompok Islam ini ditujukan langsung kepada pemerintahan monarki Islam. Artinya, dalam konteks Saudi, Islam telah dijadikan sebagai sumber legitimasi bagi kerajaan sekaligus sebagai medium protes bagi kelompok oposisi. Kendati pada masa lalu Saudi berhasil mengatasi tantangan dari kelompok oposisi

---

<sup>18</sup> James P. Piscatori, "Ideological Politics in Saudi Arabia," dalam *Islam in the Political Process*, ed. James P. Piscatori. (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 56–63.

muslim militan, munculnya gerakan Islam baru telah menjadi perhatian serius bagi monarki dan para pendukungnya di kawasan.<sup>19</sup> Kekuatan dan/atau gerakan Islam di Arab Saudi setidaknya dapat dipetakan dalam beberapa kekuatan, baik yang berlatar belakang Sunni maupun Syiah.

Walaupun Saudi menerapkan paham keagamaan tunggal secara ketat, kenyataannya di negara itu tetap muncul paham keagamaan lain, yang bahkan sampai melahirkan gerakan dan/atau kekuatan politik Islam alternatif. Alternatif yang masih dekat dengan Wahabisme adalah Salafi sehingga kedua paham ini dalam diskursus umum acap kali saling ditukarbalikkan bahwa paham keagamaan Saudi adalah Wahabi-Salafi meskipun keduanya berbeda. Padahal, bagi Salafi (terinspirasi pemikiran ahli hadis Syekh Nashirudin Al-Bani), kaum Wahabi yang dalam konteks kontemporer didominasi pemikiran Abdul Aziz bin Baz disebut sebagai “keliru”.

Dalam konsep teologis tidak ada beda, hanya saja karena Wahabi merujuk pada mazhab Hanbali, ini dianggap menjadi bermasalah sebab kaum Salafi harusnya hanya merujuk secara murni kepada Al-Qur’an dan hadis.<sup>20</sup> Gerakan baru Salafi inilah yang acap kali melakukan *sweeping* pada tahun 1965 terhadap toko yang menampilkan gambar wanita di Madinah. Kendati agak berseberangan, pada perkembangannya Salafi meminta dukungan ulama Wahabi Syekh Abdul Aziz bin Baz guna memperkuat posisi. Bin Baz lantas memberikan wewenang kepada pemimpin mereka untuk menjadi pengawas syariat dalam masyarakat sehingga Salafi makin kuat menjadi gerakan militan.<sup>21</sup> Dengan diketuai Juhaiman al-Utaibi, mereka berani mengkritik kerajaan, bahkan sempat melakukan kudeta, menduduki Masjidilharam pada 20 November 1979, sehingga ditumpas dengan menggunakan tank ke dalam Masjidilharam.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Dekmejian, “The Rise of Political Islam”, 627.

<sup>20</sup> David Commins, *Islam in Saudi Arabia*. (London and New York: I. B. Tauris, 2015).

<sup>21</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 138–141.

<sup>22</sup> Yaroslav Trofimov, *Kudeta Mekkah: Sejarah yang tak Terkuak*. (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2007).

Di Saudi ternyata secara “tersembunyi” juga ada Ikhwanul Muslimin (IM). Kehadiran IM di negara ini sudah lama sejak pembunuhan Hasan Al-Banna (1949 M), disusul pembersihan gerakan ini oleh Gamal Abdul Nasser (1950-an–1960-an). Para aktivis IM akhirnya terdiaspora ke berbagai negara, termasuk Arab Saudi.<sup>23</sup> Memang, IM paling lambat berkembang di Saudi dibandingkan di wilayah Arab yang lain, bahkan telah tumbuh sejak era kolonialisme di negara-negara Arab. Kala itu, IM menawarkan formula atas bangsa Arab bahwa satu-satunya solusi menghentikan dominasi (politik, ekonomi, dan budaya) Eropa atas Arab adalah mengembalikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran ini, IM dapat menjadi ideologi yang sangat cepat menyebar ke luar Mesir, seperti ke Sudan, Suriah, Yordania, dan Yaman sejak tahun 1950-an.<sup>24</sup>

Saudi memang merupakan satu-satunya negara yang menolak berdirinya organisasi Islam apa pun, termasuk IM. Hasan Al-Banna tahun 1946 memang sempat menemui Raja Abdul Aziz untuk meminta izin pembukaan kantor resmi IM.<sup>25</sup> Namun, karena relasi monolit kerajaan-ulama Wahabi dan monopoli otoritas keagamaan oleh ulama Wahabi, kehadiran organisasi baru di luar kontrolnya tentu sangat mengganggu. Walhasil, Abdul Aziz menolak dengan dalih bahwa ketika Islam telah menjadi napas bagi rakyat Saudi, kehadiran organisasi apa pun tidak diperlukan lagi.

Namun, karena pembersihan aktivis IM di Mesir dan disusul negara-negara Arab lain, seperti Suriah, pengungsi IM tidak terhindarkan semakin banyak di Saudi. Mereka mayoritas berasal dari kalangan intelektual dan terdidik sehingga Raja Faisal memanfaatkan kapasitas mereka untuk mengembangkan pendidikan Saudi yang masih tradisional, bahkan dilibatkan dalam peletakan fondasi

---

<sup>23</sup> Stephane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, penerj. George Holoch. (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 39.

<sup>24</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 38.

<sup>25</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 40–41, 62.

kurikulum dan sistem pendidikan. Sebagian mereka memiliki andil dalam pendirian sekolah-sekolah dan menjadi guru bagi anak-anak Saudi. Manna' Al-Qattan (asal Mesir), bahkan sempat memiliki posisi penting di Kementerian Pendidikan Saudi yang mendesain kebijakan pendidikan dan kurikulum, dengan sebagian besar di antaranya masih diterapkan sekarang.<sup>26</sup> Berikutnya, intelektual IM gelombang kedua berdatangan, seperti Muhammad Qutb (adik Sayyid Qutb) menjadi dosen di Institute of Sharia yang akhirnya menjadi Universitas Ummul Quro. Ketika Universitas Islam Madinah didirikan (tahun 1961), sebagian besar staf dan pengajarnya juga pengikut IM.

Pada konteks inilah terjadi pertemuan signifikan ajaran Wahabi-IM yang oleh Muhammad Qutb ditegaskan sebagai tidak adanya pertentangan Wahabi-IM. Bedanya, Wahabi menekankan aspek teologis, sedangkan IM memberi warna aktivisme sosial dan politik. Karangan Muhammad Qutb ini memberi inspirasi bagi berdirinya gerakan *As-Sahwa al-Islamiyah* (Kebangkitan Islam) di Saudi Arabia.<sup>27</sup>

Melalui sendi-sendi pendidikan, pengaruh IM menguat kepada generasi muda terdidik di Saudi. Beasiswa yang diberikan Universitas Islam Madinah terhadap mahasiswa-mahasiswa asing juga membantu penyebaran IM dalam skala global. Berdirinya Liga Muslim Dunia (1962) yang menjadi program Saudi bagi penyebaran Islam dan memperkuat keberadaan institusi pendidikan Islam di seluruh dunia juga tidak lepas dari pengaruh itu. Pembentukan Majelis Pemuda Muslim Dunia (1972) juga menjadi saluran aktivis IM di Saudi dalam memperluas pengaruh di kalangan muda di seluruh dunia, bahkan termasuk diaspora muslim di Eropa dan Amerika. Kedekatan IM-kerajaan mencapai puncak pada era Raja Faisal. Saat era Perang Dingin itu, Raja Faisal memanfaatkan IM untuk mengampanyekan gerakan anti-sosialisme, komunisme, dan

---

<sup>26</sup> Lihat Panduan *Educational Policy in the Kingdom of Saudi Arabia*. Lacroix, *Awakening Islam*, 46.

<sup>27</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 43.

pemerintahan sekuler (Nasser/Mesir) untuk menggalang solidaritas dunia Islam demi kepentingan politik luar negeri Saudi Arabia. IM menjadi mesin propaganda efektif melalui koran, majalah, dan radio.<sup>28</sup>

Meskipun menguasai sektor pendidikan dan organisasi, IM Saudi tetap tidak mampu menembus lembaga tradisional ulama yang dikuasai Wahabi seperti Peradilan Syariat dan Majelis Ulama Senior. Namun, kiprah IM pun bersinggungan langsung di wilayah dominasi Wahabi dengan menyebarkan buku, buklet, dan selebaran tentang pemikiran IM di sekitar Masjidilharam.<sup>29</sup> Dalam posisi ini, kerajaan diuntungkan: di satu sisi mendapatkan dukungan politis dari ulama Wahabi, sedangkan di sisi lain dengan sumber daya IM, lembaga pendidikan dan kelembagaan Saudi juga tetap terbangun baik.

Namun, eksistensi IM secara kelembagaan merupakan organisasi yang dilarang berdiri di Saudi sehingga IM tetap berkembang secara informal. IM tetap berkembang melalui perkumpulan pemuda, klub-klub hobi, olahraga, ruangan kelas, perkemahan pelajar, aksi solidaritas, dan perkumpulan penghafal Al-Qur'an. Mereka terhubung dengan jaringan informal yang bernama *Jama'at*. Metode ini pada tahun 1970-an cukup mengakar di masyarakat Saudi.

Kedekatan dan percampuran Wahabi-IM ini pada akhirnya tetap saja melahirkan perpecahan. Pengikut IM faksi ulama asal Suriah, Syekh Muhammad Surur (dikenal dengan sebutan Sururi), enggan mengkritik apalagi konfrontasi dengan pemerintah, sebuah karakter tipikal Wahabisme. Adapun generasi muda IM berpendidikan dari Barat dan telah bersentuhan dengan iklim politik demokratis bergabung dalam *As-Sahwa Al-Islamiyah* (dikenal dengan sebutan *Sahwa*). *Sahwa* pimpinan Safar Al-Hawali dan Salman Al-Awdah ini berkarakter gabungan Wahabi-IM sehingga berbeda dibandingkan

---

<sup>28</sup> Lacroix, *Awakening Islam*, 40-42.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Syekh Ismail Harbi, Wakil Direktur Yayasan Haramain, 30 Maret 2017.

IM dari tempat asalnya yang masih mengadopsi sufisme. Hanya saja, keduanya sama-sama memiliki tendensi politik yang kuat.

*Sahwa* pernah protes keras—dengan melayangkan surat permintaan agar pemerintah kembali kepada pijakan Islam yang benar—ketika Saudi meminta bantuan pada AS dan sekutunya (baca: negara nonmuslim) dalam perang Irak-Kuwait tahun 1991. Sekitar 500.000 pasukan internasional memasuki Saudi.<sup>30</sup> Peristiwa ini justru memicu lahirnya Dekrit Raja (1993) untuk membentuk Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan yang melakukan kontrol ceramah dan otoritas ulama-ulama Saudi agar loyal pada kerajaan.<sup>31</sup> Raja Fahd melakukan pembersihan syekh yang diduga berafiliasi dengan IM, mengganti para ulama *Sahwa* dari semua posisi mereka, mengusir Muhammad Qutb dari Universitas Ummul Quro. Menteri Dalam Negeri Saudi, Pangeran Nayef, bahkan secara terbuka menuduh IM sebagai sumber dari semua petaka di Kerajaan Arab Saudi.<sup>32</sup>

Hubungan kerajaan-*Sahwa* berangsur membaik ketika Mufti Saudi Abdul Aziz bin Baz meninggal (1999) sehingga menimbulkan kekosongan profil ulama yang mumpuni. Raja Fahd semula ingin menjadikan ulama-ulama *Sahwa* sebagai penopang kerajaan dengan syarat berkomitmen untuk tidak menentang Pemerintahan Saudi. Tujuan Raja kala itu adalah untuk mendapatkan legitimasi dari ulama *Sahwa* guna menentang Al-Qaeda yang banyak digandrungi pemuda Saudi. Namun, relasi ini kembali berubah ketika Raja Abdullah tampil dan seiring munculnya isu *Arab Spring*. Para ulama *Sahwa* kembali mengajukan petisi, mengajukan proporsi yang adil antara hak negara dan hak berorganisasi yang ditandatangani

---

<sup>30</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 144–145.

<sup>31</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 145–147.

<sup>32</sup> Stéphane Lacroix, “Saudi Arabia’s Muslim Brotherhood predicament,” *The Washington Post*, (Maret 2014), [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm\\_term=.f3b04fe78fc2](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fc2)

10 ulama *Sabwa* termasuk Salman Al-Awdah.<sup>33</sup> Seiring fenomena penggulingan dan geliat pergantian rezim di Mesir, para ulama *Sabwa* juga menuntut reformasi pemerintahan meskipun mereka menentang rencana demonstrasi besar-besaran pada 11 Maret 2011 di Riyadh sehingga demonstrasi gagal terlaksana.

Tidak hanya muncul dari kalangan Sunni, gerakan politik Islam di Saudi muncul dari kalangan Syiah juga. Arab Saudi memang bukan negara monolit Sunni, melainkan ada juga warga Syiah. Meskipun jumlah kaum Syiah hanya sekitar 10%, namun sejak berkuasa di tahun 1913 atas wilayah-wilayah Syiah (terutama Al-Hasa), Arab Saudi menghadapi dilema antara keinginan untuk mendapatkan legitimasi di wilayah Syiah ini atau berpegang pada menegakkan pengaruh Wahabi.<sup>34</sup> Berdasarkan konteks sejarah, mayoritas penganut Syiah berada di pesisir timur dekat dengan Teluk Persia, yakni Al-Hasa, dekat perbatasan Oman, sebagian lagi berada di selatan Saudi berbatasan dengan Yaman. Al-Hasa dihuni berbagai etnis Arab, Persia, Baluchi, Asia Selatan dan Afrika. Mayoritas warga di sana menganut Syiah Itsna Asyariyah.

Penganut Syiah di Saudi tidaklah tunggal. Itsna Asyariyah (Syiah Imamiyah) merupakan aliran dominan, mencapai sekitar 2 juta jiwa yang terkelompok dalam al-Baharna, Nakhawila, Bani Husaini, Bani Ali (Harb), dan Bani Juhaynah. Kelompok 1) Al-Baharna merupakan imigran dari berbagai tempat sejak Bani Umayyah dan Abbasiyah. Mereka ada di pesisir timur dan terkonsentrasi di Kota Qatif dan Dammam di sekitar Pelabuhan King Abdul Aziz dan dekat dengan Bahrain. Mereka memiliki kesamaan etnis dengan Syiah Bahrain. 2) Nakhawila merupakan kaum sosial menengah ke bawah, menganut Syiah Imamiyah, dan menetap di sekitar Madinah, Wadi al-Fara. Kebanyakan mereka berkerja sebagai petani dan buruh perkebunan kurma di sekitar Madinah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 145–147.

<sup>34</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 7–8.

<sup>35</sup> Raihan Ismail, *Saudi Clerics and Shi'a Islam* (New York: Oxford University Press, 2016).

3) Penganut Syiah Imamiyah dari sebagian kecil Bani Hussaini (keluarga Syarif Hussain yang menguasai Hijaz era penguasaan Turki Utsmani), Bani Ali, dan Bani Juhaynah. Mereka adalah suku nomaden di wilayah Hijaz. Sebagian besar telah menganut ajaran Wahabi sejak keluarga Bani Saud menguasai Saudi. 4) Di sebelah barat daya Saudi, tepatnya di Lembah Najran (sejak abad ke-16), bahkan menjadi kiblat Syiah Ismailiyah yang berasal dari Yaman, Pakistan, dan India. 5) Di sepanjang perbatasan Saudi–Yaman, terdapat Syiah Zaidiyah, sebagai sekte utama Syiah Yaman. Relasi interpersonal kesukuan, kultural, dan kedekatan geografis menyebabkan Syiah di wilayah ini dinamis meskipun secara entitas politik mereka terpisahkan antara dua negara.

Pada era kejayaan, harga minyak dan ekonomi Saudi mengalami surplus sehingga pembangunan besar-besaran terjadi di Saudi. Namun, pembangunan berbagai infrastruktur (seperti rumah sakit, sekolah, penampungan air, jalan) hanya banyak terpusat di wilayah Sunni sehingga memancing kecemburuan yang memicu gelombang demonstrasi di kalangan Syiah. Kelompok oposisi Syiah terbesar di Saudi merujuk pada figur Syekh Hasan Al-Saffar (murid Muhammad Mahdi al-Shirazi, Irak Utara). Hasan bersama kaum muda Syiah Saudi mendirikan Organization of Islamic Revolution (OIR) pada tahun 1979. Momentum revolusi Iran membuat OIR kian aktif melakukan kritik bahkan demonstrasi di wilayah timur Saudi. Akibatnya, banyak anggota OIR ditangkap.<sup>36</sup> Berikutnya, pemerintah membuat kebijakan “akomodatif”, dengan mengundang Hasan Al-Saffar ke rumah pribadi ulama terkemuka Wahabi, Bin Baz. OIR akhirnya menjadi lebih moderat, bahkan berganti nama menjadi Reform Movement.<sup>37</sup>

Berbeda dengan Saudi Arabia yang telah secara kukuh menahbisikan ikatan yang kuat antara *Ad-Din wa Ad-Daulah*, Kuwait memang kurang memperlihatkan keterkaitan sekukuh yang terjadi di Saudi

---

<sup>36</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 141.

<sup>37</sup> Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 105.

meskipun dengan monopoli Wahabisme. Namun, politik keterbukaan di Kuwait membuka peluang tampilnya kekuatan-kekuatan politik Islam yang bahkan menjadi sangat dominan dalam konstelasi politik. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi kuatnya relasi antara warga dengan faksi politik tertentu di Kuwait, yaitu tribalisme, kelas menengah dari para pengusaha, dan ideologi Islam.<sup>38</sup>

*Pertama*, faktor tribalisme (kesukuan) yang sudah mendarah daging dalam kehidupan warga Kuwait. Kebijakan mengeluarkan kaum *Biduni* (ras Arab non-Kuwait sebagai bukan warga negara Kuwait) dalam politik Kuwait sejak 1991 merupakan bagian dari perwujudan sentimen tribalisme. Jika populasi Arab Saudi (2016) mencapai 31,79 juta jiwa, 36,8% di antaranya merupakan imigran<sup>39</sup>, penduduk Kuwait yang berjumlah sekitar 4,398 juta jiwa,<sup>40</sup> mayoritas adalah non-Kuwait (termasuk ekspatriat) yang mencapai 55%, sedangkan warga Kuwaiti (Kuwait asli) jumlahnya hanya mencapai 45% yang umumnya mendiami wilayah perkotaan atau Kuwait City. Polanya hampir sama dengan Saudi, yakni 85% warga tinggal di perkotaan.<sup>41</sup> Dari 55% tersebut, 33% di antaranya adalah Arab non-Kuwait, sebagai etnis terbesar kedua di Kuwait. Mereka berasal dari beragam etnis Timur Tengah dan Afrika Utara yang datang setelah kemerdekaan 1961. Mereka banyak dari Palestina dan Yordania dan berpindah kewarganegaraan hingga menjadi kelompok etnis Arab non-Kuwait serta direkrut menjadi tentara atau polisi. Namun, semasa perang 1991, mereka banyak yang dideportasi dan dicabut kewarganegaraannya karena dukungan mereka terhadap Irak, memfasilitasi pengungsi Irak, dan dituduh melakukan upaya pembunuhan Emir Jabir Al-Ahmad As-Sabah. Sejak itulah banyak

---

<sup>38</sup> A. Hiramatsu, "The Changing Nature of the Parliamentary System in Kuwait: Islamists, Tribes, and Women in Recent Elections," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 4, No. 1&2, (2011), 62–73.

<sup>39</sup> Mayoritas imigran berasal India, Mesir, Bangladesh, Srilanka, Filipina, Indonesia, dan Pakistan yang bekerja pada berbagai sektor, seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembantu rumah tangga.

<sup>40</sup> "Kuwait Population 2017," Januari 2017.

<sup>41</sup> "Kuwait Population 2017", 1–2.

warga Arab non-Kuwait (seperti Arab Saudi, Irak, Yaman, dan Sudan) tidak berkewarganegaraan alias *Bidun*. *Bidun* ini dianggap imigran gelap oleh Pemerintah Kuwait meski telah turun-temurun tinggal di Kuwait.

Meskipun Kuwait merupakan negara kecil yang makmur dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi dan sistem politik demokratis yang maju, tribalisme begitu dominan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sejarah Kuwait tidak lepas dari pertalian kuat tiga suku besar (As-Sabah, Al-Khalid, dan Al-Ghanim) yang bermigrasi dari Najd ke wilayah pesisir Kuwait untuk mencari penghidupan. Pertalian ketiga suku tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya negara Kuwait modern. Politik Kuwait tidak lepas dari peran kesukuan tersebut. Di Kuwait, suku dapat berperan sebagai partisan (pendukung) organisasi politik tertentu tanpa campur tangan dari pemerintah. Dalam hal ini, kepala suku mengarahkan pengikutnya untuk memilih atau mendukung faksi tertentu sesuai dengan ideologi politiknya. Terdapat sejumlah suku berpengaruh terkait basis dukungan di Kuwait, antara lain, Al-Mutairi, Ar-Rashidi, Al-Enizi, As-Shammari, Ad-Dhaferi, dan Al-Ajmi.<sup>42</sup>

*Kedua*, faktor kelas menengah yang berkembang di Kuwait dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Etheridge, sedikitnya terdapat sekitar 1,1 juta orang (25% dari total penduduk Kuwait) kategori kelas menengah (kebanyakan ekspatriat berprofesi pengusaha).<sup>43</sup> Meskipun tidak begitu tampak dalam percaturan politik, pengusaha muda di Kuwait telah mendorong banyak perubahan, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. *Ketiga*, faktor ideologi keislaman. Peran faksi politik terutama dari kelompok Islam.

Meskipun Kuwait melarang partai politik, organisasi sosial-politik nonresmi dibolehkan dan berkembang dengan sangat

---

<sup>42</sup> AlFozaie, Naser. "Tribalism in Kuwait: Impacts on the Parliament," Master Thesis 2016, file:///E:/Bahan%20Tulisan%20Kuwait/Nasser-2016\_Tribalisme%20in%20Kuwait.pdf.

<sup>43</sup> Jamie Etheridge, "Hallmarks of Kuwait's Middle Class," *Kuwait Times* (Juni 2014), <http://news.kuwaittimes.net/hallmarks-kuwaits-middle-class/>.

dinamis. Para aktivisnya sangat aktif dan berperan besar dalam kancah politik Kuwait. Dalam konteks politik nasional, kelompok oposisi dapat dibagi dalam tiga kekuatan utama, yaitu Kelompok Oposisi Islam, Gerakan Populer (terdiri dari Forum Demokrasi Kuwait, Aliansi Demokrasi Nasional, dan Gerakan Progresif Kuwait), dan Kelompok Independen. Kebanyakan terdiri dari para aktivis, baik intelektual, pemuda maupun suku yang mempunyai pandangan kritis terhadap pemerintah.<sup>44</sup>

Ketiga kelompok tersebut mempunyai tujuan sama dalam hal reformasi politik, tetapi terdapat perbedaan menonjol, terutama terkait kebijakan sosial-politik, agama, dan kebijakan luar negeri. Sementara itu, secara ideologis, aktivisme politik Kuwait didominasi beberapa arus, di antaranya, 1) kelompok pedagang liberal, 2) arus nasionalis dan progresif yang terinspirasi Nasserisme dan Ba'tsisme, (berkembang tahun 1970-an), 3) kelompok berhaluan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin (IM) dan Salafi. Berdasarkan afliasinya, kelompok Islam dibedakan lagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok oposisi Islam yang terdiri dari faksi politik The Islamic Constitutional Movement (ICM) dan Salafi. Sementara itu, kelompok pro-Monarki terdiri dari kalangan Syiah dengan beragam alirannya.<sup>45</sup>

ICM merupakan sayap politik IM yang cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, terlihat dari simpati masyarakat dengan aktivitas sosial-politik ICM di samping banyaknya anggota IM mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.<sup>46</sup> ICM sebagai gerakan politik Islam gaya baru di Kuwait didirikan (30 Maret 1991), bertujuan untuk melakukan reformasi pemerintah secara legal di samping perannya dalam bidang sosial dan

---

<sup>44</sup> S. Awadh, "Islamic Political Groups in Kuwait: Roots and Influences," *Unpublished Doctoral Thesis*. (Portsmouth: University of Portsmouth, 1999).

<sup>45</sup> Courtney Freer, "The Rise of Pragmatic Islamism in Kuwait's Post Arab Spring Opposition," *Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brookings*. (Washington: Brookings Institution, 2015), 1–2.

<sup>46</sup> Freer, "The Rise of Pragmatic Islamism," 2.

amal. Kemunculan ICM dilatarbelakangi oleh kekecewaan sebagian anggotanya terhadap IM Internasional yang seolah-olah diam dan membiarkan Irak melakukan invasi ke Kuwait pada Agustus 1990 sehingga gerakan ini memutuskan hubungan dengan IM internasional. Di Kuwait, ICM tumbuh karena dorongan sebagian anggotanya untuk memperjuangkan reformasi sosial-politik melalui Social Reformation Society (SRS) dengan mendirikan badan amal Islam yang berafiliasi dengan pengikut IM yang sudah ada sebelumnya. IM Kuwait pernah mengalami perpecahan pada tahun 2003 dengan dua kepemimpinan<sup>47</sup> sehingga pada Pemilu 2003 kalah dan kehilangan tiga dari lima kursi di parlemen.

Setelah pemilu, ICM melakukan restrukturisasi secara drastis, menciptakan Majelis Umum ICM (beranggotakan 70 orang) dan sekretariat ICM (beranggotakan 21 orang) dan sembilan orang untuk mengisi jabatan di kantor urusan politik ICM. Restrukturisasi dimaksudkan untuk membentuk faksi politik resmi yang diizinkan pemerintah dalam menghadapi pemilu. ICM merombak jajaran pimpinan dengan memprioritaskan anggota muda dan moderat dibandingkan kalangan tua. Terbukti dengan perombakan, ICM dan kelompok yang tergabung dalam blok oposisi memperoleh suara signifikan, seperti pada Pemilu 2012, 2014, dan 2016. Di parlemen, ICM berkoalisi dengan kelompok Islam lain yang beranggotakan 13 orang sebagai anggota tetap untuk bekerja sama dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan politik lain. ICM juga berkoalisi dengan kelompok lain untuk mendukung kebijakannya.

ICM bertujuan melakukan reformasi pemerintahan secara legal, melakukan islamisasi lewat reformasi konstitusional. Karakteristik cara ini telah menjadikan ICM pilihan yang dapat diterima kalangan yang menginginkan implementasi Islam dalam reformasi pemerintahan dengan tanpa kekerasan.<sup>48</sup> ICM merupakan sayap resmi gerakan Ikhwanul Muslimin Kuwait. Organisasi yang memi-

---

<sup>47</sup> Shafeeq Ghabra, "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait," *Middle East Policy*, 55(2), May, (1997), 58–59.

<sup>48</sup> Brown, "Pushing Toward", 3–20.

liki ikatan formal dengan organisasi induk di Mesir ini sebenarnya membangun fungsi utama untuk bergerak di bidang sosial dan amal. Namun, ICM akhirnya terjun juga ke ranah politik, terutama ketika terjadi pembubaran parlemen (1976 M) akibat perseteruan terus-menerus antara parlemen dan pemerintah. Ketika parlemen kembali diaktifkan pada tahun 1981, Ikhwanul Muslimin memperoleh beberapa kursi. Capaian politik terbesar IM terjadi pada 1990, menyusul peristiwa Saddam Hussein menyerang Kuwait. Kala itu, angkatan muda IM tetap tinggal di Kuwait dan membentuk gerakan perlawanan ICM.<sup>49</sup> Sejak itulah eksistensi ICM mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat Kuwait. Memang, setidaknya sampai 2017 belum ada gerakan Islam yang kuat untuk memenangkan kursi mayoritas di parlemen, tetapi eksistensi ICM (dan gerakan Islam lain) bersifat instrumental dalam membentuk kelompok mayoritas reformis dalam Pemilu Parlemen 2016. Tatkala terjadi perebutan kekuasaan keluarga kerajaan pada 2006 menyusul wafatnya sang raja, misalnya ICM mampu menggunakan situasi ini untuk memperoleh dukungan rakyat dan gerakan kiri untuk membentuk koalisi reformis.<sup>50</sup>

Selain IM, di Kuwait terdapat gerakan Islam yang juga cukup kuat, Salafi. Kelompok ini terpilah dalam dua kelompok, antara Salafi puritan dan aktivis. Kaum puritan lebih berkembang di dalam negeri, sedangkan kaum aktivis lebih banyak pendukung di luar negeri.<sup>51</sup> Salafi puritan kurang politis, memilih fokus pada penguatan keagamaan dan penegakan nilai Islam yang sesuai As-Salaf As-Salih, sementara Salafi aktivis terlibat dalam politik praktis. Dalam Pemilu Parlemen 2012, kelompok aktivis ini sempat mendominasi kursi

---

<sup>49</sup> Amanda Rudman dkk., “Domestic Dynamics of Political Islam in the Greater Middle East: Case Studies of Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey,” *Cornell International Affairs Review*, 1. No.1 (2007), 1–3.

<sup>50</sup> Brown, “Pushing Toward”, 3–20.

<sup>51</sup> Zoltan Pall, “Kuwait Salafism and Its Growing Influence in the Levant,” *Carnegie Endowment for International Peace*. (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2014), 15–20.

parlemen. Namun, karena dominasi dan sikap represif monarki, kelompok ini jadi terpinggirkan.

Kemunculan Salafi di Kuwait menjadi organisasi yang tertata pada pertengahan abad-19 ketika sejumlah pemuda mengikuti dakwah Salafi berkumpul dan menyusun program untuk mengingatkan masyarakat Kuwait tentang pentingnya Islam yang bersumber dari ajaran Rasul dan sahabat. Kelompok Salafi ini tidak banyak berkecimpung dalam kancah politik, tetapi lebih pada pendidikan dan amal.

Pada awal Kuwait modern berdiri, Salafi mendapatkan pengikut di Kuwait dan mulai terjun ke dunia politik, khususnya di kalangan pedagang dan ekspatriat Arab. Mereka kali pertama mendirikan Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) pimpinan syekh (asal Mesir) dan Abdurrahman Abdul Khaliq. RIHS dimaksudkan sebagai kendaraan politik para ulama dan aktivis Salafi. Meskipun Salafi di Kuwait kerap dirugikan rezim monarki, namun mereka menikmati dukungan Arab Saudi sebagai sekutu dekat monarki. Konon, komunitas Arab Badui dari Najd yang datang ke Kuwait abad ke-17 menjadi pengikut aliran Salafi sehingga wajar kiranya jika aktivitas gerakan ini banyak didanai kelompok pedagang Salafi Saudi.

Selain RIHS, faksi Salafi lainnya yang berperan dalam politik Kuwait adalah Asosiasi Salafi Islam (At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi) yang didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan membangun moralitas masyarakat Kuwait setelah Perang Teluk (invasi Irak). Isu yang didengungkan kelompok ini di parlemen adalah terkait dengan hukum Islam (syariat) dan menjadikan syariat sebagai satu-satunya sumber hukum, melarang minuman keras dan perjudian. Di parlemen, Asosiasi Salafi Islam merupakan kelompok Salafi terbesar yang dekat dengan kelompok pro-monarki. Kelompok ini harus bersaing dengan ICM untuk mendapatkan pengaruh dari elite urban (Hadar).

Kelompok Salafi terakhir adalah Partai Ummah (Hizb Ummah), blok politik yang menyebut diri sebagai sebuah partai meskipun hal itu sebenarnya dilarang pemerintah Kuwait. Faksi yang berdiri pada

tahun 2005 ini sebagian besar anggotanya berasal dari komunitas Badui yang terinspirasi dari pemikiran Syekh Al-Mutairi. Kubu ini berusaha mendorong gerakan Salafi Kuwait agar dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Di parlemen, faksi ini kerap menyerukan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi di parlemen. Oleh karena itu, pandangannya yang lebih moderat, banyak aktivis Salafi dari Partai Ummah yang tidak disukai kalangan Salafi konservatif.

Selain kekuatan politik Islam dari kaum Sunni, di Kuwait juga muncul kekuatan politik dari kalangan Syiah. Dari keseluruhan penduduk Kuwait, 75% bermazhab Sunni (Maliki dan Hanbali), tetapi eksistensi Syiah juga berpengaruh signifikan dalam konstelasi politik. Sekitar 15% penduduk Kuwait adalah penganut Syiah, dan sisanya 10% nonmuslim semuanya adalah ekspatriat (pekerja migran). Warga Syiah di Kuwait terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Syiah Arab (Syiah Kuwaiti), sekitar 20% dari total warga Syiah, sedangkan sebagian besar (80%) adalah Syiah asal Iran.<sup>52</sup> Etnis Syiah Iran telah menetap di Kuwait selama berabad-abad sejak Dinasti Buyud menguasai Kuwait pada abad ke-10 M. Meskipun kebanyakan mereka adalah ekspatriat dengan budaya Syiah, umumnya mereka cenderung setia pada Kuwait sebagaimana kebanyakan ekspatriat lain. Namun, monarki Kuwait tetap menaruh curiga pada kelompok ini sehingga sering menyebabkan terjadinya pergulatan antarkedua kelompok dalam arena politik di Kuwait.

Dari berbagai kekuatan politik Islam yang tumbuh di Kuwait, tampaknya ICM merupakan kelompok yang paling siap dalam menghadapi terpaan krisis dan dominasi kuat monarki. Pasalnya, ICM lebih mengedepankan reformasi damai dalam aksinya ketimbang harus menempuh cara-cara kekerasan. Hal ini berbeda dengan kekuatan politik Islam lainnya seperti Syiah yang sudah terfragmentasi secara politis dengan menjadi kelompok pro-monarki. Mereka

---

<sup>52</sup> Ghabra, "Balancing State", 9–10.

tidak memiliki organisasi politik yang cukup baik di tengah semakin meningkatnya krisis politik Kuwait.

Peran faksi Islam sangat besar dalam kehidupan sosial politik Kuwait, di parlemen maupun di sektor pendidikan dan dakwah.<sup>53</sup> Kurikulum pendidikan Islam, baik di sekolah maupun universitas berada dalam kawalan dan kontrol kelompok ini agar tetap selaras dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, apa yang terjadi di Kuwait sama persis dengan yang sempat terjadi di Saudi sebelum akhirnya Raja Saudi memberangus peran mereka akibat aksi (protes) politik terkait Perang Teluk tahun 1991 yang diikuti protes politik terkait fenomena *Arab Spring*.

Bedanya adalah dalam konteks Kuwait, aktivitas sosial dan dakwah kelompok Islam di Kuwait berperan signifikan sehingga mampu memengaruhi berbagai kalangan. Oleh karena itu, pada setiap pemilu—yang memang diselenggarakan di Kuwait—kelompok Islam meraih suara signifikan. Namun, dominasi monarki dalam politik dan ekonomi menjadikan kelompok ini lebih berfokus dalam reformasi konstitusi, isu korupsi, dan aktivitas sosial kemanusiaan, ketimbang melakukan perlawanan reformasi struktur kepemimpinan di Kuwait.

Pada Pemilu Februari 2012, misalnya, kelompok oposisi Islam memperoleh 34 dari 50 kursi. Adapun kelompok liberal memperoleh 9 kursi, sedangkan kalangan perempuan tidak mendapatkan kursi.<sup>54</sup> Pada 20 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi Kuwait membatalkan hasil Pemilu 2012 dan mengembalikannya pada Parlemen Pemilu 2009. Pembubaran parlemen ini merupakan puncak dari pertarungan politik antara rezim pro monarki vs kelompok oposisi Islam. Namun, keputusan pemerintah membubarkan parlemen mendapatkan penolakan keras dari oposisi yang bersepakat memboikot pemilu baru. Memang, pemboikotan pemilu menyebabkan

---

<sup>53</sup> Ghabra, “Balancing State”, 58–72.

<sup>54</sup> “Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC,” (London: Chatham House, 2010).

hasil Pemilu Desember 2012 dikuasai kelompok pro-monarki. Namun, serangkaian protes ekstraparlemen terus terjadi sehingga peta persaingan, baik di eksekutif maupun legislatif beralih mendukung oposisi. Kemenangan oposisi Islam pada Pemilu 2012 dan tetap eksistensinya mereka dalam mengawal demokrasi dengan dukungan masyarakat ini terjadi karena faktor keislaman, aktivitas sosial yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat (terutama di daerah yang didominasi para suku), serta sepaik terjangnya sebagai garda depan gerakan protes menentang kesewenang-wenangan dan dominasi rezim monarki.

Dalam Pemilu 25 Juli 2013, suara kelompok Syiah turun secara signifikan, hanya 8 dari sebelumnya yang mencapai 17 kursi. Kelompok liberal mengalami peningkatan dari 1 menjadi 9 kursi. Kelompok muslim Sunni pro-pemerintah mendapat 30 kursi dan perempuan memperoleh 2 kursi parlemen. Berikutnya pada Pemilu 26 November 2016 kelompok oposisi memperoleh 24 dari 50 kursi. Separuh dari kursi parlemen oposisi berasal ICM sayap Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Sepertiga kursi parlemen diduduki kalangan pemuda, sedangkan Syiah dan suku mengalami penurunan menjadi 6 kursi dari 9 kursi pada pemilu sebelumnya.<sup>55</sup>

Di Kuwait, Islam memberi pengaruh signifikan dalam membentuk identitas diri komunitas “pesisir” atau suku, yang kebanyakan lebih termotivasi untuk meningkatkan identitas kultural dalam sosial kemasyarakatan dibandingkan terlibat langsung dalam kehidupan politik praktis. Komunitas suku yang kritis tidak ragu untuk mendukung kelompok Islam fundamentalis (seperti Salafi) ataupun reformis (ICM) selama hal itu dapat memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>56</sup> Komunitas suku di pesisir inilah yang kerap dilibatkan pemuda dan aktivis politik untuk melakukan perubahan dan berkontribusi dalam proses demokratisasi, terutama menentang

---

<sup>55</sup> K. Katzman, “Kuwait: Governance, Security, and U.S. Policy,” *Congressional Research Service*, (May 2016).

<sup>56</sup> Yagoub Al-Kandari, *Tribalism, Sectarianism, and Democracy in Kuwaiti Culture*. (Kuwait City: Kuwait University Press, 2014).

kesewenang-wenangan monarki. Kesadaran politik kelompok suku (dan kelompok pemuda) yang tumbuh dari hasil interaksi dengan gerakan Islam ini telah sukses menghasilkan karakter baru yang lebih kritis dan terbuka, bahkan sebagian terlibat untuk menjadi anggota parlemen. Realitas ini telah memperluas dikotomi politik antara konservatif monarki dan pengusaha kelas menengah serta generasi baru aktivis politik, baik dari daerah pedalaman maupun perkotaan) yang berhaluan Islam maupun nasional sekuler. Kelompok ini memprotes kebijakan ekonomi yang tidak sesuai Visi Kuwait 2035 ataupun soal pengelolaan negara koruptif.<sup>57</sup>

Terkait konstelasi agama dalam konteks politik, kasus Uni Emirat Arab (UEA) tampaknya tidak jauh beda dengan Kuwait. Berbeda dengan Arab Saudi yang telah secara kukuh menahbiskan ikatan yang kuat antara *Ad-Din wa Ad-Daulah* dan monopoli paham Wahabi, UEA pun—sebagaimana Kuwait—kurang memperhatikan keterkaitan sekukuh apa yang terjadi di Saudi. Di UEA bahkan terdapat kelompok oposisi Islam terbesar, semisal Jamiyyat Al-Islah (Al-Islah Society) yang bertujuan melakukan perubahan rezim. LSM yang terdaftar di UEA sejak 1974 M ini aktivitas awalnya adalah di bidang olah raga, budaya, amal, dan aktivitas sosial. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendapat lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial, Al-Islah memiliki hubungan baik dengan pegawai pemerintah.<sup>58</sup>

Namun, pada perkembangan waktu, Al-Islah akhirnya mengembangkan agenda reformasi, paralel dengan agenda sosialnya, sebagaimana cukup jamak dilakukan banyak gerakan politik Islam lain di dunia Arab, termasuk ICM di Kuwait, ataupun Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir dan An-Nahdhah di Tunisia meskipun tetap ada perbedaan dalam tujuan dan bentuk gerakannya. Walhasil, terinspirasi oleh nilai-nilai politik Islam moderat, Al-Islah akhirnya

---

<sup>57</sup> Ghabra, “Kuwait at the Crossroads,” 1–3.

<sup>58</sup> Pekka Hakala, “Opposition in the United Arab Emirates,” *Quick Policy Insight*, (15 November 2012). [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf)join/2012/491458/EXPO-AFET\_SP%282012%29491458\_EN.pdf.

memiliki tujuan untuk menyediakan petunjuk moral dan reformasi politik bagi seluruh warga negara UEA.<sup>59</sup>

Secara ideologis, Al-Islah merupakan manifestasi gerakan IM sehingga cikal bakal eksistensinya di wilayah Teluk Arab telah ada sebelum negara Uni Emirat Arab lahir. Pada tahun 1950–1960-an, Mesir era Gamel Abdel Nasser melakukan pembersihan IM di negaranya sehingga para aktivis melarikan diri ke berbagai wilayah, termasuk wilayah yang akhirnya bernama UEA. Mereka adalah individu berpendidikan, profesional, dan kalangan yang mempunyai mobilitas tinggi. Mereka bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk sektor peradilan dan pendidikan.<sup>60</sup> Karakteristik pendominasian sektor pendidikan oleh IM ini persis seperti terjadi di Saudi maupun Kuwait.

Kiprah IM di UEA adalah menangani kegiatan sosial dan budaya. Apabila membaca majalah kelompok IM, Al-Islah, akan terlihat topik yang paling sering dibahas adalah menyangkut perkembangan pendidikan Islam, penyensoran terhadap informasi yang berasal dari Barat, seperti tulisan di majalah atau program televisi, pembatasan penjualan alkohol, masalah korupsi di pemerintahan, dan perambahan bisnis dan budaya asing (terutama Barat) dalam masyarakat UEA.

IM memang ingin mengembangkan sebuah agenda reformasi politik melalui kegiatan dan program sosial. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih setara.<sup>61</sup> Pada awal bulan Maret 1979, Dewan Al-Islah UEA menulis sebuah surat kepada penguasa setempat menjelang pertemuan Al-Majlis al-A'la lil-Ittihad (Dewan Penguasa Tertinggi), yang mendukung usaha pemerintah untuk mengurangi korupsi dan untuk menghabiskan uang minyak dengan cara “saleh”. Pada tahun 1982, majalah *Al-Islah* lebih eksplisit menjelaskan posisi

---

<sup>59</sup> Hakala, “Opposition”.

<sup>60</sup> Al-Qassem, “The Brothers”.

<sup>61</sup> Hakala, “Opposition.”

mereka menentang larangan pemerintah terhadap majalah Islam. Mereka menganggap Islam dapat menyelesaikan berbagai masalah. Katanya, “Dengan Islam, kita membebaskan tanah Islam, kita menghentikan ketidakadilan terhadap Islam. Tiran takut kepada kita karena Islam.”<sup>62</sup>

Pada awal 1990-an, sektor peradilan dan pendidikan UEA telah dikuasai IM, bahkan seakan-akan menjadi “negara dalam negara” (*a state within a state*). Kelompok itu akan memastikan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa pendidikan dan hibah adalah anggota IM—setidaknya berafiliasi atau simpatisan mereka. Dalam waktu singkat, dewan mahasiswa dan asosiasi profesional—seperti serikat ahli hukum dan guru—berubah menjadi pos terdepan bagi kepentingan Ikhwanul Muslimin.<sup>63</sup>

Dapat dipahami jika dalam pemilu parlemen, Al-Islah akhirnya juga mendominasi 20 dari 40 kursi FNC yang diperebutkan. Pada November 2008, masa tugas anggota FNC diperpanjang dari dua tahun menjadi empat tahun, durasi masa kerja ini dianggap lebih sesuai dengan parlemen lainnya di dunia. Pada Pemilu 2011, terdapat 469 kandidat (termasuk 85 wanita) untuk 20 kursi yang diperebutkan dalam pemilu. Pemilu 3 Oktober 2015 diikuti 330 kandidat (termasuk 74 wanita) untuk 20 kursi yang diperebutkan. Dilihat dari latar belakang mereka, para kandidat FNC ternyata dominan dari kalangan hukum dan pendidikan. Oleh sebab itu, meskipun tidak ada data resmi, kemungkinan besar Al-Islah (IM) telah mendominasi—meskipun tidak seluruh 20 kursi—kursi parlemen yang diperebutkan. Namun, representasi tersebut tetap tidak memadai, mengingat 50% diangkat oleh pihak monarki.

Melihat perkembangan demikian, penguasa Emirat mulai membatasi ruang gerak kelompok IM. Pejabat-pejabat yang berafiliasi dengan IM dipecat dan orang-orang sekitarnya dipindahkan

---

<sup>62</sup> Abdullah Abu Al-Hadi, “Why Ban Islamic Magazines?”. *Al-Islah* 30/50 (1982), dalam *The Roots of Conspiracy Against the UAE 2*. (Dubai: Al Mezmaah Studies and Research Center, 2013), 172.

<sup>63</sup> Al-Hadi, “Why Ban Islamic,” 172–173.

ke lembaga lain.<sup>64</sup> Kemudian, pemimpin Al-Islah berpaling kepada penguasa Ras al-Khaimah, Syekh Saqr bin Muhammad al-Qasimi, yang mengizinkan mereka untuk secara legal mendirikan IM di wilayah keemiran tersebut.

Namun, pada perkembangan berikutnya, penguasa UEA merasa ada ancaman terhadap stabilitas nasional dan regional. Apalagi setelah peristiwa Serangan 9/11 tahun 2001, dua orang UEA dituduh terlibat dalam tragedi WTC itu. Setelah tuduhan tersebut, otoritas UEA memutuskan untuk mereformasi sistem pendidikan dan kurikulum sekolah. Para pengkhotbah diwajibkan untuk mematuhi khotbah yang telah disetujui sebelumnya oleh Kementerian Kehakiman dan Urusan Islam. Pengawasan juga dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai berpartisipasi dalam kegiatan Islam untuk mencegah penyebaran ideologi yang dianggap radikal.<sup>65</sup>

Bahkan, ada ratusan orang yang dianggap radikal ditahan *Amn al-Daulat* (Aparat Keamanan Negara). Beberapa kalangan yang dianggap mempunyai kaitan dengan Al-Islah (pengacara, hakim, guru, dan profesor di universitas) dibatasi ruang geraknya. Bahkan, ada yang dilarang berpartisipasi dalam seminar atau acara publik, termasuk ada yang diancam izin profesional mereka akan dicabut. Nasib sama dialami pula oleh ratusan pegawai Kementerian Pendidikan UEA. Sebagian guru dipaksa untuk pindah profesi atau pensiun dini.<sup>66</sup> Dengan demikian, ruang kebebasan semakin menyempit. Intinya, penguasa UEA berusaha membatasi ruang gerak kelompok yang berafiliasi dengan Al-Islah.

Kebijakan ini telah menumbuhkan benih-benih perlawanan terhadap rezim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gerakan oposisi di UEA sebenarnya sudah ada sebelum muncul *Arab Spring* (2011). Pada 2009 misalnya, sejumlah aktivis, termasuk mahasiswa

---

<sup>64</sup> Marta Saldana, "Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates: The Case of UAEU Students," *Ph.D. Dissertation*. (Exeter: University of Exeter, 2014), 139.

<sup>65</sup> Saldana, "Rentierism and Political Culture", 139–140.

<sup>66</sup> Saldana, "Rentierism and Political Culture", 139–140.

dan narablog, meluncurkan sebuah situs [www.uaehewar.net](http://www.uaehewar.net) untuk berdiskusi.<sup>67</sup> Situs tersebut menarik perhatian warga UEA sehingga ribuan pengguna internet yang berbasis di UEA segera memenuhi situs. Situs dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai tempat terbaik untuk mengemukakan keluhan, menantang pihak berwenang, dan mendiskusikan masa depan negara UEA.<sup>68</sup> Dalam beberapa pekan, perdebatan seru terjadi pada sejumlah isu, termasuk kekayaan pribadi keluarga yang berkuasa dan keberlanjutan proyek investasi luar negeri UEA.

Pada Januari 2010, terjadi debat publik paling kontroversial dalam situs. Ribuan pengguna internet di Emirat mengomentari pembebasan hukuman anggota keluarga penguasa Abu Dhabi dari tuduhan penyiksaan dan sodomi. Warga UEA mengkhawatirkan penerapan hukum yang tidak adil tersebut akan berdampak reputasi internasional UEA. Penguasa Emirat merasa tersudutkan dan hasilnya situs itu tidak dapat diakses.<sup>69</sup> Hanya saja, situs itu masih bisa diakses dari luar negeri (dan bertahan sampai tahun 2011) sehingga dengan menggunakan *mirror web* itu, warga UEA di dalam negeri dapat mengakses. Walhasil, ketika muncul *Arab Spring*, mereka masih dapat berdiskusi dan membahas revolusi di Tunisia dan Mesir.

Meski memilih cara moderat, Pemerintah UAE menuduh Al-Islah sebagai ancaman keamanan nasional, bahkan aktivitasnya dianggap subversif. Pada tahun 1994 sebagian besar anggota yang memegang jabatan penting, baik di media, akademik, maupun di bidang industri langsung diberhentikan. Bahkan, Ketua Al-Islah, Syekh Sultan bin Kayed Al-Qasimi termasuk dalam daftar tahanan pemerintah. Sejak itu, peran Al-Islah dalam kancah politik UEA mengalami kemunduran yang pada akhirnya mendorong kondisi instabilitas politik akibat langkah represif pemerintah.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Situs itu sudah tidak dapat diakses lagi.

<sup>68</sup> Christopher Davidson, "Fear and Loathing in the Emirates," <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.

<sup>69</sup> Davidson, "Fear and Loathing".

<sup>70</sup> Davidson, "Fear and Loathing".

## E. Agama, Politik Domestik, dan Dinamika Regional

Diplomasi dalam konstelasi politik luar negeri pada hakikatnya adalah muslihat yang bijaksana melalui perundingan untuk mencapai cita-cita bangsa. Efektivitas diplomasi dan atau politik luar negeri tidak terlepas dari pergolakan di dalam negeri sebab politik luar negeri pada dasarnya merupakan refleksi dari kebijakan politik domestik.<sup>71</sup> Sebaliknya, berbagai kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah acap kali memengaruhi konstelasi politik domestik juga.

Realitas politik luar negeri Saudi tampaknya tidak bergeser dari logika itu. Artinya, kebijakan luar negeri Saudi pada kenyataannya memang memengaruhi persoalan domestik, tetapi pada saat yang sama politik domestik ternyata juga memengaruhi kebijakan luar negerinya. Persoalan sensitif, seperti isu Syiah, telah menjadi bukti kontemporer yang sangat kuat. Sejak Organization of Islamic Revolution (OIR) ditaklukkan, baik melalui cara-cara kekerasan dengan menangkap banyak anggota OIR maupun lewat cara “akomodatif” dengan merangkul pimpinan OIR, persoalan Syiah di Saudi sempat mengendap, bahkan seolah-olah telah tuntas terselesaikan. Namun, persoalan itu kembali mengemuka seiring dengan dinamika regional. Ketika terjadi kudeta pemberontak Syiah Houthi di Yaman atas pemerintahan Ali Abdullah Saleh, misalnya, fakta ini telah menimbulkan kekhawatiran Pemerintah Saudi tentang ancaman Syiah, mengingat Yaman berbatasan langsung dengan wilayah Saudi yang berpenduduk Syiah. Di sepanjang perbatasan Saudi–Yaman, memang terdapat Syiah Zaidiyah sebagai sekte utama Syiah Yaman. Relasi interpersonal kesukuan, kultural dan kedekatan geografis menyebabkan Syiah di wilayah ini dinamis meskipun secara entitas politik mereka terpisahkan antara dua negara, Saudi dan Yaman. Oleh karena itu, ketakutan terhadap radikalisme Syiah

---

<sup>71</sup> Dhurorudin Mashad, “Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi,” dalam *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, ed. Ganewati Wuryandari (Yogyakarta: P2P-LIPI – Pustaka Pelajar, Agustus, 2008), 174.

ini, Pemerintah Saudi lantas mengirimkan bantuan militer untuk merontokkan kekuatan Syiah Houti yang dicurigai mendapat dukungan persenjataan dari Iran.

Namun, seiring penyerangan Saudi kepada Syiah Houti di selatan Yaman, hubungan panas antara Syiah dan pemerintah-ulama Wahabi di Saudi kembali terjadi, akibat stigma Pemerintahan Wahabi Saudi yang anti-Syiah kian menguat. Ulama Syiah Syekh Al-Nimr asal Syarqiyyah mengusulkan pemilu terbuka, bahkan mengancam Provinsi Syarqiyyah akan memisahkan diri jika hak-hak kaum Syiah tidak dipenuhi. Nimr akhirnya ditangkap sehingga muncul berbagai demonstrasi antara 2011–2016. Hukuman mati terhadap Nimr, 4 ulama Syiah, dan 43 orang pengikutnya pada tahun 2016 tidak bisa meredam protes, bahkan memancing kekerasan seperti mege bom kantor intelijen Saudi di Qatif,<sup>72</sup> dan pembunuhan polisi Saudi di Awwamiyah sebelah timur Qatif. Saudi lantas melabeli mereka teroris dan membombardir wilayah itu (Mei 2017) dengan korban 23 meninggal dan 20.000 mengungsi ke wilayah lebih aman.<sup>73</sup>

Pilinan faktor domestik dan regional ini juga berlaku dalam isu IM Saudi. Rekam jejak ulama *Sahwa* berbasis IM di Saudi ternyata senantiasanya menimbulkan kewaspadaan atau bahkan kecurigaan rezim Saudi. Apalagi, ketika berembus isu *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah, ulama *Sahwa* mengajukan petisi (ditandatangani 10 ulama *Sahwa*, termasuk Salman Al-Awdah) yang secara substantif menuntut reformasi pemerintahan. Meskipun *Sahwa* menentang rencana demonstrasi besar 11 Maret 2011 di Riyadh, kebangkitan *Sahwa* menghangatkan kembali ingatan rezim yang menganggap *Sahwa* sebagai ancaman.

---

<sup>72</sup> “Inside the Saudi town that’s been under siege for three months by its own government,” *Independent*, (Agustus 2017), <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>.

<sup>73</sup> “Saudi security forces flatten old quarter of Awamiya”, *Al Jazeera*, 10 Agustus 2017, <http://www.aljazeera.com/news/2017/08/saudi-security-forces-flatten-quarter-awamiya-170809213631682.html>.

Berpijak pada realitas tersebut, tidak mengherankan jika Saudi sangat menentang kekuasaan Muhammad Mursi yang berbasis IM di Mesir, bahkan memberikan dukungan, baik secara politis maupun materiel, terhadap kudeta yang dilakukan Jenderal As-Sisi yang mengakibatkan pertumpahan darah yang besar di Tahir Square. Dukungan Saudi terhadap As-Sisi ini memang menuai kritikan dari dalam negeri, terutama dari ulama *Sahwa*. Pada 8 Agustus 2013, 56 ulama yang beberapa di antaranya berlatar IM menentang kebijakan Saudi sehingga menjadikan suhu politik dalam negeri Saudi memanas. Berbagai narasi disampaikan, di antaranya, larangan untuk turut mendukung penghancuran sesama pemeritahan muslim dan larangan untuk menentang pemerintahan muslim yang dipilih oleh rakyatnya.<sup>74</sup>

Dari realitas ini, tampak bahwa keputusan Saudi yang berseberangan dengan kehendak sebagian besar ulama dan rakyatnya untuk mendukung kudeta As-Sisi sekaligus pelemahan kekuatan IM Mesir akhirnya menimbulkan beberapa konsekuensi. *Pertama*, Saudi harus menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung pemerintahan As-Sisi. *Kedua*, Saudi harus lebih aktif melemahkan kekuatan *Sahwa* di dalam negeri. Akhirnya, untuk kali pertama Pemerintahan Saudi melakukan pelarangan terhadap buku-buku IM dan menggagalkan berbagai ceramah oleh ulama-ulama *Sahwa*. Kewaspadaan terhadap IM makin kuat pada era Raja Salman. Pada 4 Februari 2017, Salman mengeluarkan dekrit yang menyatakan: *pertama*, IM yang berbasis di Mesir sebagai organisasi teroris. *Kedua*, pelarangan terhadap segala bentuk ekspresi dukungan terhadap IM. *Ketiga*, kebijakan ini juga berlaku kepada semua organisasi yang berafiliasi dengan IM, tidak hanya *Sahwa*, tetapi juga Sururi.<sup>75</sup>

Dekrit ini akhirnya mengandung konsekuensi terhadap politik luar negeri Saudi, yakni cenderung bertentangan dengan negara-negara yang dianggap dekat dengan IM, seperti Turki dan Qatar.

---

<sup>74</sup> "Saudi Security Force".

<sup>75</sup> "Saudi Security Force".

Apalagi, propaganda Qatar yang mendukung fenomena gerakan *Arab Spring* di berbagai negara Arab dan pemberitaan Al Jazeera yang sering menyudutkan Pemerintahan Saudi menyebabkan Saudi menerapkan kebijakan keras terhadap Qatar. Hanya berselang satu bulan dari dekrit itu, Saudi menarik duta besarnya dari Qatar dan berlanjut pada blokade ekonomi Saudi terhadap negara tersebut.

Labelisasi teroris terhadap IM oleh Saudi secara permukaan bersifat sangat politis, terutama akibat berbagai sikap kritis organisasi tersebut terhadap kebijakan negara. Namun, Saudi memang menghadapi ancaman kekerasan nyata dari gerakan-gerakan yang oleh terminologi global dilabeli teroris, seperti Al-Qaeda dan ISIS. Namun, jika dicermati, ancaman Al-Qaeda juga terjadi akibat kebijakan yang keliru oleh simbiosis Bani Saud-Wahabi. Sebenarnya, akar persoalannya sama dengan yang diprotes IM faksi *Sahwa*, yakni menolak keras kebijakan Saudi untuk meminta bantuan AS dalam perang Irak-Kuwait tahun 1991. Penolakan Al-Qaeda Arabian Peninsula (QAP)<sup>76</sup> dapat dipetakan dalam tiga hal. *Pertama*, kehadiran pasukan nonmuslim AS dianggap menodai tanah Saudi yang terdapat dua kota suci, Makkah dan Madinah. *Kedua*, Saudi tidak layak menyediakan tanah bagi pasukan nonmuslim yang akan menghancurkan kepemimpinan negara muslim berdaulat (baca: Saddam Hussein di Irak) seberapa pun kesalahannya. *Ketiga*, rencana penyediaan tempat AS membangun basis militer di Saudi menyakiti hati umat Islam, apalagi dianggap sebagai bagian dari rencana Amerika untuk menguasai Jazirah Arab.<sup>77</sup> Bukan hanya kepada kekuasaan Bani Saud, Osama juga melayangkan kritik kepada mufti Wahabi, Bin Baz, yang mengeluarkan fatwa pembolehan semua rencana tadi. Osama dkk. juga melontarkan kritik pedas fatwa Bin Baz yang men-

---

<sup>76</sup> Al-Qaeda dibangun oleh Abdullah Al-Azzam dan Osama bin Laden yang berlatar belakang IM dalam rangka membantu perang melawan tentara pendudukan Soviet. Seiring berakhirnya Perang Afghanistan—dimulai sejak 1988—maka organisasi yang bernama Makhtab Al-Khadimat yang memiliki milisi dari berbagai bangsa pulang ke negara masing-masing.

<sup>77</sup> Thomas Hegghammer, *Jihad in Saudi Arabia*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 103–105.

dukung perundingan damai Arab-Israel, yang dilihat tidak lebih dari pelayan fatwa terhadap sang majikan, keluarga Saud.<sup>78</sup>

Osama sebenarnya menawarkan “pasukan” mantan kombatan Al-Qaeda di Afghanistan sebagai penjaga negara dari ancaman ambisi Saddam Hussain kala itu. Berdasarkan pengakuan Khaled Shaikh Muhammad, pemimpin senior Al-Qaeda dari seluruh pelatihan militer Al-Qaeda terhadap ras Arab di Afghanistan, bahwa hampir 70% di antaranya adalah warga Saudi. Namun Saudi justru menjawab dengan melakukan penangkapan besar-besaran sekitar 800–900 orang di sekitar Makkah terkait jaringan Al-Qaeda yang diduga akan melakukan penyerangan terhadap Saudi.<sup>79</sup> Sejak itulah terjadi perseteruan akut Al-Qaeda in The Arabian Peninsula (AQP) vs rezim Saudi.

Fenomena jumlah warga negara Saudi mendukung Al-Qaeda tadi akhirnya menjadi tidak terlalu mengejutkan ketika tercatat bahwa lebih dari 2.000 pasukan ISIS merupakan warga negara Saudi juga. Sebab, seiring dengan meredupnya pengaruh AQP, sangat mungkin orang yang sama mengalihkan dukungan kepada kemunculan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2014, mengingat pemimpin ISIS adalah mantan pemimpin Al-Qaeda asal Irak, Abu Bakar Al-Baghdadi. Upaya ISIS menarget Pemerintah Saudi tidak lepas dari peran militer Saudi dalam pelemahan sel-sel ISIS serta penyerangan udara terhadap ISIS, baik dalam wilayah domestik maupun di Irak dan Suriah.<sup>80</sup>

Melihat serangan-serangan ISIS di Saudi, sebenarnya target yang disasar bukanlah tempat, melainkan aparat keamanan sebagai simbol representasi pemerintah ditambah dengan kelompok Syiah di Saudi. Pada tahun 2015, ISIS mengebom masjid di daerah Asir

---

<sup>78</sup> Commins, *The Wahabi Mission*, 187–188.

<sup>79</sup> Hegghammer, *Jihad in Saudi Arabia*, 114–115.

<sup>80</sup> “Saudi Arabia took part in weekend air strikes against Islamic State: Pentagon,” *Reuters*, (Februari 2016), <http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-saudi-arabia-airstrikes/saudi-arabia-took-part-in-weekend-air-strikes-against-islamic-state-pentagon-idUSKCN0VP2FM>.

dan berlanjut di daerah warga Syiah, Qatif dan Dammam, yang menewaskan 25 orang dan 106 di antaranya luka-luka. Penyerangan juga merambah wilayah tengah Saudi, di titik pemeriksaan polisi di Riyadh. ISIS juga mendeklarasikan diri sebagai pelaku pembunuhan terhadap 12 anggota SWAT di dalam masjid. Bom bunuh diri dan penembakan terhadap polisi juga terjadi di sepanjang tahun 2015. Saudi menangkap beberapa pelaku dengan bendera ISIS<sup>81</sup> bahkan mengklaim menangkap beberapa sel ISIS, tetapi rantai jaringan ini belum bisa diputus.<sup>82</sup>

Berbagai langkah politik bahkan militer Pemerintah Saudi terhadap kekuatan politik Islam, termasuk yang superradikal semacam Al-Qaeda ataupun ISIS, implikasinya ternyata sangat luas, bahkan sampai harus merangkul dan/atau bermusuhan dengan negara-negara sekawasan (atau bahkan global). Padahal, kebijakan-kebijakan semacam itu memiliki pengaruh luar biasa terhadap kondisi ekonomi Saudi yang sedang berada pada tubir “kebangkrutan”.

Tahun 2016 Saudi Arabia tidak lagi menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Meskipun memproduksi 12,3 juta barel per hari (meningkat sekitar 3% dari tahun 2015), Saudi hanya pemasok 13,4% kebutuhan minyak dunia dan menguasai 38,8% produksi minyak Timur Tengah. Konsumsi minyak dalam negeri hanya sekitar 28,6% dari produksi sehingga PDB per kapita Saudi mencapai 20.029 dolar (2016). Namun, jumlah ini sebenarnya menurun drastis dihitung sejak tahun 2012. Harga minyak dunia pernah mencapai 106,18 dolar per barel (2011), naik dari harga 78,6 dolar per barel pada tahun 2010. PDB per kapita Saudi pernah mencapai puncaknya pada level 25.303 dolar (2012)<sup>83</sup>, tetapi akhirnya terjun

---

<sup>81</sup> “ISIL claims deadly attack on Saudi forces at mosque,” *Al Jazeera*, (Agustus 2015), <http://www.aljazeera.com/news/2015/08/suicide-attack-mosque-saudi-arabia-southwest-150806110739697.html>.

<sup>82</sup> “ISIS Threatens Saudi Arabia with Major Attacks, Says ‘We Will Strike You In Your Homes,’” *Newsweek*, (September 2017), <http://www.newsweek.com/isis-threatens-saudi-arabia-attacks-says-its-turn-will-come-after-tehran-623715>.

<sup>83</sup> Bank Dunia. “Saudi Arabia”, diakses pada 15 Juli 2017, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SA>.

bebas pada angka 41,19 dolar per barel (2016).<sup>84</sup> Perekonomian Saudi diperburuk dengan pengangguran yang mencapai 12,7%. Lesunya perekonomian Saudi belakangan ini berdampak juga pada pembelanjaan pemerintah yang menurun dan tekanan terhadap pekerja imigran dan ekspatriat yang semakin ketat.<sup>85</sup>

Terpuruknya ekonomi Saudi akibat harga minyak memang berusaha diatasi dengan membuat Visi 2030 dengan cara meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lapangan pekerjaan hingga 30%, menggenjot pertumbuhan UKM pada PDB hingga level 35%, dan menumbuhkan sektor ekonomi nonmigas, seperti pariwisata dan jasa. Saudi ingin mengejar ketertinggalan ekonominya dari Uni Emirat Arab dan Qatar yang telah lebih dahulu mengembangkan ekonomi sektor nonmigas, terutama jasa dan pariwisata. Ketergantungan APBN pada sektor migas memang telah membuat ekonomi Saudi lunglai ketika harga minyak turun. Sementara itu, keberhasilan UEA disusul Qatar membuat pengaruh Saudi secara ekonomi politik kawasan mulai terkikis. Pertumbuhan kedua negara tersebut sebenarnya menjadi ancaman bagi Saudi. Misalnya, banyaknya jamaah umrah dan haji menggunakan rute Dubai atau Doha sehingga membuat ikon Jeddah ataupun Riyadh sebagai *hub* tidak begitu menonjol di kawasan. Walhasil, dengan postur politik yang tampil konfrontatif, baik dalam kemelut Mesir, Yaman, maupun Qatar, hal tersebut kian menguras modalitas keuangan Saudi sendiri. Langkah politik Saudi dengan menandatangani pinjaman dengan IMF dan gebrakan politik dengan menangkapi para pangerah-pengusaha besar Arab Saudi terkait isu korupsi sebenarnya merupakan cerminan dari kebutuhan keuangan Saudi yang sangat mendesak.

Adapun profil gerakan Islam di Kuwait terkait dengan fenomena regional tampaknya tidak terlalu menonjol. Realitas ini tampaknya

---

<sup>84</sup> Centre for Energy Economics Research and Policy, *BP Statistical Review*.

<sup>85</sup> Dominic Dudley, "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" *Forbes*, (Juli 2016), <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.

terkait erat dengan dinamika sejarah politik Kuwait yang pernah diserang oleh Irak dalam Perang Teluk tahun 1990. Implikasi dari perang tersebut bahkan dirasakan sampai konteks kekinian. Pada tataran politik dalam negeri Kuwait, misalnya, telah melahirkan konsep *Biduni*, yakni warga Kuwait (turun-temurun telah menetap di Kuwait), tetapi mereka tidak diakui sebagai warga negara Kuwait. Mereka adalah Arab non-Kuwait, sebagai etnis terbesar kedua di Kuwait, yang terdiri dari beragam etnis wilayah Arab dan Afrika Utara yang datang setelah kemerdekaan Kuwait 1961. Namun, semasa Perang Teluk 1991, mereka dianggap memberi dukungan terhadap Irak dan memfasilitasi pengungsi Irak, sejak itulah mereka tidak diakui sebagai warga negara alias Bidun<sup>86</sup>. Perlakuan Kuwait atas kaum *Biduni* ini tentu saja menjadi sedikit ganjalan dalam hubungan negara ini dengan berbagai negara lain, yaitu asal mula kaum *Biduni* tadi.

Perang Teluk 1991 juga mewariskan “ketidakpedulian” gerakan politik Islam Kuwait terkait konteks regional. Kemunculan ICM di Kuwait, misalnya, memang dilatarbelakangi kekecewaan sebagian anggotanya terhadap IM Internasional yang seolah-olah diam dan membiarkan Irak melakukan invasi ke Kuwait pada Agustus 1990 sehingga gerakan ini memutuskan hubungan dengan IM internasional. Walhasil, ketika terjadi *Arab Spring* misalnya, ketika banyak negara mengalami pergolakan demokratisasi—yang hampir semuanya juga digerakkan oleh IM—untuk mengganti rezim-rezim otoriter, semisal Tunisia, Libya, Mesir, tampaknya tidak memicu solidaritas IM Kuwait untuk menggelorakan hal serupa dalam kerangka jaringan IM. Gerakan Islam di Kuwait tampaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga eksistensi negara meskipun mereka tetap harus kritis terhadap berbagai kebijakan rezim.

Namun, sebagai anggota GCC, Liga Arab, dan OKI, gerakan Islam di Kuwait senantiasa mendorong monarki untuk memberi

---

<sup>86</sup> *Biduni* tidak mendapatkan hak sosial maupun politik sebagaimana warga Kuwait lainnya, seperti asuransi kesehatan, pendidikan, akta kelahiran, kartu identitas, serta berpartisipasi dalam pemilu.

perhatian serius terhadap persoalan di dunia Islam. Kuwait menjadi salah satu negara yang memprakarsai proposal damai Palestina-Israel, serta rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Oleh karena itu, posisinya tersebut, wajar kiranya sebagian kalangan memandang, bahwa apa yang dilakukan Kuwait adalah menjadi penyeimbang kekuatan di tengah krisis diplomatik antara Qatar dan GCC yang dimotori Arab Saudi.

Kuwait tampaknya cenderung mengambil sikap jalan tengah, tidak seekstrem Saudi belakangan ini. Di antara negara Timur Tengah lainnya, Kuwait adalah rumah yang aman bagi perkembangan gerakan Islam moderat ataupun fundamentalis, seperti Ikhwanul Muslimin (IM) dan Salafi. Bahkan, di negaranya sendiri IM dan Salafi dapat tumbuh subur sehingga dalam kasus Hamas pun Kuwait tidak berkehendak ikut melabelinya sebagai gerakan “teroris” sebagaimana sikap beberapa negara Arab lain.

Hanya saja, sebagai negara yang tergabung dalam aliansi anti-terorisme yang digagas Saudi, Kuwait juga menjadikan persoalan terorisme di kawasan sebagai salah satu isu penting yang kerap didengungkan pada sejumlah kesempatan. Apalagi, sejumlah negara sempat menuduh bahwa beberapa menteri dan kerabat dekat monarki Kuwait mulai membantu dan mendanai kelompok yang terlibat aksi teror di Suriah dan Irak. Bahkan, pada Agustus 2016, AS menjatuhkan sanksi pembekuan aset terhadap pejabat Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait.

Ada beberapa alasan yang mendorong Kuwait untuk menunjukkan *high profile* dan banyak terlibat aktif dalam kebijakan politik luar negerinya. Antara lain, kemampuan militer dan meningkatnya ekonomi Kuwait dalam beberapa tahun terakhir melalui pendapatan dan ekspor minyak yang telah memicu Kuwait untuk banyak terlibat aktif sebagai penyeimbang kekuatan di tengah pudarnya pengaruh Qatar dan Arab Saudi di kawasan. Memang, harga minyak turun drastis sejak 2011 sehingga berpengaruh sangat besar pada negara. Namun, sebagaimana Qatar dan UEA, Kuwait juga tidak terlalu

mengandalkan sektor minyak karena negara telah mengembangkan berbagai sektor lain selain minyak.

Sebagaimana Kuwait, sektor minyak memang besar pengaruhnya terhadap ekonomi UEA. Ekspor minyak mencapai 30% dari PDB UEA. Karena harga minyak terus turun, UEA memangkas produksi minyak menjadi 139 ribu barel per hari.<sup>87</sup> Dalam sepuluh tahun terakhir, harga minyak dunia cenderung turun. Pada pertengahan 2008, harga minyak mencapai 140 dolar AS per barel, dan pada pertengahan 2017 harganya berkisar 50 dolar AS per barel, bahkan sempat di bawah 40 dolar AS per barel pada tahun 2016.<sup>88</sup>

Untuk mengatasi ketergantungan pada minyak, UEA meluncurkan program diversifikasi dan liberalisasi ekonomi, guna mengubah ekonominya dari ekonomi konvensional padat tenaga kerja menjadi ekonomi berdasarkan pengetahuan, teknologi, dan tenaga kerja terampil. Melalui Visi 2021 Pemerintah dan swasta UEA berinvestasi di berbagai sektor, seperti produksi aluminium, pariwisata, penerbangan, perdagangan, dan telekomunikasi. Mereka berharap akan mencapai ekonomi yang produktif dan kompetitif pada saat ulang tahun emas berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 2021. Secara umum, visi tersebut ingin menjadikan UEA sebagai salah satu negara terbaik di dunia pada peringatan 50 tahun Emirat.<sup>89</sup>

Secara ekonomi, UEA memang melakukan berbagai terobosan perubahan dengan Visi 2021. Namun, secara politik, UEA nyaris tidak melakukan perubahan sampai muncul demonstrasi seiring dengan fenomena *Arab Spring*. Fenomena ini memancing Arab Saudi ikut campur mengirimkan tentara. Ini dikarenakan secara keagamaan UEA yang rezimnya berkarakter Sunni memang memiliki warga Syiah yang cukup banyak.

---

<sup>87</sup> "Uni Emirat Arab Pangkas Produksi Minyak 139 Ribu Barel," diakses pada 24 Oktober 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002092931-85-245486/uni-emirat-arab-pangkas-produksi-minyak-139-ribu-barel/>.

<sup>88</sup> "Markets Crude Oil," diakses pada 25 Oktober 2017, <http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=10y>.

<sup>89</sup> Vision 2021. Diakses pada 24 Oktober 2017, <http://www.vision2021.ae>.

Fenomena regional di Timur Tengah, seperti penggulingan penguasa di Tunisia dan Mesir, memang telah memberikan inspirasi bagi masyarakat UEA untuk menilai pemimpin mereka. Parlemen UEA yang dianggap kurang dapat mewakili kepentingan rakyat dikritik. Kekurangan penguasa UEA juga dibahas dalam diskusi. Pada Maret 2011, pendiri situs [www.uaehewar.net](http://www.uaehewar.net) bersama dengan sejumlah aktivis lainnya menyebarkan petisi yang ditujukan ke penguasa Abu Dhabi. Salah satu tuntutan dalam petisi yang ditandatangani 130 intelektual itu adalah agar seluruh anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Petisi juga meminta agar UEA menjadi negara monarki konstitusional yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar lainnya. Terdapat empat ormas UEA yang ikut menandatangani petisi yang terdiri dari asosiasi para ahli hukum, guru, profesional, dan dosen universitas. Jika diamati latar belakangnya, mereka berlatar Al-Islah karena IM selama bertahun-tahun memang mendominasi dua sektor itu. Keikutsertaan empat ormas itu menambah bobot nilai dan tuntutan petisi. Para pemrakarsa dan penanda tangan petisi memublikasikan pernyataan bersama itu dengan mengatakan, “Masyarakat sipil UEA memandang bahwa telah tiba waktunya untuk memastikan hak partisipasi politik setiap warga melalui pemilihan dewan langsung dengan pengawasan penuh Pemerintah Federal dan wewenang legislatif.” Petisi juga menuliskan, “Kurangnya keterlibatan warga negara untuk memilih perwakilan mereka selama puluhan tahun setelah pembentukan negara.”<sup>90</sup>

Penguasa Emirat menanggapi petisi itu dengan menangkap lima tokoh penanda tangan petisi. Kelima aktivis tersebut adalah Ahmed Mansoor, seorang insinyur dan narablog; Nasser bin Ghaith, seorang ekonom dan dosen universitas di Sorbonne Abu Dhabi; dan aktivis daring Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul-Khaleq, dan Hassan Ali al-Khamis. Mereka—yang akhirnya disebut sebagai “UEA 5” ini—pada awal April 2011 ditahan, lalu mulai disidang secara terbuka pada 14 Juni 2011 dengan dikenai Pasal 176 Undang-Undang

---

<sup>90</sup> [www.vision2021.ae](http://www.vision2021.ae)

Pidana. Mereka dituduh menghina pejabat publik dengan menggunakan situs daring terlarang ([www.ueahewar.net](http://www.ueahewar.net)).<sup>91</sup>

Demonstrasi memang sempat mewarnai, bahkan dianggap telah mengancam eksistensi monarki UEA. Realitas ini bahkan menjadi perhatian serius negara tetangga, Arab Saudi sehingga sampai mengirimkan tentaranya untuk membantu aparat UEA dalam meredam gejolak negara tersebut. Dapat dipahami jika ketika Arab Saudi menggulingkan kebijakan-kebijakan regional, termasuk upaya untuk mengucilkan Qatar yang disebut telah memfasilitasi kaum radikal, UEA langsung berdiri di belakang Saudi. Artinya, Pemerintah Uni Emirat Arab ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menuding negara tetangga Teluk Arab-nya itu mendukung ekstremisme dan membahayakan stabilitas nasional.<sup>92</sup>

## Daftar Pustaka

- AlFozaie, Naser. "Tribalism in Kuwait: Impacts on the Parliament". Master Thesis 2016, Department of International Environment and Development Studies, diakses pada Agustus 2017. [file:///E:/Bahan%20Tulisan%20Kuwait/Nasser-2016\\_Tribalisme%20in%20Kuwait.pdf](file:///E:/Bahan%20Tulisan%20Kuwait/Nasser-2016_Tribalisme%20in%20Kuwait.pdf).
- Al-Hadi, Abdullah Abu. "Why Ban Islamic Magazines?". *Al-Islah* 30/50 (1982), dikutip dalam Salem Humaid, *The Roots of Conspiracy Against the UAE 2*. Dubai: Al Mezmaah Studies and Research Center, 2013, 172–173.
- Al-Qassemi, Sultan. "The Brothers and the Gulf". *Foreign Policy*, 14 December 2012. Diakses pada 18 Oktober 2017. <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.
- Al-Noqaidan, Mansur. "Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Imarat: Al-Tamaddad wal-Inhisar". Dalam *Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Khalij*, diedit oleh Al-Mesbar Studies and Research Centre. Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre, 2012.
- Al-Kandari, Yagoub. *Tribalism, Sectarianisme, and Democracy in Kuwaiti Culture*. Kuwait City: Kuwait Universty Press, 2014.

---

<sup>91</sup> "UAE: Investigate Threats against 'UAE 5'," (25 November 2011), <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>.

<sup>92</sup> AFP, Senin (5/6/2017).

- Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008.
- Awadh, S. "Islamic Political Groups in Kuwait: Roots and Influences". *Unpublished Doctoral Thesis*. Portsmouth: University of Portsmouth, 1999.
- Bank Dunia. "Saudi Arabia", diakses pada 15 Juli 2017. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SA>.
- Batrawi, Aya. "Women win 17 seats in Saudi Arabia's first elections with female candidates". Independent, 13 Desember 2015, diakses pada Agustus 2017, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/a-woman-has-been-elected-in-saudia-arabias-elections-a6771161.html>.
- BP Statistical World Energy Juni 2017. *BP Statistical Review of World Energy*. <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf>.
- Brown, Nathan J. "Pushing Toward Party Politics? Kuwait's Islamic Constitutional Movement". *Carnegie Endowment for International Peace*, No.79, January 2007, 3-20, diakses pada 15 Mei 2017. <http://carnegieendowment.org/2007/02/13/pushing-toward-party-politics-kuwait-s-islamic-constitutional-movement-pub-19016>.
- Bubalo, Antony. *Middle East, Islamism dan Indonesia*. New South Wales: Low Institute for International Politics, 2005.
- Commins, David. *Islam in Saudi Arabia*. London and New York: I. B. Tauris, 2015.
- Commins, David. *The Wahabi Mission and Saudi Arabia*. London and New York: I.B. Tauris, 2006.
- Davidson, Christopher, "Fear and Loathing in the Emirates." (18 September 2012). Diakses pada 23 Oktober 2017. <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.
- Dazi Heni, Fatiha. "The Arab Spring Impact on Kuwait 'Exceptionalism'". *International Journal of Archeology and Social Sciences in the Arab Peninsula*. Chatillon: Arabian Humanities, 2015.
- Denoeux, Guilain. "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam". *Middle East Policy*, IX, No. 2 (2002).
- Diwan, Kristin Smith. "New Generation Royals and Succession Dynamics in the Gulf State". *Issue Paper*, No. 2. The Arab Gulf States Institute, Washington: The Arab Gulf Institute, 2017.

- Dudley, Dominic, "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" *Forbes*, 12 Juli 2016, diakses pada Juli 2017. <https://www.forbes.com/sites/dominic-dudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.
- Etheridge, Jamie, "Hallmarks of Kuwait's Middle Class", *Kuwait Times*, 13 Juni 2014, diakses pada 27 Agustus 2017. <http://news.kuwaittimes.net/hallmarks-kuwait-middle-class/>.
- Freer, Courtney. "The Rise of Pragmatic Islamism in Kuwait's Post *Arab Spring* Opposition". *Project on U.S. Relations with the Islamic World at Brookings*. Washington: Brookings Institution, 2015, 1–2.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Ghabra, Shafeeq. "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait". *Middle East Policy*, 55 No. 2 (Mei 1997): 58–59.
- Ghabra, Shafeeq. "Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation". *Middle East Institute Policy paper Series*. Washington: Middle East Institute, 2014, 1–3.
- Government and Society of Saudi Arabia". *Encyclopedia Britannica*, 3 Agustus 2017, diakses pada Agustus 2017. <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society>.
- Hakala, Pekka. "Opposition in the United Arab Emirates". *Quick Policy Insight*, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament, 15 November 2012. Diakses pada 31 Januari 2017. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/join/2012/491458/EXPO-AFET\\_SP%282012%29491458\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf).
- Hiramatsu, A. "The Changing Nature of the Parliamentary System in Kuwait: Islamists, Tribes, and Women in Recent Elections". *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 4, No. 1&2 (2011): 62–73.
- Hegghammer, Thomas. *Jihad in Saudi Arabia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- "Inside the Saudi town that's been under siege for three months by its own government". *Independent*, 4 Agustus 2017, <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>.

- Ismail, Raihan. *Saudi Clerics and Shi'a Islam*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Imarah, Muhammad. *Al-Ushuliyah Baina Al-Gharb wa Al-Islam*. Kairo: Daar Asy-Syaruq, 1998.
- "ISIS claims deadly attack on Saudi forces at mosque", Al Jazeera, 7 Agustus 2015. <http://www.aljazeera.com/news/2015/08/suicide-attack-mosque-saudi-arabia-southwest-150806110739697.html>.
- "ISIS Threatens Saudi Arabia with Major Attacks, Says 'We Will Strike You In Your Homes'", Newsweek, 6 September 2017. <http://www.newsweek.com/isis-threatens-saudi-arabia-attacks-says-its-turn-will-come-after-tehran-623715>.
- Katzman, K. "Kuwait: Governance, Security, and U.S. Policy", *Congressional Research Service*, May, 4, 2016.
- "Kuwait Population 2017". Januari 2017, diakses pada September 2017. <http://countrymeters.info/en/Kuwait>.
- "Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC". London: Chatham House, 2010.
- Lacroix, Stephane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, penerj. George Holoch. Cambridge: Harvard University Press, 2011, 39.
- Lacroix, Stéphane. "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood predicament", *The Washington Post*, 20 Maret 2014. [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm\\_term=.f3b04fe78fc2](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fc2).
- "Markets Crude Oil." Nasdaq Crude Oil WTI (NYMEX) Price. Diakses pada 25 Oktober 2017. <http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?-timeframe=10y>.
- Mashad, Dhurorudin. *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi*. Dalam *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, diedit oleh Ganewati Wuryandari. Yogyakarta: P2P-LIPI – Pustaka Pelajar, Agustus, 2008.
- Olimat, Muhamad S. "Women and Politics in Kuwait". *Journal of International Women's Studies*, Vol. 2 (September, 2009): 199–212.
- Pall, Zoltan. "Kuwait Salafism and Its Growing Influence in the Levant". *Carnegie Endowment for International Peace*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2014, 15–20.

- Piscatori, James P. "Ideological Politics in Saudi Arabia". Dalam *Islam in the Political Process*, diedit oleh James P. Piscatori. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Qutb, Sayyid. *Ma'alim fi Ath-Thariq*, Diterjemahkan oleh Penerbit Darul Uswah. Yogyakarta: Penerbit Darul Uswah, 2011.
- Rudman, Amanda dkk. "Domestic Dynamics of Political Islam in the Greater Middle East: Case Studies of Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey". *Cornell International Affairs Review*, 1. No.1 (2007): 1–3.
- Saldana, Marta. "Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates: The Case of UAEU Students". Ph.D. Dissertation. Exeter: University of Exeter, 2014.
- "Saudi protesters fire-bomb intelligence building in Qatif", Middle East Eye, 11 Januari 2016. <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-protesters-fire-bomb-intelligence-building-qatif-843608836>
- "Saudi security forces flatten old quarter of Awamiya", Al Jazeera, 10 Agustus 2017. <http://www.aljazeera.com/news/2017/08/saudi-security-forces-flatten-quarter-awamiya-170809213631682.html>.
- "Saudi Arabia took part in weekend air strikes against Islamic State: Pentagon", *Reuters*, 17 Februari 2016. <http://www.reuters.com/article/us-mid-east-crisis-saudiarabia-airstrikes/saudi-arabia-took-part-in-weekend-air-strikes-against-islamic-state-pentagon-idUSKCN0VP2FM>.
- Trofimov, Yaroslav. *Kudeta Mekkah: Sejarah yang tak Terkuak*. Ciputat: Pustaka Alvabet, 2007.
- "UAE: Investigate Threats against 'UAE 5'". 25 November 2011. Diakses pada 23 Oktober 2017. <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>.
- Vision 2021. Diakses pada 24 Oktober 2017. <http://www.vision2021.ae>.
- Wawancara dengan Syekh Ismail Harbi, Wakil Direktur Yayasan Haramain, 30 Maret 2017.
- "Women in Saudi Arabia to vote and run in elections," BBC News, 25 September 2011. <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15052030>.



## DAFTAR SINGKATAN

AED	United Arab Emirates Dirham
CDLR	Committee for the Defence of Legitimate Rights
CISR	Centre for Islamic Studies and Research
FSC	Federal Supreme Council
FNC	Federal National Council
GCC	Gulf Cooperation Council/Dewan Kerja Sama Teluk
ICM	The Kuwait Islamic Constitutional Movement
IM	Ikhwanul Muslimin
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria
NEC	The National Election Committee
OIR	Organization of Islamic Revolution
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
QAP	Al-Qaeda Arabian Peninsula
RIHS	The Society for the Islamic Heritage
UEA	Uni Emirat Arab





## INDEKS

- Abbasiyah, 155  
 Abdul Aziz bin Baz, 39, 48, 136, 150, 154  
 Abu Dhabi, 6, 101, 102, 104, 107, 111–114, 116–120, 124, 125, 130, 138, 144, 146, 170, 181  
 Al-Hasa, 26, 36, 61, 155  
 Al-Islah, 6, 7, 92, 103, 121–123, 129, 166–170, 182  
 Al-Qaeda, 48–57, 126, 154, 174, 175, 187  
 Al-Qur'an, 30, 42, 46, 139, 153  
 An-Nahdhah, 7, 166  
 Arab Saudi, 1–4, 8, 12, 17–20, 22–29, 31–33, 37–40, 42–45, 48–51, 55, 70, 71, 78, 83, 94–96, 102, 103, 105, 108, 109, 116, 126, 127, 132, 133, 135, 139, 148, 149, 154, 155, 157, 162, 166, 177, 179, 180, 182  
 Arab Spring, 2, 18, 23, 48, 58–61, 69, 85, 91, 99, 122–124, 129, 135, 143–145, 154, 159, 164, 169, 170, 172, 174, 178, 180, 183, 184  
 As-Sabah, 69, 71, 72, 76, 78, 81–85, 88, 89, 96, 143, 144, 157, 158  
 Dahran, 29, 137  
 Dammam, 28, 29, 53, 56, 137, 155, 176  
 Dubai, 6, 25, 55, 101, 102, 104, 108, 111–114, 116–122, 128, 129, 138, 144, 146, 168, 177, 182  
 Ekspatriat, 24, 72, 73, 75, 76, 81, 83, 105, 138, 157, 158, 162, 163, 177  
 Federal National Council, 113, 187  
 Hanafi, 40, 136  
 Hanbali, 34, 39, 49, 73, 74, 136, 137, 150, 163  
 Hasan Al-Banna, 11, 42, 43  
 Hijaz, 18, 26, 27, 28, 34–38, 56, 135, 137, 156

- Ikhwanul Muslimin, 3, 5, 7, 12, 13, 18, 39, 42, 43, 90–92, 96, 120, 122, 128, 129, 136, 138, 139, 142, 145, 148, 151, 159, 160, 165, 166, 168, 179, 182, 187
- ISIS, 55–57, 60, 61, 63, 64, 174–176, 185, 187
- Islamic Contitucional Movement, 80, 91, 142, 159
- Jazirah Arab, 4, 18, 19, 20, 51, 70, 76, 148, 174
- Jeddah, 25, 38, 50, 177
- Kuwait, 1–3, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 19, 36, 37, 41, 46, 58, 67, 68–82, 84–96, 98–100, 103, 108, 133, 135, 137–139, 141–148, 154, 156–167, 174, 177–180, 182–187
- Madinah, 18, 22, 27–29, 33, 35, 36, 44, 45, 47, 49, 56, 135, 137, 150, 152, 155, 174
- Makkah, 4, 18, 19, 27, 29, 33, 35, 36, 51, 52, 135, 137, 142, 149, 174, 175
- Maliki, 34, 40, 73, 136, 163
- Masjidil Haram, 4, 45, 50, 56, 149, 150, 153
- Muhammad bin Abdul Wahab, 33, 135
- Muhammad bin Salman, 24, 30
- Najd, 18, 26, 27, 29, 34–38, 54, 56, 71, 74, 81, 135, 137, 141, 158, 162
- National Election Committee, 114, 187
- Politik Islam, 3, 6–10, 12, 18, 70, 91, 92, 95, 103, 120, 128, 133, 141, 143, 145–150, 155, 157, 159, 163, 166, 176, 178
- Qatar, 2, 19, 23, 25, 37, 58, 59, 61–63, 95, 96, 104, 105, 108, 127, 128, 173, 177, 179, 182
- Qatif, 28, 42, 56, 65, 155, 172, 176, 186
- Sahwa, 39, 44, 46–49, 53, 54, 60, 136, 152–154, 172–174
- Salafi, 49, 50, 85–87, 90, 91, 93–95, 142, 150, 159, 161, 162, 165, 179
- Sayyid Qutb, 11, 42, 44, 152
- Sudairi, 29, 30, 61, 63
- Sunni, 40, 42, 73, 74, 86, 88, 128, 137, 138, 143, 150, 155, 156, 163, 165, 180
- Syafi'i, 34, 40, 136
- Syiah, 27–29, 38, 40–42, 53, 56–61, 73, 85, 88, 90, 91, 95, 138, 142, 150, 155, 156, 159, 163, 165, 171, 172, 175
- Tribalisme, 76, 80, 81, 157, 158
- Umayyah, 28, 155
- Ummul Quro, 44, 47, 152, 154
- Uni Emirat Arab, 1–3, 6, 8, 12, 25, 58, 101–108, 112–114, 116, 119, 120, 125, 127, 128, 132, 133, 135, 138, 139, 144, 145, 166, 167, 177, 180, 182, 187
- Wahabi, 2, 18, 27–30, 32–47, 49, 51, 52, 61, 62, 74, 135–138, 140, 141, 143, 150–156, 166, 172, 174, 175



## BIOGRAFI EDITOR

### **Muhammad Fakhry Ghafur**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2010 hingga sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Sastra Arab dan Studi Islam dari The Faculty of Islamic Call Tripoli-Libya pada tahun 2006. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam diperoleh dari Institut PTIQ Jakarta tahun 2009.





## BIOGRAFI PENULIS

### **Indriana Kartini**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2003 hingga saat ini. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada tahun 2002. Penulis melanjutkan studi S2 di University of Melbourne, Australia, dan memperoleh gelar Master of International Politics pada tahun 2008.

### **M. Hamdan Basyar**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 1984 hingga sekarang dan Dosen Pascasarjana UI Program Kajian Timur Tengah dan Islam. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Sastra Arab UI dan S2 (M.Si.) dari Program Kajian Stratejik Ketahanan Nasional UI. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES).

### **Muhammad Fakhry Ghafur**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2010 hingga sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Sastra Arab dan Studi Islam dari The Faculty of Islamic Call Tripoli-Libya pada tahun 2006. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam diperoleh dari Institut PTIQ Jakarta tahun 2009.

## **Nostalgawan Wahyudhi**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2013 hingga sekarang. Gelar S1 diperoleh dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan S2 (Master) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik, International Islamic University of Malaysia (IIUM) pada tahun 2011.

## **Dhurorudin Mashad**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 1992 hingga sekarang. Gelar sarjana (S1) diperoleh dari jurusan Ilmu Politik FISIP UI dan S2 (M.Si.) dari Program Kajian Stratejik Ketahanan Nasional UI.

# POLITIK ISLAM

## ARAB SAUDI, KUWAIT, & UNI EMIRAT ARAB

Sejarah mencatat, pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah tidak terlepas dari pengaruh Islam. Kegagalan rezim-rezim penguasa dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat diproses oleh gerakan sosialis dan organisasi keislaman. Kemunculan gerakan Islam yang termanifestasi dalam kegiatan politik menjadi sumber masalah serius bagi para rezim yang berkuasa pada saat itu. Penguasa ditekan untuk melakukan perubahan, dan beberapa negara di Timur Tengah berhasil melakukan perubahan melalui gerakan kudeta.

Uniknya, tidak semua negara di Timur Tengah terkena kudeta militer. Negara-negara Teluk yang kaya akan minyak dapat terhindar dari kudeta militer meski kawasan ini juga mengalami guncangan dinamika politik. Eksplorasi minyak menjadi berkah dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat sehingga gerakan protes secara masif di kawasan semenanjung Arabia ini dapat dihindari.

Buku ini memberikan analisis menarik mengenai eksistensi dan hubungan antara gerakan Islam dan negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab sebagai representasi negara-negara Teluk. Kajian yang dilakukan cukup mendalam dan mampu memberikan gambaran secara komprehensif dalam menjelaskan fenomena gerakan Islam di Timur Tengah. Bagi pembaca yang menginginkan informasi mendetail berkaitan dengan dinamika Islamisme di negara-negara ini silakan membaca buku ini.

*Selamat membaca!*



**Diterbitkan oleh:**

LIPI Press, anggota Ikapi  
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6  
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710  
Telp.: (021) 573 3465  
E-mail: [press@mail.lipi.go.id](mailto:press@mail.lipi.go.id)  
Website: [lipipress.lipi.go.id](http://lipipress.lipi.go.id)

ISBN 978-602-496-072-8

